

**KEBEBASAN DAN KAPABILITAS SEBAGAI KRITERIA ETIS:
Kajian Mengenai Pandangan Etika Amartya Sen
dalam Ide Kebebasan dan Integrasinya ke dalam Teori Pilihan Sosial**

DISERTASI

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari
STF Driyarkara**

Oleh

SUNARYO

NIM: 0280108512

Program Doktor



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2015

ABSTRAK

[A] SUNARYO (0280108512)

[B] KEBEBASAN DAN KAPABILITAS SEBAGAI KRITERIA ETIS:

Kajian Mengenai Pandangan Etika Amartya Sen dalam Ide Kebebasan dan Integrasinya ke dalam Teori Pilihan Sosial

[C] xi + 199; 2015; Daftar Pustaka

[D] Kata Kunci: kebebasan, kapabilitas, pilihan sosial, pilihan rasional, preferensi, nilai, kesejahteraan, kepelakuan, pemeriksaan kritis, area yang dilindungi.

[E] Isi disertasi ini merupakan kajian tentang pandangan etika Amartya Sen dalam ide kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*). Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Yang pertama, dari rumusan mengenai kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial, apa ukuran dan kriteria tindakan etis yang hendak diajukan Amartya Sen? Yang kedua, mengapa Sen mengkritik keras teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang dipahami sebagai maksimalisasi kepentingan-diri? Apa yang hendak ditunjukkan oleh Sen lewat kritik ini terkait dengan pandangannya mengenai etika?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menyusun disertasi ini dalam tiga kerangka dasar yang akan dijelaskan dalam Bab II, III dan IV. Yang pertama adalah penjelasan tentang pandangan Sen mengenai kebebasan yang dipahami dalam dua aspek, yakni aspek proses dan kesempatan real. Yang kedua adalah mengenai kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*), kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) dan kritik terhadap teori pilihan rasional. Yang ketiga adalah uraian mengenai integrasi kebebasan ke dalam pilihan sosial.

Dari tiga kerangka kerja ini, penulis mengajukan kesimpulan bahwa tindakan etis menurut Sen diukur pada sejauh mana tindakan itu melindungi kebebasan dan memperluas kapabilitas. Yang dimaksud dengan perlindungan kebebasan adalah adanya perhatian terhadap hak dan kebebasan setiap orang dengan tidak melangkahinya. Sementara yang dimaksud dengan perluasan kapabilitas adalah penguatan kemampuan seseorang atau masyarakat dalam mencapai sesuatu. Sementara melalui kritik atas teori pilihan rasional, ia memahami bahwa rasionalitas pilihan tidak diukur pada maksimalisasi kepentingan-diri, tetapi pada sejauh mana sebuah pilihan telah diperiksa secara kritis. Dalam pandangannya, tindakan etis yang didasarkan pada komitmen yang sudah melewati proses pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*) dapat disebut rasional meski tidak memaksimalkan kepentingan-diri. Inilah kesimpulan yang dapat ditarik dan sekaligus menjadi tesis penulis mengenai kriteria etis menurut Amartya Sen.

[F] Pustaka 104 (1906-2015)

[G] Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno; Dr. B. Herry-Priyono; Dr. Karlina Supelli

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PEDOMAN PENGGUNAAN DISERTASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Pengantar	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Studi Pustaka	11
1.6 Susunan Disertasi.....	15
1.7 Biografi Intelektual Sen.....	20
BAB II: DUA ASPEK KEBEBASAN AMARTYA SEN	
2.1 Pengantar.....	29
2.2 Kebebasan dalam Aspek Proses dan Kesempatan	31
2.3 Kebebasan sebagai Tidak Adanya Paksaan	34
a. “Perlindungan Diri” Mill.....	36
b. “Area yang Dilindungi” Hayek.....	39
c. “Kebebasan Negatif” Berlin.....	42
2.4 Kebebasan sebagai Kapabilitas.....	48
a. Inspirasi Kebebasan dari Marx.....	50
b. Refleksi Mengenai Ketidakmampuan.....	51
c. Tolok Ukur Kualitas Hidup.....	55
d. Kritik Terhadap “Hal-hal Pokok” Rawls.....	58
2.5 Rangkuman.....	62

BAB III: KEBEBASAN KESEJAHTERAAN, KEPELAKUAN DAN PILIHAN RASIONAL

3.1	Pengantar.....	64
3.2	Kapabilitas Kesejahteraan dan Kepelakuan	66
	a. Kebebasan Kesejahteraan.....	67
	b. Kebebasan Kepelakuan.....	71
3.3	Komitmen Kepelakuan dan Pilihan Rasional.....	77
3.4	Hilangnya Kapabilitas dan Kemiskinan.....	83
3.5	Korelasi Kebebasan dan Kesejahteraan	86
3.6	Kontrol Pelaku dalam Kebebasan.....	93
3.7	Rangkuman.....	97

BAB IV: MASALAH KEBEBASAN DALAM PILIHAN SOSIAL

4.1	Pengantar.....	99
4.2	Tentang Teori Pilihan Sosial.....	101
4.3	Hubungan Preferensi dan Nilai.....	109
4.4	Konflik Kebebasan dan Pilihan Sosial.....	112
4.5	Modifikasi Teori Pilihan Sosial.....	116
	a. Perlindungan Kebebasan dan Hak	117
	b. Kemungkinan Perbandingan Antar-Pribadi.....	122
4.6	Perluasan Informasi sebagai Tuntutan Keadilan	128
4.7	Rangkuman.....	132

BAB V: KRITIK MARTHA NUSSBAUM DAN PHILIP PETTIT

5.1	Pengantar.....	134
5.2	Kritik dan Catatan Nussbaum	136
	a. Signifikansi Ambang Batas.....	137
	b. Relativisme Budaya.....	143
	c. Pendasaran Sen pada Marx dan Aristoteles.....	145
	d. Klasifikasi Kebebasan Kesejahteraan dan Kepelakuan.....	147
5.3	Kritik Pettit terhadap Konsep Kontrol Sen.....	152
5.4	Rangkuman.....	160

BAB VI: KEBEBASAN DAN KAPABILITAS SEBAGAI KRITERIA ETIS	
6.1 Pilihan Sosial Berbasis-Kebebasan.....	163
a. Kritik atas Teori Pilihan Rasional.....	164
b. Panduan Praktis.....	168
6.2 Pandangan Sen Mengenai Etika.....	170
6.3 Asumsi Dasar dan Dampak	173
6.4 Relevansi Bagi Indonesia	177
6.5 Kritik dan Tanggapan.....	180
BAB VII: PENUTUP.....	190
DAFTAR PUSTAKA.....	193

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1.....	170
Gambar 6.2.....	184
Gambar 6.3.....	185

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	105
Tabel 4.2.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Tema kebebasan adalah salah satu tema besar yang kerap direfleksikan oleh para filsuf dan pemikir dalam berbagai bidang di sepanjang sejarah. Pada umumnya, ada dua sisi kebebasan yang direfleksikan, yang pertama sebagai kehendak bebas (*free will*) dan yang kedua sebagai kebebasan politik dan sosial. Dua sisi ini dirumuskan secara berbeda-beda oleh banyak pemikir. Isaiah Berlin membagi kebebasan menjadi kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif dipahami sebagai tidak adanya paksaan dan kebebasan positif dimaknai sebagai kebebasan untuk menentukan diri (Berlin 2002, 169).¹ Philip Pettit juga mengidentifikasi dua macam kebebasan, yakni kebebasan psikologis yang terkait dengan masalah kehendak bebas (*free will*) dan kebebasan politik dalam arti tidak adanya rintangan yang berasal dari luar (Pettit 2001, 1-5). Franz Magnis-Suseno membagi kebebasan menjadi kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial (Magnis-Suseno 1987, 22-28). Kebebasan eksistensial dimaknai sebagai kemampuan untuk menentukan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya sebagai manusia.² Sementara pengertian kebebasan sosial terkait dalam hubungannya dengan orang lain dalam arti tidak adanya paksaan yang dilakukan pihak lain secara sengaja.³

¹ Pandangan Isaiah Berlin mengenai dua konsep kebebasannya akan dijelaskan lebih luas dalam Bab II.

² Itu artinya, sesuatu yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia tidak menjadi bagian dari kebebasan. Misalnya jika kita tidak bisa terbang tanpa menggunakan alat apapun tidak bisa dimaknai bahwa kita tidak bebas karena keinginan itu berada di luar kemampuan kita sebagai manusia. Lih. Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), 23-26.

³ Sementara jika dilihat sebagai “isme” atau paham, istilah liberalisme dipahami secara berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari satu masa ke masa yang lain. Milton Friedman pernah menjelaskan perkembangan dan perbedaan pengertian liberalisme. Pada abad ke-18 misalnya, liberalisme di Eropa mendorong sistem *laissez faire*, sementara di akhir abad ke-19 dan abad ke-20, khususnya pada tahun 1930-an di Amerika, liberalisme diasosiasikan sebagai kesiapan negara untuk mengantarkan masyarakat mencapai tujuannya. Pengertian liberalisme sudah bergeser dari konsep kebebasan itu sendiri ke konsep kesejahteraan dan kesetaraan. Di masa awal, perluasan kebebasan merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan, namun di masa selanjutnya, kesejahteraan dan kesetaraan dianggap sebagai prasyarat bagi kebebasan. Dampak dari pemahaman terakhir ini adalah dimungkinkannya intervensi negara. Menurutnya perkembangan ini dianggap sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan gagasan kebebasan sebelumnya. Lih. Milton Friedman, *Capitalism and*

Tema mengenai kebebasan juga menjadi salah satu tema besar yang masuk dalam radar pemikiran Amartya Sen, seorang ekonom yang memiliki minat besar pada filsafat dan teori sosial.⁴ Beberapa karya besarnya telah diabdikan untuk menjelaskan masalah kebebasan yang ia hubungkan dengan masalah kemiskinan, ketidakadilan dan teori pilihan sosial (*social choice theory*). Pandangannya mengenai hal ini dapat dibaca dalam *The Idea of Justice* (2009), *Rationality and Freedom* (2004), *Development as Freedom* (1999), *Inequality Reexamined* (1992) dan dalam berbagai tulisan yang tersebar di banyak jurnal ilmiah. Mengapa ide kebebasan menjadi sangat penting bagi Amartya Sen sehingga hampir selalu menjadi perspektif yang tidak pernah luput dalam analisisnya mengenai persoalan ekonomi dan masalah sosial? Paling tidak ada dua pertimbangan yang bisa dilihat sebagai penjelasan mengapa kebebasan menjadi penting bagi Sen. Yang pertama adalah karena kebebasan menjadi sesuatu yang bernilai pada dirinya dan yang kedua karena kebebasan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk meraih tujuan-tujuan yang hendak dicapai (Sen 1999, 18; 2009, 228).

Dalam memahami kebebasan, Sen membaginya menjadi dua aspek, yakni aspek proses dan aspek kesempatan real (*real opportunity*) (Sen 2009, 228). Yang dimaksud dengan kebebasan dalam arti proses adalah bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk memilih sesuatu yang dianggap baik tanpa ada paksaan dari pihak luar. Sementara kebebasan dalam arti kesempatan real dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap baik dan bernilai. Ia menyebut kebebasan dalam arti “kemampuan untuk mencapai” sebagai kapabilitas. Konsep kapabilitas menjadi konsep sentral bagi Sen dalam menganalisis masalah kemiskinan dan ketidakmampuan. Melalui konsep ini, ia menekankan makna kebebasan sebagai

Freedom (Chicago: The University of Chicago Press, 1982 [1962]), 5-6. Perkembangan ini kemudian membuat pengertian liberalisme dipahami secara berbeda antara pemikir di benua Eropa dan di Amerika. Di Amerika, kata liberal merujuk pada gagasan mengenai intervensi negara dan program-program ‘negara kesejahteraan’, sementara di Eropa, pengertian liberal dipahami sebagai paham yang mendorong sistem *laissez faire*. Lih. Bettina Bien Greaves, prakata dalam *Liberalism in the Classical Tradition* oleh Ludwig von Mises (San Francisco: Cobden Press, 2002), v. Lebih lanjut, menurut Kloppenberg, kebanyakan masyarakat Amerika di akhir abad 20 memaknai liberalisme secara kontras. Yang pertama liberalisme merujuk pada New Deal – atau New Frontier atau Great Society – di mana idenya adalah membawa kesetaraan sosial yang lebih besar dengan mengandalkan peran pemerintahan federal. Yang kedua, kebanyakan masyarakat Amerika juga mengasosiasikan liberalisme dengan seruan pada kebebasan personal yang lebih besar dan dilindungi lewat intervensi pemerintah. James T. Kloppenberg, *The Virtues of Liberalism* (Oxford: Oxford University Press, 1998), 9-10.

⁴ Amartya Sen menggunakan kata “freedom” dan “liberty” secara bergantian dalam karya-karyanya dan dapat dipertukarkan satu sama lain.

kemampuan pelaku untuk meraih sesuatu yang ia anggap bernilai. Konsep kapabilitas kadang juga disebut sebagai kebebasan substantif.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Sen membagi kapabilitas menjadi dua, yakni kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) (Sen 2009, 288-289). Ia mendefinisikan kebebasan kesejahteraan sebagai kemampuan untuk mencapai sesuatu yang sangat menentukan kesejahteraan seseorang (Sen 1985, 201). Sementara pengertian kebebasan kepelakuan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang dianggap bernilai atau dianggap penting (Sen 1985, 203). Menurut Sen, ide kebebasan kepelakuan terkait erat dengan konsepsi mengenai yang baik (*the conception of the good*) yang dianut seseorang. Ide kebebasan ini mengandaikan status pelaku yang memiliki tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang dianggap baik (Sen 1985, 203-204). Sen kadang menyebut tindakan kepelakuan sebagai tindakan yang didasarkan pada komitmen. Di dalam tindakan ini, si pelaku memutuskan hubungan antara pilihan tindakan yang diambil dan motif maksimalisasi kepentingan-diri (Sen 2009, 189). Melalui tindakan ini, ia melihat manusia sebagai pelaku (*doer*) dan juga pemutus/hakim (*judge*), sementara melalui kebebasan kesejahteraan, ia lebih melihat manusia sebagai penerima manfaat (*beneficiary*). Dengan pemahaman ini, ia menilai kebebasan kepelakuan memiliki tujuan yang lebih luas daripada kebebasan kesejahteraan, karena yang terakhir hanya berfokus pada satu tujuan, yakni keuntungan (*advantage*) (Sen 1985, 208).

Ide yang hendak ditegaskan Sen lewat kebebasan kepelakuan adalah pluralitas nilai dan motif dalam bertindak. Apa yang dianggap bernilai oleh seseorang bukan hanya aspek kesejahteraan atau manfaat. Maksimalisasi keuntungan bukan satu-satunya motif tindakan manusia. Dalam bertindak, seseorang bisa saja tidak mengejar keuntungan yang lebih besar untuk dirinya. Sen mengajukan contoh tindakan membela tanah air (*patriotisme*) yang dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak didorong oleh pencarian keuntungan yang lebih besar bagi si pelaku. Dengan konsep kebebasan kepelakuan, ia sebenarnya hendak mengkritik teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang oleh para ekonom arus utama ini dipahami sebagai pilihan tindakan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest maximization*). Sebuah pilihan dapat dikatakan rasional jika dan hanya jika dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Jika tindakan rasional dipahami demikian, maka tindakan patriotik dan seluruh tindakan

yang didasarkan pada komitmen kepelakuan akan dianggap sebagai tindakan tidak rasional. Padahal tindakan patriotik, solidaritas dan seluruh tindakan yang didasarkan pada komitmen tidak bisa dinilai sebagai tindakan tidak rasional hanya karena tindakan itu tidak memaksimalkan kepentingan-diri. Karenanya, pengertian rasionalitas pilihan harus dievaluasi. Rasionalitas pilihan tidak ditentukan hanya oleh motif memaksimalkan kepentingan-diri. Dalam hal ini, Sen lebih memahami rasionalitas sebagai pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*). Jika pilihan sudah dipertimbangkan secara kritis maka pilihan itu dapat disebut sebagai pilihan rasional, tidak peduli apakah tindakan itu memaksimalkan kepentingan-diri atau tidak.

Dari uraian di atas, ada dua konsep besar yang hendak diangkat Sen, yakni konsep kebebasan dalam arti proses dan kebebasan dalam arti kapabilitas. Karena konsep pertama lebih generik, penulis akan menyebut secara singkat sebagai kebebasan. Sementara konsep yang kedua disingkat sebagai kapabilitas. Melalui dua konsep ini Sen ingin menggarisbawahi mengenai pentingnya perspektif kebebasan dan kapabilitas dalam relasi antar-sesama, dalam perumusan kebijakan publik dan dalam menilai kualitas hidup (*quality of life*) manusia. Dua konsep ini kemudian menjadi dasar bagi Sen dalam mengkritik pandangan ekonomi mapan yang menilai keberhasilan pada tingginya pendapatan per kapita atau GDP.⁵ Dalam pandangannya, kualitas hidup manusia tidak ditentukan oleh ukuran per kapita dan GDP melainkan pada seberapa besar kebebasan dan kapabilitas yang dimiliki.⁶ Dengan pandangan ini, ia mendorong agar kebijakan publik pemerintah memerhatikan aspek kebebasan dan kapabilitas warga

⁵ GDP atau *Gross Domestic Products* adalah total nilai barang dan layanan yang diproduksi dalam satu tahun oleh sebuah negara. Biasanya GDP dijadikan ukuran untuk melihat tingkat kemakmuran sebuah negara. Penjelasan teknis mengenai GDP dan juga GNP bisa dilihat dalam Donald Rutherford, *Routledge Dictionary of Economics* (London dan New York: Routledge, 1992), 175.

⁶ Pada Februari 2008, Amartya Sen bersama Joseph Stiglitz dan Jean Paul Fitoussi diminta oleh Presiden Perancis saat itu, Nicholas Sarkozy untuk merumuskan ukuran ekonomi yang lebih komprehensif, sebagai alternatif dari model GDP yang ada selama ini. Di kalangan ekonom tampaknya sudah ada kesadaran bahwa ukuran GDP sejatinya tidak lagi memadai dalam menjelaskan kemajuan kualitas hidup manusia. Karenanya diperlukan ukuran-ukuran yang lebih komprehensif agar dapat memberikan gambaran capaian sosial dengan lebih baik. Salah satu pesan penting dari rumusan yang diajukan Sen dan rekan-rekan ini adalah menggeser perhatian dalam melihat kualitas hidup dari ukuran produksi ke kesejahteraan (*from production to well-being*). Kelemahan mendasar yang ada di dalam model GDP adalah karena data ini hanya memberikan informasi mengenai produksi yang dihasilkan bukan kesejahteraan yang dapat dinikmati. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ukuran kesejahteraan adalah seluruh aspek yang terkait dengan kualitas hidup manusia seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, suara politik, hubungan sosial, keberlanjutan lingkungan yang baik dan keamanan dari krisis ekonomi dan juga bencana alam. Lebih lanjut mengenai pandangan Sen dan rekan-rekan ini dapat dilihat dalam "Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress" di www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

negaranya. Pandangan ini juga menjadi dasar baginya dalam merumuskan konsep pembangunan. Hal yang harus dibangun bukan kondisi kesejahteraannya saja. Dalam memahami pembangunan sebagai kebebasan, ia juga menekankan pentingnya kebebasan sipil dan politik bagi masyarakat seperti kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat dan lain-lain.

Sen mengkritik pendekatan pembangunan yang hanya memerhatikan aspek kesejahteraan saja sebagaimana yang terjadi di banyak negara. Ia mengkritik pandangan Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura yang mengatakan bahwa pembatasan kebebasan sipil dan politik justru akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pandangan yang kemudian dikenal sebagai tesis Lee ini dianut oleh banyak pemerintah di Asia, termasuk Indonesia di masa Orde Baru. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers dan kebebasan sipil-politik lainnya. Dalam menanggapi pandangan ini, Sen menunjukkan bahwa tesis Lee ini sebenarnya tidak berdasar. Bila dilihat secara komparatif di banyak negara, pemerintahan yang demokratis justru memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menciptakan kesejahteraan dibanding pemerintahan yang otoriter. Selain itu, hal yang hendak dipertegas adalah tentang signifikansi kebebasan itu sendiri bagi proyek pembangunan. Dalam pembangunan, aspek yang perlu diperluas bukan hanya kemampuan masyarakat mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kebebasan mereka untuk berpendapat, berpolitik dan berserikat.

Dalam disertasi ini penulis akan menunjukkan bagaimana kebebasan dan kapabilitas menjadi ide sentral dalam memahami manusia dan bagaimana ide itu diintegrasikan ke dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*). Ide mengenai perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas menjadi kriteria atau ukuran dalam menilai tindakan sebagai tindakan etis. Sebuah tindakan dapat dikatakan baik jika tindakan itu ditujukan untuk melindungi kebebasan dan juga dilakukan dengan cara yang menghormati kebebasan. Sebagai seorang ekonom dan juga filsuf, Sen resah dengan dominasi ukuran-ukuran ekonomistik dalam menilai manusia. Ia menolak capaian kualitas hidup yang diukur lewat pendapatan per kapita dan GDP. Ia mengkritik keras pengertian rasionalitas pilihan yang sudah diringkus dalam kerangka manusia ekonomi (*homo economicus*), yakni sebagai maksimalisasi kepentingan-diri atau

keuntungan. Ia memodifikasi teori pilihan sosial (*social choice theory*) yang kurang mempertimbangkan dimensi kebebasan. Keresahan dan catatan Sen atas hal-hal tersebut bertopang pada pentingnya ide kebebasan. Dalam pandangannya, kebebasan merupakan sesuatu yang bernilai pada dirinya sehingga menjadi tujuan yang harus dicapai. Kebebasan juga bisa menjadi sarana untuk sesuatu yang lain. Ia mengatakan bahwa dengan kebebasan yang lebih besar, kita dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai sesuatu yang lain.

1.2 Perumusan Masalah

Ide mengenai kebebasan dan kapabilitas merupakan ide yang sangat sentral dalam pemikiran Sen. Secara teoritis, ide ini ia kaitkan dengan teori pilihan sosial (*social choice theory*) dan teori pilihan rasional (*rational choice theory*).⁷ Ada dua hal pokok yang hendak ia tunjukkan dalam hubungan-hubungan ini. Yang pertama, ia menggarisbawahi pentingnya perspektif kebebasan di dalam perumusan pilihan sosial. Yang kedua, ia mengkritik keras pengertian pilihan rasional yang dipahami hanya sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest*). Melalui konsep komitmen kepelakuan, ia menunjukkan bahwa pilihan rasional tidak hanya dipahami sebagai maksimalisasi kepentingan-diri. Pilihan rasional lebih dipahami sebagai pilihan yang sudah diperiksa secara kritis. Dari dua gagasan ini, penulis mencoba untuk mempertegas pandangan etika menurut Sen. Ada dua pertimbangan mengapa pandangan Sen mengenai etika perlu dipertegas. Yang pertama, refleksi Sen sendiri mengenai filsafat sebenarnya berpusat pada filsafat moral atau etika. Salah satu proyek besar filsafatnya adalah mengembalikan ilmu ekonomi ke dalam kerangka etika. Yang kedua, uraian Sen mengenai etika tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi, tetapi juga dengan bidang-bidang lain yang lebih luas. Karenanya, melalui disertasi ini penulis mencoba mempertegas rumusan Sen mengenai etika dengan menunjukkan aspek kebaruan pandangan etika Sen dan relevansinya bagi kehidupan kita saat ini.

Pertanyaan penelitian mengenai etika dalam pandangan Amartya Sen ini penulis rumuskan sebagai berikut:

⁷ Dua teori ini lebih familiar di dalam ilmu ekonomi, khususnya ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*).

- Dari rumusan Amartya Sen mengenai kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial, apa ukuran atau kriteria tindakan etis yang rasional yang hendak ia ajukan?
- Mengapa Sen mengkritik keras teori pilihan rasional yang dipahami sebagai maksimalisasi kepentingan-diri? Apa yang hendak ditunjukkan lewat kritik ini terkait dengan pandangannya mengenai etika?

Dalam pertanyaan pertama, hal yang hendak dipertegas adalah tentang ukuran dari tindakan etis yang rasional menurut Amartya Sen. Dari pandangan Sen yang menempatkan kebebasan sebagai sesuatu yang sentral bagi manusia, dan dari upayanya mengintegrasikan perspektif kebebasan ke dalam pertimbangan pilihan sosial, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas menjadi ukuran untuk menilai sebuah tindakan sebagai tindakan yang etis. Sebuah tindakan dapat dikatakan baik secara etis jika tindakan itu ditujukan untuk melindungi kebebasan, dilakukan dengan cara yang menghormati kebebasan setiap orang dan memperluas kapabilitas.

Sementara dalam pertanyaan kedua, Sen mengkritik keras teori pilihan rasional yang dipahami dalam kerangka manusia ekonomi (*homo economicus*). Dalam kerangka ini, pilihan rasional dipahami sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Sebuah pilihan disebut rasional hanya jika memuaskan kepentingan-diri pelaku. Dalam pandangan Sen, jika pengertian rasional dipahami demikian lantas bagaimana kita menjelaskan tindakan etis yang didasarkan oleh komitmen? Di dalam tindakan komitmen, seseorang memutuskan hubungan antara pilihan tindakan yang diambil dan motif maksimalisasi kepentingan-diri. Jika pengertian pilihan rasional dipahami hanya sebagai pilihan tindakan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri maka tindakan etis yang didasarkan oleh komitmen dapat dianggap sebagai pilihan tidak rasional. Bagi Sen, pengertian pilihan rasional dalam kerangka manusia ekonomi ini sulit diterima karena memiliki dampak yang cukup serius bagi rasionalitas tindakan etis yang didasarkan oleh komitmen. Melalui kritik ini, ia kemudian mendefinisikan ulang pengertian pilihan rasional. Ia lebih memahami pilihan rasional sebagai pilihan yang sudah diperiksa secara kritis (*critical scrutiny*). Pilihan tindakan yang didasarkan oleh komitmen dapat disebut rasional jika sudah dipertimbangkan secara kritis. Dengan

pandangan ini ia menunjukkan bahwa rasionalitas tindakan etis tidak hanya terkait dengan pilihan tindakan yang memaksimalkan kepentingan-diri, tetapi juga yang tidak memaksimalkan kepentingan-diri sebagaimana yang ada di dalam tindakan komitmen. Dengan kritik ini, ia sekaligus hendak memberikan pendasaran rasionalitas bagi tindakan etis yang didasarkan oleh komitmen.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengapa pandangan Sen mengenai etika dianggap penting sehingga harus ditulis dalam sebuah disertasi, dan apa relevansinya bagi kita di Indonesia? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini karena ada pertimbangan subjektif yang tidak bisa dihindari. Namun demikian, penulis dapat menunjukkan secara objektif mengenai signifikansi Sen dalam pemikiran kontemporer sehingga pemikirannya layak untuk diangkat. Dalam bidang filsafat moral, sosial dan politik, di samping John Rawls dan Juergen Habermas, menurut penulis, Amartya Sen juga merupakan salah satu pemikir kontemporer yang cukup penting. Meski pernah meraih hadiah Nobel dalam bidang ekonomi, refleksi pemikirannya tidak hanya berkulat dalam bidang itu. Karya-karya besarnya, seperti *The Idea of Justice* (2009), *Rationality and Freedom* (2004 [2002]), *Development as Freedom* (1999), *Inequality Reexamined* (1992) dan *On Ethics and Economics* (1988) adalah beberapa karya yang telah memberikan kontribusi bagi banyak bidang, seperti teori sosial, teori politik, kebijakan publik, teori demokrasi dan filsafat moral. Bidang yang terakhir ini, filsafat moral atau etika, menurut penulis merupakan refleksi utama Sen di dalam filsafat. Salah satu materi yang kerap direfleksikan di dalam bidang ini adalah mengenai pentingnya kebebasan dan pendekatan kapabilitas. Ide mengenai kebebasan dan kapabilitas bahkan menjadi ide sentral yang menopang pemikirannya dan menjadi dasar baginya dalam mengevaluasi berbagai masalah sosial. Inilah pertimbangan yang dapat diajukan mengapa pandangan etika Sen perlu diangkat lewat disertasi ini.

Lantas apa relevansi pemikiran Sen bagi kita di Indonesia? Meski kondisi Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perubahan dari rezim otoriter Orde Baru ke era reformasi, penulis tetap melihat signifikansi pemikiran Sen mengenai perlindungan kebebasan. Secara kasat mata, di masa Orde Baru, kita memang menyaksikan dan merasakan bagaimana kebebasan sipil dan politik dikorbankan demi pembangunan

ekonomi sehingga ide kebebasan yang diajukan Sen lewat *Development as Freedom* saat itu tentu sangat relevan dalam melawan kecenderungan yang dipengaruhi oleh tesis Lee tersebut. Namun setelah hampir dua dekade berlalu, nyatanya masalah perlindungan kebebasan masih tetap menjadi masalah serius di negeri ini. Beberapa kondisi yang dapat dilihat sebagai tidak adanya perlindungan kebebasan misalnya adalah pelanggaran atas hak ibadah kelompok minoritas seperti Ahmadiyah di berbagai daerah dan hak sebagian kelompok Kristen HKBP di beberapa tempat. Sebagai negara yang menghormati kebebasan beragama dan sudah meratifikasi hak sipil dan politik, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi.

Pemikiran Sen mengenai kebebasan yang perlu dipahami dan dikaji untuk menganalisis persoalan di Indonesia adalah pemikirannya mengenai pendekatan kapabilitas (*capability approach*). Melalui pendekatan ini, hal yang ditekankan dalam melihat masalah sosial adalah soal kemampuan seseorang atau masyarakat dalam mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan misalnya, dari sisi peraturan perundang-undangan kita sudah relatif berada dalam tahap yang cukup baik di mana undang-undang sudah menjamin kebebasan dasar itu. Namun dalam praktiknya, kita masih kerap melihat ada sebagian masyarakat yang tidak bisa menikmati kebebasan karena berbagai faktor di luar peraturan perundang-undangan. Itu artinya ada masalah pada kapabilitas masyarakat untuk mencapai kebebasan itu. Adanya ketidakmampuan atau deprivasi kapabilitas untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai merupakan kondisi yang sangat ditekankan dalam pendekatan kapabilitas. Pendekatan kapabilitas ini merupakan konsep orisinal yang dikembangkan oleh Sen. Karena pertimbangan ini, penulis melihat besarnya signifikansi dan relevansi pandangan Sen mengenai perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam disertasi ini, penulis menggunakan pendekatan historis. Melalui pendekatan ini, disertasi ini akan menelusuri konsep yang dikaji secara sistematis dari sumber atau karya yang ditulis oleh tokoh yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penelitian mengenai pandangan kebebasan Sen dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial akan dilakukan dengan cara menelusuri

karya-karya Sen yang membahas masalah kebebasan dan juga soal integrasi kebebasan ke dalam teori pilihan sosial. Dalam melakukan penelusuran atas teks dan karya Sen mengenai kebebasan, ada begitu banyak buku dan artikel yang membahas masalah ini, karena tema kebebasan merupakan salah satu ide pokok dalam pemikiran Sen. Karenanya perlu ada pemilahan secara teliti dalam menentukan teks yang akan menjadi rujukan utama. Dari karya-karya yang pernah dipublikasikan, penulis akan berkonsentrasi pada lima karya sebagai sumber utama. Lima sumber ini kiranya sudah cukup memadai untuk memberikan penjelasan mengenai konsep kebebasan yang diajukan oleh Sen.

Dari lima karya itu, yang pertama adalah *Rationality and Freedom* yang terbit tahun 2002. Karya ini merupakan kumpulan tulisan yang membahas masalah kebebasan, pengertian mengenai rasionalitas dan modifikasi teori pilihan sosial secara komprehensif. Untuk memahami pandangan Sen mengenai kebebasan, karya ini harus dikaji dan tidak bisa diabaikan. Karya yang kedua adalah *The Idea of Justice* yang terbit tahun 2009 dan sejauh ini menjadi karya buku paling akhir yang dipublikasikan Sen. Buku ini merumuskan pandangan Sen mengenai keadilan yang mengkritik pendekatan Rawls tentang keadilan yang dianggap bertumpu pada paham institusionalisme.⁸ Dalam *The Idea of Justice*, Sen menguraikan masalah kebebasan dan kapabilitas sebagai isi dari konsep keadilan yang ia ajukan. Karya yang ketiga adalah *Development as Freedom* yang terbit tahun 1999. Melalui buku ini ia menggarisbawahi pentingnya ide kebebasan dalam proyek pembangunan. Dalam pandangan Sen, pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kebebasan. Buku yang keempat adalah *Inequality Reexamined* yang terbit tahun 1992. Dalam karya ini ia mempertanyakan kembali ide tentang kesetaraan dan melalui pendekatan kapabilitas ia melihat manusia dalam kerangka yang plural sehingga kebijakan yang perlu dikembangkan juga tidak harus sama. Besarnya uraian mengenai kebebasan dan kapabilitas menjadi alasan mengapa buku ini menjadi salah satu rujukan utama. Yang terakhir atau yang kelima adalah artikel Sen yang berjudul “Well-being, Agency and Freedom” yang pernah disampaikan

⁸ Yang dimaksud dengan paham institusionalisme dalam teori keadilan adalah paham yang meyakini bahwa pembentukan institusi merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, teori keadilan Rawls dipahami sebagai institusionalisme karena teori keadilannya diarahkan pada pembentukan struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) yang akan menjamin berlangsungnya keadilan dalam masyarakat. Lih. Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 5-10.

dalam John Dewey Lectures pada 1984 dan diterbitkan dalam *The Journal of Philosophy* tahun 1985. Melalui lima karya ini penulis akan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam disertasi ini. Tentu saja, selain lima rujukan ini masih ada beberapa karya Sen lain dan karya para komentator yang akan dijadikan sumber pendukung utama dalam penelitian ini.

Melalui karya-karya di atas, pertanyaan disertasi ini akan dijawab, dijelaskan dan kemudian akan ditegaskan sebuah rumusan mengenai pandangan etika menurut Sen. Dalam melakukan hal ini penulis menyusun penelitian disertasi ini dalam tiga kerangka dasar. Pada bagian pertama akan ditunjukkan bagaimana Sen memahami konsep kebebasan yang dibagi dalam dua aspek, yakni aspek proses dan kesempatan. Pada bagian kedua dijelaskan perbedaan kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*), serta kritik Sen atas teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Dan pada bagian akhir akan diuraikan bagaimana Sen mengintegrasikan kebebasan ke dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*). Tiga kerangka dasar ini akan dikerjakan dalam tiga bab utama disertasi, yakni Bab II, Bab III dan Bab IV. Melalui tiga kerangka kerja ini penulis akan menyimpulkan dan menjawab pertanyaan utama yang diajukan dalam disertasi ini.

1.5 Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini akan ditunjukkan beberapa buku atau disertasi yang pernah membahas pandangan Amartya Sen mengenai kebebasan. Ada beberapa disertasi dan buku yang sudah membahas pandangan Sen mengenai kebebasan. Pada umumnya, para penulis atau peneliti mengenai Sen mencoba menunjukkan signifikansi pendekatannya mengenai kebebasan, khususnya pendekatan kapabilitas sebagai piranti (*tools*) untuk memecahkan masalah sosial saat ini. Di samping mereka yang mempertegas signifikansi pendekatan Sen, ada juga yang mencoba memberikan catatan terhadap tidak bekerjanya pendekatan itu dalam kehidupan real. Dari beberapa tulisan dan penelitian yang ada, penulis hendak memastikan bahwa penelitian disertasi yang sedang dikerjakan ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Beberapa penelitian disertasi dan buku yang pernah dilakukan dan sempat terlacak di antaranya adalah disertasi John Jeffrey Zink dari Universitas Utah, Chuan Chia Tseng di Universitas Birmingham, Sabina Alkire dari Universitas Oxford, Polly Vizard di Insititute for

Development Studies (DESTIN) di London School of Economics dan Syam Surya Syamsi di Program Studi Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Secara singkat, disertasi mereka atau yang sudah menjadi buku akan dijelaskan di bawah ini.

Yang pertama adalah disertasi yang ditulis oleh Zink di Universitas Utah, Amerika Serikat pada tahun 2005. Disertasi itu berjudul *Amartya Sen and Freedom: A Critique*. Dalam disertasi ini, Zink mengkritik asumsi Sen tentang korelasi positif antara perluasan akses pendidikan dan pengurangan kemiskinan. Ia juga mengkritik argumen Sen yang mengatakan bahwa mekanisme pasar dapat memperluas kebebasan. Menurutnya, dalam catatan biro sensus di Amerika, meski sudah terjadi perluasan akses terhadap pendidikan namun angka kemiskinan dan rasio gini di Amerika masih belum berubah.⁹ Zink menilai Sen mengabaikan hubungan antara kelas sosial (*social class*) dan kebebasan (Zink 2005, 4). Perbedaan kelas sosial di dalam masyarakat menciptakan perbedaan cara para orang tua memfasilitasi pendidikan untuk anak-anaknya. Anak-anak dari keluarga kaya sejak awal sudah dipersiapkan masuk perguruan tinggi, sementara keluarga menengah ke bawah tidak bisa melakukan itu. Perbedaan kondisi ini tentu saja berdampak pada kemampuan mereka untuk mengakses pekerjaan. Anak-anak yang belajar di sekolah dan perguruan tinggi yang baik akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dibanding anak-anak dari masyarakat menengah ke bawah. Dalam hal ini Zink memahami proses perluasan akses pendidikan sebagai kebebasan bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan terbaik untuk mereka yang mampu mengaksesnya. Akibatnya, perluasan pendidikan sebagaimana yang berlangsung dalam mekanisme pasar tidak memberikan pengaruh pada penurunan rasio gini dalam masyarakat (Zink 2005, 106-109).

Disertasi yang kedua ditulis oleh Chuan Chia Tseng di Universitas Birmingham, Inggris pada tahun 2011. Disertasi itu berjudul *Microfinance and Amartya Sen's Capability Approach*. Ada dua hal pokok yang diangkat dalam disertasinya. Yang pertama adalah evaluasi atas pendekatan kapabilitas Sen dengan cara membandingkan

⁹ Yang dimaksud dengan gini atau koefisien gini (*gini coefficient*) adalah ukuran ketidaksetaraan pendapatan dalam satu populasi. Skalanya itu dimulai dari 0 (nol) untuk kesetaraan yang sempurna hingga 1 (satu) untuk yang paling buruk. Di dalam rasio gini 0 atau kesetaraan yang sempurna digambarkan sebagai kondisi di mana setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sementara rasio gini 1 atau ketidaksetaraan sempurna adalah kondisi di mana 1 orang memiliki seluruh pendapatan. Yang lain tidak memperoleh apa-apa. Lih. Nelson, *A Comprehensive Dictionary of Economics* (Chandigarh-India: Abhishek Publications, 2009), 75-76.

pendekatan ini dengan teori-teori moral lain dan juga dengan melihat beberapa keberatan atas konsep kapabilitas Sen. Yang kedua, ia kemudian mencoba menganalisis dampak pinjaman usaha kecil (*microfinance*) bagi pengurangan kemiskinan bila dilihat dari pendekatan Sen. Dari penelitian ini ia melihat bahwa pendekatan kapabilitas Sen, meski mengklaim terkait dengan teori moral dan teori keadilan, pendekatan ini justru tidak memberikan penjelasan yang tegas tentang apa itu keadilan dan apa perbedaan antara benar dan salah.¹⁰ Dalam pandangan Chuan Chia Tseng, pendekatan Sen hanya memberikan penjelasan mengenai aspek penting dalam mengurangi kemiskinan. Kebijakan sosial mengenai pengurangan kemiskinan harus dinilai lewat dampak kemampuan individu dalam mengubah sumber daya menjadi kesejahteraan atau kebebasan substansial untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap bernilai secara rasional (Chuan 2011, 299).

Jika kita melihat pendekatan kebebasan Sen dalam proses pengurangan kemiskinan, Chuan menilai pendekatan Sen jauh lebih kompleks dan lebih mapan. Menurutnya, pendekatan ini berdiri di atas pandangan Aristoteles, relativisme dan kepelakuan (*agency*). Pengaruh Aristoteles dapat dilihat dalam signifikansi *functionings* (capaian aktual) dan kapabilitas untuk berfungsi. Melalui pendekatan ini, tujuan ekonomi dan politik adalah untuk mempromosikan kebebasan manusia. Sementara pandangan relativisme dapat dilihat pada heterogenitas personal setiap orang dalam menentukan sesuatu yang dianggap bernilai. Dan yang terakhir, melalui kepelakuan (*agency*), dalam melihat tujuan yang dianggap bernilai, setiap orang selalu berdiri di atas keyakinannya (Chuan 2011, 300-301). Dengan demikian, atas pertanyaan pertama, ia menyimpulkan bahwa pendekatan kapabilitas Sen lebih banyak terkait dengan tema pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Lantas bagaimana dengan pertanyaan kedua, apakah pinjaman untuk usaha kecil memberikan dampak dalam mengurangi kemiskinan dalam arti menambah kebebasan substansial mereka? Atas pertanyaan ini ia berkesimpulan bahwa bukti mengenai pinjaman untuk usaha kecil dapat mengurangi kemiskinan adalah lemah. Secara substantif, pinjaman untuk usaha kecil ini tidak memperluas kebebasan real masyarakat untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap

¹⁰ “Although Sen’s capability approach has drawbacks, both as a general moral theory and as theory of justice, in that it does not give us an idea about either what justice is and what the difference is between right and wrong...” Chuan Chia Tseng, *Microfinance and Amartya Sen’s Capability Approach* (Ph.D diss., University of Birmingham, 2011), 299.

bernilai. Namun ia sendiri menggarisbawahi bahwa kesimpulan ini tidak menutup kemungkinan bahwa barang kali pinjaman untuk usaha kecil dapat mempromosikan kebebasan masyarakat di beberapa tempat lain (Chuan 2011, 7).

Yang ketiga adalah buku yang ditulis oleh Sabina Alkire, salah seorang murid Sen yang juga inisiator forum Human Development and Capability Association (HDCA).¹¹ Ia menulis buku berjudul *Valuing Freedoms: Sen's Capability Approach and Poverty Reduction* pada tahun 2002.¹² Melalui buku ini, Alkire menekankan aspek kapabilitas yang perlu dikembangkan dalam masyarakat yang termarjinalkan. Penelitiannya mengenai kebebasan menurut Amartya Sen terkonsentrasi pada teori kapabilitas sebagai alat evaluasi untuk mengembangkan kehidupan masyarakat miskin. Pertanyaan dasar yang ia ajukan dalam buku ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi kapabilitas yang bernilai. Dengan pertanyaan dasar itu ia menunjukkan bahwa kapabilitas yang perlu dikembangkan dalam masyarakat miskin sebenarnya tidak hanya terpusat pada upaya peningkatan pendapatan saja. Pengembangan harga diri sebagai manusia dan juga pengakuan sosial menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Risetnya mengenai pengembangan kapabilitas banyak disambungkan dengan program yang dilakukan oleh Oxfam di Pakistan (Alkire 2002, 1-4).

Yang keempat adalah riset disertasi yang pernah dilakukan Polly Vizard. Ia menulis buku *Poverty and Human Rights: Sen's 'Capability Perspective' Explored* pada 2006. Buku ini merupakan revisi dari disertasi doktoralnya di Insititute for Development Studies (DESTIN) di London School of Economics. Buku ini ditulis dalam bentuk monografi di mana ada beberapa tulisan yang mencoba mengeksplorasi perspektif Sen mengenai kapabilitas bagi penguatan hak azasi manusia, khususnya masalah pengurangan kemiskinan (Vizard 2006, 1). Dalam pandangan Vizard, perspektif Sen mengenai kapabilitas memberikan kontribusi bagi proyek hak azasi manusia dalam soal pengurangan masalah kemiskinan. Ada beberapa kontribusi yang digarisbawahi oleh Vizard, di antaranya adalah kontribusi dalam membangun kerangka

¹¹ Sabina Alkire adalah Direktur Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), serta aktif di Human Development and Capability Association, sebuah lembaga yang berkonsentrasi aktif mempromosikan pendekatan kapabilitas (*capability approach*) dalam pembangunan manusia. Lihat HDCA dalam www.capabilityapproach.com

¹² Buku ini tampaknya berangkat dari disertasi doktoral yang pernah ia tulis di Universitas Oxford yang berjudul “*Operationalizing Amartya Sen's Capability Approach to Human Development: A Framework for Identifying 'Valuable' Capabilities*” pada tahun 1998.

normatif untuk memahami masalah kemiskinan sebagai kekerasan atau sebagai penyangkalan hak azasi yang paling dasar (Vizard 2006, 14). Dengan karya ini, Vizard hendak mempertegas kontribusi pendekatan kapabilitas Sen bagi penguatan hak azasi manusia.

Yang terakhir adalah disertasi yang ditulis Syam Surya Syamsi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2013. Dalam disertasi yang berjudul *Teori dan Etika Pembangunan Amartya Sen: Pendekatan Kebebasan, Kapabilitas dan Pentingnya Komitmen Bagi Pembangunan*, Syamsi mencoba menunjukkan etika yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan yang dilakukan banyak negara di dunia. Ia menilai pembangunan yang memasukkan pertimbangan etika akan melahirkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas (Syamsi 2013, 13). Yang dimaksud dengan pertimbangan etika dalam pembangunan misalnya adalah penegasan perlunya memasukkan jaminan kebebasan sipil dan politik. Dengan pandangan ini, Syamsi menyimpulkan bahwa gagasan Sen mengenai etika pembangunan menganut pandangan Kantian yang dipahami secara moderat (Syamsi 2013, 242-243).

Dari studi kepustakaan mengenai kebebasan dan kapabilitas yang dipahami Amartya Sen di atas, penulis hendak mempertegas kembali bahwa penelitian yang tengah lakukan dalam disertasi ini merupakan riset yang berbeda. Perbedaan ini tentu tidak dipahami sebagai perbedaan total. Dalam beberapa hal, ada persinggungan mengenai pertanyaan besar yang tidak bisa dihindari. Misalnya pertanyaan mengenai pandangan etika yang diajukan dalam disertasi ini bisa bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chuan Chia Tseng dan Syam Surya Syamsi. Namun jika dilihat lebih detail kita dapat melihat spesifikasi dan penekanan yang berbeda. Dalam hal ini, hal yang ditekankan dalam penelitian disertasi ini adalah soal kriteria etika menurut Sen serta signifikansi dari kritik Sen atas pengertian pilihan rasional. Perbedaan penekanan ini akan berimplikasi pada perbedaan cara menjawab dan struktur argumen yang diajukan.

1.6 Susunan Disertasi

Isi disertasi ini berupaya menjawab pertanyaan utama yang sudah ditegaskan dalam perumusan masalah dan akan diuraikan dalam bab demi bab. Penelitian disertasi

ini mencoba merumuskan ukuran atau kriteria dari tindakan etis yang dipahami Sen dari pandangannya mengenai kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*). Untuk menjawab pertanyaan pokok ini, pertama-tama akan ada tiga bab inti yang akan menjelaskan konsep Sen mengenai kebebasan yang dibedakan dalam aspek proses dan kesempatan real, tentang kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*), kritiknya atas teori teori pilihan rasional (*rational choice theory*), serta integrasi kebebasan ke dalam pilihan sosial. Uraian pokok ini dijelaskan dalam bab II, III dan IV. Secara keseluruhan, disertasi ini disusun dalam tujuh bab, di mana pada Bab I akan dipaparkan rumusan masalah utama yang diajukan, tujuan penelitian, studi pustaka dan biografi intelektual Amartya Sen.

Pada Bab II akan dijelaskan pandangan Sen mengenai kebebasan yang dibagi dalam dua aspek, yakni aspek proses dan kesempatan real (*real opportunity*). Dalam menjelaskan dua aspek ini, juga akan ditunjukkan beberapa ide yang menjadi dasar dari masing-masing aspek itu. Kebebasan dalam aspek proses misalnya banyak diinspirasi oleh para pemikir libertarian seperti Friedrich Hayek dan John Stuart Mill. Konsep kebebasan dalam aspek ini juga bersinambung dengan konsep kebebasan negatif yang dirumuskan oleh Isaiah Berlin. Pandangan mereka mengenai kebebasan akan diuraikan secara singkat dan akan ditunjukkan kesinambungannya dengan pandangan Sen mengenai kebebasan dalam aspek proses. Sementara dalam memahami kebebasan sebagai kemampuan (*the ability to achieve*) atau kapabilitas, kita akan melihat beberapa pandangan dan kondisi yang dapat dipahami sebagai inspirasi dalam perumusan konsep kapabilitas. Inspirasi yang pertama diambil dari pandangan Marx yang memahami kebebasan sebagai kebebasan untuk menentukan sesuatu atau yang kerap dipahami sebagai kebebasan positif. Yang kedua adalah refleksi Sen mengenai kondisi ketidakmampuan. Dalam hal ini, kondisi ketidakmampuan pada manusia merupakan inspirasi yang paling penting bagi Sen dalam merumuskan konsep kapabilitas. Yang ketiga adalah rumusan mengenai kualitas hidup sebagaimana yang diajukan Martha Nussbaum. Ia adalah rekan Sen yang juga menggunakan kapabilitas sebagai pendekatan di dalam pemikirannya. Nussbaum dan Sen sama-sama memahami kualitas hidup manusia sebagai sesuatu yang tidak bisa diukur dari tingginya pendapatan per kapita atau GDP. Kualitas hidup manusia sejatinya diukur dari seberapa besar kapabilitas yang mereka miliki. Dan yang terakhir, rumusan Sen mengenai kapabilitas dibedakan dengan

konsep “hal-hal pokok” (*primary goods*) yang diajukan John Rawls. Dalam hal ini Sen lebih memahami hal-hal pokok sebagai sarana menuju kebebasan (*means to freedom*), bukan kebebasan itu sendiri (*freedom to achieve*).

Pada Bab III akan dijelaskan pandangan Sen mengenai kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*), kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) dan pengertian pilihan rasional. Ada beberapa pandangan dasar yang ditegaskan Sen pada bab ini. Yang pertama adalah mengenai nilai-nilai yang dipertimbangkan dalam pilihan tindakan. Melalui klasifikasi kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan, ia menegaskan bahwa kesejahteraan bukan satu-satunya nilai yang dipertimbangkan dalam memilih tindakan yang akan diambil. Dalam hal ini Sen mengkritik pengertian pilihan rasional yang hanya dipahami sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Dalam teori pilihan rasional, sebuah pilihan dapat disebut rasional jika dan hanya jika ia dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Baginya, pengertian pilihan rasional tidak harus selalu dikaitkan dengan motif memaksimalkan keuntungan dan kepentingan-diri. Pilihan tindakan yang tidak memiliki motif itu, sebagaimana yang ada di dalam tindakan komitmen bisa saja disebut rasional. Ia memahami pilihan rasional sebagai pilihan yang sudah diperiksa secara kritis. Hal yang juga akan dibahas dalam Bab III ini adalah soal hilangnya kapabilitas (deprivasi) dan pengertian kemiskinan. Dalam pandangan Sen, orang miskin tidak dipahami sebagai orang yang berpendapatan rendah semata. Sejatinya orang miskin adalah orang yang kehilangan kapabilitas. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan soal hubungan antara kebebasan dan kesejahteraan. Sen menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara jaminan kebebasan di dalam masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Secara spesifik ia menunjukkan korelasi ini dalam kontribusi demokrasi bagi capaian kesejahteraan. Yang terakhir, bab ini akan menyinggung soal kontrol yang dipahami dalam konsep kebebasan yang diajukan Sen. Baginya, konsep kontrol tidak hanya dipahami dalam arti kontrol langsung (*direct control*) dari si pelaku, tetapi juga kontrol tidak langsung (*indirect control*).

Di dalam Bab IV akan dijelaskan masalah kebebasan di dalam pilihan sosial. Sen menegaskan bahwa ada konflik antara kebebasan dan pilihan sosial. Hal pokok yang hendak ditunjukkan dalam bab ini adalah gagasan modifikasi yang diajukan Sen. Dalam menguraikan Bab IV ini, pertama-tama akan dijelaskan pengertian teori pilihan

sosial (*social choice theory*). Setelah itu akan diklarifikasi pengertian mengenai preferensi dan nilai, dua konsep yang cukup penting dalam teori mengenai pilihan. Dalam memahami persoalan pilihan sosial, masalah utama yang dihadapi sebenarnya adalah bagaimana kita menyikapi preferensi yang begitu banyak. Preferensi yang ada sebanding dengan jumlah individu yang ada di dalamnya. Masalah yang perlu dijawab kemudian adalah bagaimana preferensi yang begitu banyak dijadikan satu preferensi sosial? Dalam pandangan Sen, teori pilihan sosial tradisional biasanya lebih memerhatikan nilai manfaat dan kesejahteraan di dalam pertimbangannya dibanding kebebasan. Karenanya Sen kemudian mengajukan modifikasi atas teori pilihan sosial yang sudah diintegrasikan nilai kebebasan di dalamnya. Ada dua gagasan yang ia ajukan untuk memodifikasi teori pilihan sosial. Yang pertama adalah adanya pertimbangan untuk melindungi kebebasan dan hak dasar dan yang kedua membuka kemungkinan perbandingan antar-pribadi (*interpersonal comparison*) di dalam perumusan pilihan sosial. Hal terakhir yang akan ditunjukkan dalam bab ini adalah tentang pertimbangan keadilan dalam perumusan pilihan sosial yang menuntut adanya perluasan informasi atau perluasan pertimbangan.

Pada Bab V akan ditunjukkan beberapa kritik atas pandangan kebebasan dan kapabilitas yang dipahami Sen. Ada dua tokoh yang diangkat dalam bab ini, yakni Martha C. Nussbaum dan Philip Pettit. Dua tokoh ini merepresentasikan kritik internal dan kritik eksternal. Nussbaum adalah seorang pemikir yang juga menggunakan pendekatan kapabilitas dalam analisisnya. Meski menggunakan pendekatan yang sama, Nussbaum memiliki beberapa catatan kritis atas pandangan Sen. Hal yang paling ia garisbawahi adalah soal ketiadaan ide ambang batas (*threshold*) dalam pendekatan kapabilitas yang diajukan Sen. Nussbaum menilai ide mengenai ambang batas sangatlah penting dalam upaya melindungi martabat manusia agar tidak terdegradasi. Karenanya ia mempertanyakan mengapa Sen tidak pernah menegaskan ide ini dalam pendekatan kapabilitasnya. Hal kedua yang ia catat dari pemikiran Sen adalah soal kurangnya sikap tegas terhadap paham relativisme budaya. Yang ketiga, soal tidak adanya uraian yang komprehensif mengenai pendasaran dari Marx dan Aristoteles bagi rumusan kapabilitas yang dipahami Sen. Padahal sebelumnya ia sudah menyinggung bahwa konsep ini banyak dipengaruhi oleh dua pemikir ini. Yang terakhir, Nussbaum mengkritik klasifikasi kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan yang ia anggap tidak

jasas. Sementara Pettit mengajukan kritik terhadap pandangan kebebasan Sen dari perspektif Republikan. Ia menggarisbawahi pandangan Sen yang memberikan ruang bagi kontrol tidak langsung (*indirect control*) dalam ide kebebasannya. Bagi Pettit, pandangan Sen ini akan berdampak pada kemungkinan ketergantungan pelaku pada kebaikan hati atau dominasi dari pihak lain. Jika kemungkinan ini diafirmasi, apa yang disebut sebagai kebebasan menurut Sen nantinya tidak lagi bisa disebut kebebasan karena mengandung unsur dominasi. Dalam perspektif Republikan, Pettit memahami kebebasan sebagai non-dominasi.

Dalam Bab VI, penulis akan memberikan analisis mengenai integrasi kebebasan ke dalam teori pilihan sosial yang diajukan Sen. Melalui bab ini juga akan ditegaskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam disertasi ini. Secara detail ada beberapa hal yang akan diuraikan dalam bab ini. Yang pertama akan disajikan analisis mengenai langkah-langkah yang dilakukan Sen dalam mengintegrasikan kebebasan ke dalam teori pilihan sosial. Hasil dari proses pengintegrasian ini Sen mengajukan model pilihan sosial berbasis-kebebasan atau *liberty-based social choice*. Yang kedua adalah penegasan pandangan Sen mengenai kriteria tindakan etis. Penegasan ini merupakan jawaban atas pertanyaan utama disertasi dan sekaligus menjadi tesis yang penulis ajukan dalam disertasi ini. Pada bagian berikut akan ditunjukkan asumsi dasar dan beberapa dampak pandangan Sen mengenai etika, dan relevansinya bagi kehidupan kita di Indonesia. Yang terakhir, dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa catatan atas pandangan Sen yang sudah disajikan.

Pada Bab Penutup penulis akan memberikan kesimpulan singkat mengenai disertasi ini. Hal yang penulis tegaskan dalam bagian penutup ini adalah tentang gagasan besar yang hendak ditegaskan Sen lewat integrasi kebebasan dalam teori pilihan sosial, serta relevansinya bagi refleksi filosofis. Menurut penulis ada dua hal pokok yang hendak ditegaskan Sen lewat gagasan pengintegrasian kebebasan ke dalam teori pilihan sosial. Yang pertama adalah memasukkan pertimbangan etika ke dalam pilihan sosial yang cenderung ekonomistik. Yang kedua, masih terkait dengan yang pertama, Sen juga hendak mengembalikan pandangan kita mengenai manusia yang tidak hanya dipahami sebagai pengejar manfaat, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki nilai tanggung jawab pada kehidupan yang lebih luas.

1.7 Biografi Intelektual Sen

Amartya Sen lahir pada 3 Nopember 1933 di Santiniketan, Bengal barat dari keluarga yang sudah memiliki tradisi intelektual dan pendidikan yang cukup mengakar.¹³ Ayahnya, Ashutosh Sen, pengajar kimia di Universitas Dhaka, sementara kakeknya, Kshiti Mohan Sen adalah pengajar sastra Sanskrit di Visva-Bharati – sekolah yang didirikan oleh peraih nobel sastra 1913 Rabindranath Tagore. Di masa-masa awal pendidikannya, Sen memiliki ketertarikan pada Sastra (Sanskrit), Matematika dan Fisika.¹⁴ Di jenjang selanjutnya Sen memantapkan diri untuk bergelut dalam ilmu ekonomi. Ia menuturkan, bagi seorang India tidaklah sulit untuk menjelaskan mengapa ia meminati masalah ekonomi. Katanya, pada tahun 1943, ketika ia baru berumur 9 tahun, sebuah bencana besar melanda tanah kelahirannya, Bengal. Bencana besar itu adalah kelaparan hebat yang menewaskan jutaan manusia. Tiga dekade setelah bencana itu, Sen melakukan sebuah analisis ekonomi tentang sebab-sebab awal kelaparan dan bagaimana hal itu menjadi sebuah bencana dahsyat (Klamer 1989, 136). Seluruh refleksinya mengenai bencana itu dapat kita lihat dalam pandangannya mengenai hilangnya kapabilitas manusia dan minatnya pada tema ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*).¹⁵

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Visva-Bharati, Sen melanjutkan pendidikan ke Presidency College di Kalkutta untuk belajar ekonomi. Di Kalkutta (1951-1953) ia berjumpa dengan para pengajar dan ekonom yang juga meminati masalah-masalah masyarakat dan politik yang berhaluan kiri. Karya dan pemikiran Karl Marx sangat memengaruhi perspektif dan argumen yang dibangun oleh para ekonom India di masa itu. Kondisi ini juga turut memengaruhi Sen, meski secara resmi ia tidak

¹³ Riwayat mengenai Sen dapat dilihat dalam www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical". *Nobelprize.org*. Nobel Media AB 2013. Web. 8 Jan 2014. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1998/sen-bio.html> dan juga dalam wawancara yang pernah dilakukan Arjo Klamer "A Conversation with Amartya Sen" *Journal of Economic Perspective* 3 (1989): 135-150. Klamer melakukan wawancara pada tahun 1985 di Oxford. Klamer, saat itu adalah seorang *Visiting Associate Professor* ekonomi di Universitas Iowa.

¹⁴ www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical".

¹⁵ Ekonomi kesejahteraan adalah satu cabang dari ilmu ekonomi yang berupaya merumuskan proposisi yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Secara teknis, kesejahteraan sosial dipahami sebagai penjumlahan dari seluruh kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu kemudian secara eksplisit dimengerti sebagai manfaat yang dapat dinikmati oleh seorang individu. Karenanya, kesejahteraan kemudian diukur dari penjumlahan manfaat yang dapat dinikmati oleh individu. Lih. Yew-Kwang Ng, *Welfare Economics: Towards a More Complete Analysis* (New York: Pelgrave Macmillan, 2004), 2. Amartya Sen menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi karena kontribusinya dalam bidang ekonomi kesejahteraan. Lih. www.nobelprize.org

terlibat dalam partai politik manapun. Beberapa pengajar yang memengaruhi pemikiran Sen adalah Bhabatosh Datta, Tapas Majumdar, Sukhamoy Chakravarty dan lain-lain. Selain karya-karya Marx, Sen sendiri membaca karya-karya pemikir besar lainnya seperti karya Aristoteles, Adam Smith, John Stuart Mill dan juga Bernard Shaw. Sen mengatakan bahwa ia sangat menikmati karya Smith dan pemikirannya kemudian banyak memengaruhi pandangan Sen. Setelah menuntaskan jenjang pendidikan di India, pada 1953 ia meneruskan pendidikan ke Trinity College Universitas Cambridge, Inggris (Klamer 1989, 136-137).¹⁶

Pada saat belajar di Trinity College, Cambridge, di sana tengah berlangsung perdebatan dan pro-kontra antara ekonomi Keynesian dan neoklasik.¹⁷ Selama di Cambridge, Sen menjumpai banyak tokoh intelektual penting dan membentuk pemikirannya di kemudian hari. Beberapa pemikir penting itu di antaranya adalah Maurice Dobb,¹⁸ Piero Sraffa,¹⁹ Dennis Robertson,²⁰ Joan Robinson²¹ dan juga beberapa

¹⁶ Lihat juga dalam www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical".

¹⁷ Menurut Richard D. Wolff dan Stephen A. Resnick, ekonomi neoklasik dirumuskan dan dimapkan dalam rentang waktu 1870 hingga 1930. Analisis dalam teori neoklasik dimulai dari pandangan dasar tentang dimensi mental dan fisik seorang individu. Dalam diri setiap individu tersusun pikiran, dalam arti ada kemampuan berpikir secara logis, dan tubuh, di mana seseorang memiliki kemampuan bekerja dan menginginkan sesuatu untuk dikonsumsi. Segala hal yang berlangsung di dalam ekonomi, apakah itu harga, pendapatan, kemakmuran dan pertumbuhan, dipahami sebagai turunan atau akibat dari interaksi antara pikiran dan tubuh seorang individu. Dalam ekonomi neoklasik, produksi dan distribusi kesejahteraan adalah efek dari perjuangan seorang manusia secara individu dalam menggunakan penalarannya dan kemampuan bekerja untuk mencapai hasil terbaik untuk diri mereka. Sistem ini mengklaim bahwa pertukaran bebas di antara para pencari kepentingan-diri akan menghasilkan kemakmuran yang lebih besar bagi setiap orang. Karenanya, dalam pandangan teori neoklasik, masyarakat harus melindungi kebebasan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan-diri mereka, dan harus membuat sebuah institusi yang menjamin kebebasan itu. Sementara mazhab ekonomi Keynesian diambil dari pandangan para pengikut John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris. Keynes menulis buku berjudul *General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) sebagai reaksi atas depresi ekonomi tahun 1930-an. Ia mengkritik asumsi-asumsi di dalam teori neoklasik. Dalam menanggapi depresi masa itu ia mendorong adanya peran negara yang lebih besar. Menurut para pengikut Keynesian, harus ada aturan yang menata ekonomi. Aturan-aturan itu mengatur aktivitas para produsen, konsumen dan pelaku ekonomi lainnya. Dengan kata lain, jika mau dipertajam perbedaan antara keduanya, asumsi dalam neoklasik adalah bahwa ekonomi hanya menjadi konsekuensi dari perilaku para individu yang bebas. Jadi yang pertama-tama hadir adalah para individu yang bebas, dan kemudian hadir aktivitas ekonomi sebagai konsekuensi dari adanya individu yang bebas. Sementara di dalam asumsi Keynesian justru sebaliknya yakni bahwa tindakan individu bergantung pada aturan yang dibuat. Perilaku ekonomi harus diatur dan tidak dibiarkan berlangsung dalam mekanisme pasar. Lih. Richard D. Wolff dan Stephen A. Resnick, *Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian*, (Cambridge, MA: MIT Press, 2002), 14-21.

¹⁸ Maurice Dobb adalah seorang ekonom Marxis yang sangat terkenal lewat buku *Political Economy and Capitalism* (London: Routledge, 1937) dan *Studies in the Development of Capitalism* (London: Routledge, 1946). Ia hidup dari tahun 1900 dan meninggal pada 1976.

¹⁹ Piero Sraffa menulis buku *Production of Commodities by Means of Commodities* (Cambridge: Cambridge University Press, 1960). Buku ini menghidupkan kembali pendekatan klasik mengenai teori

yang lain. Dalam pandangan Sen, Maurice Dobb merupakan salah seorang begawan dalam ekonomi politik Marxis yang amat penting dan sangat memengaruhinya, khususnya mengenai teori nilai. Meski seorang Marxis, Dobb juga membaca tradisi pemikiran yang lain. Sementara Piero Sraffa, menurutnya merupakan pemikir paling cerdas yang pernah ia jumpai. Ada begitu banyak gagasan segar yang ia terima dari Sraffa, misalnya soal rasionalitas, perilaku manusia, peran masyarakat dalam formasi nilai dan lain-lain.²² Sen juga dididik oleh Joan Robinson yang kemudian bersama Amiya Dasgupta menjadi supervisor Ph.D-nya. Meski tidak semua gagasan Robinson dapat meyakinkan Sen, namun Sen sendiri amat mengagumi perempuan ini (Klamer 1989, 137-139).

Tesis Ph.D Sen adalah tentang *The Choice of Techniques* yang diterima oleh Robinson sebagai tema yang bagus.²³ Di sisi lain, Sen sendiri sebenarnya memiliki ketertarikan pada tema ekonomi kesejahteraan, tema yang kebetulan tidak terlalu diminati oleh Robinson.²⁴ Ia pernah meminta Sen untuk meninggalkan tema ini. Minat Sen pada tema ekonomi kesejahteraan justru mendapat dukungan dari Maurice Dobb. Bersama Dobb, Sen pernah mendiskusikan buku Kenneth Arrow, *Social Choice and Individual Values* (1951) yang belum lama terbit pada waktu itu. Dalam diskusi itu,

nilai. Bersama Dobb, ia juga mengedit karya-karya David Ricardo. Sraffa lahir pada 1889 dan meninggal pada 1963.

²⁰ Pada awalnya Dennis Robertson adalah murid Keynes, kemudian menjadi mitra kerja Keynes dan terakhir ia menjadi salah seorang kritikus Keynes. Salah satu karya pentingnya berjudul *Banking Policy and the Price Level* (London: P.S. King & Son, 1926). Ia lahir pada 1890 dan meninggal pada 1963.

²¹ Joan Robinson (1903-1983) pernah menjadi mitra kerja Keynes sebagai anggota dari sebuah kelompok yang disebut "Cambridge Circus". Ia kemudian menjadi salah satu supervisor Ph.D Sen.

²² Sen pernah menulis sebuah artikel berjudul "Sraffa, Wittgenstein and Gramsci". Artikel tersebut mengulas beberapa gagasan pokok Sraffa mengenai nilai. Di dalam artikel itu dijelaskan bahwa di satu sisi pandangan Sraffa banyak dipengaruhi oleh Gramsci, dan di sisi lain, pandangannya kemudian juga memberikan pengaruh bagi Wittgenstein. Menurut Sen, kritik Sraffa atas Wittgenstein menjadi titik tolak peralihan dari Wittgenstein I (*Tractatus Logico-Philosophicus*) ke Wittgenstein II (*Philosophical Investigation*). Amartya Sen, "Sraffa, Wittgenstein and Gramsci," *Journal of Economic Literature* XLI (2003); 1240-1241.

²³ Disertasinya diterbitkan dengan judul *Choice of Techniques: an Aspect of the Theory of Planned Economic Development* pada 1960. Karya ini membahas masalah alokasi investasi dalam merencanakan pembangunan ekonomi. Melalui buku ini Sen menekankan investasi yang memiliki nilai surplus. Lih. Charles W. Howe, "Choice of Techniques," *The American Economic Review* 51 (1961): 720-722.

²⁴ Menurut Sen, status ekonomi kesejahteraan di dalam teori ekonomi modern tidak terlalu diperhitungkan. Sementara di dalam ekonomi politik klasik tidak ada pembedaan tajam antara analisis ekonomi kesejahteraan dan analisis tipe ekonomi lainnya. Namun karena ada kecurigaan semakin besarnya penggunaan etika di dalam ekonomi kesejahteraan, bidang ini kemudian semakin diragukan statusnya sebagai ilmu. Karenanya bidang ini kemudian cenderung diletakkan di luar kotak ekonomi pada umumnya. Lih. Amartya Sen, *On Ethics & Economics*, (Oxford: Balckwell Publishers Ltd., 1988 [1987]), 29.

Dobb menegaskan bahwa kesimpulan Arrow bukan hanya soal aljabar, karenanya ia mendorong Sen untuk menulis tema-tema di luar aljabar (Klamer 1989, 139).

Secara formal, perjumpaan Sen dengan filsafat dimulai ketika ia mendapatkan fellowship di Trinity College, Universitas Cambridge. Fellowship itu memberikan kesempatan kepadanya untuk mengambil studi apa saja yang ia kehendaki selama empat tahun. Ia memilih bidang yang menurutnya termasuk keputusan radikal, yakni studi filsafat. Pilihan tersebut tentu bukan tanpa dasar karena sebelum itu ia sebenarnya sudah memiliki ketertarikan pada logika dan epistemologi. Dalam perkembangan selanjutnya, minat Sen terhadap filsafat semakin berkembang ke masalah etika dan filsafat politik. Dalam pandangannya, isu ini terkait dengan masalah demokrasi dan kesetaraan, tema yang juga ia minati. Karenanya, masalah-masalah dalam filsafat akan bersinggungan dengan masalah ekonomi. Masalah-masalah yang ada di dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*) dan logika matematika akan bersinggungan dengan masalah filsafat moral serta soal ketidaksetaraan dan ketidakmampuan (deprivasi). Pergulatan dengan filsafat moral dan filsafat politik telah mempertemukan Sen dengan beberapa pemikir dan filsuf besar seperti John Rawls, Isaiah Berlin, Bernard Williams, Ronald Dworkin, Derek Parfit, Thomas Scanlon, Robert Nozick dan lain-lain.²⁵

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sen sendiri, tahun 1970-an adalah fase di mana ia sangat menggeluti teori pilihan sosial (*social choice theory*). Ia merasa beruntung karena telah berdiskusi dengan para peminat teori pilihan sosial dari berbagai negara. Beberapa di antaranya adalah Peter Hammond, Charles Blackorby, Kotaro Suzumura, Geoffrey Heal, Gracieda Chichilnisky, Ken Binmore, Wulf Gaertner, Eric Maskin, John Muelbauer, Kevin Roberts, Susan Hurley dan lain-lain. Ia juga merasa bahagia karena telah ikut ambil bagian dalam masa emas studi teori pilihan sosial saat itu. Dari tema teori pilihan sosial ia masuk pada masalah-masalah ketidaksetaraan dan kemiskinan. Dalam rentang waktu 1970-an hingga awal 1980-an karya-karyanya banyak mengulas masalah teori pilihan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, masalah kemiskinan, pengangguran dan juga masalah kebebasan dan hak serta ketidaksetaraan gender.²⁶

²⁵ www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical".

²⁶ www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical".

Salah satu karya awal yang cukup penting yang terkait dengan tema teori pilihan sosial dan ekonomi kesejahteraan adalah buku *Collective Choice and Social Welfare* yang terbit tahun 1970. Karya ini membahas masalah teori pilihan sosial dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tapas Majumdar, guru Sen di Kalkutta, karya ini menjadi karya klasik yang mengantarkan Sen meraih nobel ekonomi pada 1998. Melalui buku ini, Sen mencoba membangkitkan kembali pendekatan pilihan sosial yang hampir mati dengan memodifikasi teori tersebut (Majumdar 1998, 2860). Salah satu modifikasi yang diajukan Sen adalah dengan memasukkan metode perbandingan antar-pribadi (*interpersonal comparisons*) ke dalam teori pilihan sosial. Di dalam teori pilihan sosial tradisional sebagaimana yang dikembangkan oleh Kenneth Arrow, metode perbandingan antar-pribadi tidak diakui (Arrow 1963, 9). Menurut Sen, tidak adanya pengakuan ini karena metode tersebut lebih dianggap sebagai prinsip etika daripada sebagai prinsip ekonomi (bdk. Sen 1988, 30-31).

Tidak lama setelah itu, ia juga menerbitkan karya penting berjudul *On Economic Inequality* pada 1973. Karya ini, sebagaimana ia katakan sendiri, merupakan pengembangan lebih lanjut dari karya sebelumnya, *Collective Choice and Social Welfare*. Hanya saja, pada karya ini ia lebih menekankan masalah ketidaksetaraan ekonomi. Kemudian pada 1981 ia memublikasikan buku *Poverty and Famines*. Dalam buku ini ia menganalisis persoalan kemiskinan dan kelaparan dengan pendekatan sistem kepastian hak (*entitlement*) dan kepemilikan (*ownership*).²⁷ Menurutnya, masalah kelaparan sejatinya bukan karena tidak ada makanan. Kelaparan terjadi karena orang tidak memiliki hubungan legitim dengan komoditas. Dengan kata lain, kelaparan terjadi karena orang tidak memiliki hak atas makanan yang sebenarnya tersedia. Dalam banyak

²⁷ Menurutnya, sistem *entitlement* terkait dengan proses kepemilikan yang legitim oleh seseorang atas sesuatu (komoditas). Sebagai contoh kita bisa melihat proses kepemilikan pribadi yang legitim dalam sistem ekonomi pasar. Mengapa saya memiliki hak legitim atas satu karung beras? Jawabannya adalah karena saya sudah menukarkan uang saya dengan beras itu di sebuah toko. Mengapa saya memiliki hak yang legitim atas uang yang saya gunakan untuk menukar beras itu? Karena saya mendapatkannya dengan menjual buah mangga milik saya. Mengapa saya memiliki hak legitim atas mangga itu? Karena saya mendapatkan dari pohon mangga yang saya tanam di atas tanah saya. Mengapa saya memiliki hak legitim atas tanah itu? Karena saya mendapatkannya dari warisan orang tua saya, dan seterusnya. Proses ini menjelaskan mengapa saya memiliki hak yang legitim atas sesuatu. Menurut Sen ada beberapa sistem entitlement yang dianggap legitim dalam ekonomi pasar. Yang pertama entitlement yang didasarkan pada jual beli (*trade-based entitlement*), yang kedua didasarkan pada produksi (*production-based entitlement*), yang ketiga entitlement yang didasarkan pembuatan sendiri (*own-labour entitlement*) dan yang keempat entitlement karena warisan atau pengalihan kepemilikan (*inheritance and transfer entitlement*). Lih Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Oxford University Press, 1981), 1-2.

bencana kelaparan, peristiwa itu terjadi karena masyarakat tidak memiliki akses atas komoditas yang dibutuhkan. Menurutnya, akses masyarakat terhadap komoditas (sistem *entitlement*) tidak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme pertukaran yang ada di dalam sistem pasar. Untuk menjamin akses masyarakat terhadap komoditas, negara juga harus berperan aktif misalnya lewat pemberian jaminan sosial (*social security*) (Sen 1981, 1-8).

Pentingnya pendekatan kapabilitas mulai ditegaskan ketika ia mempelajari sebab-sebab dan pencegahan kelaparan pada tahun 1970-an. Hasil dari studi ini adalah buku *Poverty and Famines* (1981) sebagaimana yang dijelaskan di atas. Pada tahun 1980-an ia sempat berkerja sama dengan seorang ekonom dari Belgia, Jean Dreeze untuk studi mengenai kelaparan dan hilangnya kapabilitas (*deprivasi*). Dalam memahami masalah kelaparan dan hilangnya kapabilitas, Sen semakin menyadari tentang pentingnya kebebasan substantif dalam arti kapabilitas untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap bernilai. Ia mengatakan, suara pesimistis mengenai teori pilihan sosial yang selalu berakhir pada ketidakmungkinan pilihan sosial Arrow sebenarnya dapat dimodifikasi lewat perluasan basis informasi. Pemikiran Sen mengenai masyarakat yang kehilangan kapabilitas juga dipengaruhi oleh gagasan tentang kelompok “paling kurang beruntung” (*the least-advantaged*) yang pernah diajukan John Rawls dalam teori keadilannya. Karenanya, ia mengatakan sendiri bahwa kehidupan intelektualnya telah banyak dipengaruhi oleh dua raksasa ini, yakni Arrow lewat teori pilihan sosial (*social choice theory*) dan Rawls lewat teori keadilan (*a theory of justice*).²⁸

Pada tahun 1980-an, Sen mulai pindah ke Amerika Serikat dan mengajar di beberapa universitas di negeri itu.²⁹ Salah satu kampus di mana Sen mengajar adalah Universitas Harvard. Di sana ia berjumpa dengan pemikir-pemikir penting seperti Robert Nozick, Eric Maskin, John Rawls dan Thomas Scanlon. Gagasan mengenai teori pilihan sosial masih menjadi perhatian Sen. Saat itu ia mencoba menganalisis teori

²⁸ www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical".

²⁹ Pada tahun 1980-an, istri Sen, Eva Colomi, mengidap kanker dan meninggal secara mendadak pada tahun 1985. Dua anaknya saat itu, Indrani dan Kabir, kurang lebih baru berumur 10 dan 8 tahun. Sen merasa perlu untuk berpindah jauh dari tempat mereka kala itu agar anak-anaknya bisa melupakan kesedihan. Ia kemudian pindah ke Amerika di mana Sen mengajar di beberapa universitas di sana. Secara cepat kedua anaknya mulai akrab dengan kehidupan kampus. www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical".

tersebut dengan pendekatan keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Salah satu konsep yang kemudian ia kembangkan adalah pandangannya mengenai kapabilitas. Konsep ini kemudian ia tulis dalam karyanya berjudul *Commodities and Capabilities* pada 1985.³⁰ Karya ini berisi monografi yang ia kembangkan dari Hennisman Lectures di Universitas Amsterdam pada 1982. Isinya sebenarnya masih terkait dengan buku *Poverty and Famines* dan juga kritik terhadap tradisi utilitarian. Pertanyaan penting yang ia ajukan dalam buku ini adalah “bagaimana kita harus menilai kesejahteraan seseorang?” Untuk menjawab pertanyaan ini ia menjelaskan beberapa pendekatan, namun seluruh pendekatan ini tidak memuaskan pertanyaan yang ia ajukan. Beberapa pendekatan yang tidak memuaskannya itu mencoba menilai kesejahteraan seseorang dari pendapatan yang diterima (*real income*), pilihan (*choice*), kebahagiaan (*happiness*) dan hasrat yang terpenuhi (*desire-fulfilment*). Menurutnya, kesejahteraan (*well-being*) seseorang itu tidak bisa dinilai dari apa yang dikonsumsi atau kebahagiaan yang dinikmati. Dalam buku itu ia mengatakan bahwa kesejahteraan seseorang bisa dinilai lewat capaian (*achievement*), baik dalam arti tindakan atau kondisi, yang kemudian ia sebut sebagai *functionings*. Ia kemudian menegaskan bahwa konsep yang paling mendasar untuk menilai kesejahteraan seseorang ada dalam kebebasan seseorang untuk memilih beragam *functionings* yang kemudian ia sebut sebagai kapabilitas (Sugden 1986, 820-822).

Dalam perkembangannya, ide mengenai kapabilitas menjadi salah satu pendekatan yang sangat sentral dalam pemikiran Sen. Kita bisa melihat hal ini dalam karya-karya berikutnya. Pemahaman mengenai kapabilitas kemudian juga memengaruhi salah satu rekannya, Martha Nussbaum, seorang filsuf perempuan yang menguasai filsafat klasik, etika dan juga studi sastra. Mereka pernah melakukan penelitian bersama dan memublikasikan kumpulan tulisan bersama beberapa penulis lain yang diberi judul *The Quality of Life* (1993). Pada tahun 1990-an, Sen mulai menerbitkan buku yang sudah berfokus pada pendekatan kapabilitas. Salah satu buku itu adalah *Inequality Reexamined* (1992). Pada tahun-tahun awal di Harvard ia berjumpa dengan salah seorang rekannya sewaktu di Cambridge, Mahbub ul Haq. Bersama Haq, ia merumuskan dan mengevaluasi indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) dengan pendekatan kapabilitas.

³⁰ www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical".

Dalam rentang 1990-an hingga 2000-an akhir, Sen telah memublikasikan karya-karya besar yang terkait dengan filsafat dan ekonomi. Pada 1992, sebagaimana sudah disinggung, ia menerbitkan buku penting berjudul *Inequality Reexamined*. Melalui karya ini ia sudah mulai menjelaskan secara komprehensif konsep kapabilitas. Ia membedakan secara jelas pengertian kapabilitas dan capaian (*functionings*). Selain itu, ia juga menegaskan perbedaan pendekatan ini dengan konsep “hal-hal pokok” (*primary goods*) yang diajukan oleh Rawls (Sen 1992, 36). Teori dan pendekatan kapabilitasnya kemudian menjadi kerangka penting dalam konsepsinya mengenai pembangunan. Hal ini dapat kita lihat dalam buku yang terbit pada 1999 yang berjudul *Development as Freedom*. Secara substantif, buku ini memberikan kerangka yang sangat jelas dalam melihat pandangan Sen mengenai pembangunan. Baginya, pembangunan harus dimaknai sebagai perluasan kebebasan manusia. Di dalam pembangunan, pemerintah atau negara harus memberikan perhatian pada jaminan layanan kesejahteraan yang baik dan jaminan kebebasan. Rumusan pembangunan sebagai kebebasan merupakan kritik atas tesis Lee yang hanya memberikan perhatian pada capaian kesejahteraan seraya mengabaikan aspek yang terkait dengan kebebasan sipil dan politik.

Pada tahun 2002, ia memublikasikan buku *Rationality and Freedom* yang merupakan kumpulan dari beberapa makalah yang pernah ditulis. Tema-tema pokok yang diuraikan dalam buku ini di antaranya adalah soal kritiknya atas rasionalitas manusia ekonomi (*homo economicus*), uraian komprehensif mengenai kebebasan, baik dalam arti kesempatan dan juga aspek proses, serta hubungannya dengan teori pilihan sosial (*social choice theory*). Dalam kritiknya atas rasionalitas manusia ekonomi, Sen mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa pilihan rasional adalah pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest*). Baginya, pengertian rasionalitas seperti ini membatasi makna dari tindakan rasional. Seseorang yang melakukan sesuatu bukan karena motif memaksimalkan kepentingan-diri akan dianggap sebagai tidak rasional. Padahal, di dalam kehidupan sosial, ada begitu banyak tindakan yang tidak selalu didasarkan pada motif mencari keuntungan, dan tindakan itu tetap disebut sebagai tindakan rasional. Dalam hal ini, Sen lebih memahami pilihan rasional sebagai pilihan yang sudah melalui proses pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*). Sementara dalam uraian mengenai kebebasan dan pilihan sosial (*liberty and social choice*), Sen mencoba

menunjukkan masalah besar di dalam teori pilihan sosial yang cenderung melihat aspek kesejahteraan dan manfaat (utilitas) sebagai informasi utama dalam mengambil keputusan. Sen mengajukan sebuah modifikasi dengan cara menginjeksi dan mengintegrasikan perspektif kebebasan di dalam teori pilihan sosial.

Publikasinya yang terakhir adalah buku *The Idea of Justice* yang terbit tahun 2009 lalu. Buku ini merupakan kelanjutan dari proyek besarnya dalam merefleksikan masalah rasionalitas, kebebasan dan keadilan. Melalui karya ini ia mencoba me respons teori kebebasan Rawls yang menurutnya dipahami sebagai institusionalisme atau pandangan yang cenderung mengandalkan atau menjadikan institusi sebagai satu-satunya lokomotif dalam merealisasikan keadilan. Alternatif dari pandangan itu, Sen mencoba memahami keadilan sebagai perluasan kondisi yang paling sedikit unsur ketidakadilannya (*less unjust*). Alih-alih dari pada institusi ia justru lebih menekankan peran tindakan aktual (*actual behaviors*) dan pilihan sosial yang dapat semakin memperluas kebebasan (Sen 2009, 5-6). Melalui pemahaman ini, masalah keadilan tidak hanya didekati lewat pembentukan struktur dasar masyarakat (*the basic structure of society*) sebagaimana yang diajukan Rawls, tetapi lebih dilihat sebagai perhatian pada berlangsungnya kehidupan yang adil dalam masyarakat (Sen 2009, x). Hingga saat ini, sejauh penulis ketahui, belum ada buku baru yang diterbitkan oleh Sen. Buku-buku terakhir ini merupakan karya yang berupaya menyimpulkan seluruh pergulatan pemikiran Sen dalam masalah ekonomi, teori sosial dan refleksinya mengenai filsafat moral. Beberapa karya terakhir ini juga akan menjadi rujukan utama dalam disertasi yang secara khusus membahas masalah kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial.

BAB II

DUA ASPEK KEBEBASAN AMARTYA SEN

2.1 Pengantar

Amartya Sen memahami kebebasan dalam dua aspek, yakni aspek proses dan kesempatan (*opportunity*). Kebebasan dalam aspek proses dimaknai sebagai kebebasan memilih sesuatu yang kita anggap bernilai tanpa paksaan dari pihak luar. Tidak adanya paksaan dalam memilih dan menentukan sesuatu yang kita anggap bernilai menjadi pengertian utama dalam konsep kebebasan ini. Sementara melalui aspek kesempatan, ia menekankan pengertian kebebasan substantif, yakni adanya kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap bernilai. Kebebasan dalam arti kemampuan ini kemudian disebut sebagai kapabilitas. Dalam pandangannya, dua aspek kebebasan ini merupakan pengertian komprehensif mengenai kebebasan yang dipahami sebagai gabungan dari pandangan libertarian dan konsekuensialis.

Dalam menjelaskan dua aspek kebebasan ini penulis akan memaparkan beberapa ide dan konteks yang melatari perumusan konsep kebebasan dalam aspek proses dan kesempatan. Ada beberapa pemikir yang kerap dirujuk oleh Sen ketika menjelaskan ide kebebasan. Ia pernah mengatakan bahwa kebebasan yang dimaknai sebagai proses memiliki kesinambungan dengan pandangan Isaiah Berlin mengenai konsep kebebasan negatif, yakni kebebasan sebagai tidak adanya paksaan dari luar. Pada tempat yang lain ia juga merujuk pengertian kebebasan yang dipahami John Stuart Mill dan Friedrich Hayek. Konsep yang ia ambil dari Mill dan Hayek adalah mengenai “area yang dilindungi” (*protected sphere*). Karenanya, pandangan Mill, Hayek dan Berlin mengenai kebebasan akan diulas secara singkat dan akan ditunjukkan kesinambungannya dengan konsep kebebasan dalam aspek proses yang dipahami oleh Sen.

Pengertian kebebasan sebagai tidak adanya paksaan dari luar dianggap sebagai pengertian generik mengenai kebebasan. Dalam arti ini, kebebasan dimaknai sebagai tidak adanya pengekangan atau paksaan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain. Sen melihat pengertian kebebasan tidak cukup jika hanya dipahami seperti itu, yakni sebagai tidak adanya paksaan oleh pihak lain. Karenanya ia mengajukan aspek

kebebasan yang bertumpu pada kesempatan atau kemampuan. Dalam arti ini, kebebasan dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai sesuatu atau kapabilitas. Dengan pemahaman ini Sen hendak menegaskan bahwa kebebasan tidak hanya dipahami sebagai tidak adanya paksaan, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mencapai sesuatu atau kapabilitas. Ia memahami dua aspek kebebasan ini sebagai pengertian yang tidak terpisahkan dalam ide kebebasan. Untuk menyebut seorang manusia sebagai manusia bebas, kondisi yang diandaikan bukan hanya tidak adanya paksaan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga keniscayaan adanya kemampuan untuk mencapai hal yang dianggap bernilai.

Pengertian kebebasan yang dipahami sebagai kapabilitas melengkapi pengertian kebebasan yang biasanya dipahami sebagai tidak adanya paksaan. Konsep kapabilitas kemudian menjadi ide yang khas dalam pemikiran Amartya Sen mengenai kebebasan. Dalam pandangannya, konsep kapabilitas merupakan pendekatan yang efektif dalam memberikan jalan keluar bagi masalah ketidakmampuan atau hilangnya kapabilitas seseorang atau masyarakat. Pendekatan ini juga menjadi kritik yang diajukan Sen terhadap pendekatan yang berbasis pada manfaat (utilitas) sebagaimana yang dipakai dalam ukuran kesejahteraan yang didasarkan pada pendapatan per kapita dan GDP.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan beberapa inspirasi dan konteks yang melatari perumusan pendekatan kapabilitas. Beberapa hal yang akan dijelaskan di antaranya adalah, yang pertama, inspirasi dari Marx yang memberikan alternatif pengertian kebebasan selain dari pengertian yang biasa diajukan oleh para pemikir libertarian. Hal kedua adalah realitas tentang ketidakmampuan yang menjadi konteks penting bagi perumusan konsep kapabilitas. Dari realitas ini, Sen menegaskan bahwa hal paling penting bagi hidup manusia sebenarnya adalah adanya kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) atau kapabilitas. Yang ketiga adalah diskusinya bersama Martha Nussbaum dalam merumuskan kualitas hidup manusia yang kemudian berujung pada penetapan pendekatan kapabilitas sebagai perspektif dalam melihat kualitas hidup (*quality of life*). Dan yang terakhir adalah refleksinya terhadap pandangan Rawls mengenai kelompok paling tidak beruntung (*the least-advantaged*) dan kritiknya atas konsep hal-hal pokok (*primary goods*) yang diajukan Rawls. Dari beberapa konteks ini kita bisa melihat bahwa pendekatan kapabilitas yang ditawarkan Sen mencoba

memberikan sebuah kerangka baru dalam memahami ketidakbebasan dan ketidakmampuan manusia.

2.2 Kebebasan dalam Aspek Proses dan Kesempatan

Sen memahami konsep kebebasan dalam dua aspek, yakni aspek kesempatan (*opportunity*) dan aspek proses.¹ Dua aspek ini sekaligus menjadi alasan mengapa kebebasan menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Yang pertama, tulis Sen “kebebasan yang lebih besar akan memberikan kita kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan-tujuan kita – sesuatu yang kita anggap bernilai”.² Kebebasan dalam arti ini akan membantu dan memperkuat kemampuan kita untuk menentukan hidup sebagaimana yang kita inginkan. Ia menyebut aspek kebebasan ini sebagai kebebasan yang memerhatikan “kemampuan aktual seseorang untuk mencapai sesuatu yang ia memiliki alasan untuk menilai [hal itu].”³ Kebebasan dalam arti ini kerap ia sebut sebagai kebebasan substantif atau kapabilitas.⁴ Sementara kebebasan dalam aspek proses adalah kebebasan yang memerhatikan proses memilih atau mengambil keputusan itu sendiri. Dalam menentukan sesuatu yang saya anggap baik dan bernilai, saya bebas atau tidak dipaksa. Dengan kebebasan ini “kita...ingin memastikan bahwa kita tidak dipaksa berada dalam kondisi karena paksaan yang didesakkan oleh orang lain”.⁵ Kebebasan dalam arti proses ini lebih bersifat prosedural atau formal. Pada saat seseorang mengambil keputusan, ia tidak dipaksa oleh pihak lain.⁶ Dalam pandangan Sen, dua aspek ini tidak bisa dipisahkan ketika kita menganalisis makna kebebasan. Perhatian

¹ Menurut Sen, pada umumnya, pandangan mengenai kebebasan banyak diasosiasikan dengan karya-karya para libertarian seperti Hayek, Nozick, J.M. Buchanan dan lain-lain. Namun, katanya, argumen awal mengenai pentingnya kebebasan sebenarnya juga bisa kita dapatkan dalam filsafat politik Karl Marx. Marx memahami kebebasan sebagai kondisi di mana individu dapat mengembangkan aktivitas di dalam kontrolnya. Kebebasan dalam arti ini lebih dimaknai sebagai kebebasan positif yang kerap diperlawanan dengan kebebasan negatif. Lih. Amartya Sen, *Inequality Reexamined* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 41 dalam catatan kaki no. 8.

² “...more freedom gives us more opportunity to pursue our objectives – those things that we value.” Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 228.

³ “...the actual ability of a person to achieve those things that she has reason to value.” Amartya Sen, *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004 [2002]), 10.

⁴ Dalam menjelaskan pengertian kebebasan substantif ini Sen kadang memaknainya sebagai “kebebasan untuk mencapai” (*freedom to achieve*), kadang “kemampuan untuk mencapai” (*the ability to achieve*), dan kadang juga “kebebasan untuk berfungsi” (*freedom to function*).

⁵ “We may...want to make sure that we are not being forced into some state because of constraints imposed by others.” Sen, *The Idea of Justice*, 228.

⁶ Penjelasan mengenai dua aspek kebebasan ini dapat dilihat dalam Amartya Sen, “Market and Freedoms,” *Oxford Economic Papers* 45 (1993): 522; Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, INC, 1999), 17; Sen, *Rationality and Freedom*, 10; 585; Amartya Sen, *The Idea of Justice*, 228.

pada dua aspek kebebasan ini merupakan langkah moderat di antara dua perspektif kebebasan, yakni kelompok libertarian yang terlalu menekankan prosedur dan kelompok konsekuensial yang lebih berfokus pada hasil (Sen 1999, 17).

Menurut Sen, sebagian orang lebih menekankan aspek proses, namun sebagian yang lain lebih menekankan aspek kesempatan. Misalnya, pernyataan “jangan beri saya pilihan, kamu tahu restoran ini dan cita rasa saya, kamu harus pilihkan apa yang saya inginkan”, dalam pandangan Sen, menggambarkan orang yang cenderung pada konsekuensi daripada proses memilih. Sementara pernyataan “saya tahu kamu bisa mengekspresikan pandangan saya jauh lebih baik dari yang saya bisa, namun biarkan saya bicara sendiri” menggambarkan orang yang lebih menekankan aspek proses dibanding hasil (Sen 2002, 10). Dalam hal ini, Sen menganggap aspek kesempatan dan aspek proses sebagai hal yang harus diperhatikan. Melalui dua aspek ini, ia hendak menegaskan bahwa yang dinilai bukan hanya hasil kulminasi (*culmination outcome*) tetapi juga bagaimana hasil itu diperoleh. Penekanan pada dua aspek kebebasan ini ia sebut sebagai hasil komprehensif (*comprehensive outcome*).

Penjelasan lebih lanjut mengenai dua aspek kebebasan ini juga bisa dilihat dalam ilustrasi yang pernah dibuat Sen. Ilustrasi ini menceritakan tentang tiga skenario berikut.⁷ Pada skenario 1, katakan saja, bahwa pada akhir pekan ini saya berencana untuk tinggal di rumah, tidak kemana pun dan akan menghabiskan waktu di rumah. Ketika akhir pekan tiba, saya berhasil atau memiliki kesempatan untuk merealisasikan rencana tersebut. Pada skenario 2, saya memiliki rencana yang sama dengan skenario 1, namun ketika memasuki akhir pekan, tiba-tiba ada seorang penjahat yang mengancam hidup saya dan memaksa saya untuk keluar rumah. Dengan demikian saya tidak bisa mewujudkan rencana saya dan kebebasan saya juga hilang. Dan yang terakhir, pada skenario 3, saya juga memiliki rencana yang sama dengan skenario 1, dan pada saat akhir pekan ternyata ada seorang penjahat yang memaksa saya untuk tetap tinggal di rumah dan akan menyiksa saya jika saya melanggar permintaannya.

Ilustrasi di atas dapat dibaca dalam perspektif kebebasan Sen dengan cara berikut. Pada skenario 1, saya memiliki kebebasan untuk memilih apa yang saya kehendaki (aspek proses) dan saya memiliki kesempatan untuk mewujudkan rencana itu

⁷ Ilustrasi sejenis ini dapat kita baca di beberapa tempat dalam karya Sen. Sementara yang penulis tampilkan di sini diambil dari Sen, *The Idea of Justice*, 229-230.

(aspek kesempatan). Dengan demikian, dalam skenario 1 ini saya memiliki kebebasan baik dalam aspek proses dan juga aspek kesempatan. Sementara pada skenario 2, saya kehilangan kesempatan untuk merealisasikan rencana saya dan juga kehilangan kebebasan dalam aspek proses. Dan yang terakhir pada skenario 3, saya memang dapat merealisasikan rencana saya untuk tetap tinggal di rumah, namun capaian itu berlangsung dalam paksaan yang dilakukan oleh pihak lain. Menurut Sen, bila dilihat dari perspektif “hasil kulminasi” (*culmination outcome*), kita tidak melihat masalah serius dalam skenario 3 karena saya justru memperoleh apa yang saya inginkan. Namun bila dilihat dari perspektif “hasil komprehensif” (*comprehensive outcome*) kita akan melihat persoalan kebebasan dalam skenario 3. Capaian saya untuk tinggal di rumah di akhir pekan berlangsung dalam paksaan yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga saya kehilangan kebebasan dalam arti proses (Sen 2009, 228-230). Dengan kata lain, saya memang mencapai apa yang ingin saya lakukan, tetapi dalam capaian itu saya kehilangan kebebasan untuk menentukan pilihan.⁸ Bagi Sen, sesuatu tidak cukup bila hanya dilihat pada titik akhirnya. Hal yang juga perlu dilihat adalah bagaimana sesuatu itu diperoleh. Perhatian Sen pada hasil komprehensif menjadi dasar bagi signifikansi dua aspek kebebasan yang dipahami dalam aspek proses dan kesempatan.

Dengan memerhatikan dua aspek kebebasan ini, Sen berpandangan bahwa tidak cukup jika kita memahami kebebasan hanya dalam arti proses. Mengutip T.H. Green, Sen menulis “Kita tidak hanya memaksudkan kebebasan dari pengekangan atau paksaan...ketika kita berbicara mengenai kebebasan sebagai sesuatu yang sangat dihargai, kita memaksudkannya sebagai daya positif atau kapasitas melakukan atau menikmati sesuatu yang bernilai...”⁹ Menentukan sesuatu yang kita anggap bernilai secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak luar tentu saja sangat penting bagi setiap individu, namun selain kebebasan dalam arti ini, kita juga perlu memaknai kebebasan sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang kita anggap

⁸ Skenario ketiga ini sebenarnya mau menjelaskan kasus di mana masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan hidup dengan cara yang mudah namun pada saat yang sama kebebasan mereka untuk menentukan sendiri apa yang mereka anggap baik direnggut oleh rezim otoriter. Dalam arti ini, meski mereka mendapatkan kemakmuran (sesuatu yang sangat penting bagi hidup manusia), namun mereka kehilangan elemen kehidupan lain yang juga penting, yakni kebebasan itu sendiri.

⁹ “*We do not mean merely freedom from restraint or compulsion... When we speak of freedom as something to be so highly prized, we mean a positive power or capacity of doing or enjoying something worth...*” Sen, *Rationality and Freedom*, 586-587. Tentang pandangan mengenai perlunya perhatian pada aspek kesempatan dalam memahami kebebasan bisa dilihat dalam buku yang sama, Sen, *Rationality and Freedom*, 93.

bernilai. Sen memaknai kebebasan dalam arti ini sebagai kesempatan real (*real opportunity*) untuk mencapai sesuatu atau yang kemudian ia sebut sebagai kapabilitas.

Pandangan Sen mengenai kebebasan yang dipahami dalam dua aspek ini pada dasarnya adalah satu kesatuan. Namun melalui dua aspek ini Sen ingin menekankan dua hal yang berbeda, yang satu lebih ditekankan sisi ketiadaan paksaan yang dilakukan oleh orang lain, sementara yang lain lebih ditekankan sisi kemampuan untuk mencapai. Setelah menjelaskan pengertian dua aspek kebebasan ini, pada bagian berikut akan diuraikan mengenai ide dan konteks yang melatari pentingnya dua aspek kebebasan itu. Pertama-tama akan diuraikan pandangan beberapa pemikir yang telah memengaruhi pandangan Sen mengenai kebebasan dalam arti proses. Setelah itu akan diuraikan konteks yang melatari perumusan ide kapabilitas atau kebebasan yang dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai.

2.3 Kebebasan sebagai Tidak Adanya Paksaan

Pada umumnya, ketika kita menelusuri pengertian kebebasan, kita kerap kali mendapati pandangan para libertarian di dalamnya. Orang seperti Hayek, Robert Nozick dan James Buchanan menjadi tokoh-tokoh penting dalam pandangan ini (Sen 1992, 41).¹⁰ Mereka memahami kebebasan sebagai tidak adanya paksaan. Sen kemudian memahami pengertian kebebasan ini sebagai kebebasan dalam arti proses. Dalam menjelaskan kebebasan dalam arti ini, Sen kerap mengutip pandangan John Stuart Mill dan Isaiah Berlin. Pandangan mereka mengenai kebebasan kerap dirujuk ketika Sen menjelaskan pengertian kebebasan dalam aspek proses. Gagasan tentang perlunya perlindungan ruang pribadi (*protected sphere*) yang kerap disinggung Sen, misalnya, adalah ide yang banyak dipengaruhi Mill dan Hayek.¹¹ Untuk itu, dalam uraian mengenai ide-ide yang menjadi fondasi kebebasan dalam aspek proses, kita perlu melihat pandangan libertarian yang kerap dirujuk. Pandangan yang disinggung hanya terbatas pada ide yang masih terkait dengan konsep kebebasan dalam aspek proses yang diajukan Sen.

¹⁰ Selain mereka, Sen kadang juga menyebut nama seperti Robert Sugden dan Frank Knight. Nama-nama ini dapat dilihat dalam Sen, *Rationality and Freedom*, 93.

¹¹ Menurut Sen, pandangan kebebasan dua tokoh ini bila dilihat lebih detail akan ada beberapa perbedaan. Amartya Sen, "Liberty, Unanimity and Rights," *Economica* 43 (1976b): 218.

Dalam perumusan pilihan sosial (*social choice*) atau putusan kolektif (*collective decision*),¹² Sen kerap menggarisbawahi pentingnya jaminan perlindungan wilayah pribadi (*personal domain*) atau yang juga kerap disebut sebagai “area yang dilindungi” (*protected sphere*). Gagasan ini menurutnya banyak merujuk pada pandangan Mill dan Hayek.¹³ Bagi Sen, jaminan perlindungan wilayah pribadi ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam perumusan pilihan sosial. Dalam sebuah putusan kolektif bisa saja terkandung tindakan yang berpotensi menyerang wilayah pribadi seseorang. Hak seseorang untuk melakukan meditasi, misalnya, harus dilindungi dari tindakan yang dapat mengganggu hak tersebut (Sen 2004, 413-414). Dalam pandangannya, hak-hak dasar sejenis ini menjadi area yang wajib dilindungi dan dijamin bagi setiap orang. Penegasan mengenai pentingnya jaminan bagi setiap orang untuk memiliki area yang dilindungi (*protected sphere*) banyak diinspirasi oleh Mill dan Hayek.¹⁴

Selain itu, pada saat menjelaskan konsep kebebasan dalam aspek proses, Sen juga pernah menghubungkan aspek kebebasan ini dengan konsep kebebasan negatif yang diajukan Berlin. Sen memahami konsep Berlin mengenai kebebasan negatif sebagai aspek permisif dari kebebasan untuk bertindak. Di dalamnya terkandung otonomi untuk memutuskan sesuatu dan juga kekebalan (imunitas) dari campur tangan yang dilakukan oleh pihak luar. Dalam pandangan Sen, gagasan kebebasan negatif yang diajukan Berlin ini memiliki kesinambungan dengan konsep kebebasan dalam aspek proses (Sen 2002, 586). Dalam *Food and Freedom* (1987), kita bisa melihat pengaruh Berlin terhadap Sen ketika mengklasifikasi konsep kebebasan.¹⁵ Karenanya untuk

¹² Penulis akan menjelaskan masalah teori pilihan sosial dan kebebasan pada Bab IV. Istilah pilihan sosial (*social choice*) dan putusan kolektif (*collective decision*) adalah dua istilah yang dapat digunakan secara bergantian. Namun sebagai teori, para ahli lebih menyebutnya sebagai “teori pilihan sosial” (*social choice theory*), bukan teori putusan sosial.

¹³ Penegasan ini dapat kita lihat pada saat Sen menjelaskan rumusan pilihan sosial yang didasarkan pada perspektif kebebasan. Uraian lebih lanjut bisa dilihat pada catatan kaki nomor 38 dalam Sen, *Rationality and Freedom*, 282.

¹⁴ Menurut Sen, meski Mill banyak menekankan aspek kebebasan dalam aspek proses, ia sebenarnya juga memberikan perhatian pada aspek kesempatan aktual dalam konsep kebebasannya. Lih. Sen, *Rationality and Freedom*, 10 pada catatan kaki nomor 10. Hal yang sama juga ia lihat pada pandangan Friedman mengenai kebebasan. Meski ia menempatkan kebebasan untuk memilih (*free to choose*) atau kebebasan dalam aspek proses sebagai sesuatu yang utama, namun Friedman sendiri tetap memberikan perhatian kebebasan dalam aspek kesempatan (*opportunity*). Lih. Sen, *Rationality and Freedom*, 11 pada catatan kaki nomor 12. Pandangan Friedman tidak diuraikan lebih jauh karena Sen lebih banyak merujuk konsep area yang dilindungi (*protected sphere*) yang diajukan Mill dan Hayek.

¹⁵ Dalam artikel yang ia sampaikan dalam *Sir John Crawford Memorial Lecture* pada 1987 itu, Sen mengklasifikasi kebebasan menjadi empat. Yang pertama adalah kebebasan instrumental negatif; yang kedua kebebasan intrinsik negatif; yang ketiga kebebasan instrumental positif; dan yang terakhir

melihat ide-ide yang menjadi dasar perumusan kebebasannya, khususnya dalam aspek proses, pada bagian ini akan dibahas konsep kebebasan Mill, Hayek dan juga Berlin. Lewat tiga pemikir ini, kita akan melihat kesinambungannya dengan konsep kebebasan dalam aspek proses yang dipahami oleh Amartya Sen.

a. “Perlindungan Diri” Mill

Dalam *On Liberty*, Mill menulis bahwa tema utama kebebasan yang ia ajukan tidak membahas masalah kebebasan kehendak (*liberty of the will*), melainkan soal kebebasan sipil atau kebebasan sosial. Ia memahami kebebasan sipil sebagai “hakikat dan batas-batas kekuasaan yang dapat dijalankan secara sah oleh masyarakat terhadap individu.”¹⁶ Dalam pandangan Mill, sepanjang sejarah kita selalu menyaksikan tegangan antara kebebasan dan otoritas. Karenanya ia memahami kebebasan sebagai “perlindungan melawan tindak kesewenang-wenangan para penguasa politik.”¹⁷ Kekuasaan merupakan sesuatu yang niscaya dalam politik untuk melindungi kelompok yang lemah, namun kekuasaan juga bisa berbahaya karena kerap dijadikan alat untuk melawan atau merusak kebebasan individu. Tulis Mill:

Untuk mencegah anggota-anggota masyarakat yang lebih lemah menjadi mangsa burung nasar¹⁸ yang tak terbilang banyaknya, perlulah ada seekor burung nasar pemangsa yang lebih kuat dari yang lain yang diberi tugas untuk menekan mereka. Namun karena raja burung nasar itu tidak kurang ganasnya dalam memangsa kawanannya burung serta binatang kecil lainnya, maka sangat perlu untuk terus-menerus mempertahankan diri dari ancaman paruh dan cakarannya. Karena itu tujuan para patriot adalah membuat batasan kekuasaan di mana penguasa harus mematuhi dalam menjalankan kekuasaannya terhadap masyarakat.¹⁹

Dengan penegasan di atas, Mill memahami kebebasan sebagai pembatasan kekuasaan yang dimiliki penguasa dalam berhadapan dengan masyarakat. Menurutnya

kebebasan intrinsik positif. Dari dua klasifikasi Berlin, Sen menambahkan kategori instrumental dan intrinsik. Yang ia maksud dengan instrumental, kebebasan dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara yang dimaksud dengan intrinsik, kebebasan dipahami sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya. Lih. Amartya Sen, *Food and Freedom* (Washington, D.C.: Sir John Crawford Memorial Lecture, 1987), 2-3.

¹⁶ “...the nature and limits of the power which can be legitimately exercised by society over the individual.” John Stuart Mill, *On Liberty* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc, 1978), 1.

¹⁷ “...protection against the tyranny of the political rulers” Mill, *On Liberty*, 1.

¹⁸ Burung nasar adalah burung pemakan bangkai. Ia juga kadang disebut sebagai burung hering atau burung bangkai.

¹⁹ “To prevent the weaker members of the community from being preyed upon by innumerable vultures, it was needful that there should be an animal of prey stronger than the rest, commissioned to keep them down. But as the king of the vultures would be no less bent upon preying upon the flock than any of the minor harpies, it was indispensable to be in a perpetual attitude of defence against his beak and claws. The aim, therefore, of patriots, was to set limits to the power which the ruler should be suffered to exercise over the community.” Mill, *On Liberty*, 2.

pembatasan kekuasaan yang mengancam kebebasan individu itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui pengakuan akan kekebalan (imunitas) individu yang dikenal sebagai kebebasan politik atau hak. Penguasa tidak boleh melanggar batas kekebalan itu. Dan yang kedua dengan memantapkan sistem kontrol yang sah. Melalui sistem ini, menurutnya, legitimasi negara harus selalu didasarkan pada persetujuan warga atau mereka yang diwakili (Mill 1978, 2). Dengan pembatasan, konsekuensinya kekuasaan negara atau penguasa tidaklah tanpa batas, karena yang pertama mereka harus mengakui kekebalan yang ada pada setiap warga, dan yang kedua kekuasaan yang dimiliki selalu ada dalam kontrol dan persetujuan dari mereka yang dikuasai. Pengakuan akan adanya kekebalan dan keharusan adanya persetujuan dalam kekuasaan yang dibangun oleh Mill adalah upaya untuk menjamin agar kebebasan individu tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh kekuasaan politik.

Penegasan mengenai kebebasan individu dalam arti ini bisa kita lihat dalam tegangan antara kebebasan dan pilihan sosial (*liberty and social choice*). Sen melihat bahwa pilihan sosial atau putusan kolektif memiliki potensi mengurangi kebebasan atau hak dasar seorang individu. Menurutnya, keputusan kolektif yang mengatasnamakan suara terbanyak, misalnya, bisa saja melangkahi kebebasan dan hak anggota yang seharusnya dilindungi. Dalam perumusan pilihan sosial yang akan diuraikan pada Bab IV, Sen menggarisbawahi pentingnya perhatian pada kebebasan di dalam perumusan pilihan sosial. Dalam membuat putusan kolektif, kita harus memerhatikan hal yang tidak bisa dilangkahi dari seorang individu. Sen melihat teori pilihan sosial tradisional cenderung mempertimbangkan nilai manfaat dan kesejahteraan, seraya mengabaikan hak dan kebebasan dasar sebagian anggota yang lain. Tuntutan untuk memberikan perhatian pada aspek kebebasan dimaksudkan agar pilihan sosial dapat bersinambung dengan upaya perlindungan kebebasan anggota yang ada di dalamnya.

Dalam pandangan Mill, ancaman terhadap kebebasan individu tidak hanya datang dari kekuasaan politik yang sewenang-wenang, tetapi juga dari keyakinan umum dan dari kewajiban yang datang dari masyarakat. Agama dan juga komunitas bisa menjadi sumber ketidakbebasan bagi individu yang ingin berpikir dan bertindak berbeda (Mill 1978, 4). Karenanya kita perlu membuat batasan bagi kekuatan (opini) kolektif dalam berhadapan dengan kebebasan individu. Kebebasan individu tidak dapat dilanggar oleh tirani kolektif dan juga kesewenang-wenangan kekuasaan politik (Mill

1978, 5). Dengan demikian, pada intinya gagasan mengenai kebebasan individu yang diajukan Mill ini menolak segala bentuk paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik yang datang dari institusi negara, agama, masyarakat dan juga dari individu yang lain. Dengan demikian, kekuasaan atau kekuatan yang harus dibatasi bukan hanya kekuasaan politik tetapi juga tirani sosial. Mill menyebut proses perlindungan diri ini sebagai “penyesuaian antara kebebasan individu dan kontrol sosial.”²⁰

Pandangan Mill mengenai penyesuaian atau keseimbangan antara kebebasan individu dan kontrol sosial bisa dilihat sebagai gagasan yang ada di belakang ide integrasi kebebasan dalam pilihan sosial yang diajukan Sen. Dalam perumusan pilihan sosial tradisional, hal yang ditekankan biasanya adalah suara terbanyak dan aspek yang diperhatikan adalah aspek manfaat (utilitas). Putusan sosial yang dihasilkan kerap kali mengabaikan atau mengurangi kebebasan dan hak para individu yang ada di dalamnya. Karenanya, Sen kemudian mencoba memodifikasi model pilihan sosial yang ada menjadi pilihan sosial yang pro kebebasan. Pilihan sosial yang sudah mengintegrasikan nilai kebebasan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang bebas dan juga memerhatikan nilai-nilai kebebasan. Dengan kata lain, perumusan pilihan sosial harus memerhatikan aspek prosedur dan juga substansi yang akan diputuskan.

Pandangan Mill mengenai perlindungan diri (*self-protection*) tampaknya mendasari gagasan Sen ini. Menurut Mill, prinsip perlindungan diri menjadi prinsip utama di dalam kebebasan. Ia mengidentifikasi tiga area kebebasan individu yang harus dilindungi. Yang pertama adalah kebebasan yang ada di dalam kesadaran diri seperti suara hati, keyakinan, pikiran, moralitas dan agama serta pengetahuan. Yang kedua adalah kebebasan untuk menentukan rencana yang sesuai dengan karakter seorang individu. Melalui kebebasan ini, kita dapat melakukan apa yang kita suka sejauh tidak melukai pihak lain dan akan menerima segala konsekuensi yang mungkin muncul, tanpa ada halangan dari pihak lain meski pihak luar menganggap tindakan yang kita ambil sebagai tindakan yang bodoh atau salah. Kebebasan ini harus dijamin sejauh kita tidak mengganggu atau melukai pihak atau orang lain. Yang ketiga, kebebasan untuk berserikat sejauh tidak ditujukan untuk melukai pihak lain (Mill 1978, 11-12). Inilah

²⁰ “...the fitting adjustment between individual independence and social control” Mill, *On Liberty*, 5.

beberapa pandangan Mill yang turut menjadi dasar bagi perumusan kebebasan dalam aspek proses yang dipahami Sen.²¹

b. “Area yang Dilindungi” Hayek

Tokoh yang juga kerap disinggung oleh Sen dalam uraian mengenai kebebasan adalah Friedrich Hayek. Hayek, menulis beberapa karya, di antaranya adalah *The Constitution of Liberty* (1960). Salah satu konsep yang kerap dirujuk oleh Sen adalah konsep area yang dilindungi (*protected sphere*). Konsep ini masih berkaitan dengan pandangan Mill mengenai perlindungan diri (*self-protection*). Dari keduanya, Sen mencoba mengambil konsep tentang perlindungan area pribadi setiap orang yang harus dijamin.²² Menurut Sen, dalam setiap pribadi terdapat area yang dilindungi (*person’s protected sphere*) yang tidak bisa dilangkahi (Sen 1976, 218). Dalam uraian ini akan ditunjukkan bagaimana Hayek membangun konsep kebebasan sebagai area yang dilindungi (*protected sphere*).

Dalam *The Constitution of Liberty* (1960), Hayek memaknai kebebasan sebagai “kondisi di mana seseorang tidak tunduk pada paksaan oleh kehendak sewenang-wenang orang lain.”²³ Hayek menyebut kebebasan dalam arti ini sebagai kebebasan pribadi atau individual (Hayek 1960, 11). Pengertian ini menjadi makna dasar kebebasan yang dipahami oleh Hayek. Kondisi bebas berarti bahwa seseorang bisa melakukan apa yang direncanakan dan apa yang diputuskannya sendiri secara bebas. Lawan dari kondisi ini adalah kondisi di mana seseorang tunduk pada kehendak orang lain yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam pengertian kebebasan ini terdapat dua konsep kunci. Yang pertama adalah ‘tidak adanya paksaan’ (*absence of coercion*).

²¹ Paham kebebasan Mill sendiri dapat disimpulkan sebagai kebebasan individu untuk mencapai apa yang ia anggap baik dengan caranya sendiri. Pandangan ini menunjukkan bahwa paham kebebasan Mill memiliki hubungan erat dengan paham mengenai individualitas. Tanpa kebebasan individu, seseorang akan kehilangan individualitasnya karena ia tidak bisa meyakini apa yang ia anggap baik dan tidak bisa menentukan model hidup yang ia inginkan. Argumen Mill mengenai kebebasan berpikir dan berpendapat didasari pada prinsip pencarian kebenaran. Menurutnya, jika pandangan yang dilarang itu benar, maka kita tidak memiliki kesempatan memperbaiki pandangan yang keliru. Namun jika memang pandangan yang dilarang itu salah, kita tidak bisa menunjukkan bahwa pandangan yang selama ini dianut sudah benar. C.L. Ten, “Mill’s *On Liberty*: Introduction,” dalam *Mill’s On Liberty*, ed. C.L. Ten (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 2-3.

²² Meski keduanya memiliki kesamaan pandangan, menurut Sen keduanya juga memiliki perbedaan dalam memahami kebebasan. Sen tidak menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan ini. Sen, “Liberty, Unanimity and Rights,” 218.

²³ “*The state in which a man is not subject to coercion by the arbitrary will of another or others*” Friedrich A. Hayek, *The Constitution of Liberty*, (Chicago: The University of Chicago Press, [1960] 1978), 11.

Jika seseorang melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh dan mengetahui konsekuensi yang harus ditanggung, maka tuntutan untuk memenuhi tanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan tidak bisa disebut sebagai paksaan. Misalnya adalah keharusan untuk membayar setelah makan di sebuah restoran. Keharusan itu tentu saja tidak bisa dimaknai sebagai paksaan (*coercion*). Konsep kunci yang kedua, paksaan itu dilakukan oleh manusia atau *human agent*. Dalam pandangan Hayek, “konsep kebebasan hanya merujuk pada hubungan manusia dengan manusia yang lain.”²⁴ Dengan batasan ini, kondisi ketidakbebasan yang muncul karena kondisi alam, misalnya, tidak memiliki relevansi langsung bagi konsep kebebasan dalam arti ini (Hayek 1960, 12-13).

Dampak dari pengertian paksaan (*coercion*) yang harus mengandaikan pelaku manusia (*human agent*) adalah tidak relevannya rintangan yang berasal bukan dari manusia bagi konsep ketidakbebasan. Hayek memberikan sebuah ilustrasi tentang seorang pendaki tebing yang tengah terjebak dan keselamatannya terancam. Ketika pendaki itu menjumpai celah yang bisa menyelamatkan hidupnya, kita biasanya menyebut kondisi itu – di mana ia akhirnya bisa lepas dari situasi sulit itu – sebagai bebas (*free*). Jika sebaliknya yang terjadi, ia terjebak dan tidak menemukan jalan keluar, kita akan menyebut kondisi itu sebagai tidak bebas (*unfree*). Bagi Hayek, adanya pilihan yang memberinya kesempatan untuk menyelamatkan diri tentu saja penting, namun kondisi ini tidak memiliki relevansi dengan konsep kebebasan individual yang ia ajukan. Masalah kebebasan bukan soal adanya pilihan atau kesempatan, tetapi pada sejauh mana kehendak seseorang tidak diintervensi oleh orang lain (*human agent*) sehingga ia tidak bisa melakukan hal yang dikehendaki (Hayek 1960, 12-13). Inilah pengertian kondisi bebas sebagai tidak adanya paksaan sewenang-wenang oleh pihak lain (*human agent*) yang dipahami Hayek.²⁵

²⁴ “...‘freedom’ refers solely to a relation of men to other men,” Hayek, *The Constitution of Liberty*, 12.

²⁵ Menurut Hayek, pengertian ini kerap ‘dipelintir’ menjadi pengertian yang sangat berbeda dari makna dasarnya. Salah satu pemaknaan yang tidak sesuai dengan makna dasarnya adalah pemaknaan kebebasan sebagai daya (*power*). Kebebasan sebagai daya mengandaikan adanya kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu (*the physical ability to do what I want*). Baginya, kebebasan dalam arti ini tidak lepas dari ilusi orang-orang yang memiliki hasrat untuk terbang atau mengubah lingkungannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurutnya, konsep kebebasan yang pada umumnya dibangun oleh kaum sosialis ini memiliki bahaya besar, karena sekali kita menerima cara pandang ini maka ada kemungkinan bagi mereka untuk menggunakan kata kebebasan untuk sesuatu yang justru mengancam kebebasan individual. Ia mencoba menunjukkan asumsi atau pengandaian yang berbeda antara kebebasan individual dan

Dengan demikian, definisi Hayek mengenai kebebasan bersandar pada sejauh mana konsep paksaan dipahami. Dalam hal ini, ia memahami paksaan sebagai “kontrol atas lingkungan atau kondisi seseorang oleh orang lain sehingga... ia dipaksa untuk bertindak tidak sesuai dengan rencananya sendiri, melainkan melayani tujuan orang lain.”²⁶ Dengan kata lain, “Paksaan terjadi ketika tindakan seseorang dibuat untuk melayani kehendak orang lain, bukan [melayani] tujuannya sendiri...”²⁷ Alih-alih mencapai tujuannya, orang yang dipaksa itu justru memuaskan tujuan orang lain. Dengan kata lain, orang yang dipaksa adalah orang yang tidak bisa menggunakan pikiran dan pengetahuannya untuk tujuan dan keyakinannya sendiri. Baginya, paksaan menjadi jahat persis karena tindakan tersebut mengabaikan hakikat seseorang sebagai manusia yang dapat berpikir dan memiliki nilai, dan karena tindakan itu, ia hanya menjadi alat bagi tujuan orang lain (Hayek 1960, 20-21).

Menurut Hayek, karena paksaan adalah kontrol atas tindakan individu yang dilakukan oleh orang lain, hal itu dapat dicegah hanya dengan membuat individu

kebebasan dalam arti daya (*power*). Menurut Hayek, kata kunci yang ada dalam kebebasan individu adalah paksaan yang dilakukan oleh orang lain secara sewenang-wenang dan sengaja. Sementara kata kunci dalam kebebasan sebagai daya ada di dalam konsep keterkekangan (*restraint*). Pergeseran konsep kebebasan individu ke kebebasan dalam arti daya/kemampuan (*power*) ditopang oleh pandangan yang menjadikan masalah keterkekangan sebagai masalah kebebasan. Melalui pandangan ini, kebebasan dipahami sebagai tidak adanya kondisi yang membuat seseorang tidak bisa melakukan sesuatu yang ia inginkan karena sebab apapun, apakah itu disebabkan oleh manusia yang lain, alam atau kondisi fisiknya sendiri. Dengan pergeseran ini, kebebasan kemudian dipahami sebagai tidak adanya kesukaran untuk merealisasikan keinginan kita (*the absence of obstacles to the realization of our desires*) atau secara umum sebagai ketiadaan kesukaran eksternal (*the absence of external impediment*). Dengan pengertian ini, kebebasan lebih dipahami sebagai daya efektif untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan (*effective power to whatever we want*). Dalam pandangan Hayek, paham kebebasan dalam arti daya (*power*) masuk ke lingkaran liberal yang dominan di Amerika. Mereka memaknai kebebasan sebagai daya efektif untuk melakukan sesuatu. John Dewey dan J.R. Commons adalah beberapa di antaranya. Menurutnya, pemaknaan kebebasan sebagai daya (*power*) memiliki dampak serius karena pemaknaan ini berdampak pada identifikasi kebebasan dengan kesejahteraan (*wealth*). Dampak lanjutan dari pengertian kebebasan ini adalah tuntutan redistribusi kesejahteraan atas nama kebebasan. Meski kebebasan dan kesejahteraan merupakan dua hal penting, namun bagi Hayek keduanya sangat berbeda. Menghubungkan kebebasan dengan kesejahteraan merupakan bagian dari jebakan kata (*verbal trap*) yang berimplikasi pada kesimpulan yang sangat berbeda. Hayek, *The Constitution of Liberty*, 16-19. Menurut penulis, dampak dari pandangan Hayek ini tentu adalah penolakan atas konsep kapabilitas yang diajukan Sen. Sebagaimana yang akan kita lihat, Sen memahami kebebasan juga sebagai kapabilitas, yakni adanya kesempatan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dalam memahami kapabilitas, Sen tidak hanya melihat tindakan manusia (*human agent*) sebagai sumber ketidakbebasan. Ia juga memasukkan hambatan yang disebabkan oleh kondisi alam, kondisi sosial dan ketidakberdayaan fisik sebagai sumber ketidakbebasan.

²⁶ “By ‘coercion’ we mean such control of the environment or circumstance of a person by another that...he is forced to act not according to a coherent plan of his own but to serve the ends of another.” Hayek, *The Constitution of Liberty*, 20-21.

²⁷ “Coercion occurs when one man’s actions are made to serve another man’s will, not for his own...” Hayek, *The Constitution of Liberty*, 133.

mampu mengamankan ruang pribadinya (*privat sphere*) dalam menghadapi campur tangan (*interference*) pihak lain. Kemampuan itu dimungkinkan oleh jaminan dari otoritas yang memiliki kekuasaan. Baginya, paksaan merupakan campur tangan terhadap harapan atau hak yang dimiliki seseorang. Jika kita tidak mengakui adanya area yang dilindungi ini (*protected sphere*), paksaan bukan hanya akan ada, tetapi juga bisa meluas. Dalam penilaiannya, campur tangan yang sewenang-wenang dapat diidentifikasi dengan jelas pada masyarakat yang mengerti dan mengakui adanya area yang dilindungi pada setiap pribadi. Perlindungan ruang pribadi ini dapat dilakukan melalui jaminan hukum yang membuat masyarakat mampu menentukan isi dari area yang dilindungi dan juga bisa membedakan area miliknya dan bukan miliknya (Hayek 1960, 139-140).

Pandangan kebebasan Hayek yang diperhatikan Sen tampaknya lebih terarah pada konsep “area yang dilindungi” (*protected sphere*). Sementara penjelasan Hayek yang cukup ketat mengenai makna ketidakbebasan sebagai paksaan yang dilakukan oleh orang lain akan sedikit berbeda dari pemahaman Sen mengenai ketidakbebasan. Perbedaan itu akan kita lihat dalam uraiannya mengenai kapabilitas. Dalam pengertian yang lebih luas, Sen memahami kebebasan untuk mencapai (*freedom to achieve*) sebagai kemampuan untuk meraih sesuatu. Ketidakbebasan untuk mencapai sesuatu tidak hanya disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh manusia yang lain. Kecacatan yang ada pada tubuh seseorang, alam yang keras dan rentan terjadi bencana dapat dipahami sebagai sumber ketidakbebasan. Uraian mengenai hal ini akan dijelaskan lebih jauh dalam konsep Sen mengenai kapabilitas.

c. “Kebebasan Negatif” Berlin

Ide yang juga perlu dilihat sebagai inspirasi bagi pandangan Sen mengenai kebebasan dalam aspek proses adalah konsep Isaiah Berlin mengenai kebebasan negatif. Dalam “Two Concepts of Liberty,” Berlin menguraikan dua konsep kebebasan yang menurutnya terbagi menjadi kebebasan negatif dan kebebasan positif. Bila dilihat dari permukaan, dua konsep kebebasan ini memang agak mirip. Namun jika ditelusuri lebih jauh, maka akan muncul perbedaan antara keduanya. Kebebasan dalam arti negatif menegaskan tentang tidak adanya paksaan yang dilakukan oleh pihak lain. Konsep kebebasan ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan “area yang subjek – seseorang atau

kelompok – dibiarkan atau harus dibiarkan melakukan atau menjadi sesuatu yang ia mampu tanpa campur tangan orang lain.”²⁸ Sementara kebebasan positif menegaskan soal sumber kontrol dalam memilih dan bertindak. Konsep ini dirumuskan dalam pertanyaan “apa atau siapa yang menjadi sumber kontrol atau campur tangan yang dapat menentukan seseorang untuk melakukan atau menjadi ini dan bukan itu.”²⁹ Pertanyaan dalam konsep kebebasan yang pertama terkait dengan ketiadaan paksaan yang datang dari luar individu, sementara pertanyaan yang kedua terkait dengan penentu yang mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu.³⁰

Berlin menyebut kebebasan negatif sebagai kebebasan politik. Secara normal kita menyebut diri kita bebas jika tidak ada orang lain yang melakukan campur tangan terhadap aktivitas kita. Jika saya tidak bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan karena ada halangan atau campur tangan dari orang lain, saya akan mengatakan bahwa saya tidak bebas. Begitu juga jika saya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak saya sukai, maka saya akan menyebut diri saya dipaksa atau diperbudak oleh orang lain (Berlin 2002, 169). Melalui konsep mengenai paksaan (*coercion*), Berlin membedakan antara kondisi ketidakmampuan (*inability*) yang diakibatkan oleh campur tangan yang datang dari pihak atau orang lain dan ketidakmampuan yang ada di dalam diri subjek. Jika saya tidak bisa melompat sepuluh kaki di udara, atau tidak bisa membaca karena buta, ketidakmampuan semacam ini tidak tepat disebut sebagai paksaan.³¹ Kita juga

²⁸ “*what is the area within which the subject – a person or group of persons – is or should be left to do or be what he is able to do or be, without interference by other persons?*” Isaiah Berlin, *Liberty*, (Oxford: Oxford University Press, [1969] 2002), 169.

²⁹ “*what, or who, is the source of control or interference that can determine someone to do, or be, this rather than that?*” Berlin, *Liberty*, 169.

³⁰ Dalam pandangan Sen, jika seseorang tidak bebas dari kelaparan dan kekurangan sarana untuk mendapatkan makanan secara layak, kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki kebebasan positif. Pada saat yang sama, ia bisa saja memiliki kebebasan negatif dalam arti bahwa ketidakbebasan itu bukan karena campur tangan yang dilakukan oleh orang lain. Lih. Sen, *Food and Freedom*, 2-3.

³¹ Franz Magnis-Suseno juga menyinggung hubungan konsep kebebasan, paksaan dan ketidakmampuan. Ia memaknai kebebasan bukan hanya sekadar tidak adanya paksaan yang datang dari luar, tetapi lebih dari itu, kebebasan berarti bahwa kita mampu menentukan sendiri. Kebebasan dalam arti yang pertama disebut sebagai kebebasan sosial dan kedua disebut sebagai kebebasan eksistensial. Pengertian kebebasan eksistensial berarti bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri. Kebebasan ini bermakna positif dalam arti bebas untuk melakukan A atau B dan seterusnya. Yang dimaksud dengan kebebasan menentukan sendiri adalah kebebasan menentukan tindakan mana yang akan diambil. Pengertian tindakan yang dimaksud adalah aktivitas yang sifatnya disengaja, bukan sesuatu yang berjalan secara otomatis. Misalnya, apakah hari ini saya berangkat ke kantor atau tidak, bukan apakah hari ini saya bernafas atau tidak. Kebebasan seseorang untuk menentukan tindakan dibatasi oleh batas-batas kemampuannya sebagai manusia. Misalnya jika manusia tidak dapat terbang bukan berarti bahwa ia tidak bebas, tetapi kemampuan untuk terbang adalah tindakan yang ada di luar jangkauan

tidak bisa mengatakan ketidakmampuan ini sebagai kurangnya kebebasan politik. Kata Berlin, “Anda kekurangan kebebasan politik hanya jika Anda dicegah untuk mencapai satu tujuan oleh orang lain.”³² Dengan demikian, rintangan yang muncul dari bukan manusia atau tindakan yang tidak didasari oleh unsur kesengajaan, tidak dapat disebut sebagai pembatasan kebebasan politik. Masalah ketidakmampuan (*incapacity*) untuk mencapai tujuan tidak menjadi bagian dari masalah kebebasan politik (Berlin 2002, 169).³³ Orang yang tidak bisa berangkat ke tempat yang ia inginkan karena tiba-tiba banjir melanda rumah dan jalan yang akan ia lalui bukan bagian dari masalah kebebasan politik yang dimaksud oleh Berlin.

Menurut Berlin, para libertarian seperti John Locke dan John Stuart Mill di Inggris atau Benjamin Constant dan Alexis de Tocqueville di Perancis, berpandangan bahwa harus ada area minimum dari kebebasan pribadi yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Jika hal itu dilanggar maka seorang individu akan mendapati dirinya berada dalam area yang sangat sempit untuk mengembangkan kemampuan alamiahnya, bahkan dalam batas yang minimal. Karena kondisi ini, seseorang tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dalam konteks kehidupan publik, tuntutan kebebasan di atas akan selalu mengalami ketegangan dengan otoritas publik. Dalam pandangan Berlin, manusia secara luas memang saling bergantung (*interdependent*). Tidak ada manusia yang seratus persen bersifat privat sebagaimana juga tidak ada kehidupan pribadi seseorang yang dapat dirintangi seratus persen oleh sesuatu yang berasal dari luar. Hal yang perlu

manusia. Yang membuat manusia tidak bebas adalah karena tindakan yang seharusnya dapat dilakukan namun tidak bisa dilakukan karena dikekang oleh kekuatan yang lebih besar di luar dirinya. Kita menyebut itu sebagai paksaan. Paksaan berarti bahwa orang lain memakai kekuatan fisik yang lebih besar dari yang kita miliki untuk menaklukkan kita. Kita dicegah untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Dengan demikian paksaan berarti bahwa tubuh kita digunakan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Sementara yang dimaksud dengan kebebasan sosial adalah kebebasan yang terkait dengan orang lain. Kebebasan dalam arti ini memiliki makna negatif dalam arti bahwa kebebasan dimaknai sebagai tidak adanya paksaan yang datang dari orang lain secara sengaja. Dengan pengertian ini, sesuatu dapat disebut sebagai pengekangan kebebasan jika ada paksaan yang datang dari orang lain dan dilakukan secara sengaja. Tindakan yang dilakukan bukan oleh manusia atau dilakukan tanpa sengaja bukan bagian dari pengekangan kebebasan. Misalnya karena banjir, kita tidak bisa kemana-mana. Kondisi ini tidak bisa kita sebut sebagai pengekangan kebebasan. Begitu juga jika seorang penjaga perpustakaan tanpa sengaja mengunci kita di dalam ruangan baca sehingga kita tidak bisa keluar, tindakan itu bukan bagian dari pengekangan kebebasan karena penguncian itu dilakukan tanpa sengaja. Lih. Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), 22-28.

³² “*You lack political liberty or freedom only if you are prevented from attaining a goal by human beings.*” Berlin, *Liberty*, 169.

³³ Konsekuensi dari pandangan ini, jika seseorang tidak mampu membeli sepotong roti karena tidak memiliki uang bukanlah bagian dari masalah kebebasan politik. Kriteria paksaan yang ada di dalam kebebasan politik adalah paksaan yang dilakukan secara sengaja (*by intention*) oleh seorang pelaku (*agent*). Lih. Berlin, *Liberty*, 169-170.

ditegaskan dalam tegangan ini adalah tentang garis batas (*frontier*) antara wilayah kehidupan pribadi (*private*) dan otoritas publik (Berlin 2002, 171).

Berlin mencoba menunjukkan dilema antara kebebasan individu dan kebebasan individu yang lain. Kebebasan satu kelompok individu kerap kali harus dikurangi untuk melindungi kebebasan kelompok lain. Hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan sosial dan juga ekonomi. Misalnya jika seseorang berada dalam kondisi miskin, upaya kita untuk mengurangi masalah kemiskinannya akan mengurangi kebebasan yang kita miliki. Kata Berlin, “untuk menghindari mencoloknya ketidaksetaraan dan kesengsaraan yang luas, saya siap mengorbankan sebagian atau semua kebebasan saya”.³⁴ Jika kebebasan yang kita nikmati berdiri di atas kesengsaraan pihak lain, maka sistem yang mempromosikan kondisi ini akan kita sebut sebagai tidak adil atau tidak bermoral. Namun jika saya mengorbankan kebebasan yang saya miliki untuk mengurangi kondisi ketidaksetaraan, maka kebebasan bisa hilang atau berkurang. Masalah pelik yang diajukan Berlin, jika kita memahami kebebasan sebagai nilai yang tidak bisa disentuh, maka tidak ada prinsip yang bisa membenarkan tindakan yang dapat mengurangi kebebasan seseorang, meski itu untuk tujuan kesetaraan (Berlin 2002, 172-173).³⁵

Namun, menurut Berlin, beberapa filsuf seperti John Locke dan Adam Smith cukup optimistis dalam melihat adanya kemungkinan harmonisasi antar-kepentingan. Dalam tingkat tertentu, Mill juga percaya pada kemungkinan harmoni antara kontrol sosial dan kehidupan pribadi. Sementara Thomas Hobbes justru melihat institusi publik seperti negara sebagai sebuah keniscayaan untuk melindungi hidup manusia itu sendiri. Ia berpendapat bahwa untuk melindungi manusia dari kondisi saling membunuh, kita

³⁴ “To avoid glaring inequality or widespread misery I am ready to sacrifice some, or all, of my freedom.” Berlin, *Liberty*, 172.

³⁵ Dalam pandangan penulis, salah satu contoh yang tepat untuk menjelaskan kasus ini dapat kita lihat pada penolakan Robert Nozick atas pajak. Nozick dikenal sebagai seorang libertarian yang memahami kebebasan sebagai area yang tidak bisa disentuh bahkan meski untuk motif kesetaraan sosial sekalipun. Dalam pandangannya, hak milik pribadi adalah hak yang tidak bisa dikurangi oleh alasan apapun, termasuk untuk tujuan mengambil pajak yang dilakukan oleh negara. Konsep hak milik merupakan penegasan atas konsep kepemilikan diri (*self ownership*). Bukti bahwa seseorang memiliki dirinya dapat kita lihat pada sejauh mana ia berhak atas hak miliknya. Pandangan Nozick mengenai hal ini berakar pada pandangan John Locke mengenai kebebasan dan kepemilikan pribadi (*privat ownership*). Mengambil hak milik pribadi tanpa seizin pemiliknya, meski untuk tujuan kesetaraan, akan dianggap sebagai perampasan. Atas nama kebebasan, ia menolak proyek kesetaraan termasuk di dalamnya kebijakan mengenai pajak. Lih Robert Nozick, “The Entitlement Theory of Justice” dalam *Contemporary Political Theory: A Reader*, ed. Colin Farelly (London: Sage Publication, 2004), 61-67. Lih juga dalam Colin Farelly, *Introduction to Contemporary Political Theory* (London: Sage Publication, 2004), 33-52.

perlu membentuk satu institusi penjaga yang kuat.³⁶ Dengan membentuk institusi publik yang kuat, kebebasan individu memang akan berkurang. Namun demikian, keniscayaan ini juga mengakui bahwa harus ada wilayah individu yang bebas dari kontrol sosial. Jika hal itu dilampaui, tindakan tersebut akan melahirkan sistem despotik. Benjamin Constant menyebut area yang tidak boleh dilampaui itu adalah kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk memiliki. Menurut Berlin, area itu disebut sebagai area minimum yang harus dilindungi.³⁷ Jika area minimum itu dilanggar maka kodrat kita sebagai manusia yang memiliki kebebasan telah hilang (Berlin 2002, 173).

Selain konsep kebebasan negatif, Berlin juga memperkenalkan konsep kebebasan positif. Konsep kebebasan positif adalah konsep kebebasan yang menegaskan bahwa semua keinginan berasal dari individu itu sendiri sebagai pemiliknya. Menurut Berlin, gambaran mengenai kebebasan positif dapat dilihat dalam pernyataan berikut: “Saya ingin agar hidup saya dan semua keputusan saya itu bergantung pada diri saya sendiri, bukan karena kekuatan lain di luar diri saya. Saya ingin menjadi alat bagi diri saya sendiri, bukan alat oleh orang lain. Saya ingin menjadi subjek, bukan objek.” Melalui pernyataan ini digambarkan bahwa kebebasan positif menekankan posisi “saya atau aku” sebagai pemutus dan penentu. Di dalam kebebasan positif ditekankan bahwa untuk menjadi sesuatu apapun, sayalah penentunya, bukan orang lain. Apa yang saya pilih adalah karena kehendak saya, bukan orang lain (Berlin 2002, 178-179).

³⁶ Konsep Thomas Hobbes mengenai penjaga yang kuat ada dalam ide mengenai Leviathan. Ide ini menjadi sebuah keniscayaan masyarakat yang digerakan oleh rasa takut pada kematian yang keji yang terjadi dalam keadaan alamiah (*state of nature*). Untuk menciptakan Leviathan, setiap pihak diharuskan menyerahkan haknya kepadanya. Penyerahan hak itu dimaksudkan untuk bisa menciptakan kondisi di mana manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*). Thomas Hobbes, *Leviathan* (Hardmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1974), 227.

³⁷ Apa yang membuat perlindungan kebebasan individu menjadi begitu sakral? Berlin mengutip pandangan Mill yang berpendapat bahwa tanpa kebebasan, peradaban tidak akan bisa berkembang dan kebenaran tidak akan muncul. Upaya mempertahankan kebebasan selalu berarti sebagai kebebasan dari (*liberty from*) campur tangan. Seluruh pandangan yang membela kebebasan sipil dan hak-hak individu, menurut Berlin, didasari oleh konsepsi individualistik mengenai manusia. Ada tiga fakta yang dapat ditegaskan dari posisi ini. Yang pertama pandangan bahwa seluruh pemaksaan (*coercion*) adalah buruk. Pandangan ini adalah bentuk klasik dari konsep kebebasan negatif. Yang kedua, konsepsi individualistik mengenai manusia adalah pandangan modern. Dalam penelusuran Berlin, konsepsi mengenai kebebasan individu tidak pernah ada di dalam peradaban pra-modern, mulai dari masa klasik Yunani, Romawi, Yahudi, China dan lain-lain. Hasrat pada kebebasan individu adalah capaian dalam peradaban modern, sehingga ancaman terhadap kebebasan ini menjadi awal dari kehancuran peradaban. Yang ketiga, konsep kebebasan individualistik adalah konsep yang lebih penting dari hal apapun. Lih. Berlin, *Liberty*, 174-178.

Menurut Berlin, antara konsep kebebasan positif dan kebebasan negatif seakan memiliki kemiripan. Padahal, dua konsep kebebasan ini sebenarnya memiliki jalur sejarah yang berbeda dan kadang justru berselisih satu sama lain (Berlin 2002, 179). Jika saya menegaskan, atas dasar kebebasan positif, saya adalah tuan bagi diri saya sendiri, bukan bagi siapapun, maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah: apakah saya juga bukan budak dari alam? Apakah saya bukan budak dari nafsu saya yang tidak bisa dikontrol? Kita biasanya mengidentifikasi konsep diri sebagai rasio yang mampu mempertimbangkan sesuatu untuk jangka panjang, atau diri yang otonom, yang real, atau yang ideal. Singkatnya, biasanya kita memahami konsep diri di sini dalam arti yang “terbaik” bukan dalam arti dorongan irasional atau hasrat yang tidak bisa dikontrol. Pengertian diri sebagai dorongan irasional atau hasrat yang tidak bisa dikontrol biasanya disebut sebagai diri yang rendah, yang tidak otonom dan yang empiris (Berlin 2002, 179).³⁸

Pandangan Berlin mengenai kebebasan, khususnya dalam konsep kebebasan negatif dianggap bersinambung dengan rumusan kebebasan dalam aspek proses yang dipahami oleh Amartya Sen. Tampaknya konsep kebebasan negatif menjadi pengertian

³⁸ Pengertian diri real yang rasional dan otonom bisa dipahami sebagai diri yang lebih besar dari individu. Diri real ini bisa dipahami sebagai keseluruhan sosial di mana individu adalah bagian di dalamnya. Diri ini bisa mewujudkan dalam bentuk suku, ras, negara atau masyarakat secara keseluruhan. Sementara diri empiris atau aktual adalah diri yang bisa dikelabui oleh hasrat dan nafsu sementara. Dalam hal ini, diri real memiliki hak memaksa bagian-bagian yang ada di dalamnya (individu atau diri empiris) untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik oleh diri kolektif. Diri real atau kolektivitas ini dianggap mampu melihat sesuatu yang baik. Jika ada individu yang menolak tuntutan ini, bisa saja karena individu tersebut tidak bisa melihat sesuatu yang sebenarnya baik untuk dirinya juga. Sesuatu yang dianggap baik oleh diri kolektif itu bisa dalam bentuk kebahagiaan, penunaian tugas, keadilan masyarakat atau lainnya. Lih. Berlin, *Liberty*, 179-180; 284. Orang tua yang dianggap mengerti pilihan terbaik untuk masa depan anaknya, bisa saja ia melarang tindakan-tindakan tertentu yang dianggap akan merusak masa depannya. Sebagai orang tua, seseorang bisa membuat larangan dan kewajiban yang bertentangan dengan keinginan anaknya. Misalnya melarang menggunakan obat-obat terlarang adalah bagian dari cara orang tua untuk mengantarkan anak ke masa depan yang baik. Berlin kemudian bertanya, apakah larangan semacam ini dapat disebut sebagai campur tangan atas kebebasan seorang anak? Ia menjawab: tentu saja tidak! Lantas jika posisi orang tua ini kita ganti menjadi agama, tradisi atau negara yang dianggap mengetahui apa yang terbaik untuk para individu, apakah larangan yang datang dari lembaga itu juga bukan bagian dari campur tangan terhadap kebebasan? Pada titik inilah, menurut Berlin, kita melihat paradoks dan juga wajah kontras dari dua konsep kebebasan di atas. Kebebasan negatif menjadi dasar bagi mereka yang mengusung kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik sebagai bagian dari kebebasan individu yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Sementara kebebasan positif, melalui perbedaan konsep mengenai diri, diri real atau diri otonom yang mewujudkan dalam bentuk kolektivisme seperti agama, negara atau masyarakat – yang dianggap mengerti hakikat mengenai yang baik itu sendiri – memiliki hak untuk melarang dan mewajibkan para individu untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik. Konsep kebebasan positif yang dipahami dengan cara ini akan kerap bertabrakan dengan konsep kebebasan negatif yang justru menekankan kebebasan individu dari segala bentuk paksaan yang datang dari luar. Lih. Berlin, *Liberty*, 284-285.

yang generik mengenai kebebasan. Kebebasan dipahami sebagai tidak adanya paksaan. Sen menyebut kebebasan dalam arti ini sebagai kebebasan dalam aspek proses, yang ia bedakan dengan kebebasan yang dipahami sebagai kesempatan real (*real opportunity*). Dari tiga pemikir yang sudah dibahas, kesinambungan pengertian kebebasan yang dipahami sebagai proses ada di dalam ide perlindungan diri dari paksaan yang datang dari luar. Sen sendiri mengakui bahwa di antara mereka jelas ada perbedaan yang lebih rinci mengenai kebebasan, namun secara umum ada kesamaan pandangan tentang pengertian generik kebebasan yang dipahami sebagai tidak adanya paksaan yang dilakukan secara sengaja oleh orang lain atau pihak luar.

Selain tiga pemikir di atas (Mill, Hayek dan Berlin) tentu saja masih banyak pemikir lain yang telah memberikan inspirasi bagi Sen dalam memahami kebebasan sebagai proses. Beberapa pemikir itu di antaranya adalah Robert Nozick, James M. Buchanan dan Robert Sugden. Pada umumnya pandangan mereka dikenal sebagai pandangan libertarian (Sen 2002, 11; 1992, 41). Nozick, misalnya, cenderung menolak kebijakan yang mengorbankan kebebasan individu meski itu memberikan dampak positif bagi kehidupan kolektif.³⁹ Menurut Sen, meski para pemikir libertarian ini diidentifikasi dengan konsep kebebasan dalam arti proses, namun tidak berarti bahwa mereka menolak total dimensi kebebasan substantif. Sebagian mengakui pemahaman kebebasan substantif secara implisit.⁴⁰ Pada bagian berikut kita akan melihat beberapa pemikir dan pandangan yang menginspirasi Sen dalam merumuskan konsep kebebasan dalam aspek kesempatan atau kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*).

2.4 Kebebasan sebagai Kapabilitas

Selain dalam arti proses, Sen juga memaknai kebebasan secara substantif dalam arti adanya kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu. Gagasan utama

³⁹ Pandangan libertarian Nozick dapat kita lihat dalam pemahamannya mengenai kebebasan dan milik pribadi. Menurutnya, konsep kebebasan atau hak terkait dengan konsep kepemilikan diri (*self-ownership*). Salah satu konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa pengakuan hak milik adalah bagian dari pengakuan bahwa kita memiliki diri kita sendiri. Karenanya, institusi publik seperti negara tidak memiliki hak untuk mengambil hak milik pribadi meski untuk redistribusi sebagaimana ada dalam pajak. Tindakan memungut pajak dianggap sebagai tindakan perampasan hak yang dilindungi. Ia juga menganggap praktik pajak sebagai bagian dari sistem kerja paksa. Lih. Farelly, *Introduction to Contemporary Political Theory*, 33-35. Lih. juga Nozick, "The Entitlement Theory of Justice," 64.

⁴⁰ Hal ini bisa dilihat dalam Sen, *Rationality and Freedom*, 10; 11 pada catatan kaki nomor 10 dan 12. Sen mengatakan, misalnya, meski Milton Friedman menggunakan frasa "kebebasan untuk memilih" (*free to choose*) yang kedengarannya bernada prosedural, namun ia tetap menekankan aspek kesempatan di dalamnya. Begitu juga dengan Hayek, Buchanan dan Sugden, mereka juga tetap menganggap penting aspek kesempatan di dalam kebebasan.

kebebasan dalam arti ini dapat kita lihat pada sejauh mana seseorang memiliki kemampuan atau kesempatan real (*real opportunity*) untuk mencapai sesuatu. Kemampuan itu tidak hanya ditentukan oleh diri pelaku saja, tetapi juga oleh kondisi sosial, alam dan lingkungan. Uraian mengenai hal ini akan dijelaskan lebih jauh pada Bab III. Hal yang ingin ditunjukkan dalam bab ini adalah tentang gagasan dan kondisi yang menjadi konteks bagi perumusan konsep kapabilitas. Dalam merumuskan konsep kapabilitas ada tokoh yang menjadi inspirasi. Salah satu di antara pandangan yang pernah disinggung Sen dalam mencari kemungkinan pengertian kebebasan di luar pemahaman para pemikir libertarian adalah pandangan Marx. Menurutnya, Marx memberikan perspektif berbeda dari pengertian kebebasan para libertarian. Hanya saja, inspirasi dari Marx ini masih relatif abstrak dan Sen tidak memberikan uraian lebih jauh mengenai pengaruh Marx.

Hal yang lebih konkret dapat dilihat dalam keresahan Sen melihat realitas ketidakmampuan dan ketidakamanan hidup (*deprivation and insecurities of life*). Orang yang mengalami kecacatan, kelaparan dan kemiskinan adalah orang yang mengalami ketidakmampuan.⁴¹ Keresahan ini bahkan bisa dilihat sebagai latar belakang paling kuat dalam perumusan konsep kapabilitas. Hal itu bisa kita lihat dalam biografi intelektualnya yang menjadikan masalah kehilangan kapabilitas sebagai latar belakang yang menentukan perumusan kebebasan sebagai kapabilitas. Dalam uraian mengenai hilangnya kapabilitas kita akan melihat analisis Sen mengenai kelaparan. Menurutnya, kelaparan terjadi bukan karena tidak ada bahan pangan, tetapi karena masyarakat tidak mampu mengakses bahan pangan yang mereka butuhkan. Dengan kata lain, bencana kelaparan terjadi karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dibutuhkan.

Dalam pandangan Sen, kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai juga menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas hidup manusia. Kualitas hidup tidak ditentukan oleh pendapatan per kapita dan GDP. Pandangan ini diperkuat oleh Martha Nussbaum. Nussbaum dan Sen kemudian melembagakan pendekatan kapabilitas

⁴¹ Dalam menjelaskan konsep *capability deprivation*, penulis memahaminya sebagai hilangnya kapabilitas. Kadang penulis juga menyebut kondisi ini sebagai ketidakmampuan.

ini sebagai panduan bagi proyek pembangunan manusia (*human development*).⁴² Dalam uraian mengenai kapabilitas juga akan dijelaskan perbedaan antara pendekatan kapabilitas dan konsep Rawls mengenai hal-hal pokok (*primary goods*). Menurutnya hal-hal pokok lebih dipahami sebagai sarana menuju kebebasan (*means to freedom*) sementara kapabilitas sebagai kebebasan itu sendiri, yakni kebebasan untuk mencapai (*freedom to achieve*). Bagi Sen, konsep kapabilitas adalah tentang kemampuan mengubah apa yang kita miliki menjadi sesuatu yang kita anggap bernilai.

a. Inspirasi Kebebasan dari Marx

Dalam *Inequality Reexamined* (1992) Sen menulis bahwa pengertian mengenai kebebasan pada umumnya diasosiasikan dengan pandangan para libertarian seperti Hayek, Nozick, J. M. Buchanan dan lain-lain. Namun, menurutnya, argumentasi mengenai pentingnya nilai kebebasan sebenarnya juga bisa diperoleh dari Karl Marx yang memberikan perhatian pada upaya membangun kondisi yang bebas dan aktivitas individu di bawah kontrol si pelaku. Dalam pandangan Marx, masyarakat masa depan yang terbebaskan akan dapat melakukan hal yang diinginkan pada hari ini dan hal yang lain pada esok harinya. Ia mengatakan, seseorang bisa berburu di pagi hari, memancing di siang hari, menggiring hewan di sore hari, dan berdiskusi buku setelah makan malam, tanpa perlu menjadi seorang pemburu, pemancing, penggembala atau kritikus sebagai pekerjaan khusus.⁴³

Pandangan ini dikutip Sen dari karya Marx yang berjudul *The German Ideology*. Dalam uraian mengenai kepemilikan pribadi dan komunisme (*private property and communism*) Marx menjelaskan bahwa sistem pembagian kerja telah membuat aktivitas yang dilakukan seseorang tidak lagi berada di bawah kontrolnya sendiri, melainkan ditentukan oleh posisinya di dalam sistem itu. Dalam arti tertentu, sistem itu telah menjadi kekuatan asing (*alien power*) yang memperbudak orang-orang yang ada di dalamnya. Sistem pembagian kerja telah menjadikan seseorang memiliki satu pekerjaan khusus dan ia tidak bisa lari dari sistem itu (Marx 2000, 185). Sistem itu membuat seseorang terasing dari hakikat dirinya sendiri. Melalui pandangan ini, Sen ingin

⁴² Hal ini bisa kita lihat dalam gerakan yang didasarkan pada pendekatan kapabilitas lewat forum *Human Development and Capability Approach* (HDCA). Forum ini secara aktif menyebarkan pendekatan kapabilitas melalui konferensi dan juga publikasi. Forum ini bisa diakses dalam www.hd-ca.org

⁴³ Pandangan ini dapat kita lihat dalam Sen, *Inequality Reexamined*, 41, pada catatan kaki nomor 8.

menekankan bahwa apa yang dipahami oleh Marx adalah bagian dari konsep kebebasan yang dipahami sebagai kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurutnya, kebebasan dalam arti ini kerap disebut sebagai kebebasan positif, untuk mengontraskannya dengan kebebasan negatif yang dimaknai sebagai tidak adanya paksaan yang datang dari luar (Sen 1992, 41).

Sejauh yang sudah penulis telusuri, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh pandangan Marx bagi rumusan Sen mengenai konsep kapabilitas.⁴⁴ Secara abstrak, melalui pandangan Marx, Sen mencoba menunjukkan adanya pandangan yang lain mengenai kebebasan sebagaimana yang pada umumnya dipahami oleh kalangan libertarian. Sedikitnya uraian mengenai pengaruh pandangan Marx bagi Sen juga menjadi pertanyaan Nussbaum. Catatan Nussbaum mengenai hal ini akan dijelaskan pada Bab V. Dari penjelasan singkat ini, titik tolak pandangan Marx bagi rumusan kapabilitas masih terlihat abstrak. Namun dari penegasan ini kita bisa memahami upaya Sen untuk memahami kebebasan tidak hanya dalam kerangka libertarian. Rumusan yang lebih konkret mengenai ide kapabilitas dapat dilihat dalam refleksi Sen mengenai kondisi ketidakmampuan dan ketidakberdayaan manusia.

b. Refleksi Mengenai Ketidakmampuan

Keresahan Sen atas masalah ketidakmampuan yang dialami manusia merupakan inspirasi paling kuat dalam seluruh refleksinya mengenai kebebasan sebagai kapabilitas.⁴⁵ Sebagai seorang ekonom yang juga memasuki refleksi filosofis, ia menilai tolok ukur keberhasilan sebuah negara lewat capaian per kapita dan produk domestik bruto (PDB atau GDP) tidak lagi memadai. Dalam penilaiannya, ketidakmampuan masyarakat lemah di negara maju seperti Amerika, sebagaimana yang dialami kelompok Afro-Amerika, bisa saja lebih tinggi dibanding masyarakat miskin yang tinggal di negara-negara berkembang seperti Kosta Rika, Sri Lanka, China atau India (Sen 2009, 225-226).

⁴⁴ Penulis sengaja tidak menguraikan hal ini lebih jauh karena bahan yang tersedia tidak cukup memadai. Sejauh yang sudah ditelusuri, Sen hanya menyebut pandangan Marx mengenai kebebasan sebagai varian yang berbeda dari kebebasan yang biasa dipahami oleh kelompok libertarian. Penegasan Sen mengenai hal itu hanya diperoleh dalam buku *Inequality Reexamined* (1992).

⁴⁵ Keresahan ini bisa kita lihat dalam hampir seluruh karya utama Sen. Penulis sudah menjelaskan hal ini dalam biografi intelektual Sen pada Bab I.

Dalam pandangan Sen, kebebasan dari kematian prematur bisa saja dibantu dengan pendapatan yang tinggi, namun sejatinya masalah semacam ini bergantung pada banyak hal lain seperti organisasi sosial, perlindungan kesehatan untuk masyarakat, asuransi, pendidikan, ketenteraman sosial dan lain-lain (Sen 2009, 226-227). Dengan demikian, faktor yang menentukan kemampuan kita untuk mencapai sesuatu tidak hanya ditentukan oleh uang atau pendapatan tetapi oleh banyak faktor lain. Beragam faktor ini menjadi penentu yang sangat penting bagi kapabilitas seseorang atau masyarakat. Karenanya, dalam menganalisis kualitas hidup masyarakat, Sen lebih memerhatikan kapabilitas yang dimiliki dalam mencapai sesuatu. Ia menulis, “dalam menilai kehidupan, kita memiliki alasan untuk tidak hanya memerhatikan jenis kehidupan yang ingin kita jalani, tetapi juga kebebasan yang secara aktual kita miliki untuk memilih beragam gaya dan cara hidup.”⁴⁶ Dalam pandangannya, pengakuan terhadap kebebasan sebagai kapabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menilai kehidupan manusia.⁴⁷

Dengan perspektif ini, Sen hendak menegaskan bahwa kebebasan untuk memilih kehidupan yang kita anggap bernilai merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi masalah ketidakmampuan yang dialami manusia (Sen 2009, 227). Pendekatan ini yang kemudian ia sebut sebagai pendekatan kapabilitas. Dalam pandangannya, pendekatan kapabilitas jauh lebih efektif dibanding pendekatan yang

⁴⁶ “*In assessing our lives, we have reason to be interested not only in the kind of lives we manage to lead, but also in the freedom that we actually have to choose between different styles and ways of living.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, 227.

⁴⁷ Sen pernah mengutip dialog dalam *Upanishad* antara seorang suami dan seorang istri, Yajnavalkya dan Maitreyee. Dialog itu menyindir mereka yang kerap memerhatikan kekayaan sebagai sesuatu yang penting bagi hidupnya. Sindiran yang merupakan kritik terhadap mereka yang selalu mengejar kekayaan itu berbunyi: “seberapa jauh kekayaan dapat membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan?” Kutipan ini dipakai oleh Sen sebagai evaluasi atas kecenderungan ekonomi modern yang lebih banyak memerhatikan aspek kekayaan, pendapatan dan lain-lain. Menurutnya, bukankah yang terpenting bagi hidup manusia itu sejatinya adalah kemampuan untuk bisa hidup secara baik tanpa kenestapaan dan ketidakbebasan, bukan kekayaan itu sendiri. Dengan pandangan ini, Sen menegaskan bahwa hal yang penting untuk diperhatikan dalam proyek pembangunan manusia sebenarnya adalah perluasan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Menurutnya, pandangan ini bersinambung dengan pandangan Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* yang mengatakan bahwa kekayaan bukan sesuatu yang kita kejar pada dirinya sendiri. Ia dicari karena berguna untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Aristoteles mengatakan bahwa “...kemakmuran jelas bukan sesuatu yang kita cari, [ia dicari] karena berguna untuk mendapatkan sesuatu yang lain.” Dengan demikian, kegunaan kekayaan atau komoditas persis adalah karena ia dapat menjadi sarana untuk mencapai sesuatu yang kita anggap bernilai bagi hidup kita. Pandangan ini kemudian ia rumuskan menjadi konsep kebebasan substantif dan menjadi pijakan bagi gagasan pembangunan manusia (*human development*). Sen, *Development as Freedom*, 13-15. Lihat juga Aristotle, *Nicomachean Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 6-7.

didasarkan pada aspek manfaat (utilitas) dan juga sumber daya (*resources*). Sen mengatakan:

Berbeda dengan garis pemikiran yang didasarkan pada pertimbangan manfaat dan sumber daya, [nilai] keuntungan individu dalam pendekatan kapabilitas dinilai dari kapabilitas seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia memiliki alasan dalam menilai [hal itu]. Keuntungan seseorang dalam arti kesempatan dinilai rendah dibanding orang lain jika dia kurang memiliki kapabilitas untuk mencapai sesuatu yang ia memiliki alasan dalam menilai [hal itu]. [Dengan demikian] fokus di sini ada pada kebebasan di mana seseorang secara aktual harus melakukan ini atau menjadi itu – sesuatu yang ia anggap bernilai. Jelaslah, hal yang kita anggap paling bernilai adalah sesuatu yang penting untuk bisa kita capai.⁴⁸

Menurut Sen, pendekatan kapabilitas “menghormati kebebasan kita untuk menentukan apa yang kita inginkan, apa yang kita anggap bernilai dan akhirnya apa yang kita putuskan untuk dipilih.”⁴⁹

Melalui pendekatan kapabilitas, kita dapat mengatasi masalah ketidakmampuan dengan lebih efektif. Menurut Sen, “orang dengan cacat fisik dan mental tidak hanya menjadi orang yang paling tidak mampu di dunia, mereka juga, kerap kali, menjadi orang yang paling diabaikan.”⁵⁰ Masalah serius yang dihadapi oleh orang-orang cacat, dalam penilaian Sen cenderung berlapis. Yang pertama, karena cacat, mereka biasanya menjadi miskin. Yang kedua, karena cacat, kalau bekerja, mereka biasanya diberi harga rendah. Padahal, karena kecacatan itu, mereka sebenarnya merupakan kelompok masyarakat yang perlu pendapatan lebih besar dibanding orang normal. Mereka membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengatasi kecacatannya agar mereka dapat hidup dengan wajar (Sen 2009, 258). Karenanya bagi Sen, pemahaman mengenai pentingnya tuntutan moral dan politik untuk membantu orang cacat menjadi sesuatu yang penting. Alasannya bukan hanya untuk melindungi nilai kemanusiaan, tetapi juga secara praktis bisa mengurangi konsekuensi tragis yang dialami orang cacat. Upaya itu bisa dilakukan melalui bantuan masyarakat, kebijakan publik yang memerhatikan

⁴⁸ “In contrast with the utility-based or resource-based lines of thinking, individual advantage is judged in the capability approach by a person’s capability to do things he or she has reason to value. A person’s advantage in terms of opportunities is judged to be lower than that of another if she has less capability – less real opportunity – to achieve those things that she has reason to value. The focus here is on the freedom that a person actually has to do this or be that – things that he or she may value doing or being. Obviously, the things we value most are particularly for us to be able to achieve.” Sen, *The Idea of Justice*, 231-232.

⁴⁹ “...respects our being free to determine what we want, what we value and ultimately what we decide to choose.” Sen, *The Idea of Justice*, 232.

⁵⁰ “People with physical or mental disability are not only among the most deprived human beings in the world, they are also, frequently enough, the most neglected” Sen, *The Idea of Justice*, 258.

mereka dan juga program-program yang bisa mencegah meluasnya kondisi tragis itu (Sen 2009, 259).⁵¹

Refleksi Sen mengenai ketidakmampuan dapat ditelusuri lebih jauh dalam *Poverty and Famines* (1981). Lewat buku ini ia mencoba menunjukkan bahwa masalah kelaparan sejatinya bukan karena tidak adanya komoditas, tetapi karena tidak adanya kapabilitas. Hal ini dapat kita lihat dalam pengamatannya mengenai kelaparan yang terjadi di banyak tempat. Ia mengatakan bahwa yang disebut kelaparan adalah kondisi di mana masyarakat tidak memiliki cukup makanan. Kelaparan, ia menggarisbawahi, bukan disebabkan karena tidak adanya makanan.⁵² Makanan atau komoditas itu sebenarnya tersedia, hanya saja masyarakat tidak bisa mengakses komoditas itu. Karenanya, masalah serius yang ada dalam bencana kelaparan ada pada hubungan antara masyarakat dan komoditas. Dalam hal ini, menurutnya, masyarakat tidak memiliki hubungan legitim atau kepemilikan yang sah atas komoditas yang ada sehingga kelaparan bisa terjadi. Ia menulis bahwa masalah kepemilikan terkait dengan konsep kepastian hak (*entitlement*) (Sen 1981, 1).⁵³

Sen mengatakan bahwa kepastian hak yang diterapkan dalam konsep kepemilikan terkait dengan satu perangkat kepemilikan seseorang atas sesuatu melalui proses yang legitim (Sen 1981, 1-2). Dalam sistem ekonomi pasar, misalnya, konsep kepemilikan pribadi dapat dijelaskan karena ada proses jual beli, karena kepemilikan

⁵¹ Dalam pandangan penulis, meski Sen membedakan pendekatan kapabilitas dengan pendekatan sumber daya, pendekatannya sebenarnya masih sangat bertopang pada pendekatan sumber daya yang memungkinkan adanya kapabilitas untuk mencapai sesuatu. Hal yang penulis garisbawahi adalah bahwa Sen memang membedakan dua pendekatan ini, namun cukup pasti bahwa kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mencapai sesuatu sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang akan dijelaskan pada bab III nanti. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan seberapa besar kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang. Faktor-faktor ini, bagi penulis juga merupakan sumber daya atau sarana menuju kebebasan (*means to freedom*). Karenanya, meski dibedakan, konsep kapabilitas Sen jelas akan sangat ditentukan oleh beragam faktor yang menentukan luas atau susutnya kebebasan.

⁵² “Starvation is the characteristic of some people not **having** enough food to eat. It is not the characteristic of there being not enough food to eat.” Amartya Sen, *Poverty and Famines* (Oxford: Oxford University Press, 1981), 1.

⁵³ Penulis sebenarnya kesulitan menerjemahkan kata “entitlement” ke dalam bahasa Indonesia. Dalam *Thesaurus*, “entitlement” dimengerti sebagai hak yang diberikan melalui hukum atau kontrak, khususnya hak terhadap sesuatu tertentu (*right granted by law or contract [especially a right to benefits]*). Lih. www.thefreedictionary.com. Terjemahan yang penulis pertimbangkan untuk kata ini adalah “kepastian hak”. Dengan menerjemahkan “entitlement” sebagai “kepastian hak” penulis memahami konsep itu sebagai proses di mana seseorang pantas mengklaim hak atas sesuatu. Saya memiliki hak atas sebuah buku karena saya membeli buku itu dengan uang saya. Proses membeli buku dengan uang saya itu merupakan proses yang memungkinkan saya bisa mengklaim kepemilikan buku itu secara sah.

alat produksi, karena pembuatan yang dilakukan sendiri atau karena warisan.⁵⁴ Dalam masyarakat semacam ini, kita dapat menukarkan apa yang kita miliki dengan komoditas yang dimiliki oleh pihak lain. Proses pertukaran itu bisa terjadi lewat proses jual beli, proses produksi atau kombinasi dari keduanya.

Menurut Sen, kemampuan masyarakat untuk terhindar dari kelaparan banyak ditentukan oleh sistem kepemilikan dan juga sistem pertukaran yang berlangsung pada saat itu. Misalnya, karena harga komoditas pangan yang melambung tinggi, masyarakat akhirnya tidak bisa menukarkan barang yang mereka miliki dengan komoditas pangan yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat terjebak dalam kelaparan. Karenanya, dalam pandangan Sen, sistem pertukaran kepemilikan tidak bisa bergantung hanya pada sistem pertukaran ekonomi pasar. Dalam kondisi ketika masyarakat tidak lagi mampu melakukan pertukaran secara normal, negara seharusnya melakukan intervensi. Intervensi dari negara dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses komoditas yang mereka butuhkan (Sen 1981, 3-7).⁵⁵ Melalui analisis kelaparan dengan pendekatan kapabilitas, Sen mencoba menunjukkan bahwa ketidakmampuan masyarakat mengakses komoditas merupakan persoalan dari tidak adanya kapabilitas. Baginya, masalah kemiskinan, kelaparan dan ketidakamanan hidup lebih dilihat sebagai masalah hilangnya kapabilitas (*capability deprivation*).

c. Tolok Ukur Kualitas Hidup

Melalui pendekatan kapabilitas, Sen melihat bahwa kualitas hidup manusia sejatinya ditentukan oleh seberapa besar kapabilitas yang dimiliki. Rumusan Sen mengenai kapabilitas didukung oleh seorang filsuf perempuan, Martha Nussbaum. Dalam *The Quality of Life*, buku yang mereka tulis bersama, mereka mengatakan bahwa kesejahteraan dan pendapatan yang baik tidak bisa menjadi tolok ukur dalam menilai

⁵⁴ Yang pertama, kepastian hak yang didasarkan pada proses jual-beli (*trade-based entitlement*), misalnya, saya berhak atas buku A karena saya membeli buku itu di sebuah toko dekat rumah saya. Yang kedua, kepastian hak yang didasarkan proses produksi (*production-based entitlement*), misalnya, seseorang memiliki hak atas mobil itu karena telah memproduksinya dengan mesin-mesin yang ia miliki atau ia sewa. Yang ketiga, kepastian hak yang didasarkan pada pembuatan sendiri (*own-labour entitlement*), misalnya, seseorang memiliki hak atas sebuah patung karena telah membuatnya dengan tangannya sendiri. Yang keempat adalah kepastian hak karena perpindahan kepemilikan dan juga warisan (*inheritance and transfer entitlement*), misalnya, saya memiliki sebidang tanah karena orang tua saya sudah mewariskannya kepada saya. Dalam pandangan Sen, selain empat hubungan kepastian hak ini, masih ada beberapa hubungan kepastian hak lain yang lebih kompleks, misalnya, kepemilikan karena penemuan atas sesuatu yang belum diklaim oleh pihak lain dan hubungan-hubungan kepastian hak yang lain. Lih. Sen, *Poverty and Famines*, 1-2.

⁵⁵ Misalnya lewat sistem jaminan sosial (*social security*). Lih. Sen, *Poverty and Famines*, 6-7.

kualitas hidup seseorang. Baginya, kualitas hidup manusia lebih ditentukan oleh akses pada beragam kombinasi alternatif capaian (*functionings*) yang dimiliki atau yang disebut dengan kapabilitas (Sen dan Nussbaum 1993, 3).⁵⁶ Sen dan Nussbaum dianggap sebagai perumus awal pendekatan kapabilitas dan juga aktif dalam menjadikan pendekatan kapabilitas sebagai kerangka dasar proyek pembangunan manusia.⁵⁷

Nussbaum memiliki keprihatinan yang sama dengan Sen tentang kualitas hidup manusia. Menurutnya, metode yang biasa digunakan oleh kalangan ekonom arus utama untuk mengukur keberhasilan sebuah negara adalah dengan menghitung pendapatan per kapita dan produk domestik bruto (PDB) yang dicapai. Dalam pandangannya, tolok ukur ini tidak lagi memadai untuk menjelaskan masalah ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat.⁵⁸ Untuk mengatasi kekurangan ini, ia mengajukan ide pembangunan manusia yang didasarkan pada pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*).⁵⁹ Pendekatan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana: “secara aktual, seseorang bisa melakukan apa dan menjadi apa?” Dan pertanyaan berikutnya adalah “kesempatan real apa yang ia miliki untuk melakukan itu dan menjadi itu?”⁶⁰ (Nussbaum 2011, ix-x).

Melalui pertanyaan itu, Nussbaum memahami kapabilitas sebagai kemampuan untuk mencapai sesuatu – melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu – yang dianggap

⁵⁶ Sebagai pemikir feminis, Nussbaum banyak menulis karya terkait dengan pendekatan kapabilitas dan masalah-masalah ketidakadilan yang dialami kaum perempuan. Menurutnya, pemikiran mengenai ekonomi dan politik seharusnya bersifat feminis dalam arti bahwa kebijakan yang dikembangkan harus memerhatikan masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan. Para perempuan di banyak negara mengalami ketidakadilan yang didasarkan pada jenis kelamin mereka. Lih. Nussbaum, *Women and Human Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006a), 4. Dalam penelusurannya mengenai perjuangan perempuan mencari keadilan, buruknya asupan nutrisi yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya karena faktor kemiskinan tetapi juga karena diskriminasi gender. Lih. Martha Nussbaum, *Creating Capabilities* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011), 2-4.

⁵⁷ Proyek mengenai pentingnya pendekatan kapabilitas (*capability approach*) dalam pembangunan manusia (*human development*) kemudian mereka realisasikan dalam gerakan yang mereka sebut *human development and capability approach* (HDCA). Mereka melakukan pengarusutamaan pendekatan kapabilitas ini melalui penelitian dan juga konferensi yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Lih. www.hd-ca.org

⁵⁸ Pandangan ini juga bisa dilihat pada Sen, *The Idea of Justice*, 226.

⁵⁹ Nussbaum biasanya menggunakan kata “*capabilities*” dalam bentuk jamak sementara Sen kerap menggunakannya dalam bentuk tunggal “*capability*”. Nussbaum menjelaskan bahwa penggunaan bentuk jamak dimaksudkan untuk menunjukkan beberapa kapabilitas utama yang harus dijamin bagi setiap orang untuk melindungi martabat kemanusiaannya. Dalam hal ini ia mengajukan sepuluh kapabilitas utama (*central capabilities*). Sementara Sen lebih sering menggunakan kata itu dalam bentuk tunggal karena lebih memahaminya sebagai konsep untuk menilai seberapa bebas seseorang dalam mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Lih. Nussbaum, *Creating Capabilities*, 18.

⁶⁰ “*What are people actually able to do and to be?*” dan “*What real opportunity are available to them?*”, Nussbaum, *Creating Capabilities*, x.

bernilai bagi martabat seorang manusia.⁶¹ Lebih lanjut, ia memahami kapabilitas sebagai sesuatu yang harus dicapai dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk menjaga martabat para warganya.⁶² Keharusan untuk mengimplementasikan kapabilitas utama bagi setiap orang adalah upaya untuk memperlakukan manusia sebagai tujuan (*ends*) bukan sebagai sarana (*means*) bagi yang lain.⁶³ Secara khusus, Nussbaum menggarisbawahi nasib kaum perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan. Menurutnya, kaum perempuan di banyak tempat sering kali dijadikan sebagai sarana bagi tujuan pihak lain.⁶⁴ Dengan penegasan mengenai pentingnya kapabilitas utama (*central capabilities*), pemerintah atau negara dituntut melindungi kaum perempuan dan kaum lemah lainnya sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih bermartabat (Nussbaum 2006a, 5-6).

Nussbaum mengajukan beberapa kapabilitas utama sebagai batas minimal (*threshold level of each capability*) untuk melindungi martabat manusia.⁶⁵ Ia memahami terwujudnya batas minimal kapabilitas bagi setiap orang atau warga sebagai tujuan sosial. Dalam menguraikan ambang batas kapabilitas, Nussbaum mengajukan sepuluh kapabilitas utama yang wajib ada pada setiap manusia demi martabatnya sebagai

⁶¹ "...what people are actually able to do and to be – in a way informed by an intuitive idea of a life that is worthy of the dignity of the human being." Nussbaum, *Women and Human Development*, 5.

⁶² "I, by contrast, have used the approach to provide the philosophical underpinning for an account of core human entitlements that should be respected and implemented by the governments of all nations, as a bare minimum of what respect for human dignity requires." Martha Nussbaum, *Frontiers of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006b), 70. Penegasan yang sama juga bisa kita dapatkan di dalam Nussbaum, *Women and Human Development*, 5.

⁶³ "...I Shall argue that the capabilities in question should be pursued for each and every person, treating each as an end and none as a mere tool of the ends of other..." Nussbaum, *Women and Human Development*, 5.

⁶⁴ Nussbaum pernah bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Vasanti yang tinggal di negara bagian Gujarat, barat laut India. Ia adalah seorang perempuan berumur 30-an yang kebetulan menjadi istri dari seorang suami yang gemar berjudi dan minum alkohol. Suaminya kerap kali menggunakan uang keluarga untuk mabuk. Satu kali suaminya tidak punya uang untuk memenuhi kesenangannya itu. Ia kemudian mengambil program vasektomi agar bisa mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah Gujarat yang dapat ia gunakan untuk membeli kesenangannya. Karena tindakannya itu, Vasanti kemudian tidak dapat punya anak. Dalam budaya di Gujarat, seorang istri yang tidak punya anak berarti tidak ada orang yang bisa membantunya dan juga membuat tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) akan semakin sering ia alami. Karena suaminya semakin tidak bisa dikontrol, Vasanti akhirnya pergi kembali ke keluarga orang tuanya. Lih. Nussbaum, *Creating Capabilities*, 2. Kondisi yang dialami Vasanti menggambarkan kondisi perempuan yang tidak dilindungi oleh jaminan kapabilitas utama dan juga dijadikan alat bagi suaminya untuk mencapai kepentingannya sendiri.

⁶⁵ Proposal spesifik Nussbaum ini menjadi salah satu perbedaan pendekatannya dengan pendekatan yang dilakukan oleh Sen. Sen tidak pernah membuat ambang batas (*threshold*) kapabilitas yang harus dimiliki oleh setiap orang. Penulis akan menguraikan lebih jauh soal ini pada Bab V.

manusia.⁶⁶ Uraian lebih rinci mengenai hal ini akan dijelaskan pada Bab V dalam kritik Nussbaum terhadap pandangan Sen mengenai kebebasan. Sen memang tidak merinci apa yang disebut sebagai ambang batas minimal kapabilitas utama yang harus dimiliki oleh setiap orang. Namun jika kita melihat keresahan mengenai ukuran kualitas hidup yang kerap dipakai, Sen dan Nussbaum memiliki pandangan dasar yang sama. Ukuran pendapatan per kapita dan produk domestik bruto (PDB) tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk melihat kualitas hidup manusia. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa kualitas hidup manusia ditentukan oleh sejauh mana seseorang dapat mencapai sesuatu yang dianggap bernilai atau yang disebut dengan kapabilitas (Nussbaum dan Sen 2003, 1). Melalui uraian ini kita melihat bahwa pandangan Sen mengenai kapabilitas ditegaskan signifikansinya dan bahkan didorong oleh Nussbaum untuk menjadi bagian dari konstitusi negara yang harus diimplementasikan oleh pemerintah lewat kebijakannya.

d. Kritik Terhadap “Hal-hal Pokok” Rawls

Rumusan Sen mengenai kapabilitas juga dijadikan catatan atas konsep Rawls mengenai hal-hal pokok (*primary goods*). Rawls memahami hal-hal pokok (*primary goods*) sebagai “...beragam kondisi sosial dan semua sarana tujuan yang secara umum diperlukan untuk memampukan warga negara secara layak dalam mengembangkan dua daya moral mereka dan menggunakannya secara utuh, serta untuk mencapai konsepsi mengenai yang baik yang mereka cita-citakan.”⁶⁷ Hal-hal pokok adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup dalam satu masyarakat. Menurut Rawls, konsep ini mengandaikan bahwa orang yang membutuhkannya adalah warga yang memiliki konsepsi politik mengenai manusia yang bebas dan setara, yang dianugerahi dua daya moral, dan dapat bekerjasama dalam satu masyarakat (Rawls 2001, 58). Yang

⁶⁶ Sepuluh kapabilitas utama itu adalah (1) kapabilitas pada kehidupan (*life*), (2) kapabilitas pada kesehatan tubuh (*bodily health*), (3) hak atas integritas tubuhnya (*bodily integrity*), (4) kebebasan menggunakan indra, imajinasi dan pikiran (*sense, imagination and thought*), (5) kapabilitas pada emosi (*emotions*), (6) kapabilitas pada nalar praktis (*practical reason*), (7) kapabilitas untuk berafiliasi (*affiliation*), (8) kapabilitas untuk berhubungan dengan makhluk yang lain (*other species*), (9) kapabilitas pada permainan (*play*) dan (10) kapabilitas untuk mengontrol lingkungan (*control over one's environment*). Lih. Nussbaum, *Creating Capabilities*, 33-34 dan *Women and Human Development*, 78-80. Uraian lebih rinci mengenai sepuluh kapabilitas utama ini akan dijelaskan dalam Bab V.

⁶⁷ “...various social conditions and all-purpose means that are generally necessary to enable citizens adequately to develop and fully exercise their two moral powers, and to pursue their determinate conception of the good.” John Rawls, *Justice as Fairness* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), 57.

dimaksud dengan dua daya moral adalah daya untuk mengerti dan melaksanakan prinsip keadilan; dan daya untuk mengerti konsepsi mengenai yang baik (Rawls 2001, 18-19)

Menurut Rawls, ada lima hal pokok yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan dua daya moral mereka. Yang pertama adalah jaminan hak dan kebebasan dasar (*the basic rights and liberties*). Yang dimaksud dengan hak dan kebebasan dasar adalah kebebasan berpikir, kebebasan suara hati; kebebasan politik; kebebasan berserikat; dan hak serta kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum (Rawls 2001, 44). Hak dan kebebasan dasar ini adalah kondisi institusional yang esensial yang diperlukan setiap warga negara untuk mengembangkan dua daya moral mereka secara layak dan menggunakannya secara utuh. Yang kedua adalah kebebasan bergerak dan pilihan bebas atas pekerjaan. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan yang sudah mereka pertimbangkan. Yang ketiga adalah jaminan hak atas jabatan publik tertentu untuk semua warga negara. Yang keempat adalah pendapatan dan kemakmuran yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Dan yang kelima adalah basis sosial dalam bentuk kehormatan diri (*self-respect*) yang dipahami sebagai aspek yang secara normal penting untuk mengembangkan tujuan dengan kehormatan diri (Rawls 2001, 58-59).

Menurut Rawls, jaminan atas hal-hal pokok bagi warga negara terkait dengan dua prinsip keadilan yang ia rumuskan. Dalam memahami keadilan sebagai *fairness*, ia mengajukan dua prinsip keadilan sebagai pijakan untuk mendesain struktur dasar masyarakat. Dua prinsip keadilannya itu adalah Yang pertama “Setiap orang memiliki klaim tak terbatalkan yang sama untuk sebuah skema yang betul-betul memadai dari kebebasan dasar yang setara, di mana skema itu juga kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua”, dan yang kedua “Ketidaksetaraan sosial dan [ketidaksetaraan] ekonomi adalah [hanya dizinkan] untuk memenuhi dua hal: yang pertama peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua [warga negara] dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang fair; yang kedua memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/*difference principle*).”⁶⁸

⁶⁸ “... (a) each person has the same indefensible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberty, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; and (b) social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all

Dua prinsip keadilan yang ia ajukan didesain untuk membentuk struktur dasar masyarakat yang dapat mengatur pembagian hal-hal pokok kepada masyarakat secara adil. Penentuan hal-hal pokok di atas didasarkan pada pemahaman objektif mengenai kondisi sosial yang melingkupi warga. Jaminan hak dan kebebasan, adanya kesempatan yang adil dan adanya jaminan pendapatan dan kesejahteraan yang layak dimaksudkan agar setiap warga dapat mengembangkan dua daya moral mereka dalam kehidupan sosial (Rawls 2001, 59). Rawls mengatakan bahwa hal-hal pokok adalah apa yang dibutuhkan seseorang sebagai warga negara yang bebas dan setara (Rawls 2001, 60; 1999, 79). Hal-hal pokok ini menjadi bagian dari konsepsi mengenai yang baik yang sudah disepakati oleh semua warga yang majemuk. Dengan demikian, penentuan hal-hal pokok ini sudah melalui pertimbangan atas berbagai pandangan yang ada dalam masyarakat. Isi dari hal-hal pokok itu menjadi semacam konsensus bersama (*overlapping consensus*) dari warga negara yang sangat beragam (bdk. Rawls 2001, 60-61).⁶⁹

Konsep Rawls mengenai hal-hal pokok memiliki kaitan dengan kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai “paling kurang beruntung” atau *the least advantaged*. Dalam menjelaskan siapa yang dimaksud dengan yang paling kurang beruntung, Rawls memperkenalkan konsep hal-hal pokok sebagai sesuatu yang harus dijamin agar mereka tetap memiliki kemampuan mengembangkan dua daya moral mereka dalam kehidupan masyarakat (Rawls 2001, 57-58). Perhatian besar Rawls terhadap mereka yang paling kurang beruntung juga diakui oleh Sen (Sen 2009, 260). Hanya saja, menurut Sen, dalam memerhatikan mereka yang kurang beruntung atau mereka yang kehilangan kapabilitas, kita perlu melihat masalah yang menjadi sumber dari ketidakmampuan itu sendiri. Dalam hal ini Sen cenderung menempatkan hal-hal pokok Rawls sebagai pendekatan yang didasarkan pada perspektif sumber daya (*resource perspective*). Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan kapabilitas. Dalam pandangannya pendekatan kapabilitas lebih efektif dalam mengatasi masalah yang

under conditions of fair equality of opportunity; and, second, they are to be the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle).” Rawls, *Justice as Fairness*, 42-43.

⁶⁹ Dalam hal ini penulis memahami hal-hal pokok (*primary goods*) yang diajukan oleh Rawls dan kapabilitas utama (*central capabilities*) yang diajukan oleh Nussbaum memiliki fungsi yang sama. Keduanya berfungsi untuk menjamin agar martabat setiap orang tetap terjaga. Konsep keduanya juga lahir dari cara yang sama, yakni dianggap sebagai konsensus bersama (*overlapping consensus*) atau titik temu dari berbagai kelompok yang beragam. Uraian Nussbaum mengenai pandangan ini akan kita lihat pada Bab V.

dianggap sebagai sumber ketidakmampuan. Sen mengutip dukungan Elizabeth Anderson yang menilai pendekatan kapabilitas lebih unggul dibanding pendekatan sumber daya. Pendekatan kapabilitas lebih berfokus pada tujuan dibanding sarana dan dianggap lebih mampu mengatasi masalah diskriminasi yang diderita kelompok-kelompok yang tidak mampu (Sen 2009, 262-263).

Menurut Sen, pendekatan kapabilitas lebih memerhatikan masalah kemampuan seseorang untuk mengubah komoditas, pendapatan atau utilitas yang mereka miliki menjadi capaian yang dianggap bernilai atau menentukan bagi kesejahteraan (Sen 1992, 50). Dalam pandangannya, "...bagian penting dari kekuatan pendekatan kapabilitas ada dalam pemindahan [posisi] kita dari ruang komoditas, pendapatan dan manfaat (utilitas) dan lain-lain ke ruang elemen konstitutif dari kehidupan..."⁷⁰ Konsep hal-hal pokok yang diajukan oleh Rawls, menurut Sen, lebih dipahami sebagai sarana menuju kebebasan (*means to freedom*), bukan kebebasan itu sendiri (*freedom to achieve* atau *freedom to function*). Dalam penilaiannya, konsep hal-hal pokok (*primary goods*) Rawls adalah hal yang dapat menopang kebebasan atau bisa menjadi sarana bagi kebebasan seseorang dalam mencapai sesuatu, bukan kebebasan itu sendiri (Sen 1992, 36 dan seterusnya).

Dalam pandangan penulis, meski Sen membuat perbedaan antara konsep hal-hal pokok dan kapabilitas, cukup pasti bahwa pendekatan kapabilitas diajukan Sen pada akhirnya juga bertopang pada sarana-sarana yang memungkinkan adanya kapabilitas. Kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu akan ditentukan oleh hal-hal pokok yang diajukan oleh Rawls. Bagi penulis, kritik Sen atas konsep hal-hal pokok Rawls lebih dipahami sebagai perbedaan antara sarana menuju kebebasan dan kebebasan itu sendiri. Sen tidak menolak signifikansi konsep hal-hal pokok Rawls. Bahkan, konsep ini pada dasarnya telah menjadi batu loncatan bagi Sen dalam merumuskan konsep dan pendekatan kapabilitas yang mencoba langsung mengarah perhatiannya pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok "paling kurang beruntung" (*the least-advantaged*) atau kelompok yang mengalami kehilangan kapabilitas (*capability deprivation*).

⁷⁰ "...an important part of the force of the capability approach lies in moving us away from the space of commodities, incomes, utilities, etc., on to the space of the constitutive elements of living..." Sen, *Inequality Reexamined*, 50.

2.5 Rangkuman

Pandangan Sen mengenai kebebasan yang dipahami dalam dua aspek, proses dan kesempatan, dapat dipahami sebagai satu eksposisi pandangan etis mengenai manusia. Untuk menyebut seorang manusia sebagai manusia bebas, seseorang harus bebas dalam arti bahwa ia tidak dipaksa oleh pihak manapun untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak dikehendaki dan juga harus memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Hal yang dapat dilihat sebagai kebaruan dari rumusan Sen mengenai kebebasan ada dalam konsep kapabilitasnya. Kebebasan tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya paksaan yang dilakukan pihak lain, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*). Kita bisa saja tidak dipaksa oleh siapapun untuk melakukan sesuatu, namun jika pada saat yang sama kita tidak memiliki kemampuan meraih karena berbagai faktor, maka hal seperti itu akan dilihat sebagai masalah ketidakbebasan.

Sen melihat dua aspek kebebasan yang sudah diuraikan sebagai satu kesatuan yang membuat pengertian kebebasan menjadi lebih komprehensif. Kebebasan yang dipahami dalam arti proses tentu saja bukan pengertian baru mengenai kebebasan. Kebebasan yang dipahami sebagai tidak adanya paksaan merupakan pengertian generik kebebasan dalam arti modern pada umumnya. Sen melihat pengertian kebebasan ini sebagai salah satu aspek dari dua aspek kebebasan. Ia menegaskan signifikansi kebebasan ini dalam perumusan pilihan sosial yang dijelaskan dalam Bab IV. Ide utama yang hendak didorong lewat aspek kesempatan adalah masalah kemampuan untuk mencapai atau kapabilitas. Seseorang bisa saja bebas menentukan sesuatu yang dianggap bernilai tanpa paksaan dari siapa pun, namun apakah artinya jika pada saat yang sama ia tidak bisa meraih hal yang dianggap bernilai itu. Karenanya kemampuan seseorang mencapai hal yang dianggap bernilai menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam rumusan mengenai kebebasan.

Pada bab selanjutnya kita akan melihat uraian lebih jauh mengenai kapabilitas. Konsep ini dibagi menjadi dua, yakni kapabilitas untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan kepelakuan (*agency*). Klasifikasi ini kemudian dikenal sebagai kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*). Melalui klasifikasi ini, penulis kemudian masuk pada kritik penting yang diajukan Sen

terhadap pengertian pilihan rasional (*rational choice*). Baginya, pilihan rasional tidak hanya dipahami sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest*), kesejahteraan atau keuntungan pribadi. Pilihan tindakan yang tidak memiliki motif untuk memaksimalkan kepentingan-diri juga dapat disebut rasional sejauh sudah dipertimbangkan secara kritis (*critical scrutiny*). Kritik Sen ini sangat penting untuk membuka kemungkinan adanya rasionalitas pilihan bagi tindakan-tindakan yang didasarkan pada komitmen dan tanggung jawab.

BAB III

KEBEBASAN KESEJAHTERAAN, KEPELAKUAN DAN PILIHAN RASIONAL

3.1 Pengantar

Pada bab II sudah dijelaskan mengapa Sen memasukkan konsep kapabilitas sebagai bagian penting dari pengertian kebebasan. Kebebasan tidak cukup dipahami sebagai tidak adanya paksaan terhadap seseorang dalam menentukan sesuatu. Kebebasan juga perlu dipahami sebagai adanya kapabilitas untuk mencapai sesuatu yang dianggap baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep kapabilitas ini dipahami lebih jauh. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, konsep kapabilitas dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*). Konsep ini memperkaya pengertian kebebasan yang pada umumnya dipahami sebagai tidak adanya paksaan yang berasal dari luar. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) yang merupakan klasifikasi lebih lanjut dari konsep kapabilitas. Dengan kata lain, kemampuan seseorang untuk mencapai dapat dibagi menjadi dua, yakni kapabilitas untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan kepelakuan (*agency*).

Dalam uraian mengenai kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan, ada beberapa hal yang hendak dipertegas oleh Sen. Yang pertama, melalui dua kapabilitas ini, ia menegaskan bahwa hal yang dianggap bernilai dan menentukan pilihan seseorang bukan hanya pertimbangan kesejahteraan, tetapi juga hal lain di luar itu. Dengan klasifikasi ini ia kemudian masuk pada kritiknya terhadap teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang biasa dipahami sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest*). Dalam pandangannya, pilihan rasional tentu bukan hanya pilihan yang didorong oleh motif kepentingan-diri atau keuntungan pribadi. Ia menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang didorong oleh komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab atau tindakan yang tidak didorong oleh motif memaksimalkan kepentingan-diri juga merupakan pilihan tindakan yang rasional sejauh pilihan tersebut sudah diperiksa secara kritis.

Masalah yang juga hendak disinggung dalam konsep kapabilitas ini adalah tentang pengertian kemiskinan. Sen memahami kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima. Ia lebih memahami orang miskin sebagai orang yang kehilangan kapabilitas. Seberapa besar kemampuan seseorang dalam mencapai sesuatu menjadi tolok ukur kualitas hidup yang dinikmati. Seseorang bisa saja memiliki pendapatan yang tinggi namun jika pada saat yang sama ia menderita penyakit yang membutuhkan biaya besar, maka kondisi ini akan membuat kemampuannya meraih sesuatu berkurang. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi namun mereka hidup di dalam rezim otoriter yang membatasi kebebasan berpendapat. Bagi Sen, kondisi ini membuat kapabilitasnya berkurang. Karenanya, kapabilitas untuk meraih sesuatu yang dianggap bernilai menjadi tolok ukur dalam menilai seberapa besar kualitas hidup seseorang.

Hal yang juga akan disinggung dalam bab ini adalah hubungan antara kebebasan dan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam uraian Sen tentang kontribusi sistem demokratis bagi upaya peningkatan kesejahteraan. Sen menilai pandangan Lee Kuan Yew mengenai dampak positif pembatasan hak sipil dan politik bagi kesejahteraan ekonomi sama sekali tidak berdasar. Jika dilihat secara komparatif, ia justru menilai sebaliknya. Negara demokratis memiliki kemampuan lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Namun lebih dari itu, Sen sendiri memiliki penilaian bahwa pemenuhan hak sipil dan politik merupakan sesuatu yang bernilai pada dirinya dan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan. Dengan pemahaman ini ia tidak memahami pembangunan hanya dalam arti perluasan kesejahteraan tetapi juga pada perlindungan kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan media dan kebebasan berserikat.

Terakhir, Sen menyinggung masalah kontrol dalam ide kebebasannya. Para pengusung teori kebebasan pada umumnya mensyaratkan adanya kontrol langsung (*direct control*) dalam pengertian kebebasan. Bagi Sen, dengan syarat ini pengertian kebebasan menjadi sangat terbatas. Ia menilai, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang tidak sepenuhnya bisa kita kontrol secara langsung. Namun kondisi itu tentu saja tidak akan memengaruhi kemampuan kita untuk mencapai (*the ability to achieve*). Kapabilitas kita untuk mencapai ditopang oleh kondisi sosial, kondisi politik dan juga kondisi lingkungan di mana kita hidup. Semua kondisi itu tentu saja tidak

sepenuhnya berada dalam kontrol siapa pun secara langsung. Dengan pemahaman ini, Sen lebih memahami konsep kebebasannya sebagai kondisi yang juga bergantung pada banyak faktor di luar diri si pelaku itu sendiri.

3.2 Kapabilitas Kesejahteraan dan Kepelakuan

Menurut Sen, kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu dapat diklasifikasi menjadi kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) (Sen 2009, 288-289). Dengan klasifikasi ini, Sen ingin menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam memilih satu tindakan. Seseorang bisa menilai hal di luar kesejahteraan dalam memilih tindakan yang harus diambil. Karenanya, secara garis besar, ada dua pertimbangan yang dianggap bernilai oleh setiap orang, yakni kesejahteraan (*well-being*) dan kepelakuan (*agency*). Dengan menegaskan konsep kepelakuan, ia berpandangan bahwa tindakan manusia tidak hanya didorong oleh motif kesejahteraan atau yang terkait dengan kepentingan-diri (*self-interest*). Tindakan seseorang bisa saja didorong oleh sesuatu yang sama sekali berada di luar kepentingan-dirinya.

Rumusan mengenai kebebasan kepelakuan merupakan kritik yang diajukan Sen terhadap pandangan mapan mengenai teori pilihan rasional yang biasa dipahami sebagai maksimalisasi kepentingan-diri (*self-interest*). Satu pilihan dapat disebut rasional jika dan hanya jika pilihan tersebut dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Pandangan ini tidak hanya ada di dalam ekonomi, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain seperti politik dan hukum. Bagi Sen, jika rasionalitas sebuah pilihan hanya dipahami demikian, dampaknya cukup serius. Pilihan tindakan yang tidak didasari oleh motif maksimalisasi kepentingan-diri akan disebut sebagai pilihan tidak rasional. Seseorang yang bekerja tulus membantu para korban bencana dan tidak memedulikan kondisi dirinya akan disebut tidak rasional dalam kerangka ini. Sen menolak pandangan ini dan ia menunjukkan bahwa rasionalitas pilihan tidak hanya ditentukan oleh motif maksimalisasi kepentingan-diri. Seseorang bisa saja mempertimbangan hal di luar aspek kesejahteraan sebagai pertimbangan tindakannya dan tetap disebut sebagai pilihan rasional.

Dengan demikian, kita harus terbuka terhadap pluralitas nilai yang dikejar oleh setiap orang. Adanya pluralitas nilai ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan

dalam rumusan kapabilitas yang diajukan Sen (Sen 2009, 233-234). Apa yang dianggap bernilai oleh setiap orang sangatlah beragam. Satu orang dengan orang lain, dan satu masyarakat dengan masyarakat lain memiliki cita-cita dan konsep nilai yang berbeda-beda. Semua pilihan nilai ini tentu saja dapat disebut sebagai pilihan rasional. Dalam hal ini Sen tidak memahami konsep pilihan rasional hanya sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Mengenai pengertian pilihan rasional akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab IV. Yang ingin ditunjukkan pada bab ini adalah adanya motif tindakan selain motif kesejahteraan. Secara umum ia menyebutnya sebagai kepelakuan.

a. Kebebasan Kesejahteraan

Sen mendefinisikan kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) sebagai kebebasan untuk mencapai sesuatu yang menentukan kesejahteraan seseorang (Sen 1992, 57; bdk. 1985, 201).¹ Yang dimaksud dengan kesejahteraan merujuk pada seluruh manfaat dan keuntungan yang dinikmati oleh seseorang. Sen menyebut konsep manusia dalam konsep kesejahteraan sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) (Sen 1985, 203-204). Dengan pengertian ini, kebebasan kesejahteraan dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang mencapai hidup yang berkecukupan (tidak kelaparan), sehat dan dapat mengakses pendidikan yang baik. Semua capaian ini dimaknai sebagai kondisi kesejahteraan. Namun hal penting yang ingin digarisbawahi Sen adalah perbedaan antara kebebasan kesejahteraan, capaian (*achievement*) dan sarana menuju kebebasan (*means to freedom*).

Sen kerap membedakan antara kapabilitas dan capaian aktual (*functionings*). Dua konsep ini sama-sama berhubungan dengan konsep kesejahteraan tetapi memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama, lebih dipahami sebagai “kemampuan untuk mencapai”, sementara yang kedua sebagai “capaian aktual” (*actual achievement*) atau capaian kesejahteraan (*well-being achievement*). Melalui kebebasan kesejahteraan, kita memaknainya sebagai kebebasan atau kemampuan untuk mencapai sesuatu yang terkait dengan kesejahteraan, sementara melalui capaian kesejahteraan kita memaknainya sebagai capaian aktual atau sesuatu yang dicapai secara aktual oleh seseorang.

¹ “...one’s freedom to achieve those things that are constitutive of one’s well-being.” Amartya Sen, *Inequality Reexamined* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 57.

Dalam *Inequality Reexamined* (1992) Sen menulis bahwa:

Posisi seseorang dalam sebuah tata sosial dapat dinilai dalam dua perspektif (1) capaian aktual, dan (2) kebebasan untuk mencapai. Capaian berfokus pada sesuatu yang ingin kita gapai, dan kebebasan [berfokus] pada kesempatan real untuk mencapai sesuatu yang kita anggap bernilai.²

Ia menyebut yang pertama (capaian aktual) sebagai *functionings* dan yang kedua (kebebasan untuk mencapai) sebagai kapabilitas. Konsep capaian aktual (*actual achievement*) bisa dipahami dalam arti kondisi (*beings*) atau aktivitas (*doings*) (Sen 1992, 31). Yang termasuk dalam kategori kondisi misalnya adalah kecukupan nutrisi, berbadan sehat, hingga kesejahteraan yang lebih kompleks seperti kondisi bahagia, kehormatan dan keterlibatan dalam komunitas. Sementara yang termasuk dalam kategori aktivitas misalnya berjalan, melihat, makan dan seterusnya. Sen kadang menyebut pengertian ini sebagai capaian aktual (*functionings*) atau capaian kesejahteraan (*well-being achievement*). Pengertian capaian aktual dalam konteks kesejahteraan adalah sejauh mana aspek kesejahteraan seseorang itu dapat “berfungsi” dalam arti yang luas (Sen 1985, 197-198).

Untuk memperjelas perbedaan antara capaian aktual dan kapabilitas, Sen kerap memberikan contoh tentang dua orang yang memiliki pendapatan sama namun yang satu dalam kondisi sakit atau cacat dan yang lain dalam kondisi normal atau sehat. Dalam pandangannya, meski memiliki pendapatan sama, perbedaan kondisi dua orang ini telah membuat kapabilitas keduanya berbeda. Orang pertama bisa menghabiskan pendapatan yang dimiliki untuk biaya pengobatan atau menopang kebutuhan yang diakibatkan oleh kondisi cacatnya, sementara orang kedua akan menggunakan pendapatannya itu tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang sakit atau cacat. Dengan demikian, dalam pandangan Sen, meski memiliki penghasilan yang sama namun kapabilitas (kesempatan real) dua orang ini bisa berbeda. Baginya, kemampuan untuk mengubah apa yang kita miliki menjadi capaian tidak ditentukan hanya oleh uang, tetapi oleh banyak faktor. Beberapa faktor itu misalnya adalah kondisi kesehatan,

² “A person’s position in a social arrangement can be judged in two different perspectives, viz. (1) the actual achievement, and (2) the freedom to achieve. Achievement is concerned with what we manage to accomplish, and the freedom with the real opportunity that we have to accomplish with what we value.” Sen, *Inequality Reexamined*, 31. Bandingkan juga dalam kutipan berikut: “For one thing, it would seem to disrupt the neat structure of (1) *functionings* achieved being related to the achievement of well-being, and (2) the capability to function being related to the freedom to achieve well-being.” Sen, *Inequality Reexamined*, 50.

ukuran tubuh, umur, jenis kelamin, hamil atau tidak hamil, kondisi alam, ancaman wabah penyakit, akses terhadap layanan kesehatan, pengetahuan mengenai nutrisi dan lain-lain (Sen 1985, 198-189).

Hal yang juga perlu dibedakan dari konsep kapabilitas adalah konsep mengenai kelimpahan (*opulence*). Konsep ini terkait dengan pandangan Rawls tentang hal-hal pokok (*primary goods*)³ dan pandangan Ronald Dworkin mengenai sumber daya (*resources*).⁴ Sen memahami konsep ini sebagai kekuasaan seseorang terhadap sesuatu yang ada di luar. Konsep kelimpahan, hal-hal pokok dan juga sumber daya tentu saja penting, namun dalam pandangan Sen, semua konsep ini tidak menjadi ukuran dalam melihat kualitas hidup seseorang. Dua orang yang memiliki kekayaan yang sama bisa saja memiliki kapabilitas yang berbeda. Dalam pandangan Sen, untuk sampai pada capaian aktual, ada banyak faktor yang menentukan kemampuan seseorang. Kekayaan atau pendapatan bukan satu-satunya penentu dalam melihat kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu. Karenanya, meski beberapa orang memiliki kekayaan yang sama, namun mereka dapat memiliki kapabilitas yang berbeda (Sen 1985, 198-202). Sen lebih memahami kelimpahan, hal-hal pokok dan sumber daya sebagai sarana menuju kebebasan (*means to freedom*), bukan kebebasan itu sendiri (*freedom to achieve*).

Di antara tiga konsep yang berbeda itu (sarana, kapabilitas dan capaian aktual), Sen memberikan prioritas perhatian pada konsep kapabilitas. Pendekatan yang ia gunakan kemudian lebih dikenal sebagai pendekatan kapabilitas (*capability approach*) yang menekankan masalah kemampuan untuk mencapai (*ability to achieve*), bukan capaian itu sendiri. Sementara para ekonom pada umumnya lebih memerhatikan capaian dibanding kapabilitas (Sen 1992, 32). Salah satu penjelasan mengapa aspek capaian lebih diperhatikan dibanding kapabilitas adalah karena aspek capaian lebih mudah untuk diamati. Hal ini diakui oleh Sen sendiri bahwa “Nyatanya, seperangkat kapabilitas tidak

³ Dalam bab sebelumnya penulis sudah menjelaskan hal-hal apa saja yang termasuk bagian dari hal-hal pokok Rawls. Salah satu hal yang kerap disinggung Sen adalah pendapatan (*income*). Namun sebenarnya isi dari hal-hal pokok Rawls bukan hanya itu, tetapi juga meliputi hak dan kebebasan dasar serta kesempatan yang fair.

⁴ Menurut Ronald Dworkin, yang dimaksud dengan sumber daya adalah sumber daya apapun yang dimiliki secara pribadi oleh individu. Ia memahami kepemilikan pribadi bukan hanya sekadar hubungan antara seseorang dan sumber daya material tetapi juga merupakan hubungan yang terbuka pada banyak aspek yang harus ditetapkan secara politik. Uraian mengenai konsep sumber daya dan tentang kesetaraan sumber daya dapat dilihat dalam Ronald Dworkin, *Sovereign Virtue* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), 65-119.

dapat diamati secara langsung, dan harus dibangun di atas dasar asumsi...”⁵ (Sen 1992, 52).

Dalam pandangan Sen, perhatian pada masalah kapabilitas justru memudahkan kita memahami status seorang individu dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, kita bisa melihat kemampuan untuk mengubah komoditas, pendapatan atau manfaat (utilitas) menjadi capaian yang dianggap bernilai atau konstitutif bagi kesejahteraan seseorang (Sen 1992, 50). Katanya, “...bagian penting dari kekuatan pendekatan kapabilitas ada dalam pemindahan [posisi] kita dari ruang komoditas, pendapatan dan manfaat (utilitas) dan lain-lain ke ruang elemen konstitutif dari kehidupan...” (Sen 1992, 50). Lebih lanjut ia menulis:

Kapabilitas pertama-tama merupakan ungkapan dari kebebasan untuk meraih capaian (*functionings*) yang bernilai. Konsep ini tertuju langsung pada kebebasan daripada sarana untuk mencapai kebebasan, dan ia juga mengidentifikasi berbagai alternatif real yang kita miliki. Dalam arti ini, ia dapat disebut sebagai ungkapan dari kebebasan substantif. Sejauh capaian (*functionings*) itu sesuatu yang konstitutif dari kesejahteraan, [maka] kapabilitas merepresentasikan kebebasan seseorang untuk mencapai kesejahteraan.⁶

Menurut Sen, di dalam ide kapabilitas terkandung berbagai pilihan capaian yang bisa kita ambil. “Kapabilitas yang kita perhatikan adalah kemampuan kita untuk mencapai berbagai kombinasi *functionings* yang dapat kita bandingkan dan kita nilai dengan yang lain, dalam arti apa yang kita memiliki alasan untuk menilai [suatu hal].”⁷ Sebagaimana dalam ilustrasi tindakan tidak makan pada orang yang memilih berpuasa, dalam tindakan ini ia tidak terpaksa untuk tidak makan karena tidak ada makanan. Orang yang memilih tidak makan karena hendak berpuasa dan orang yang tidak makan karena tidak ada makanan jelas sangat berbeda, meski keduanya sama-sama tidak makan. Yang pertama tidak makan karena dengan kebebasannya memilih berpuasa,

⁵ “In fact, the capability set is not directly observable, and has to be constructed on the basis of presumptions...” Sen, *Inequality Reexamined*, 52.

⁶ “Capability is primarily a reflection of the freedom to achieve valuable functionings. It concentrates directly on freedom as such rather than on the means to achieve freedom, and it identifies the real alternatives we have. In this sense it can be read as a reflection of substantive freedom. In so far as functionings are constitutive of well-being, capability represents a person’s freedom to achieve well-being.” Sen, *Inequality Reexamined*, 49.

⁷ “The capability that we are concerned with is our ability to achieve various combinations of functionings that we can compare and judge against each other in terms of what we have reason to value.” Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 233.

bukan karena tidak ada makanan. Sementara yang kedua, ia tidak makan karena memang tidak ada sesuatu yang bisa dimakan.

b. Kebebasan Kepelakuan

Melalui konsep kepelakuan (*agency*), Sen mengkritik prinsip utilitarian yang mendasarkan pada “tesis bahwa fakta moral fundamental hanya ada pada fakta mengenai kesejahteraan individu.”⁸ Ia sendiri sejatinya tidak menolak prinsip ini secara total. Yang ia tolak adalah pandangan yang menyatakan bahwa aspek kesejahteraan merupakan satu-satunya penjelasan untuk memahami motif tindakan manusia. Dalam hal ini, ia ingin menggugurkan pandangan yang menempatkan kesejahteraan sebagai satu-satunya informasi – atau yang disebut “*Well-being As Informational Foundation*” (WAIF) – dalam memahami tindakan. Ia memastikan bahwa selain aspek kesejahteraan, tindakan manusia juga dapat dipandu oleh komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban (Sen 1985, 185-187).

Sen mendefinisikan kebebasan kepelakuan sebagai kebebasan seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang ia anggap bernilai atau ia anggap penting.⁹ Menurutnya, ruang lingkup kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) lebih luas daripada konsep kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*). Sebagai pelaku, manusia tidak hanya dipandu oleh motif kesejahteraan pribadi tetapi juga oleh seluruh (totalitas) tujuannya. Sebagaimana sudah dikatakan, dalam kebebasan kesejahteraan, motif pelaku hanya ada pada manfaat sehingga dalam konsep kebebasan ini manusia lebih dilihat sebagai penerima manfaat (*beneficiary*). Sementara dalam memahami kebebasan kepelakuan (*agency*), kita tidak bisa memahaminya tanpa merujuk pada tujuan, kesetiaan, kewajiban dan secara umum, pada konsepsi mengenai yang baik (*the conception of the good*). Kebebasan kepelakuan memiliki ruang yang lebih luas, yang tidak terikat hanya pada satu tujuan melainkan pada banyak tujuan (Sen 1985, 203-204).

Dalam pandangan Sen, karena ada hubungan kuat antara ide kepelakuan dan konsepsi mengenai yang baik, maka cita-cita yang dibangun dalam perspektif

⁸ “...the thesis that the only fundamental moral facts are facts about individual well-being”. Amartya Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” *The Journal of Philosophy* 82 (1985): 185. Kalimat ini sebenarnya merupakan kutipan dari Thomas M. Scanlon, “Contractualism and Utilitarianism” dalam *Utilitarianism and Beyond*, ed. Sen dan Williams (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 108.

⁹ “A person’s ‘agency freedom’ refers to what the person is free to do and achieve in pursuit of whatever goals or values he or she regards as important.” Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” 203.

kepelakuan kerap melampaui kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Salah satu ciri khas konsep kepelakuan ini adalah ide tentang manusia sebagai pelaku yang bertanggung jawab (*persons as responsible agents*) (Sen 1985, 204). Melalui ide ini, seseorang tidak hanya berpikir tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri, tetapi juga sesuatu yang baik untuk kehidupan manusia yang lebih luas. Karenanya, bisa saja pilihan yang diambil atas dasar kepelakuan akan bertentangan dengan pilihan yang muncul dari pertimbangan kesejahteraan. Komitmen seseorang untuk berpartisipasi membantu orang lain yang tertimpa bencana dapat dilihat sebagai ekspresi dari tindakan kepelakuan yang bertentangan dengan pertimbangan kesejahteraan (*well-being*). Dari perspektif kepentingan-diri, tentu akan lebih baik jika kita tetap tinggal di rumah yang nyaman dan aman dari dampak bencana (bdk. Sen 1992, 59).

Crocker dan Robeyns¹⁰ merangkum empat ciri tindakan kepelakuan (*agency*) Sen sebagai berikut. Yang pertama, di dalam kepelakuan harus terkandung prinsip menentukan sendiri (*self-determination*). Dengan prinsip ini, seseorang memutuskan sendiri apa yang menjadi tujuannya tanpa ada paksaan dari pihak luar. Paksaan eksternal untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dapat dianggap sebagai kekerasan terhadap prinsip kepelakuan. Dimensi ini menjadi prinsip yang sangat penting dalam aspek kepelakuan. Yang kedua, pilihan yang diambil sudah didasarkan pada pertimbangan nalar atau rasio (*reason orientation* dan *deliberation*). Pilihan yang diambil bukan karena paksaan tradisi atau dogma, melainkan hasil dari proses pertimbangan yang kritis. Dalam mempertimbangkan hal itu, seseorang memiliki kesempatan untuk mempertanyakan dan mengevaluasi nilai atau norma yang ada. Yang ketiga adalah dimensi tindakan (*action*). Sebuah keputusan kepelakuan bukan hanya sekadar keputusan bebas dan kritis, tetapi lebih dari itu, ia harus terungkap dalam tindakan nyata. Dan dimensi kepelakuan yang keempat, tindakan yang dilakukan seorang pelaku diharapkan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perluasan kebebasan dan perbaikan hidup manusia. Semakin luas kebebasan yang diciptakan

¹⁰ David A. Crocker dan Ingrid Robeyns secara bersama menulis sebuah artikel berjudul "Capability and Agency" dalam *Amartya Sen* yang diedit oleh Christopher W. Morris, 2010. Crocker adalah peneliti di The Institute for Philosophy and Public Policy dan The School of Public Policy di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Pada 2008 ia menulis buku *Ethics of Global Development: Agency, Capability and Deliberative Democracy* yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Sementara Robeyns adalah Profesor Filsafat Praktis di Universitas Erasmus, Rotterdam. Ia belajar filsafat dan ekonomi serta meraih doktor di Universitas Cambridge dengan sebuah disertasi mengenai ketidaksetaraan gender dan pendekatan kapabilitas.

semakin besar pula kemampuan manusia untuk menentukan hidupnya (Crocker dan Robeyns 2010, 80-82).

Terkait dengan nilai tanggung jawab dalam ide kepelakuan, Sen menghubungkan ide ini dengan konsep daya efektif (*effective power*). Menurutnya, kapabilitas dan secara khusus kebebasan kepelakuan adalah bagian dari daya efektif yang dimiliki seseorang. Dengan daya efektif yang dimiliki, seseorang dituntut bertanggung jawab melakukan sesuatu yang bisa memperluas kebebasan orang lain (Sen 2009, 271). Katanya "...jika seseorang memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan [perubahan] yang ia lihat akan dapat mengurangi ketidakadilan di dunia, maka ada alasan yang kuat dan masuk akal untuk melakukan hal itu."¹¹ Pandangan ini merupakan uraian lebih lanjut dari konsep kepelakuan yang mengandung tanggung jawab dan kewajiban melakukan sesuatu yang sesuai dengan konsepsinya mengenai yang baik (Sen 1985, 204). Tuntutan tanggung jawab melakukan satu kewajiban ini datang karena adanya daya efektif untuk melakukan kewajiban itu. Konsep mengenai daya efektif yang ada pada seseorang sekaligus menjadi penolakan Sen terhadap konsep kewajiban yang didasarkan pada kontrak institusional. Seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu sejatinya bukan karena ia sudah terikat pada kontrak tertentu, tetapi karena memiliki daya efektif untuk melakukan sesuatu (Sen 2009, 205-207).¹²

Sen kemudian membedakan dua macam tuntutan kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban yang sempurna atau kewajiban langsung (*perfect obligation*),¹³ sedangkan yang kedua adalah kewajiban tak sempurna atau kewajiban tidak langsung (*imperfect obligation*). Kondisi para pengemis di jalan-jalan, meski kita bukan saudara atau kerabat mereka dan juga bukan pejabat yang mengurus masalah-masalah sosial (yang terikat kontrak untuk bertanggung jawab terhadap masalah sosial), sebenarnya

¹¹ "...if someone has the power to make difference that he or she can see will reduce injustice in the world, then there is a strong and reasoned argument for doing just that..." Sen, *The Idea of Justice*, 271.

¹² Menurut Sen, dalam hubungan kontrak terkandung prinsip timbal balik dan kerjasama yang diperkuat melalui kontrak. Dalam pandangannya, kewajiban tidak datang semata karena kontrak, tetapi bisa lahir dari daya efektif (*effective power*) yang dimiliki seseorang. Ia mengutip perspektif kewajiban yang diajukan oleh Budha dalam *Sutta-Nipata* tentang kewajiban seorang ibu untuk merawat anaknya. Dengan perspektif ini, kewajiban seorang ibu untuk merawat anaknya tidak didasarkan pada prinsip timbal balik dan kerjasama tetapi karena daya efektif yang dimiliki seorang ibu. Lih. Sen, *The Idea of Justice*, 205-206.

¹³ Penulis cenderung untuk menerjemahkan "*perfect obligation*" sebagai "kewajiban langsung" dibanding "kewajiban sempurna" dan "*imperfect obligation*" sebagai "kewajiban tidak langsung". Dalam pandangan penulis, penerjemahan ini lebih mudah dipahami.

tetap menuntut kita untuk bertanggung jawab dan membantu mereka keluar dari ketidakbebasan yang dialami. Tuntutan untuk bertanggung jawab kepada mereka memang tidak didasarkan pada ide kewajiban langsung (*perfect obligation*), melainkan pada tuntutan kewajiban tidak langsung (*imperfect obligation*). Menurut Sen, tuntutan untuk bertanggung jawab kepada mereka yang tidak menjadi tanggung jawab kita secara langsung adalah karena adanya daya efektif yang kita miliki. Hal yang menjadi dasar bagi tuntutan untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu sebenarnya bukan karena ikatan kontraktual tertentu, melainkan karena kita memiliki daya efektif (*effective power*) untuk melakukan perubahan dan memperluas kebebasan orang yang kehilangan kapabilitas (Sen 2009, 372-373).

Sen menjelaskan perbedaan kewajiban langsung dan tidak langsung lewat ilustrasi yang diinspirasi dari kejadian nyata pada 1964 di Queens, New York. Katanya, seorang wanita bernama Catherine (Kitty) Genovese secara berulang-ulang dianiaya oleh seseorang dan disaksikan oleh orang lain lewat apartemen tempat mereka tinggal. Namun sayang, teriakan minta tolongnya diabaikan oleh orang-orang yang menyaksikan. Dari kejadian ini, ada tiga hal yang mesti dibedakan namun terhubung satu sama lain. Yang pertama, kebebasan perempuan tersebut untuk tidak disakiti telah dirusak. Yang kedua, kewajiban si penganiaya untuk tidak menganiaya dan tidak membunuh juga sudah dirusak. Yang ketiga, kewajiban orang-orang yang menyaksikan untuk menolong orang yang mengalami penganiayaan juga sudah dirusak. Dari tiga hal ini, menurut Sen, yang pertama adalah isu utama, yang kedua pelanggaran terhadap kewajiban langsung (*perfect obligation*) dan yang ketiga pelanggaran terhadap kewajiban tak langsung (*imperfect obligation*) (Sen 2009, 374).

Dalam pandangan Sen, setiap pribadi dan institusi sejatinya memiliki tanggung jawab mengatasi ketidakbebasan yang terjadi di sekitarnya. Katanya “Sebagai orang yang hidup bersama, kita tidak bisa lari dari pemikiran bahwa kejadian buruk yang kita lihat di sekitar juga merupakan masalah kita. Masalah-masalah itu adalah tanggung jawab kita...”¹⁴ Ketika kita menyaksikan peristiwa yang melanggar kebebasan dan hak orang lain, sebagai manusia kita memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya

¹⁴ “As people who live...together, we cannot escape the thought that the terrible occurrence that we see around us are quintessentially our problems. They are our responsibility...” Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, INC, 1999), 282.

mengatasi dan mengurangi ketidakadilan yang terjadi. Ia menulis, “sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kita tidak bisa menghindari dari tugas menilai sesuatu dan apa yang perlu dilakukan.”¹⁵ Kewajiban itu datang karena adanya kemampuan. Tanggung jawab untuk mengurangi kondisi yang menyedihkan adalah karena kita mengetahui itu dan kita memiliki kemampuan untuk menolong dan melakukan perbaikan (Sen 1999, 283).

Dalam pandangan Sen, tanggung jawab itu terarah kepada individu dan juga institusi sosial, baik yang bersifat formal atau non-formal. Karenanya seluruh institusi yang memiliki daya efektif secara otomatis memiliki kewajiban terlibat dalam mengatasi masalah ketidakbebasan. Sen menulis bahwa:

Komitmen sosial terhadap kebebasan individu tentu saja tidak perlu beroperasi hanya melalui negara, tetapi juga melibatkan institusi-institusi yang lain: organisasi politik dan sosial, komunitas, pelaku non-pemerintah [NGO] dengan berbagai macamnya, media dan sarana pemahaman dan komunikasi publik yang lain dan institusi yang memungkinkan berfungsinya pasar dan hubungan kontraktual.¹⁶

Dengan pandangan ini, bagi Sen, tanggung jawab untuk mengatasi masalah ketidakbebasan tidak hanya ditujukan pada institusi negara, tetapi juga pada seluruh pihak yang memiliki daya efektif untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan sosial. Itu artinya, pasar dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat.

Dalam upaya mencapai kondisi yang diharapkan, Sen membuat klasifikasi antara cita-cita yang dicapai dengan partisipasi dan tanpa partisipasi pelaku. Pada yang pertama, cita-cita itu terwujud karena si pelaku terlibat aktif dalam mencapainya.¹⁷ Sementara yang kedua, kebetulan ada kesesuaian antara apa yang diharapkan oleh seseorang dan apa yang terjadi di luar.¹⁸ Misalnya jika kita punya harapan bahwa Jakarta bebas dari macet, kita bisa melihatnya dari dua perspektif tersebut. Dari perspektif yang pertama, harapan itu terwujud karena kita terlibat aktif dalam upaya

¹⁵ “As competent human beings, we cannot shirk the task of judging how things are and what need to be done.” Sen, *Development as Freedom*, 283.

¹⁶ “The social commitment to individual freedom need not, of course, operate only through the state, but must also involve other institutions: political and social organizations, community-based arrangements, non-governmental agencies of various kinds, the media and other means of public understanding and communication, and the institutions that allow the functioning of markets and contractual relations.” Sen, *Development as Freedom*, 284.

¹⁷ “The occurrence of such things brought about by one’s own efforts.” Sen, *Inequality Reexamined*, 57

¹⁸ “The occurrence of those things that one values and one aims at achieving.” Sen, *Inequality Reexamined*, 57

mengurangi kemacetan bersama-sama dengan pemerintah dan pihak lain. Sementara dari perspektif kedua, harapan itu bisa saja tercapai karena kebetulan pemerintah Jakarta membuat kebijakan yang mendukung terwujudnya Jakarta yang bebas dari kemacetan. Sen menyebut yang pertama sebagai sukses kepelakuan instrumental (*instrumental agency success*) dan yang kedua sebagai sukses kepelakuan yang terealisasi (*realized agency success*). Perbedaan antara keduanya terletak pada ada dan tidak adanya partisipasi pelaku dalam mencapai sesuatu yang dicita-citakan (Sen 1992, 57-58).

Terkait dengan hubungan antara kebebasan kepelakuan dan kesejahteraan, kebebasan kepelakuan bisa saja berkontribusi positif bagi kebebasan kesejahteraan. Namun, kebebasan kepelakuan juga bisa memiliki jalan yang berbeda dengan kebebasan kesejahteraan. Pada umumnya, ketika seseorang memutuskan pilihan yang dianggap bernilai, aspek kesejahteraan akan selalu menjadi bahan pertimbangan. Namun dalam kenyataannya, aspek kesejahteraan tidak selalu menjadi satu-satunya pertimbangan. Kemungkinan terjadinya gerak yang berbeda antara motif kesejahteraan dan kepelakuan adalah karena perbedaan wilayah operasi dua konsep ini. Kebebasan kesejahteraan lebih didasari pada kesejahteraan atau keuntungan pribadi (*advantage*), sementara kebebasan kepelakuan terkait dengan penilaian mengenai yang baik dan juga tanggung jawab yang didasari pada daya efektif yang dimiliki (Sen 1985, 206; bdk. 1992, 59).

Kemungkinan terjadinya perbedaan jalan dua kebebasan ini dapat dilihat dalam ilustrasi berikut yang dibuat oleh Sen. Bayangkan jika seseorang sedang bersantai di tepi pantai di sore hari dengan matahari yang hangat, menikmati makanan dan minuman yang lezat. Namun tiba-tiba ia melihat seorang anak yang tengah tenggelam di lepas pantai dan meminta tolong. Dalam perhitungannya, ia memiliki kemampuan untuk menolong anak itu dan kebetulan tidak ada orang lain yang bisa diminta untuk menolong. Atas dasar itu, ia kemudian merasa harus menolong anak itu karena rasa tanggung jawab dan daya efektif yang ia miliki. Keputusan untuk menolong anak itu tentu akan mengurangi kenyamanan dan kesenangan yang tengah ia nikmati. Itu artinya kebebasan kesejahteraannya menyusut. Keputusan untuk menolong anak yang tenggelam dapat kita pahami sebagai ekspresi dari kebebasan kepelakuan yang berjalan secara kontradiktif dengan keinginannya untuk bersantai di tepi pantai (Sen 1985, 206-207).

3.3 Komitmen Kepelakuan dan Pilihan Rasional

Adanya kemungkinan kontradiksi antara kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan berdampak pada kritik terhadap pengertian teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Di kalangan ekonom arus utama, teori pilihan rasional dipahami sebagai pilihan yang memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest*). Sen mengatakan bahwa dalam perspektif ekonomi, juga dalam politik dan hukum, “orang-orang memilih secara rasional jika dan hanya jika secara masuk akal mereka meraih kepentingan-diri mereka, dan tidak lain”.¹⁹ Pengertian ini dipengaruhi oleh pemahaman yang diajukan Francis Ysidro Edgeworth yang meringkus pengertian pilihan rasional sebagai pilihan atau tindakan yang didorong hanya oleh motif kepentingan-diri (*self-interest*) (Sen 1977, 317; 2009, 184).²⁰ Dalam pemahamannya, motif kepentingan-diri menjadi dasar dalam menilai apakah sebuah pilihan atau tindakan dapat disebut rasional atau tidak rasional. Pengertian pilihan rasional dalam arti ini dikenal sebagai konsep rasionalitas manusia ekonomi (*homo economicus*). Menurut Sen, asumsi yang ada di dalam konsep ini adalah sosok manusia yang egois.

Jika pengertian pilihan rasional dipahami demikian, lantas bagaimana kita memahami status tindakan altruistik, apakah tindakan yang didasarkan pada altruisme dapat disebut sebagai rasional? Dalam memahami tindakan semacam itu, ukuran yang dipakai adalah apakah ada motivasi kepentingan-diri di dalamnya atau tidak. Jika ada, maka kita dapat menyebutnya sebagai tindakan atau pilihan rasional. Ada dua contoh tindakan altruistik yang diangkat Sen. Yang pertama adalah tentang orang yang merasa tidak enak hidup dalam masyarakat yang timpang dan kemudian ia melakukan sesuatu yang dapat mengurangi ketimpangan tersebut. Tindakan mengurangi ketimpangan itu juga didorong oleh motif untuk mengurangi rasa tidak enak yang ada di dalam diri pelaku. Menurut Sen, di dalam tindakan altruistik seperti ini sebenarnya masih terkandung motivasi kepentingan-diri sehingga karenanya dapat disebut sebagai tindakan rasional. Sementara orang yang melakukan hal yang sama namun dengan pertimbangan karena kondisi ketimpangan adalah hal buruk bagi masyarakat sehingga

¹⁹ “...people choose rationally if and only if they intelligently pursue their self-interest, and nothing else.” Sen, *The Idea of Justice*, 179.

²⁰ Pengertian pilihan rasional ini menjadi definisi standar dalam teori ekonomi tradisional dan juga teori permainan (*game theory*). Lih. Amartya Sen, “The Formulation of Rational Choice” *The American Economic Review* 84 (1994): 385.

ia harus bertindak untuk mengurangi ketimpangan, tidak peduli apakah itu enak atau tidak enak bagi dirinya, maka di dalam tindakan ini tidak lagi terkandung motivasi kepentingan-diri. Pertanyaannya, apakah tindakan seperti ini disebut tidak rasional hanya karena tidak ada motivasi kepentingan-diri di dalamnya? (Sen 2009, 179-180).

Penulis akan menjelaskan dua tindakan altruistik di atas dan menjelaskan perbedaan antara konsep simpati dan komitmen. Namun sebelum itu kita perlu melihat catatan Sen mengenai pengertian manusia ekonomi di atas. Menurutnya, konsep manusia ekonomi bermula dari satu kutipan terkenal milik Adam Smith dalam *Wealth of Nations* yang mengatakan bahwa “Bukan karena kebaikan hati si tukang daging, tukang bir atau tukang roti yang dapat kita harapkan untuk makan malam kita, namun [itu semua adalah] karena kepentingan pribadi mereka.”²¹ Kutipan ini telah dipahami secara keliru dengan menjadikan konsep cinta-diri (*self-love*) sebagai satu-satunya motivasi tindakan manusia. Dalam pandangan Sen, konsep cinta-diri yang menjadi dasar bagi tindakan yang berorientasi pada kepentingan-diri sejatinya bukan satu-satunya motivasi tindakan manusia yang dipahami oleh Smith.²² Menurutnya, selain cinta-diri, juga ada simpati, kemurahan hati (*generosity*) dan semangat publik (*public spirit*). Di dalam kemurahan hati dan semangat publik sudah tidak ada lagi motif kepentingan-diri (Sen 2009, 184-187).

Kritik Sen terhadap konsep manusia ekonomi yang sudah terlanjur menjadi keyakinan umum ini, khususnya di kalangan ekonom, dapat dilihat dalam banyak karyanya.²³ Alih-alih memahami pilihan rasional sebagai pilihan yang memaksimalkan

²¹ “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.” Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (New York: The Modern Library, 1937), 14.

²² Menurut Pierre Force, konsep kepentingan-diri menjadi teori dasar dari buku *The Wealth of Nations* milik Adam Smith. Teori itu kemudian juga menjadi dasar dan prinsip utama dalam ilmu ekonomi modern. Meski menjadi dasar bagi bangunan ekonomi modern, frasa “kepentingan-diri” (*self-interest*) itu sendiri sangat jarang disebut. Bahkan menurut Force, frasa itu hanya disebut satu kali dalam *The Wealth of Nations*, yakni ketika Smith menjelaskan perbedaan perilaku antara para imam di dalam gereja katolik dan gereja Protestan. Sementara ketika menjelaskan tentang perilaku tukang roti, tukang daging dan penjual bir, ia lebih menggunakan frasa “cinta-diri” (*self-love*). Menurut Force, ada perbedaan penekanan antara konsep kepentingan-diri dan cinta-diri yang kemudian menjadi tema pokok dalam bukunya yang berjudul *Self-Interest before Adam Smith*. Lih. Pierre Force, *Self-Interest before Adam Smith* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 1-2.

²³ Kritik dan evaluasi Sen atas pengertian konsep pilihan rasional yang hanya dibatasi pada pemusatan kepentingan-diri banyak diulas dalam Amartya Sen, “Rational Fools,” *Philosophy and Public Affairs* 6, (1977b) dan juga dalam Amartya Sen, “The Formulation of Rational Choice.” Selain dua artikel itu, catatan terhadap pandangan tersebut juga bisa dibaca dalam Amartya Sen, *On Ethics and Economics* Amartya Sen, *On Ethics & Economics* (Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1988 [1987]), 12-28. Dalam

kepentingan-diri, ia lebih memahaminya sebagai pilihan yang didasarkan pada penalaran yang dapat dipertahankan secara reflektif jika dilakukan pemeriksaan kritis. Hal yang dituntut dalam pilihan rasional adalah adanya pemeriksaan bernalar (*reasoned scrutiny*) atas tujuan, nilai dan prioritas yang akan diambil (Sen 2009, 180; 2004, 4). Sejauh pilihan yang diambil sudah dipertimbangkan secara kritis dan si pelaku sudah mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, pilihan yang diambil dapat disebut rasional. Tidak ada keharusan bahwa pilihan tersebut akan memaksimalkan kepentingan-diri atau tidak. Tulisnya, “tidaklah bertentangan dengan nalar di dalam keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sama sekali melayani diri”.²⁴ Dengan demikian, rasionalitas pilihan tidak dibatasi pada keharusan untuk memaksimalkan kepentingan-diri sebagaimana yang dipahami dalam konsep “manusia ekonomi”. Dalam memilih dan bertindak, setiap orang atau setiap komunitas bisa mendasarkan pada pertimbangan yang tidak didasarkan pada motif kesejahteraan.²⁵

Menurut Sen, hal yang ditekankan dalam konsep pilihan rasional adalah soal kecocokan antara pilihan dan pemeriksaan kritis. Rasionalitas pilihan atau pilihan rasional terbuka bagi tindakan yang diabdikan pada kepentingan-diri dan juga yang tidak didasarkan pada kepentingan-diri.²⁶ Ia mengutip teori pilihan rasional yang dikembangkan Gary Becker yang memahami konsep penalaran dalam pengertian yang lebih luas. Dengan pengertian ini, kita dapat menempatkan tindakan komitmen (*commitment*) sebagai tindakan yang rasional, meski motivasi yang mendorong tindakan

buku itu dijelaskan bahwa perilaku rasional biasa dipahami sebagai konsistensi internal terhadap sebuah pilihan dan sebagai tindakan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri.

²⁴ “*There is nothing contrary to reason in our willingness to do things that are not entirely self-serving,*” Sen, *The Idea of Justice*, 191.

²⁵ Penulis mencoba menggarisbawahi pengertian rasionalitas Sen yang dipahami sebagai pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*). Di dalam pengertian ini ia tidak menjelaskan ukuran dari proses pemeriksaan kritis itu sendiri. Bagaimana proses pemeriksaan kritis Sen berlangsung? Untuk menjawab hal ini, ide rasionalitas sebagai pemeriksaan kritis perlu dikaitkan dengan konsep diskusi publik yang akan dijelaskan pada Bab IV nanti mengenai perluasan informasi. Di dalam diskusi publik, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh satu orang juga diperiksa oleh pihak lain. Dengan demikian, proses pemeriksaan kritis dipahami sebagai proses pemeriksaan kritis yang dilakukan secara kolektif. Masalahnya kemudian, jika sudah diperiksa secara kolektif, hal apakah yang menjadi ukuran rasionalitas dari pilihan kolektif itu? Dalam penilaian penulis, ukuran rasionalitas pilihan pada akhirnya merujuk pada kontribusi pilihan tindakan bagi kehidupan publik. Dengan kata lain, di dalam melakukan proses pemeriksaan kritis yang bersifat pribadi atau kolektif, ukuran yang dituju sebenarnya adalah kontribusi tindakan yang akan diambil bagi kehidupan publik. Kontribusi itu bisa dilihat pada sejauh mana tindakan yang dipilih bisa melindungi kebebasan dan memperluas kapabilitas. Pemahaman ini penulis pertegas di dalam pandangan etika yang rasional di dalam Bab VI nanti.

²⁶ “*Rationality as a characteristic of choice behaviour rules out neither the dedicated altruist, nor the reasoned seeker of personal gain.*” Sen, *The Idea of Justice*, 194-195.

itu bukan untuk memaksimalkan kepentingan-diri sendiri (Sen 2009, 189-190). Sen memahami tindakan yang didasari oleh komitmen sebagai tindakan yang memutuskan hubungan antara motif memaksimalkan kepentingan-diri dan pilihan tindakan yang diambil. Dengan kata lain, dalam tindakan yang didasarkan pada komitmen, seorang pelaku tidak memedulikan apakah tindakan yang diambil akan memaksimalkan kepentingan-dirinya atau tidak.

Sebagaimana sudah disinggung dalam ilustrasi di atas, Sen mencoba membedakan tindakan yang didasarkan pada simpati dan yang didasarkan pada komitmen. Menurutnya, tindakan “simpati (termasuk antipati ketika itu negatif) merujuk pada kondisi baik seseorang yang dipengaruhi oleh posisi [atau kondisi] orang lain”.²⁷ Dalam tindakan simpati, sikap yang kita ambil merupakan tanggapan terhadap kondisi yang dialami orang lain, misalnya, rasa tidak enak atau tidak nyaman yang muncul karena melihat orang lain terluka atau terkena bencana, atau sebaliknya yakni rasa bahagia karena melihat orang yang kita cintai sedang bahagia. Yang menjadi perhatian dalam tindakan simpati (atau antipati) adalah rasa yang kita alami (enak atau tidak enak) karena melihat kondisi orang lain. Rasa enak atau tidak enak masih menjadi motivasi utama dalam tindakan itu.

Sementara yang dimaksud “komitmen terkait dengan terputusnya hubungan antara kondisi baik seseorang dan pilihan tindakan.”²⁸ Tindakan itu bisa didasari simpati atau tidak didasari simpati. Menurut Sen, seseorang yang merasa tidak enak karena melihat orang lain terkena bencana, kita akan menyebut sikap itu sebagai simpati. Namun jika pada saat yang sama kita kemudian melakukan tindakan nyata dengan membantu para korban bencana, maka kita akan menyebut tindakan itu sebagai komitmen. Menurut Sen “jika kamu mengetahui seseorang disiksa sehingga membuatmu sakit, itu adalah kasus simpati; jika hal itu tidak membuatmu secara pribadi menjadi lebih buruk, namun kamu menilai itu [sebagai] sesuatu yang salah dan kamu segera melakukan sesuatu untuk menghentikannya, kita menyebut kasus itu sebagai

²⁷ “*Sympathy (including antipathy when it is negative) refers to ‘one person’s welfare being affected by the position of others’ (for example, a person can feel depressed at the sight of misery of others)*”, Sen, *The Idea of Justice*, 188.

²⁸ “... ‘*commitment*’ is concerned with breaking the tight link between individual welfare (with or without sympathy) and the choice of action (for example, being committed to help remove some misery even though one personally does not suffer from it).” Sen, *The Idea of Justice*, 189.

komitmen.”²⁹ Dengan demikian, perbedaan konsep komitmen yang sangat mendasar terletak pada hilangnya motif kepentingan-diri. Di dalam tindakan simpati, motif kepentingan-diri masih terasa, sementara di dalam tindakan komitmen, motif itu tidak lagi menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian di dalam tindakan komitmen adalah apa yang harus dilakukan dalam merespons sesuatu yang dianggap salah atau tidak baik.³⁰

Menurut Sen, rasa tidak enak ketika mendengarkan kisah seseorang yang disiksa atau rasa bahagia karena seorang kawan tengah berbahagia masih menempatkan kondisi baik (*welfare*) si pelaku sebagai motivasi tindakan itu. Pernyataan “aku bahagia karena kamu bahagia” atau “aku sedih karena kamu tertimpa bencana” adalah pernyataan simpati. Di dalamnya, si pelaku masih menempatkan rasa yang ia alami sebagai motivasi tindakan. Karenanya, tindakan simpati masih dikategorikan sebagai tindakan yang didorong oleh kepentingan-diri. Sementara di dalam tindakan komitmen, kita tidak lagi melihat motif untuk menghilangkan rasa tidak enak di dalam tindakan yang diambil. Dengan kata lain, dalam tindakan yang didasari oleh komitmen, seseorang tidak lagi menempatkan rasa yang dialaminya sebagai motivasi (Sen 2009, 188-189). Secara teknis, Sen menyebut pilihan yang tidak sesuai dengan motif kepentingan-diri ini sebagai “*counter-preferential choice*”, dalam arti bahwa pilihan atau tindakan yang

²⁹ “*If the knowledge of torture of others makes you sick, it is a case of sympathy; if it does not make you feel personally worse off, but you think it is wrong and you are ready to do something to stop it, it is a case of commitment.*” Sen, “Rational Fool,” 326.

³⁰ Konsep Sen mengenai komitmen memiliki kemiripan dengan konsep etika kewajiban Kant. Dengan etika kewajiban, Kant memahamami tindakan baik sebagai tindakan yang diabdikan pada kehendak baik. Menurutnya, sesuatu yang baik pada dirinya tanpa pembatasan hanya ada pada KEHENDAK BAIK. Lih. Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals* (New Haven dan London: Yale University Press, 2002), 9 [Ak 4:393]. Tindakan yang diabdikan pada kehendak baik disebut sebagai baik bukan karena tindakan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Juga bukan karena rasa belas kasih ketika kita melihat kenestapaan yang menuntut kita untuk berbelas kasih. Dengan kata lain, ia disebut baik bukan karena sesuatu yang ada di luar dirinya. Kehendak baik adalah sesuatu yang baik pada dirinya (*good in itself*). Lih. John Rawls, *Lectures on The History of Moral Philosophy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), 154. Lih juga Michael J. Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009), 111-113. Dalam pandangan Kant, kehendak baik adalah kehendak untuk melakukan KEWAJIBAN (*duty* [deon:bahasa Yunani]). Suatu pengada yang bersifat murni roh (tidak berbadan) yang tindakannya ditentukan oleh akal budi tidak memerlukan paham kewajiban. Sementara manusia, bukanlah makhluk yang murni roh, tetapi makhluk yang memiliki tubuh dan darah di mana tindakannya tidak hanya ditentukan oleh akal budinya tetapi juga oleh nafsu, emosi dan hasrat yang lain. Karena itu, tindakan manusia bisa ditarik ke arah yang baik dan yang jahat. Paham kewajiban hadir untuk menuntun kehendak manusia agar kehendaknya dapat ditarik ke arah yang baik, bukan yang ke arah yang jahat. Dengan paham kewajiban, tindakan manusia tidak diarahkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan inderawinya. Lih. Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika* (Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 1997), 144. Dalam pandangan penulis, konsep komitmen Sen bisa disebut sebagai bentuk lebih longgar dari etika kewajiban Kant yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan di dalam konsep komitmen masih terbuka ruang pada motif hasil atau konsekuensi, yakni kebaikan umum (*public good*). Lih. Sen, “Rational Fools”, 330.

diambil justru bertentangan dengan preferensi si pelaku secara pribadi (Sen 1977, 328).³¹

Kritik Sen terhadap pengertian pilihan rasional ini terkait dengan kritiknya terhadap paham “welfarisme”. Pandangan ini merupakan salah satu cabang dari paham utilitarianisme (Sen 2009, 278, 281; 1985, 185; Sen dan Williams 1982, 3). Ia mengutip pandangan utilitarian Jeremy Bentham, Edgeworth, Alfred Marshall dan Arthur Pigou yang memahami kebaikan sosial (*social goodness*) sebagai sesuatu yang terkait dengan kesejahteraan individu (Sen 2009, 277). Kritik Sen terhadap “welfarisme” tidak dipahami sebagai penolakan segala hal yang terkait dengan kesejahteraan. Yang ia ingin tolak dalam paham itu adalah pemahaman yang menempatkan kesejahteraan sebagai satu-satunya motif tindakan seseorang. Sebagaimana yang ia tulis, “Nilai-nilai selain pencarian kesejahteraan bisa saja secara menyolok menentukan penilaian pilihan seseorang.”³²

Menurut Sen, dalam bertindak dan beraktivitas “Masyarakat memiliki beberapa aspek selain kesejahteraan. Tidak semua aktivitasnya ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan...”³³ Selain aspek kesejahteraan, motif tindakan seseorang juga bisa didorong oleh motif kepelakuan yang terkait dengan konsepsi mengenai yang baik (*the conception of the good*). Seseorang yang mau mengorbankan dirinya untuk membela

³¹ Pandangan Sen tentang konsep komitmen merupakan konsep sentral dalam kritiknya terhadap teori pilihan rasional. Melalui konsep ini ia mencoba mendefinisikan ulang pengertian pilihan rasional yang dipahami sebagai maksimalisasi kepentingan-diri. Namun konsep komitmen yang dipahami sebagai terputusnya hubungan antara motif maksimalisasi kepentingan-diri dan pilihan aktual yang diambil menyisakan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar bagi konsep tindakan itu sendiri. Apakah mungkin lahir sebuah tindakan (*action*) seorang pelaku yang tidak melibatkan diri (*self*) di dalamnya? Asumsi dasar pertanyaan ini adalah bahwa dalam setiap tindakan, seorang pelaku dipastikan selalu melibatkan kepentingan-diri, baik dalam skala tinggi seperti tindakan egoistik, atau dalam skala rendah sebagaimana yang ada di dalam tindakan simpati. Dalam memahami tindakan, sulit rasanya untuk tidak mengaitkannya dengan tujuan-diri (*self-goal*). Kritik atas proposal Sen ini dicatat dengan cukup baik oleh Herry-Priyono dalam “Amartya Sen Membongkar Rasionalitas.” Menurutnya, orang yang bertindak atas dasar komitmen adalah orang yang tidak mengejar tujuan-dirinya. Namun kesimpulan semacam ini berimplikasi pada kemustahilan jika dilihat dalam kerangka teori kepelakuan (*agency*). Dalam memahami kepelakuan manusia, kita tidak mungkin mengabaikan adanya faktor tujuan di dalamnya. Adanya tujuan adalah jaminan untuk menyebut tindakan sebagai tindakan manusia. Dengan kata lain, tujuan tindakan adalah unsur konstitutif dari tindakan manusia. Nah konsep komitmen yang diajukan Sen, menurut Herry-Priyono, adalah negasi atas unsur konstitutif dari tindakan seorang pelaku yang seharusnya memiliki tujuan-diri di dalamnya. Kritik lebih komprehensif dapat dilihat dalam B. Herry-Priyono, “Amartya Sen Membongkar Rasionalitas” *Diskursus* 14 (2015): 69-76.

³² “*Values other than the pursuit of well-being may figure prominently in a person’s assessment of choices.*” Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” 203.

³³ “*People have aspects other than well-being. Not all their activities are aimed at maximizing well-being...*” Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” 186.

tanah air adalah tindakan yang didasarkan pada komitmen dalam bentuk patriotisme. Apa yang hendak dicapai tidak bisa disederhanakan hanya pada upaya pencarian kesejahteraan pribadi, tetapi bisa melampaui dan bahkan bertentangan dengan motif kesejahteraan atau kepentingan-diri. Secara mendasar ia berargumen bahwa “konsepsi seseorang dalam analisis moral tidak bisa disederhanakan pada pengabaian nilai intrinsik peran kepelakuan, [dengan] hanya melihatnya pada aspek kesejahteraan saja.”³⁴ Melalui kritik ini, Sen menunjukkan bahwa pandangan yang menjadikan aspek kesejahteraan sebagai satu-satunya informasi dalam memahami tindakan seseorang sebagaimana yang dianut oleh paham “welfarisme” tidaklah lagi memadai.

3.4 Hilangnya Kapabilitas dan Kemiskinan

Rumusan Sen mengenai kapabilitas memiliki hubungan erat dengan pemahamannya mengenai kemiskinan dan ketidakmampuan. Dalam pandangannya, orang miskin tidak cukup dipahami hanya sebagai orang yang memiliki pendapatan rendah. Ia lebih memahami kemiskinan sebagai hilangnya kapabilitas (*capability deprivation*) (Sen 2009, 254).³⁵ Identifikasi kehilangan kapabilitas itu tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan tetapi juga dari kondisi tubuh seseorang (cacat atau tidak cacat), kondisi alam di mana mereka tinggal (rawan bencana atau tidak) dan juga kondisi sosial (rawan konflik-kejahatan atau tidak). Semua hal ini turut memengaruhi kapabilitas seseorang dalam mencapai sesuatu.

Melalui pendekatan kapabilitas, Sen memahami bahwa setiap orang sejatinya memiliki kapabilitas yang berbeda-beda dalam mencapai sesuatu yang mereka anggap bernilai. Ia menulis,

orang yang berbeda-beda dapat memiliki kesempatan yang sungguh-sungguh berbeda untuk mengubah pendapatan dan hal-hal pokok (*primary goods*) lainnya

³⁴ “...that the conception of ‘persons’ in moral analysis cannot be so reduced as to attach no intrinsic importance to this agency role, seeing them ultimately only in terms of their well-being.” Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” 186.

³⁵ Penulis agak sulit mendapatkan padanan yang pas bagi kata “deprivation”. Namun setelah penulis pertimbangkan, salah satu padanan yang agak sedikit dekat kata itu adalah “kehilangan”. Dengan pemahaman ini, kita memaknai orang miskin sebagai orang yang mengalami kehilangan kapabilitas untuk mencapai sesuatu yang ia anggap bernilai. Orang yang mengalami kehilangan kapabilitas bisa terjadi pada orang yang pendapatannya rendah, orang cacat, orang yang tinggal di daerah rawan bencana dan juga orang yang hidup di bawah tiran sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda. Karenanya di tempat selanjutnya penulis akan memaknai deprivasi kapabilitas sebagai hilangnya kapabilitas.

menjadi [sesuatu] yang mencirikan kehidupan yang baik (*good living*) dan menjadi jenis kebebasan yang dianggap bernilai dalam kehidupan manusia.³⁶

Kapabilitas setiap orang tidak bisa disamaratakan di semua tempat. Perbedaan kondisi pribadi setiap orang dan perbedaan tempat di mana mereka tinggal menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam memahami kapabilitas yang dimiliki. Sen mengidentifikasi empat hal yang harus diperhatikan dalam melihat kapabilitas seseorang atau satu kelompok. Keempat hal ini cukup menentukan kemampuan seseorang atau masyarakat dalam mengubah kondisi yang ada menjadi sesuatu yang mereka anggap bernilai. Empat hal itu adalah: 1) keragaman pribadi (*heterogenitas personal*); 2) kondisi lingkungan (dan alam); 3) kondisi sosial (dan kebijakan publik); dan 4) perspektif hubungan di dalam komunitas (Sen 2009, 255-256).

Yang pertama adalah soal keragaman pribadi (*heterogenitas personal*). Menurut Sen, setiap orang memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda, mulai dari umur, jenis kelamin, level ketidakberdayaan (*disability*), kecenderungan pada penyakit dan seterusnya. Perbedaan ini membuat mereka memiliki kebutuhan yang juga berbeda-beda. Misalnya, orang tua yang kerap terserang penyakit tentu membutuhkan pendapatan lebih besar daripada orang muda yang sehat. Begitu juga seorang perempuan yang sedang hamil memerlukan asupan nutrisi yang lebih banyak dibanding perempuan yang tidak hamil. Gagasan dasar yang ingin disampaikan dalam keragaman pribadi ini adalah bahwa kita tidak bisa menyamaratakan kondisi setiap manusia dalam standar yang sama (Sen 2009, 255). Hampir bisa dipastikan bahwa kondisi setiap orang pada dasarnya berbeda-beda sehingga kemampuan atau kapabilitas mereka dalam mencapai sesuatu juga menjadi berbeda. Bahkan pada orang yang memiliki cacat fisik, kita juga harus melihat lebih jauh jenis cacat yang diderita. Orang yang tuna rungu (tuli), tuna wicara (bisu), tuna netra (buta), dan orang yang lumpuh sehingga tidak bisa berjalan memiliki kapabilitas yang berbeda-beda.

Faktor penentu yang kedua adalah perbedaan alam dan lingkungan di mana mereka tinggal. Upaya untuk mengubah pendapatan menjadi sesuatu yang kita anggap bernilai akan banyak bergantung pada kondisi alam dan lingkungan di mana kita tinggal. Alam dan lingkungan yang memiliki ancaman gempa dan banjir, misalnya,

³⁶ “...different people can have quite different opportunities for converting income and other primary goods into characteristics of good living and into the kind of freedom valued in human life.” Sen, *The Idea of Justice*, 254.

memiliki tantangan yang berbeda dibanding daerah yang relatif aman dari keduanya. Biaya hidup yang harus dikeluarkan masyarakat yang tinggal di alam yang memiliki ancaman bencana jauh lebih besar dibanding daerah yang aman dari ancaman itu. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi capaian yang dicita-citakan (Sen 2009, 255). Kesempatan masyarakat yang tinggal di alam tropis seperti Indonesia berbeda dengan kemampuan mereka yang tinggal di alam dingin seperti negara-negara Skandinavia. Ukuran pendapatan, ketahanan fisik serta informasi yang tepat mengenai hal apa yang perlu disiapkan untuk jenis alam tertentu akan banyak memengaruhi kapabilitas seseorang. Idenya adalah bahwa kondisi alam dan lingkungan yang berbeda akan membuat kemampuan orang tinggal di dalamnya menjadi berbeda.

Hal ketiga adalah perbedaan kondisi sosial. Kondisi sosial yang dimaksud meliputi masalah layanan kesehatan publik dan epidemiologi, tata kelola pendidikan publik, tingkat kekerasan, kriminalitas dan lain-lain (Sen 2009, 255). Dalam contoh yang pernah diangkat Sen tentang konflik antara Muslim dan Hindu di India, misalnya, dapat dilihat sebagai kondisi sosial yang telah membuat kapabilitas mereka yang terlibat dalam konflik menjadi sangat susut.³⁷ Baik kelompok Muslim maupun kelompok Hindu tidak bisa keluar rumah untuk bekerja dan mencari kebutuhan hidup mereka dengan bebas. Hal yang sama juga dialami oleh mereka yang memiliki perbedaan dalam mengakses layanan publik seperti kesehatan. Masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, ketika sakit akan sulit melakukan pengobatan karena tidak memiliki akses layanan kesehatan yang baik. Berbeda dengan kondisi mereka yang tinggal di negara yang memberikan jaminan kesehatan yang baik bagi warganya, kesempatan mereka untuk hidup sehat jauh lebih besar daripada masyarakat yang tidak memiliki jaminan layanan kesehatan yang baik. Lagi-lagi, menurut Sen, kondisi sosial dalam arti ini akan sangat memengaruhi tingkat kapabilitas masyarakat bersangkutan.

Sementara faktor yang keempat adalah soal perspektif relasi dan keterlibatan di dalam komunitas. Menurut Sen, mereka yang hidup dalam masyarakat yang

³⁷ Cerita tentang hal ini dapat kita baca dalam autobiografi yang ia tulis dalam situs Nobel. Lih. http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-autobio.html. Ia bercerita tentang seorang Muslim yang bernama Kader Mia yang harus keluar rumah karena di rumah tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Namun sialnya, ketika keluar, ia melewati kawasan kelompok Hindu yang mengetahuinya sebagai seorang Muslim. Ia diserang oleh kelompok Hindu hingga akhirnya ia tidak bisa menyelamatkan jiwanya.

mengharuskannya berpakaian bagus akan berbeda dari mereka yang tidak hidup dalam masyarakat semacam itu. Kapabilitas mereka yang merasa harus berpakaian bagus akan berbeda daripada mereka yang tidak merasa harus melakukan itu. Keharusan semacam itu menuntut orang yang ada di dalamnya untuk memiliki pendapatan yang tinggi agar bisa selalu berpakaian bagus (Sen 2009, 255-256).³⁸ Melalui keragaman faktor ini, Sen hendak menunjukkan bahwa dalam menilai masalah kemiskinan, kita perlu melihat kesempatan atau kemampuan setiap orang dalam mengubah kondisi yang ada menjadi sesuatu yang mereka anggap bernilai. Pendekatan ini dapat kita gunakan untuk melihat posisi seseorang dalam sebuah tata sosial dan juga dalam perumusan kebijakan yang harus diambil pemerintah.

Sen menggarisbawahi bahwa relevansi ketidakberdayaan (*disability*) dalam menilai masalah hilangnya kapabilitas masih dipandang sebelah mata. Menurutnya “orang-orang dengan ketidakmampuan fisik atau mental tidak hanya menjadi orang yang paling miskin di dunia, mereka juga kerap kali menjadi manusia yang paling diabaikan.”³⁹ Pemahaman mengenai tuntutan moral dan politis terhadap masalah ketidakberdayaan (*disability*) sangatlah penting bukan hanya karena hal tersebut terkait dengan dimensi kemanusiaan, namun juga karena banyak konsekuensi tragis yang diakibatkan oleh situasi tersebut sebenarnya dapat dikurangi secara substansial melalui bantuan dan intervensi yang terukur. Kebijakan yang dapat dilakukan cukup banyak mulai dari perbaikan efek dari ketidakberdayaan hingga program yang dapat mencegah perkembangan atau meluasnya kondisi tidak berdaya (Sen 2009, 259).

3.5 Korelasi Kebebasan dan Kesejahteraan

Sejauh mana kebebasan yang dimiliki masyarakat berkontribusi positif bagi kesejahteraan? Sen sangat percaya bahwa kebebasan, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan media, memiliki kontribusi positif bagi akses masyarakat terhadap kesejahteraan. Namun sebelum menunjukkan adanya kontribusi positif itu, bagi Sen, kebebasan tentu saja merupakan sesuatu yang bernilai pada dirinya. Ia berpandangan

³⁸ Dari faktor ini, kita juga bisa mengambil kasus mereka yang tinggal di kota dan di desa. Keduanya memiliki perbedaan dalam perspektif relasi. Masyarakat yang tinggal di desa pada umumnya cenderung guyub di mana unsur kolektivitasnya masih kuat. Sementara mereka yang tinggal di kota cenderung tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini tentu akan memengaruhi kemampuan atau kapabilitas mereka yang tinggal di salah satu tempat itu.

³⁹ “*People with physical or mental disability are not only among the most deprived human beings in the world, they are also, frequently enough, the most neglected.*” Sen, *The Idea of Justice*, 258.

bahwa mereka yang hak-hak sipil dan politiknya dibungkam juga dapat dipahami sebagai orang cacat (Sen 1999, 16-17). Karenanya, akses terhadap kesejahteraan dan kebebasan merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ia berpendapat bahwa ketiadaan akses terhadap makanan, kesehatan, air bersih dan juga larangan untuk memiliki pandangan berbeda atau melakukan kritik terhadap pemerintah harus dilihat sebagai bentuk-bentuk ketidakbebasan (Sen 1999, 15).

Dengan pandangan di atas, Sen mengkritik kebijakan yang cenderung memerhatikan salah satu seraya mengabaikan aspek yang lain. Baginya, capaian kesejahteraan tanpa jaminan kebebasan tetap menyisakan kecacatan di dalamnya. Ia menulis:

Bahkan ketika masyarakat tanpa kebebasan politik dan hak-hak sipil tidak berkekurangan jaminan ekonomi yang layak (dan mereka menikmati kondisi ekonomi yang baik), [sejatinya] mereka kehilangan kebebasan-kebebasan penting dalam menentukan hidup mereka dan tidak memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam putusan-putusan penting yang terkait dengan kehidupan publik... Karena kebebasan politik dan sipil adalah elemen yang konstitutif bagi kebebasan manusia, [sehingga] penyangkalan [terhadap kebebasan itu] adalah sebuah kecacatan pada dirinya.⁴⁰

Dengan pandangan ini Sen kemudian mendorong agar proyek pembangunan seharusnya tidak hanya memerhatikan kapabilitas pada kesejahteraan ekonomi. Dalam pandangannya, proyek pembangunan juga harus memerhatikan perluasan kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat, dalam berkeyakinan, dalam berserikat dan lain-lain. Kemampuan masyarakat untuk meraih kesejahteraan yang baik dan adanya kebebasan sipil dan kebebasan politik merupakan satu paket pembangunan kualitas hidup yang harus diwujudkan.

Dalam menyikapi kebijakan yang cenderung memerhatikan capaian kesejahteraan dibanding kebebasan, Sen mengkritik keras pandangan Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura yang memahami bahwa pembungkaman terhadap hak-hak sipil dan politik justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴¹ Bagi Sen,

⁴⁰ “*Even when people without political liberty or civil rights do not lack adequate economics security (and happen to enjoy favorable economics circumstances), they are deprived of important freedoms in leading their lives and denied the opportunity to take part in crucial decisions regarding public affairs... Since political and civil freedoms are constitutive elements of human freedom, their denial is a handicap in itself.*” Sen, *Development as Freedom*, 16-17.

⁴¹ Pandangan ini juga diadopsi oleh Soeharto pada masa Orde Baru. Demi pembangunan, ia harus menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan cara melarang kebebasan berpolitik, berpendapat dan membungkam mereka yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Konsep pembangunan Orde Baru

pandangan yang kemudian disebut sebagai tesis Lee ini adalah keliru, karena jika kita melihat secara komparatif kasus-kasus negara lain, tesis ini tidak terkonfirmasi. Hanya sedikit negara otoriter yang mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan ia menunjukkan sebaliknya bahwa keterbukaan dalam politik justru akan membuka kesempatan sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik (Sen 1999, 15-17; 2009, 342 dan seterusnya).

Melalui kritik ini, Sen mencoba menunjukkan adanya korelasi positif antara demokrasi dan kesejahteraan. Di banyak negara Asia, ketika pandangan Lee masih sangat berpengaruh, tesis Sen ini merupakan pandangan yang sedikit melawan arus. Para pemimpin Asia, seperti Presiden Soeharto di Indonesia dan Perdana Menteri Mahattir Mohammad di Malaysia lebih memprioritaskan pembangunan kesejahteraan daripada pemenuhan kebebasan sipil dan politik. Dalam hal ini Sen meyakini bahwa pemerintahan demokratis sejatinya justru memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan bagi warganya dibanding pemerintahan yang otoriter dan tertutup. Dalam hal ini Sen memahami demokrasi bukan hanya sebagai pemilihan umum. Ia memaknai demokrasi dalam pengertian yang lebih substantif, yakni pemerintahan yang memberikan ruang pada perbedaan pendapat, kritik dan juga termasuk di dalamnya adalah kebebasan pers dan tradisi politik oposisi.

Dalam pengertian yang substantif, Sen memahami demokrasi sebagai praktik penalaran publik atau pemerintahan yang membuka ruang diskusi publik (*government by discussion*) (Sen, 2009:324). Katanya,

...dalam filsafat politik kontemporer, pemahaman mengenai demokrasi sudah sangat meluas, sehingga demokrasi tidak lagi dilihat hanya dalam arti tuntutan untuk mengambil suara secara publik [sebagaimana yang ada dalam pemilu], namun secara lebih luas ada dalam arti yang pernah dinyatakan Rawls tentang 'penggunaan nalar publik'.⁴²

dirancang dengan kebijakan yang disebut trilogi pembangunan, yakni stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Melalui prinsip pertama, mereka berkeyakinan bahwa tidak mungkin pembangunan dilakukan dalam situasi keamanan yang tidak stabil. Karenanya prinsip ini menjadi pengandaian bagi berjalannya pembangunan. Lih. LPPKB, *Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, 2006), 47-48. Dalam praktiknya, untuk mewujudkan stabilitas keamanan, pemerintah Orde Baru membungkam kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

⁴² "...in contemporary political philosophy, the understanding of democracy has broadened vastly, so that democracy is no longer seen just in terms of the demands for public balloting, but much more capaciously, in terms of what John Rawls calls 'the exercise of public reason'." Sen, *The Idea of Justice*, 324.

Beberapa praktik yang merefleksikan “pemerintahan melalui diskusi” atau “penggunaan nalar publik” misalnya adalah tradisi oposisi dalam politik, keterbukaan terhadap kritik dan jaminan kebebasan pers atau media.⁴³ Dalam pandangannya, sistem dan juga tradisi pemerintahan semacam ini dianggap memiliki potensi yang lebih besar dan kemampuan yang lebih baik dalam menanggulangi masalah kelaparan atau kemiskinan dibanding dengan pemerintahan yang otoriter, tertutup serta tidak mengakui sistem oposisi. Menurutnya, negara demokratis tidak menutup katup atau saluran suara-suara yang berbeda sehingga dengan cara ini mereka akan membuka diri untuk dikritik dan dievaluasi jika ada kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tepat. Melalui kebebasan pers, pemerintah justru akan terbantu untuk melihat di mana saja bencana yang harus segera diatasi (Sen 2009, 342-345).

Media yang bebas bisa menjadi panggung yang teramat penting bagi proses penalaran publik dan dapat menekan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap gagal atau kurang tepat. Dalam pandangan Sen, pengalaman semacam ini tidak hanya bisa dilihat di Amerika atau Eropa, tetapi juga di India, Brazil, Jepang dan Afrika Selatan. Kebutuhan akan media yang bebas dan tanpa intervensi atau tanpa sensor kekuasaan merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat mana pun. Sen menilai ada beberapa kontribusi positif yang dapat diperoleh dari jaminan kebebasan pers. *Yang pertama* adalah kontribusi langsung bagi kebebasan berpendapat dan lebih khusus lagi adalah kontribusi kebebasan media bagi kualitas kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita membutuhkan proses komunikasi tanpa distorsi dari pihak lain agar kita dapat memahami satu masalah dengan baik dan jelas. Kondisi ini tentu saja harus ditopang oleh jaminan kebebasan media. Warga yang tidak memiliki kebebasan media, kualitas komunikasi antar-manusianya akan tereduksi, meski mereka memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. *Yang kedua*, media yang bebas memiliki peran memberikan informasi kepada publik “apa adanya” (*informational role*). Melalui informasi yang terbuka, pers melaporkan kejadian dan masyarakat melakukan pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*) sehingga mereka dapat memberikan jalan keluar kepada pemerintah. Dengan demikian pemerintah memperoleh

⁴³ Dalam pandangan Sen, demokrasi dalam arti pemilihan umum tentu saja sangat penting dalam menangkap suara publik secara efektif, namun proses ini bukan satu-satunya cara untuk melihat sebuah sistem sebagai demokratis. Hal yang lebih substansial bagi demokrasi adalah bagaimana proses penalaran publik berlangsung di dalam masyarakat demokratis itu sendiri. Lih. Sen, *The Idea of Justice*, 326-327.

dampak positif dari pemeriksaan kritis yang dilakukan media dan juga masyarakat (Sen 2009, 335-336).

Menurut Sen, kontribusi positif *yang ketiga* dari media yang bebas ada pada fungsi perlindungan bagi masyarakat yang tertimpa bencana, seperti kelaparan dan busung lapar (*protective function*). Dengan adanya jaminan kebebasan pers, media dapat mengabarkan bencana kelaparan kepada publik secara cepat. Pemerintahan yang berkuasa memang tidak menyukai pemberitaan semacam ini karena mengesankan kegagalan kebijakan mereka. Namun lepas dari ketidaksukaan itu, pemerintahan yang mengandalkan legitimasi rakyat justru akan dipaksa bergerak cepat dalam mengupayakan pemecahan masalah kelaparan yang dialami masyarakat. *Yang keempat*, media informasi memiliki fungsi pembentuk nilai atau opini dalam masyarakat. Dalam pandangan Sen, fungsi pembentuk nilai dari media tentu harus ditopang oleh jaminan kebebasan menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Dengan jaminan kebebasan ini, baik media maupun masyarakat dapat menjadikan objek informasi tertentu sebagai ajang penalaran publik bersama sehingga diperoleh hasil yang sudah mempertimbangkan berbagai nalar kritis dalam masyarakat. Dan *yang terakhir*, media yang bebas dapat menjadi panggung untuk kontestasi nalar secara terbuka dan bebas. Dalam pandangan Sen, ketersediaan panggung yang terbuka untuk kontestasi nalar memiliki korelasi dengan ide keadilan yang berupaya memberikan ruang bagi pluralitas nalar secara terbuka dan bebas. Ide keadilan, bukanlah ide yang dihasilkan dari proses refleksi seorang diri tanpa pernah melakukan penalaran bersama yang lain (Sen 2009, 336-337).⁴⁴

Melalui kebebasan pers di atas, Sen menekankan dua hal penting. Yang pertama, kebebasan merupakan sesuatu yang penting bagi martabat manusia itu sendiri, dan yang kedua, kebebasan juga bisa memberikan kontribusi secara positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dengan demikian, ia bisa menjadi

⁴⁴ Penilaian Sen mengenai peran positif kebebasan media tentu saja dilihat dari perspektif yang ideal. Kita tidak menutup mata bahwa di dalam rezim kebebasan media juga ada 'penunggang gelap' yang menggunakan kebebasan media bukan untuk tujuan positif yang diharapkan. Dalam konteks kebebasan media di Indonesia, misalnya, ada beberapa media besar yang sekaligus juga dikuasai oleh penguasa politik. Kondisi ini tentu akan memengaruhi kemerdekaan para jurnalis dalam memilih dan menyajikan berita. Namun bila kita melihat dalam proses kehidupan demokrasi yang lebih luas, kondisi semacam ini juga pada akhirnya dapat dikritik oleh para pemirsanya atau masyarakat sehingga media akan berhati-hati dalam menyajikan berita. Jika mereka tetap memaksakan kepentingannya secara vulgar melalui media tersebut, mereka justru akan ditinggalkan atau bahkan dikecam karena tidak menjalankan fungsi yang seharusnya.

tujuan pada dirinya (*ends*) dan juga sekaligus menjadi sarana (*means*). Korelasi positif antara praktik demokrasi sebagai penalaran publik dan perluasan kesejahteraan atau pengurangan dampak buruk kebijakan dapat kita lihat dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di banyak tempat. Dalam bencana kelaparan di Bengal pada 1943, misalnya, Sen melihat tragedi itu terjadi karena tidak adanya media yang bebas dan pemerintah saat itu juga tidak memfasilitasi penerimaan dan pembahasan penanggulangan bencana secara terbuka. Akibat dari tidak adanya media yang bebas dan pemerintahan yang tertutup, kelaparan di Bengal telah merenggut nyawa hingga ratusan ribu dalam rentang waktu tidak genap satu tahun (Sen 2009, 339-341).

Sebaliknya, Sen mencoba meyakinkan bahwa tidak pernah terjadi tragedi kelaparan dengan skala besar pada negara yang menerapkan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan diskusi terbuka. Pengalaman India setelah merdeka dan menjadi negara demokrasi menunjukkan hal itu. Pada sisi yang lain, meski ekonomi China jauh lebih berkembang dibanding India, namun pemerintah China yang tidak menerapkan sistem demokrasi pernah mengalami kelaparan besar pada 1958-1961 yang memakan korban hingga 30 juta manusia. Anehnya, meski tragedi kelaparan terjadi dalam waktu yang cukup lama (sekitar tiga tahun), pemerintahan saat itu tidak ditekan untuk melakukan perubahan kebijakan mengatasi kelaparan yang tengah terjadi. Di China tidak ada parlemen yang bisa berbicara secara bebas, tidak ada partai oposisi dan tidak ada kebebasan pers. Dalam pandangan Sen, bencana kelaparan besar di China pada saat itu adalah akibat dari tidak adanya demokrasi. Kesimpulan atas kasus China ini didukung oleh fakta India di masa kolonial (pada saat itu demokrasi belum berkembang di India), Uni Soviet pada 1930-an – yang menganut sistem satu partai – China, Kamboja, serta Ethiopia dan Somalia yang berada dalam pemerintahan diktator. Hal yang sama juga terjadi di Korea Utara saat ini (Sen 2009, 342).

Dalam pandangan Sen, kelaparan selalu menimpa masyarakat, bukan pemerintah yang tengah berkuasa. Untuk mengurangi bencana kelaparan maka diperlukan sebuah pemerintahan yang terbuka dan menerima pandangan yang berbeda. Dengan kata lain, bencana kelaparan dapat dikurangi sedini mungkin jika ada pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Paling tidak ada dua hal yang dapat dicatat terkait dengan korelasi antara proses mengurangi kelaparan dan pemerintah yang demokratis. Yang

pertama, dalam negara demokratis yang menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, masyarakat dapat menjadikan satu bencana di satu wilayah sebagai isu nasional. Barangkali jika dilihat skalanya, masyarakat yang mengalami bencana tidak lebih dari 10 persen dari populasi nasional. Namun melalui media, kita bisa menjadikan bencana itu sebagai isu nasional sehingga pemerintah yang berkuasa dituntut untuk segera melakukan sesuatu. Yang kedua, melalui peran sebagai penyampai informasi, media dapat memberikan informasi mengenai kebijakan yang tengah dikembangkan pemerintah dan mendiskusikan kebijakan itu secara terbuka. Misalnya, kebijakan *Great Leap Forward* yang dikembangkan oleh China yang sudah membawa petaka kelaparan 1958-1961 seharusnya dapat didiskusikan secara terbuka dan dievaluasi sehingga dapat meminimalisasi atau mengantisipasi tragedi kelaparan yang terjadi saat itu (Sen 2009, 343-344).

Terhadap argumen mengenai korelasi positif antara kebebasan dan kesejahteraan, penulis mengajukan dua catatan. Yang pertama, korelasi positif ini bukanlah sesuatu yang niscaya. Jaminan adanya proses yang bebas tidak selalu memberikan kontribusi positif bagi capaian kesejahteraan. Sistem demokrasi tidak selalu berkorelasi secara positif bagi kesejahteraan. Kesimpulan ini tentu tidak menegasi temuan Sen sendiri mengenai adanya kontribusi praktik demokrasi yang menjamin kebebasan pers dan politik bagi penanggulangan bencana kelaparan di beberapa negara. Namun kita juga menyadari bahwa di dalam praktik demokrasi terkadang ada proses penalaran publik yang memakan waktu sehingga kecepatan untuk merespons masalah menjadi lebih lama. Di sini kita melihat ada dilema antara demokrasi dan efektivitas. Orang yang cenderung ingin bekerja efektif dalam mengatasi persoalan masyarakat merasa tidak perlu banyak berdiskusi terlebih dahulu. Tentu saja pandangan ini tidak terlalu tepat karena bentuk ekstremnya ada pada tesis Lee yang diadopsi oleh pemerintahan otoriter. Hal yang hendak digarisbawahi pada pandangan Sen ini adalah soal ketakniscayaan kebebasan bagi capaian kesejahteraan. Kebebasan memang bisa memberikan kontribusi positif namun tidak niscaya.

Yang kedua, dalam argumen Sen di atas, penulis menilai Sen kurang menunjukkan adanya kontribusi kesejahteraan bagi berfungsinya kebebasan. Ia lebih sering menunjukkan sebaliknya, yakni adanya kontribusi praktik kebebasan bagi capaian kesejahteraan. Sen sendiri tentu saja memberikan perhatian pada pentingnya

kesejahteraan, namun masalah yang ingin digarisbawahi adalah soal kurangnya argumen yang menunjukkan kemungkinan kontribusi kesejahteraan bagi kebebasan. Dalam soal ini, ia kerap mencibir masyarakat yang berhasil mencapai kesejahteraan yang baik namun kosong dari kebebasan. Ia menyebut kondisi ini sebagai kehidupan yang cacat. Capaian kesejahteraan tentu saja tidak menjamin berfungsinya kebebasan. Beberapa negara minyak di Timur Tengah memiliki capaian kesejahteraan yang baik namun mereka tetap tidak berhasil mendorong lahirnya kebebasan. Namun, kita juga menyadari bahwa berfungsinya kebebasan harus ditopang oleh kesejahteraan yang baik. Daya tahan negara-negara demokratis yang selalu dirundung masalah ekonomi tidak sekuat negara demokratis yang tidak memiliki masalah ekonomi dan kesejahteraan yang buruk.⁴⁵

3.6 Kontrol Pelaku dalam Kebebasan

Salah satu masalah yang juga perlu diperhatikan dalam konsep kebebasan sebagai kapabilitas adalah masalah kontrol. Pertanyaan dalam masalah ini adalah apakah konsep kebebasan mengandaikan proses kontrol langsung (*direct control*) atas pilihan yang diambil? Menurut Sen, dalam banyak hal, sulit bagi kita untuk selalu mengontrol semua proses pilihan. Karenanya dalam melihat tercapainya sesuatu yang dianggap bernilai, Sen (1985, 208-209) mencoba membedakan antara daya efektif ([*effective power*] secara singkat disebut daya atau kemampuan [*power*])⁴⁶ dan kontrol prosedural (secara singkat disebut kontrol). Melalui pembedaan ini, Sen mencoba

⁴⁵ Salah satu hasil penelitian yang menarik untuk dilihat adalah publikasi Adam Przeworski, Michael Alvarez dan kawan-kawan mengenai daya tahan demokrasi. Dalam artikel berjudul "What Makes Democracy Endure?," mereka menyimpulkan bahwa yang membuat demokrasi bertahan kuat adalah karena komitmen pada demokrasi itu sendiri. Hal lain yang juga memengaruhi daya tahan demokrasi adalah tingkat kemakmuran, pertumbuhan dengan inflasi yang moderat, ketidaksetaraan yang semakin berkurang, kondisi dunia internasional yang mendukung dan institusi parlemen. Melalui kesimpulan ini mereka juga menunjukkan bahwa sistem diktator tidak memberikan efek yang lebih tinggi bagi pertumbuhan dibanding negara demokrasi. Mereka kemudian menegaskan bahwa sistem demokratis tidak dapat dicipta dari pembangunan pemerintahan diktator yang maju (*developed dictatorship*). Dengan kata lain sistem kediktatoran tidak memberikan manfaat apapun bagi terciptanya sistem demokratis. Karenanya, untuk memperkuat demokrasi, kita harus memperkuat komitmen pada demokrasi itu sendiri, bukan lewat kediktatoran. Mereka kemudian menunjukkan bahwa jika kita berada di dalam sistem demokrasi, tingkat pembangunan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan demokrasi. Menurut mereka, negara demokratis yang miskin dengan pendapatan per kapita hanya di bawah 1000 dollar AS berada dalam kondisi yang sangat rentan. Sementara negara demokratis yang memiliki pendapatan yang sangat baik akan memiliki daya tahan yang jauh lebih baik dibanding negara demokratis yang miskin. Lih. Adam Przeworski, dkk., "What Makes Democracy Endure?," *Journal of Democracy* XLI (1996): 39-41.

⁴⁶ Kadang juga disebut sebagai kebebasan efektif (*effective freedom*). Lih. Sen, *Inequality Reexamined*, 64.

menjawab pertanyaan apakah orang yang memiliki daya efektif namun tidak melakukan kontrol langsung terhadap proses pilihan yang diambil bisa disebut sebagai orang yang bebas atau tidak. Daya efektif lebih dipahami sebagai kemampuan yang membuat seseorang bisa mencapai sesuatu yang dianggap bernilai oleh dirinya, meski tidak melalui kontrol langsung si pelaku itu sendiri. Dalam hal ini, Sen menegaskan bahwa pada dasarnya seseorang masih dapat disebut bebas sejauh ia memiliki daya efektif, meski ia sendiri tidak bisa mengontrol proses pilihan itu secara langsung.

Untuk menjelaskan masalah ini, Sen (1985, 209-210) membuat sebuah ilustrasi yang dapat membantu kita memahami perbedaan antara daya dan kontrol. Katakan saja, seorang kawan yang kita kenal baik tiba-tiba mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia tidak sadarkan diri. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan seorang dokter menjelaskan kepada kita bahwa ada dua tindakan medis yang bisa diambil untuk menyelamatkannya. Sebut saja tindakan medis yang dimaksud adalah tindakan A dan tindakan B. Dokter itu menjelaskan lebih lanjut bahwa dua tindakan medis ini sama-sama efektif, hanya saja dibanding tindakan B, tindakan A tidak akan terlalu menyakitkan bagi pasien. Namun, jika kita mengambil tindakan A, kita harus menggunakan hewan sebagai korban dalam pengobatan itu. Kebetulan kita mengenal karakter kawan yang sedang tidak sadar ini dengan baik, bahwa jika ia berada dalam kondisi sadar ia pasti tidak akan mengambil tindakan A yang menggunakan atau mengorbankan hewan dalam proses pengobatan, meski tindakan itu justru tidak terlalu menyakitkannya. Atas dasar pengetahuan ini, kita kemudian memilihkan untuk dia tindakan B. Pada saat kita memilih tindakan B untuknya, kita sebenarnya sudah memberikan daya efektif pada dia meski ia sendiri tidak bisa melakukan kontrol terhadap proses pilihan itu. Kita sudah memilihkan pilihan yang sesuai dengan karakter kawan yang sedang tidak sadarkan diri ini, yakni apa yang ia anggap bernilai. Kita meyakini bahwa jika kawan kita ini berada dalam kondisi sadar, ia pasti akan memilih sebagaimana yang sudah kita pilihkan untuknya.

Secara luas, pengertian daya efektif merujuk pada semua hal yang membuat kita berdaya untuk merealisasikan cita-cita atau sesuatu yang kita anggap baik dan bernilai. Ia meliputi kemampuan pribadi, kondisi sosial dan juga kondisi alam. Sejauh mana semua aspek itu mendukung cita-cita yang kita harapkan akan sangat menentukan daya (*power*) kita dalam mewujudkan apa yang kita anggap baik. Dalam ilustrasi di atas,

meski kawan kita itu tengah tidak sadar, namun pilihan yang ia anggap baik (tindakan B) tetap terealisasi karena ada orang yang mengenalnya dengan baik dan telah memilihkan pilihan yang sesuai dengan watak dasar dan konsepsinya mengenai yang baik (*the conception of the good*). Dengan demikian, dalam refleksi mengenai kebebasan, meski si pelaku tidak bisa melakukan kontrol terhadap cita-cita yang dianggap baik, hal itu tidak mengurangi makna “kebebasan untuk mencapai” atau kapabilitas yang dimilikinya. Para pemikir kebebasan, menurut Sen, pada umumnya cenderung menempatkan kemampuan untuk mengontrol sebagai elemen penting dalam kebebasan. Beberapa tokoh itu di antaranya adalah Robert Nozick, Peter Bernholz, Peter Gärdenfors, Robert Sugden, Brian Barry dan lain-lain (Sen 1985, 211-212).

Dengan pandangan di atas, Sen ingin menempatkan masalah kebebasan dan capaian sesuatu yang dianggap baik dalam kerangka yang cukup kompleks. Hampir pasti, dalam dunia seperti sekarang ini, ada begitu banyak hal bernilai yang hendak dicapai tidak lagi ditentukan oleh atau berada di bawah kontrol si pelaku sebagai pemilih secara langsung (Sen 2009, 301-302). Namun, kenyataan atau kondisi ini tidak berarti bahwa si pelaku tidak lagi memiliki kebebasan. Bagi Sen, elemen penting kebebasan ada di dalam daya efektif (*effective power*), bukan pada kemampuan untuk mengontrol pilihan itu secara langsung. Pandangan ini dikritik oleh Philip Pettit, seorang pemikir Republikan yang melihat aspek kontrol (langsung) sebagai elemen penting di dalam kebebasan. Kritik Pettit terhadap pandangan Sen ini akan diuraikan dalam Bab V.

Dalam pandangan Sen, keharusan adanya kontrol langsung dalam konsep kebebasan akan sangat membatasi pengertian kebebasan itu sendiri. Dalam ilustrasi yang lain, Sen mengatakan bahwa jika naskah seorang penulis dibaca oleh seorang editor yang mengecek kekeliruan kata atau redaksi kalimat sebelum dicetak penerbit, maka proses koreksi yang dilakukan oleh editor itu tidak mengurangi kebebasan si penulis sebagai pemilik naskah buku itu sejauh sang editor itu mengetahui standar penulisan yang dibuat si penulis (Sen 1992, 64). Ketidakmampuan untuk mengontrol segala aspek yang berkaitan seluruh proses penulisan itu tidak akan mengurangi kebebasan si penulis. Sebagai penulis, ia tetap memiliki daya efektif meski proses koreksi dilakukan oleh orang lain. Posisi penulis di sini sebanding dengan orang yang mengalami kecelakaan namun tetap memiliki daya efektif terhadap pilihan yang ia

anggap bernilai karena sudah dipikirkan oleh seorang kawan yang mengenal wataknya dengan baik.

Begitu juga ketika seseorang memiliki harapan akan hidup sehat dan bebas dari wabah penyakit, terwujudnya keinginan itu tidak hanya ditentukan oleh upayanya secara pribadi. Realisasi harapan itu juga bergantung pada sejauh mana kebijakan publik dan kondisi alam mendukung cita-citanya. Kebijakan publik dan kondisi alam yang mendukung akan semakin memperluas terwujudnya harapannya untuk hidup sehat dan bebas dari wabah penyakit. Namun sebaliknya, jika kebijakan publik dan kondisi alam tidak mendukung harapan seseorang maka kondisi ini akan membuat susut harapannya terhadap hidup yang sehat. Kebijakan publik dan kondisi alam memang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol pelaku namun semua hal itu jelas akan sangat memengaruhi status keluasaan atau penyusutan daya setiap orang dalam mencapai cita-cita yang diharapkan (Sen 1992, 65). Tulis Sen,

Jika kita tidak memiliki kontrol atas proses eliminasi epidemik, maka tidak ada lagi yang akan dikatakan...di wilayah ini. Namun dalam pengertian yang lebih luas, isu mengenai kebebasan (sebenarnya) masih tetap ada. Kebijakan publik yang mengeliminasi epidemik dapat memperluas kebebasan kita untuk mencapai kehidupan yang ingin kita capai.⁴⁷

Hal penting yang perlu dicatat dalam hubungan antara kebebasan dan kontrol adalah bahwa ide mengenai kebebasan tidak mesti diidentifikasi sebagai kontrol langsung yang dilakukan oleh seorang pelaku. Seseorang akan tetap disebut bebas sejauh daya efektifnya masih berfungsi meski ia tidak bisa melakukan kontrol langsung atas pilihan itu. Hal yang bukan bagian dari kontrol langsung ini akan memengaruhi luas atau tidaknya kebebasan seseorang untuk mencapai (*freedom to achieve*). Dengan demikian, dalam menilai kebebasan, kita memang harus mempertimbangkan secara rinci mengenai fakta-fakta objektif dalam hubungannya dengan cita-cita yang hendak dicapai. Pertimbangan itu diperlukan untuk melihat sejauh mana daya efektif seseorang dalam mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Jika fakta-fakta objektif itu

⁴⁷ "If we do not have control over the process of elimination of epidemics, there is no more to be said...in this field. But in a broader sense, the issue of freedom is still there. A public policy that eliminates epidemics is enhancing our freedom to lead the life...that we would choose to lead." Sen, *Inequality Reexamined*, 65.

mendukung maka daya efektif untuk mencapai sesuatu akan meluas, namun jika yang terjadi sebaliknya maka daya efektif akan semakin menyusut.⁴⁸

3.7 Rangkuman

Dalam Bab III ini telah dijelaskan mengenai klasifikasi kapabilitas yang dibagi menjadi kebebasan kesejahteraan dan juga kebebasan kepelakuan. Melalui klasifikasi ini Sen menunjukkan bahwa nilai yang menjadi pertimbangan seseorang dalam bertindak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan, tetapi juga hal-hal lain di luar kesejahteraan. Klasifikasi ini kemudian berdampak pada perumusan ulang pengertian pilihan rasional yang biasanya dipahami hanya sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest*). Jika kita memahami tindakan rasional hanya pada tindakan yang didorong oleh motif kepentingan-diri, maka kita akan menilai tindakan yang didorong oleh komitmen pada tanggung jawab sebagai tindakan tidak rasional. Padahal kita tentu bisa saja menilai tindakan yang didasari oleh komitmen, seperti patriotisme dan solidaritas sebagai tindakan yang juga rasional jika tindakan itu sudah dipertimbangkan secara kritis.

Hal yang juga ditegaskan dalam uraian Sen mengenai kapabilitas adalah soal pengertian kemiskinan. Sen memahami kemiskinan bukan hanya dari rendahnya pendapatan seseorang tetapi lebih pada seberapa besar kapabilitas yang dimiliki. Karenanya ia kemudian mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan (deprivasi) kapabilitas. Faktor yang menentukan kemampuan seseorang dalam mencapai sesuatu bukan hanya pendapatan, tetapi juga banyak faktor yang lain seperti kondisi tubuh, kondisi sosial dan lain-lain. Dalam bab ini juga ditunjukkan mengenai korelasi antara jaminan kebebasan dan capaian kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam kontribusi positif demokrasi bagi kesejahteraan. Sen berpandangan bahwa pemerintahan yang demokratis justru memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan.

Dalam bahasan terakhir bab ini, Sen menyinggung masalah kontrol dalam konsep kebebasannya. Ia menilai kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu

⁴⁸ Salah satu konsekuensi penting dari pandangan ini adalah bahwa kebebasan setiap orang untuk mencapai sesuatu menjadi sangat beragam, karena kita harus memperhitungkan sejauh mana fakta-fakta objektif yang ada di sekelilingnya mendukung cita-cita yang dianggap bernilai oleh setiap orang.

ditentukan oleh berbagai faktor yang ada di luar diri pelaku, seperti kondisi sosial, kondisi politik dan juga kondisi lingkungan dan alam. Pengertian ini berbeda dengan pandangan Philip Pettit, seorang Republikan yang mengandaikan kontrol langsung di dalam konsep kebebasannya. Kritiknya ini dapat dilihat dalam Bab V. Selanjutnya pada Bab IV akan dijelaskan mengenai kontestasi kebebasan dalam pilihan sosial (*social choice*). Yang akan ditegaskan dalam Bab IV nanti adalah tentang catatan Sen atas teori pilihan sosial tradisional serta modifikasi yang ia ajukan. Gagasan yang ingin ia upayakan adalah bagaimana mengintegrasikan pertimbangan kebebasan ke dalam pilihan sosial.

BAB IV

MASALAH KEBEBASAN DALAM PILIHAN SOSIAL

4.1 Pengantar

Setelah menjelaskan pandangan Sen mengenai kebebasan dan kapabilitas dengan panjang lebar pada Bab II dan III, pada Bab IV ini akan ditunjukkan bagaimana kebebasan dikontestasikan dalam kehidupan sosial. Jika kita memahami kebebasan sebagai tidak adanya paksaan oleh pihak lain dan sebagai kapabilitas untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai, maka setiap manusia pada dasarnya merupakan subjek penilai yang harus dihormati dan diberi ruang untuk mewujudkan sesuatu yang dianggap bernilai. Setiap orang selalu memiliki nilai tentang yang baik, dan mereka selalu berupaya untuk mewujudkan apa yang dianggap bernilai itu. Jika demikian, lantas bagaimana keputusan kolektif atau pilihan sosial dibuat karena di dalam sebuah kelompok selalu terkandung beragam nilai dan preferensi dari setiap individu yang harus dipertimbangkan.

Dalam kehidupan bersama, hampir pasti bahwa kita selalu dituntut untuk membuat pilihan sosial (*social choice*) atau keputusan bersama (*collective decision*). Setiap orang yang ada di dalam kelompok memiliki preferensi sendiri tentang hal yang dianggap baik. Pertanyaan utama dalam teori pilihan sosial, bagaimana sebuah kelompok mengakomodasi preferensi yang sangat beragam itu sehingga menjadi satu preferensi sosial? Putusan kolektif yang dihasilkan akan berdampak pada perluasan atau penyusutan kebebasan setiap pribadi yang ada di dalamnya. Hal yang dianggap bernilai oleh para individu sangatlah beragam. Nilai yang dikejar tidak dapat disamaratakan hanya pada satu nilai tertentu, misalnya nilai kesejahteraan. Karenanya, dalam merumuskan putusan sosial, Sen menekankan model putusan sosial yang memerhatikan kebebasan atau nilai para anggota yang sangat beragam.

Dalam bab ini, pertama-tama akan dijelaskan apa yang dimaksud teori pilihan sosial (*social choice theory*). Dalam rumusan yang sederhana, teori pilihan sosial adalah teori yang membahas mekanisme membuat pilihan sosial. Masalah utama dalam membuat pilihan sosial, sebagaimana dirumuskan oleh Sen dan juga para teoritikus

pilihan sosial adalah bagaimana membuat pilihan sosial yang legitim. Dalam pandangan Sen, salah satu masalah dalam perumusan pilihan sosial tradisional adalah pertimbangan pilihan yang hanya didasarkan pada nilai kesejahteraan dan manfaat (utilitas). Baginya, model pilihan sosial semacam ini merupakan akar dari konflik antara kebebasan dan pilihan sosial. Hasil pilihan sosial yang hanya didasarkan pada nilai manfaat atau kesejahteraan kurang memiliki kesinambungan dengan tuntutan kebebasan.

Gagasan utama bab ini sendiri adalah tentang modifikasi yang diajukan Sen terhadap teori pilihan sosial. Dalam memodifikasi teori pilihan sosial ia mencoba memasukkan kebebasan di dalam pertimbangan pilihan sosial. Penegasan kebebasan itu ada dalam tuntutan perlindungan hak dasar setiap orang dari tindakan yang mengganggu (*invasive action*). Ia menyebut hak dasar itu sebagai area yang dilindungi (*protected sphere*). Dalam modifikasi ini ia juga mencoba menunjukkan mekanisme perbandingan antar-pribadi (*interpersonal comparisons*) sebagai sesuatu yang dapat dipakai dalam pertimbangan pilihan sosial. Dalam pandangannya, model perumusan pilihan sosial tradisional yang hanya didasarkan pada nilai manfaat sudah tidak lagi memadai. Gagasan dasar mengenai ide perbandingan antar-pribadi adalah akomodasi konsep nilai yang lebih plural. Apa yang disebut sebagai nilai (*value*) tidak hanya terpusat pada kesejahteraan dan manfaat. Perumusan pilihan sosial juga harus memasukkan pertimbangan yang lebih plural mengenai nilai, termasuk di dalamnya adalah yang terkait dengan nilai kepelakuan (*agency*).

Upaya memperluas perspektif dalam mengambil keputusan publik juga terkait dengan ide keadilan. Sen menilai putusan kolektif yang hanya didasarkan pada satu perspektif sebagai keputusan yang kurang memerhatikan keadilan. Putusan kolektif harus terbuka terhadap berbagai pandangan dan nilai. Semua pandangan dan perspektif itu kemudian diuji secara kritis dan terbuka. Kecenderungan untuk mengklaim satu pandangan sebagai kebenaran seraya menutup diri dari pengujian kritis (*critical scrutiny*) oleh pihak lain dapat membuat satu kelompok terjebak dalam ilusi objektif (*objective illusion*) atau ilusi posisi (*positional illusion*). Dalam mengatasi persoalan sosial, kita dituntut untuk terbuka pada berbagai pandangan dan perspektif agar bisa sampai pada objektivitas etis (*ethical objectivity*). Sen memahami objektivitas etis sebagai sikap yang tidak hanya berdiri pada pandangan sendiri, tetapi sebagai sikap yang terbuka dan kritis terhadap berbagai pandangan.

4.2 Tentang Teori Pilihan Sosial

Dalam diskusi mengenai kebebasan dan kapabilitas, Sen memberikan perhatian besar pada satu teori yang disebut teori pilihan sosial (*social choice theory*). Kemampuan masyarakat untuk mencapai hidup sehat misalnya, tidak hanya ditentukan oleh upaya yang mereka lakukan sendiri. Tercapainya harapan itu juga ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.¹ Pertanyaannya kemudian, sejauh mana kebijakan publik yang dibuat itu dapat memperluas harapan masyarakat untuk hidup sehat? Jawaban atas pertanyaan ini tentu akan sangat bergantung pada mekanisme dan hal apa saja yang menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan publik. Dua hal ini akan sangat menentukan isi kebijakan yang dihasilkan dan pada gilirannya akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap bernilai.²

Kebijakan publik adalah salah satu contoh dari pilihan sosial (*social choice*). Dalam arti yang lebih luas, pilihan sosial merujuk pada semua pilihan atau putusan yang dibuat secara kolektif. Hampir pasti, dalam kehidupan bersama kita selalu dituntut untuk membuat pilihan sosial atau putusan kolektif. Setiap pilihan atau putusan sosial yang dihasilkan akan berdampak pada perluasan atau penyusutan kebebasan seseorang. Karena pertimbangan itu, teori pilihan sosial menjadi tema yang tidak bisa dipisahkan dari masalah kebebasan. Yang kerap dipersoalkan dalam tema kebebasan dan pilihan sosial adalah soal mekanisme membuat keputusan sosial dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan atau penilaian dalam pilihan sosial (Sen 2004, 268). Dua hal ini dapat diringkas sebagai masalah prosedur dan substansi pilihan sosial. Persoalan ini menjadi perhatian Sen dalam merefleksikan masalah kebebasan dan pilihan sosial.

Sebelum masuk pada uraian mengenai konflik antara kebebasan dan pilihan sosial, kita perlu melihat apa yang dimaksud teori pilihan sosial dan sejarah awalnya. Sen mendefinisikan teori pilihan sosial sebagai teori yang memerhatikan hubungan

¹ Selain faktor kebijakan sosial, faktor yang juga menentukan tercapainya cita-cita untuk hidup sehat adalah faktor alam dan lingkungan. Dalam uraian mengenai kontrol di dalam kebebasan, Sen menjelaskan bahwa segala hal yang dicita-citakan tidak bisa ditentukan oleh pelaku sendiri. Capaian terhadap satu harapan juga bergantung pada sesuatu di luar diri si pelaku, salah satunya adalah peran kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.

² Misalnya kebijakan pemerintah yang tidak memerhatikan jaminan kesehatan, pembatasan rokok, serta kontrol atas emisi gas buang kendaraan bermotor tentu akan berdampak pada menyusutnya kesempatan masyarakat mencapai hidup yang sehat.

antara preferensi individu dan pilihan sosial (Sen 1977, 53). Dengan kata lain, dalam teori pilihan sosial kita hendak memerhatikan bagaimana sebuah putusan kolektif dihasilkan. Apa yang disebut sebagai putusan kolektif bukanlah putusan satu orang yang kemudian mengatasnamakan banyak orang yang ada di dalamnya. Putusan kolektif berarti putusan yang dihasilkan dari begitu banyak orang yang ada di dalam satu kelompok. Hal yang juga diperhatikan dalam putusan sosial adalah hal-hal apa saja yang dipertimbangkan untuk menghasilkan sebuah putusan kolektif ini.

Pandangan yang kurang lebih sama juga diberikan oleh Suzumura³ dan Craven.⁴ Suzumura memahami teori pilihan sosial sebagai proses evaluasi atas berbagai metode membuat keputusan kolektif (Suzumura 2002,1). Sementara Craven menambahkan bahwa teori pilihan sosial memberikan perhatian pada proses membuat pilihan atau penilaian yang didasarkan pada pandangan dan preferensi beberapa individu yang saling berlainan (Craven 1992, 1). Dalam pandangannya, teori pilihan sosial sejatinya adalah satu subjek yang digunakan secara umum di dalam banyak bidang. Menurutnya, masalah dasar yang ada dalam teori ini terkait dengan masalah filsafat moral, yakni mengenai penilaian moral (*moral judgement*) (Craven 1992, 1-2).⁵ Dalam membuat pilihan sosial, kita melihat peralihan dari begitu banyak preferensi individu yang ada di dalamnya kemudian berubah menjadi satu keputusan kolektif.

Menurut Sen, dalam membuat keputusan kolektif, kita melihat bagaimana keragaman preferensi para individu menjadi satu keputusan kolektif. Baginya, hal paling penting yang perlu diperhatikan dalam teori pilihan sosial adalah proses peralihan dari begitu banyak preferensi individu menjadi satu keputusan sosial. Pertanyaan penting yang diajukan dalam teori pilihan sosial dirumuskan sebagai berikut: apa yang membuat sebuah putusan sosial itu legitim sehingga dapat mengatasnamakan satu kolektivitas tertentu? Bukankah sebelum menjadi keputusan kolektif ada begitu banyak preferensi? Jumlah preferensi itu sebanding dengan jumlah

³ Kotaro Suzumura adalah salah seorang rekan diskusi Sen yang juga menekuni tema teori pilihan sosial. Ia mengajar di Universitas Cambridge, Inggris dan Universitas Hitotsubashi, Jepang. Bersama Sen dan juga Kenneth Arrow, ia menjadi editor buku *Handbook of Social Choice Theory and Welfare*.

⁴ John Craven adalah seorang profesor ekonomi di Universitas Kent di Canterbury, Inggris.

⁵ Meski banyak berhubungan dengan filsafat moral, Craven juga mengatakan bahwa teori ini seperti tidak memiliki "rumah" (*homeless*). Hal ini disebabkan karena meski merupakan masalah moral, teori ini justru lebih banyak disajikan dalam rumus matematika sehingga banyak calon pembaca tidak familiar dengan rumus matematika akhirnya enggan menyentuh materi ini. Lih. John Craven, *Social Choice: A Framework for Collective Decisions and Individual Judgements* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 2.

individu yang ada di dalamnya. Kemudian, bagaimana kita menyikapi keragaman preferensi tersebut? (Sen 2004, 66).⁶

Sen merumuskan persoalan yang ada dalam teori pilihan sosial melalui pertanyaan utama “bagaimana mungkin kita bisa sampai pada putusan agregatif yang meyakinkan mengenai masyarakat (misalnya tentang kesejahteraan sosial, kepentingan publik, masalah kemiskinan dan lain-lain), dari beragam preferensi, minat dan kesulitan individu yang berbeda-beda yang ada dalam masyarakat?”⁷ Dan “bagaimana kita mendapatkan dasar rasional dalam membuat penilaian agregatif, seperti masyarakat yang lebih suka ini daripada itu, atau masyarakat lebih memilih ini daripada itu, dan [bagaimana] putusan itu dianggap benar secara sosial?”⁸ Dari semua pertanyaan mengenai teori pilihan sosial, pada akhirnya kita harus bertanya apakah yang disebut sebagai pilihan sosial yang masuk akal (*reasonable*) itu benar-benar mungkin? Jika memang pilihan sosial yang masuk akal itu mungkin, kita harus bertanya lebih jauh bagaimana teori pilihan sosial mengakomodasi keragaman preferensi yang ada di dalamnya. Dalam rumusan Sen, “bagaimana kita bisa mengakomodasi hak dan kebebasan setiap orang [yang ada di dalamnya] dengan memberikan pengakuan yang layak terhadap preferensi mereka?”⁹ Seluruh pertanyaan yang terkait dengan

⁶ Menurut Nitzan yang menulis buku *Collective Preference and Choice*, secara alamiah, masyarakat perlu membuat sebuah aturan untuk mentransformasi preferensi atau pilihan individu menjadi preferensi atau pilihan sosial. Aturan itu kemudian disebut sebagai aturan penjumlahan (*aggregation rule*). Melalui aturan ini, sebuah kelompok berharap dapat menyelesaikan perbedaan (konflik) preferensi yang ada di dalam kelompok tersebut. Menurutnya, kenyataan akan adanya perbedaan dalam masyarakat dan kebutuhan akan aturan penjumlahan menjadi dua masalah dasar dalam teori pilihan sosial. Lih. Shmuel Nitzan, *Collective Preference and Choice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 4-5. Nitzan adalah profesor dalam bidang ekonomi di Universitas Bar-Ilan, Israel.

⁷ “...how can it be possible to arrive at cogent aggregative judgment about society (for example, about ‘social welfare,’ or ‘the public interest,’ or ‘aggregate poverty’), given the diversity of preferences, concerns, and predicaments of the different individuals within the society?” Amartya Sen, *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, [2002] 2004), 66. Pertanyaan mengenai apakah sebuah pilihan sosial itu mungkin adalah pertanyaan yang sangat mendasar dalam teori pilihan sosial. Nitzan dalam bukunya, *Collective Preference and Choice*, mengatakan bahwa sebuah pilihan sosial yang betul-betul memuaskan sebenarnya tidak ada. Masalahnya kemudian, putusan kolektif itu sendiri adalah sesuatu yang niscaya di dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat dihadapkan pada keharusan membuat keputusan kolektif. Karenanya meski ada perbedaan pandangan dan kepentingan antar-anggota masyarakat, kita tetap harus membuat aturan untuk menghasilkan sebuah putusan sosial. Lih. Nitzan, *Collective Preference and Choice*, 9-11, dan 35-36.

⁸ “How can we find any rational basis for making such aggregative judgements as ‘the society prefers this to that,’ or ‘the society should choose this over that,’ or ‘this is socially right?’” Sen, *Rationality and Freedom*, 66

⁹ “How can we accommodate rights and liberties of persons while giving adequate recognition to their preferences?” Sen, *Rationality and Freedom*, 67.

kemungkinan pilihan sosial ini, dalam pandangan Sen, menjadi pertanyaan utama yang diajukan dalam teori pilihan sosial.

Dalam penelusuran Sen, masalah pilihan sosial sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurut Sen, persoalan pilihan sosial bisa kita lihat sejak Aristoteles dalam *Politics* dan Kautilya dalam *Economics (arthashastra)*.¹⁰ Namun secara sistematis, teori pilihan sosial baru menjadi sebuah disiplin pada abad ke-18 lewat J.C. Borda (1781) dan Marquis de Condorcet (1785) yang hidup di masa Pencerahan. Hidup di masa itu, mereka dituntut untuk membuat tatanan sosial yang masuk akal. Secara kebetulan, Condorcet saat itu menjadi salah satu tokoh intelektual dalam revolusi Perancis. Motivasi yang melatari para teoritis pilihan sosial di masa itu adalah untuk menghindari kondisi tidak stabil dan kesewenang-wenangan dalam menyusun pilihan sosial. Mereka berupaya membangun sebuah model putusan demokratis dan rasional untuk sebuah kelompok dengan memerhatikan preferensi dan kepentingan setiap anggota yang ada di dalamnya.¹¹ Namun investigasi mengenai model itu melahirkan pesimisme. Mereka dihadapkan pada inkonsistensi dalam putusan mayoritas. Inkonsistensi itu dapat dijelaskan sebagai berikut: *A* bisa mengalahkan *B* dengan mayoritas, kemudian *B* mengalahkan *C* dengan mayoritas dan begitu juga *C* bisa mengalahkan *A* dengan mayoritas (Sen 2004, 67-68).

Inkonsistensi di atas dikenal sebagai paradoks mayoritas Condorcet. Untuk menjelaskan paradoks ini, asumsikan saja bahwa ada tiga orang yang hendak mengambil keputusan kolektif dan ada tiga pilihan yang hendak diambil, yakni *x*, *y* dan *z*. Orang pertama (*A*) lebih memilih *x* daripada *y*, dan lebih memilih *y* daripada *z*. Orang kedua (*B*) lebih memilih *y* daripada *z*, dan lebih memilih *z* daripada *x*. Sementara orang ketiga (*C*) lebih memilih *z* daripada *x*, dan lebih memilih *x* daripada *y*. Maka hasilnya adalah mayoritas dari *A* dan *B* lebih memilih *y* daripada *z*, mayoritas *A* dan *C* lebih memilih *x* daripada *y* dan mayoritas *B* dan *C* lebih memilih *z* daripada *x*. Karenanya, jika preferensi masing-masing individu demikian, dalam kondisi apa pun selalu ada

¹⁰ Kautilya adalah penulis di masa India klasik, yang hidup pada abad ke-4 sebelum masehi. Ia adalah penulis mengenai strategi politik dan ekonomi politik yang dalam literatur modern digambarkan sebagai Machiavelli dari India.

¹¹ "The motivation that moved the early social choice theorists included the avoidance of both instability and arbitrariness in arrangements for social choice. The ambitions of their works focused on the development of a framework for rational and democratic decisions for a group, paying adequate attention to the preferences and interests of all its members." Sen, *Rationality and Freedom*, 68. Lihat juga dalam Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 92.

pilihan mayoritas yang diminati oleh mayoritas yang lain dan tidak mungkin ada perankingan antar-mayoritas (Kevin Roberts 2010, 117). Dengan kata lain, kondisi ini tidak akan menghasilkan preferensi mayoritas dari A, B dan C. Preferensi masing-masing individu menempatkan preferensi individu yang lain bukan sebagai preferensi, sehingga mayoritas preferensi dari ketiganya menjadi tidak mungkin.¹² Ilustrasi paradoks mayoritas Condorcet itu dapat kita lihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 4.1

Paradoks Mayoritas Condorcet:

Preferensi A	X	y	z
Preferensi B	Y	z	x
Preferensi C	Z	x	y

Tabel 4.2

Hasilnya

Preferensi A dan B	y	z
Preferensi A dan C	x	y
Preferensi B dan C	z	x

Di abad ke-20, tema pilihan sosial kembali dihidupkan oleh Kenneth Arrow melalui karyanya *Social Choice and Individual Values* (1951) dengan memerhatikan kesulitan dalam putusan sosial dan inkonsistensi yang ada di dalamnya.¹³ Namun sentuhan Arrow tetap berakhir pada nada pesimistis. Melalui Teorema Kemungkinan Umum (*General Possibility Theorem*) ia mengungkapkan bahwa hasil pilihan sosial tidak mungkin memuaskan seluruh kondisi yang dituntut dalam fungsi kesejahteraan sosial (*social welfare function*). Teoremanya ini kemudian dikenal sebagai teorema

¹² Dalam teori pilihan sosial, kasus preferensi masing-masing individu seperti ini disebut tidak transitif (*intransitive*) dan tidak konsisten (*inconsistent*). Uraian lebih teknis bisa dilihat dalam Nitzan, *Collective Preference and Choice*, 94-99.

¹³ Kenneth Arrow lahir pada 1921 dan meraih nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1972. Melalui karyanya yang berjudul *Social Choice and Individual Values* (1951) Arrow hendak mengajukan teori pilihan sosial yang memerhatikan nilai-nilai individu yang ada di dalamnya. Lih. Kenneth J. Arrow, *Social Choice and Individual Values* (New York: John Wiley & Sons, Inc., [1951] 1963), 7.

ketidakmungkinan (*the impossibility theorem*). Menurutnya, melalui teorema ini, sulit bagi kita untuk menghasilkan putusan sosial yang betul-betul memuaskan. Itu artinya, kita akan selalu menghadapi inkonsistensi dalam hasil putusan sosial. Dalam pandangannya hanya model kediktatoran yang bisa menghasilkan sebuah putusan yang meyakinkan dan menghindari inkonsistensi, namun model ini mengorbankan dimensi yang cukup mendasar dalam politik dan ekonomi. Dalam politik kita mengabaikan prinsip putusan partisipatif, dan dalam ekonomi kita tidak tanggap terhadap keragaman kepentingan yang ada di dalam masyarakat (Sen 2004, 69). Melalui teorema ketidakmungkinan Arrow ini, kita tidak mungkin bisa mentransformasi preferensi para individu menjadi preferensi sosial yang masuk akal dan demokratis atau non-diktator (Nitzan 2010, 93).

Dalam merumuskan teori pilihan sosial, Arrow memahami preferensi sosial sebagai penjumlahan preferensi individu. Ia menyebut mekanisme ini sebagai fungsi kesejahteraan sosial (*social welfare function* [SWF]). Fungsi kesejahteraan sosial ini menjadi semacam mekanisme penjumlahan pilihan yang didasarkan pada susunan pilihan individu yang ada di dalamnya.¹⁴ Cara kerja SWF adalah dengan menghitung jumlah preferensi yang paling diminati dan kemudian menjadikan hasil penjumlahan itu sebagai preferensi sosial. Dengan demikian, dalam penilaian Sen, metode yang ada di dalam SWF dapat disimpulkan sebagai penjumlahan preferensi terbanyak dalam satu kelompok dan menjadikannya sebagai preferensi sosial (Sen 2004, 329). Sebagaimana yang juga disimpulkan oleh Kevin Roberts, mekanisme ini sama seperti mekanisme pilihan sosial yang dilakukan melalui penjumlahan suara terbanyak (Roberts 2010, 117).¹⁵ Salah satu hal yang dipermasalahkan Sen dalam mekanisme SWF Arrow adalah karena ia hanya menghitung dan mempertimbangkan aspek manfaat (utilitas) dari setiap

¹⁴ Kevin Roberts mendefinisikan fungsi kesejahteraan sosial Arrow sebagai mekanisme agregasi yang mendeterminasi perankingan sosial (*social ordering*) sebagai fungsi perankingan individu (*individual orderings*). Menurutnya, contoh paling nyata dari praktik fungsi kesejahteraan sosial ini adalah mekanisme *voting* yang didasarkan pada jumlah suara terbanyak. Lih. Kevin Roberts "Social Choice Theory and the Informational Basis Approach" dalam *Amartya Sen*, ed. Christopher Morris (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 117.

¹⁵ Kevin Roberts adalah profesor ekonomi di Universitas Oxford. Perhatian utama dalam penelitiannya adalah tentang teori mikro-ekonomi dan dasar-dasar teoritis mengenai kesejahteraan dan ekonomi publik, termasuk tentang teori pilihan sosial. Ia menulis artikel berjudul "Social Choice Theory and the Informational Basis Approach".

preferensi individu yang ada di dalamnya.¹⁶ Ia tidak memasukkan aspek di luar itu sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan dalam SWF.

Secara teknis, di dalam fungsi kesejahteraan sosial (SWF) ada empat tuntutan yang harus dipuaskan namun sayangnya tidak ada putusan sosial yang berhasil memuaskan seluruh tuntutan itu. Empat tuntutan itu adalah: 1. Efisiensi Pareto (P), 2. Non-diktator, (ND) 3. Bebas (independen [I]) dan 4. Area Tidak Terbatas (*Unrestricted domain* [U]) (Sen 2004, 72; lih. juga Roberts 2010, 117-118). Uraian lebih detail mengenai prinsip-prinsip ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Hal yang ingin ditunjukkan Arrow dalam uraian mengenai tuntutan ini adalah bahwa tidak ada putusan sosial yang dapat memuaskan seluruh kondisi ini secara simultan.¹⁷ Untuk mengatasi ketidakmungkinan ini diperlukan sebuah modifikasi atas teorema Arrow. Struktur aksioma yang dikembangkan Arrow menunjukkan bahwa teoremanya dimotivasi untuk mencari model yang dapat menjamin preferensi individu dari beragam individu yang ada di dalamnya. Format fungsi kesejahteraan sosial (SWF) yang dianggap tidak memadai ini kemudian dimodifikasi dengan mengakomodasi perbandingan manfaat antar-pribadi (*interpersonal comparison of utilities*) (Sen 2004, 302-303).¹⁸ Modifikasi

¹⁶ Sejak akhir abad ke-19 pendekatan ekonomi yang mendasarkan pada nilai manfaat (utilitas) menjadi pendekatan yang cukup dominan. Pendekatan yang dikembangkan oleh para ekonom neo-klasik ini menilai sesuatu dari manfaat (utilitas) yang ada di dalamnya. Lebih lengkapnya, ada dua hal yang menentukan nilai suatu komoditas, yakni manfaat dan kelangkaan. Dalam buku *Asal Usul Kekayaan*, Martin Suryajaya menjelaskan konsep nilai manfaat sebagai kritik atas konsep sebelumnya, yakni teori nilai-kerja. Bagi ekonom neo-klasik, nilai komoditas ditentukan oleh proses sirkulasi antara permintaan dan ketersediaan, bukan oleh proses pembuatan komoditas barang tersebut. Pandangan ekonomi neo-klasik ini dianut oleh para ekonom hingga kini. Martin Suryajaya, *Asal Usul Kekayaan* (Yogyakarta: Resist Book, 2013), 110-117. Termasuk ketika kita merumuskan pilihan sosial (*social choice*), paradigma para ekonom ini juga turut memengaruhi cara sebuah kelompok menilai sesuatu. Yang dianggap bernilai adalah sejauh sesuatu itu memberikan manfaat ekonomis yang besar. Dalam arti tertentu, konsep nilai sudah direduksi pada pengertian yang sangat terbatas, yakni manfaat ekonomis. Pandangan ini kemudian dihubungkan juga dengan konsep pilihan rasional (*rational choice*). Sebuah pilihan dapat disebut rasional sejauh ia dapat memaksimalkan manfaat dan keuntungan. Pandangan-pandangan ini menjadi konteks dasar dari modifikasi Sen mengenai pilihan sosial dalam bab ini dan juga mengenai pilihan rasional yang sudah diuraikan dalam Bab III.

¹⁷ Sewaktu masih menjadi mahasiswa doctoral pada tahun 1948, Arrow pernah ditanya oleh seorang ahli logika di The RAND Corporation, Olaf Helmer “dalam arti apa sebuah kolektivitas dapat dikatakan memiliki fungsi manfaat (*utility functions*)?” Atas pertanyaan ini, Arrow menjawab dengan jawaban Abram Bergson, seorang ekonom Amerika, yakni melalui fungsi kesejahteraan sosial (SWF). Namun pada saat merumuskan jawabannya itu secara lebih sistematis ia kemudian menemukan apa yang disebut sebagai paradoks *voting*. Karena temuan ini ia kemudian menyatakan bahwa metode penjumlahan suara terbanyak dalam mengagregasi preferensi adalah sebuah model yang tidak bisa memuaskan tuntutan seluruh kondisi. Sen, *Rationality and Freedom*, 330.

¹⁸ Arrow sendiri dalam *Social Choice and Individual Values* berpandangan bahwa perbandingan kemanfaatan antar-pribadi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermakna. Arrow, *Social Choice and Individual Values*, 9.

ini akan kita lihat pada upaya yang dilakukan oleh Sen dengan memasukkan perbandingan antar-pribadi dalam perumusan putusan sosial. Ide mengenai modifikasi teori pilihan sosial akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Dalam arti tertentu, fungsi kesejahteraan sosial (SWF) yang dikembangkan Arrow bersinambung dengan pendekatan utilitarian yang diinspirasi Jeremy Bentham.¹⁹ Untuk sampai pada keputusan yang berorientasi pada ekonomi kesejahteraan mereka menggunakan kalkulus utilitarian dengan menjumlah kepentingan individu yang ada di dalamnya atas dasar prinsip manfaat (utilitas). Yang diperhatikan oleh Bentham dan juga oleh kelompok utilitarian pada umumnya adalah manfaat total dalam satu kelompok. Dalam pandangan Sen, pendekatan ini tidak memerhatikan aspek distribusi dari yang total itu. Mereka tidak memerhatikan keragaman kepentingan dan masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Mereka hanya menghitung aspek manfaat terbesar bagi satu kelompok. Menurut Sen, di dalamnya ada keterbatasan informasi mengenai apa yang dianggap penting secara etis dan politik (Sen 2004, 70). Menurut Sen, melalui pendekatan utilitarian, posisi mereka yang tidak memiliki kapabilitas yang cukup baik (misalnya karena kondisi cacat, tua atau miskin) akan sulit bersaing dengan mereka yang memiliki kapabilitas lebih baik. Kondisi ini akan membuat mereka hanya mendapatkan perhatian yang sedikit atau bahkan tidak diperhitungkan sama sekali. Dalam sejarah pengambilan keputusan publik, harus diakui bahwa pendekatan utilitarian ini memiliki pengaruh yang cukup luas dan panjang, khususnya dalam pertimbangan ekonomi kesejahteraan (Sen 2004, 70-72).

Dalam penelusuran yang dilakukan Sen, tampaknya masalah utama yang membuat hasil keputusan sosial tidak dapat memuaskan tuntutan seluruh kondisi adalah karena keterbatasan informasi (*informational constraints*) (Sen 1985, 169-184). Keterbatasan informasi itu terjadi karena pada saat kita mempertimbangkan hal-hal yang dianggap penting oleh setiap anggota masyarakat, kita hanya memerhatikan

¹⁹ Jeremy Bentham (1748-1832) menguraikan etika utilitarian yang mendasarkan pada prinsip kemanfaatan (utilitas) dalam buku *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Dalam buku itu ia mengatakan bahwa kodrat manusia selalu terarah pada pertimbangan manfaat (utilitas). Yang ia maksud dengan utilitas adalah maksimalisasi kenikmatan (*pleasure*) dan minimalisasi rasa sakit (*pain*). Secara alamiah, tindakan manusia akan selalu terarah pada pencarian utilitas dalam arti ini. Ia pernah mengatakan bahwa “Alam telah menempatkan manusia berada di bawah pengaturan dua tuan yang berdaulat, [yakni] rasa sakit dan kesenangan”. Lih. Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: The Clarendon Press, [1789] 1823), 1-2, pada chapter I, nomor I. Dengan pernyataan itu, ia menegaskan bahwa prinsip utilitas menjadi faktor penentu bagi tindakan yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok.

salah satu aspek saja, dalam hal ini adalah aspek kesejahteraan atau lebih spesifik lagi adalah aspek manfaat (utilitas). Padahal, dalam merumuskan sesuatu yang dianggap penting dan bernilai oleh masyarakat, aspek kesejahteraan bukan satu-satunya hal yang dipertimbangkan untuk menjadi pilihan dalam bertindak. Sebagaimana ditulis oleh Sen, “Nilai-nilai selain capaian kesejahteraan bisa saja sangat memengaruhi penilaian seseorang dalam memilih” (Sen 1985, 203). Masyarakat tidak hanya menganggap penting hal-hal yang menopang kesejahteraannya tetapi juga hal-hal lain yang tidak terkait dengan kesejahteraan dan keuntungannya secara pribadi. Karenanya model perumusan pilihan yang hanya didasarkan pada satu informasi, dalam hal ini aspek kesejahteraan atau manfaat tidaklah lagi memadai.²⁰ Dalam pandangan Sen, untuk mengatasi model yang tidak lagi memadai ini kita perlu memodifikasi metode perumusan putusan sosial yang juga memerhatikan masalah kebebasan dan hak.

4.3 Hubungan Preferensi dan Nilai

Salah satu masalah rumit dalam teori pilihan sosial adalah soal peralihan dari preferensi anggota yang sangat beragam menjadi satu preferensi sosial. Karenanya, konsep dasar yang perlu dipahami lebih lanjut dalam teori pilihan sosial adalah konsep mengenai preferensi. Preferensi seseorang akan sesuatu terkait dengan proses penalaran yang dibangun dalam menjelaskan alasan rasa sukanya terhadap sesuatu. Preferensi dalam arti ini tentu akan terkait dengan kesempatan seseorang untuk mencapai sesuatu yang diminatinya.²¹ Sen memahami kebebasan sebagai “kemampuan aktual seseorang untuk mencapai sesuatu yang ia memiliki alasan untuk menilai [memberikan nilai]”²²

²⁰ Prinsip ini dianut oleh paham utilitarianisme atau lebih khusus lagi adalah welfarisme. Pandangan ini hanya menerima dan menganggap penting aspek kesejahteraan atau utilitas. Lih. Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 278 dan 281. Kritikanya terhadap pandangan ini juga dapat kita lihat dalam Amartya Sen dan Bernard Williams, “Introduction: Utilitarianism and Beyond”, dalam *Utilitarianism and Beyond*, ed. Amartya Sen dan Bernard Williams (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 3.

²¹ Dalam teori pilihan sosial, kita perlu membedakan antara preferensi (*preference*) dan pilihan (*choice*). Menurut Nitzan, pengertian preferensi merujuk pada rasa suka seseorang terhadap seperangkat alternatif, sementara pengertian pilihan adalah perilaku memilih itu sendiri. Lih. Nitzan, *Collective Preference and Choice*, 3. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa preferensi adalah rasa suka kita terhadap sesuatu, sementara pilihan adalah aktivitas memilih secara aktual. Dalam arti ini, bisa saja terjadi perbedaan antara preferensi yang dimiliki dan pilihan yang diambil. Misalnya secara pribadi saya tidak suka jika membayar pajak karena akan mengurangi harta yang dimiliki, namun karena pajak itu bermanfaat untuk membantu kelompok masyarakat yang lebih lemah, saya tetap akan memilih membayar pajak. Oleh John Craven, perbedaan ini juga disebut sebagai perbedaan antara kepentingan pribadi (*personal interest*) dan pertimbangan moral (*moral judgement*). Lih. Craven, *Social Choice*, 8-9.

²² “...the actual ability of a person to achieve those things that she has reason to value.” Sen, *Rationality and Freedom*, 10.

Kebebasan seseorang untuk memilih banyak dipandu oleh preferensi atau nilai yang dianut. Dengan demikian, dalam menilai aspek kesempatan seseorang untuk mencapai sesuatu, preferensinya akan memainkan peran yang sangat penting.²³ Sesuatu yang diminati tidak bisa dipisahkan dari kebebasan, baik yang dipahami sebagai kesempatan dan juga sebagai proses. Mengapa seseorang lebih suka membaca buku A daripada buku B adalah karena preferensinya demikian. Dalam pandangan Sen, preferensi ini oleh Hayek kemudian disebut sebagai area yang dilindungi (*protected sphere*) pada diri setiap orang.²⁴

Menurut Sen, ada begitu banyak pengertian mengenai preferensi. Beberapa pengertian itu di antaranya adalah penilaian (*judgment* dan *valuation*), pilihan (*choice*) dan rasa yang menyenangkan (*favorable feeling*). Semua pengertian ini berbeda satu sama lain. Dalam ekonomi arus utama, misalnya, preferensi kerap dipahami sebagai sesuatu yang dipilih oleh seseorang (*choice*) dengan segala macam alasan dan pertimbangan yang mungkin mereka ajukan. Kadang preferensi juga dipahami sebagai sesuatu yang dapat melayani kepentingan (*interest*) atau dapat memaksimalkan kesejahteraan (*well-being*) seseorang. Mengapa seseorang memilih A daripada B adalah karena A dianggap dapat memuaskan kepentingannya (*interest*) atau dapat memaksimalkan kesejahteraannya (Sen 2004, 589).²⁵ Pemahaman Sen mengenai preferensi identik dengan konsep pilihan rasional yang sudah dijelaskan dalam Bab III. Oleh kalangan ekonom arus utama, preferensi dipahami sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan si pelaku. Dalam pandangan Sen, pengertian pilihan

²³ “In assessing the opportunity aspect of freedom, the role that a person’s preferences – in the broadest sense – may play cannot but a central issue.” Sen, *Rationality and Freedom*, 13.

²⁴ Dikutip oleh Sen dalam “Liberty, Unanimity and Rights”, *Economica* 43 (1976): 218. Pandangan Hayek sendiri mengenai “area yang dilindungi” sudah dijelaskan dalam Bab II.

²⁵ Menurut Kwang Ng, dalam memahami kesejahteraan (*welfare*), para ekonom cenderung menyederhanakan kesejahteraan lewat preferensi. Misalnya, jika si Ahmad lebih menyukai y dibanding x maka kerap disimpulkan bahwa dimensi kesejahteraan Ahmad ada di dalam y . Namun cara penyimpulan seperti ini tidak selalu memadai. Pertama karena preferensi dan kesejahteraan adalah dua hal yang bisa berbeda. Jika Ahmad lebih menyukai y dibanding x , dia memperkirakan bahwa kondisinya akan lebih sejahtera di y dibanding di x . Padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian, antara sebelum dan sesudah kejadian bisa terjadi kesenjangan. Yang kedua, preferensi individu tidak selalu dipengaruhi atau didorong oleh motif kesejahteraan pribadi si pelaku, tetapi bisa saja karena motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Andaikan ada 1 buah apel dan 1 buah jeruk tersisa, dan Ahmad lebih menyukai apel dibanding jeruk. Namun dia mengetahui bahwa adiknya juga suka apel dibanding jeruk. Ahmad kemudian memilih jeruk karena pertimbangan adiknya yang lebih menyukai apel (ia berharap agar apel dapat dimakan oleh adiknya). Dalam hal ini, Ahmad tidak memaksimalkan kesejahteraannya. Bdk. Yew-Kwang Ng, *Welfare Economics: Towards a More Complete Analysis* (New York: Pelgrave Macmillan, 2004), 6-7.

rasional seperti ini dianggap tidak lagi memadai karena tidak dapat menjelaskan hubungan tindakan yang didasarkan pada komitmen dan rasionalitas.

Sementara dalam filsafat moral, preferensi biasa dipahami sebagai rasa lebih suka (*feeling of preference*), entah dengan alasan apapun. Menurut Sen, dengan pemahaman ini, tidak ada keharusan bahwa preferensi dipahami sebagai pilihan yang bisa memaksimalkan kepentingan-diri atau kesejahteraan si pelaku (Sen 2004, 590). Definisi ini dekat dengan pengertian yang diajukan Arrow yang memahami preferensi individu sebagai nilai (*value*) (Sen 2004, 590; Arrow 1963, 23). Pengertian preferensi sebagai nilai mengungkapkan segala macam nilai yang dimiliki seorang individu. Apa yang Arrow sebut sebagai “pemeringkatan preferensi” (*preference ordering*) dapat dilihat sebagai pemeringkatan preferensi yang didasarkan pada nilai yang diyakini seseorang (Sen 2004, 590). Dalam pandangan Sen, apa yang dianggap bernilai oleh seseorang bukan hanya sesuatu yang dapat memaksimalkan kepentingan-dirinya, tetapi juga sesuatu yang tidak memaksimalkan kepentingan-diri. Baginya, semua pengertian preferensi ini penting dan ia tidak setuju pada kecenderungan untuk membatasi pengertian preferensi hanya pada satu pengertian sebagaimana yang ada dalam ekonomi arus utama. Semua pengertian yang ada bisa menjadi dasar dalam perumusan pilihan sosial dalam arti bahwa putusan sosial harus mempertimbangkan beragam preferensi yang dimiliki para anggota (individu) yang ada di dalamnya (Sen 2004, 304).

Hal yang perlu ditegaskan dalam pengertian preferensi sebagai nilai adalah bahwa nilai yang diyakini juga harus didasari dan juga tunduk pada proses pemeriksaan yang beralasan (*reasoned scrutiny*) (Sen 2004, 590). Setiap orang memiliki penilaian tentang sesuatu yang kemudian menjadi dasar bagi preferensinya. Penilaian itu harus didasari pada pemeriksaan kritis. Dalam arti ini, proses penilaian yang dipahami Sen tidak bersifat dogmatis. Nilai memang bisa datang dari komunitas di mana seseorang hidup. Sen mencoba menganalisis sumber penilaian yang dilakukan oleh seorang pribadi dan ia mengakui bahwa komunitas memiliki peran besar dalam membentuk sistem nilai yang dianut oleh seseorang. Dalam *Reason before Identity*, ia menulis bahwa “...peran komunitas dan pertemanan merupakan sesuatu yang penting bagi kita semua...”²⁶ Komunitas dan lingkungan di mana kita tumbuh memberikan pengaruh

²⁶ “...community and fellowship is important for us all...” Amartya Sen, *Reason before Identity* (Oxford: Oxford University Press 1999b), 5.

yang sangat besar bagi pengetahuan dan juga pemahaman kita mengenai etika dan norma (Sen 1999b, 5).

Namun, menurut Sen, kita juga perlu ingat bahwa meski setiap orang mengadopsi nilai dari komunitasnya, setiap orang juga bisa bersikap kritis terhadap segala hal yang diterima dari komunitas di mana ia hidup. Karenanya, apa yang disebut sebagai preferensi atau nilai bukan sesuatu yang terberi begitu saja (*given*). Preferensi seseorang juga dibentuk oleh proses dialog, diskusi dan interaksi sosial (Sen 2004, 310). Dengan demikian, preferensi seseorang bukanlah sesuatu yang sudah selesai melainkan sesuatu yang terus berkembang sepanjang ada proses dialog, diskusi dan interaksi sosial. Sen menegaskan bahwa meski komunitas memiliki pengaruh dan peran besar dalam membentuk diri setiap orang (*self-realization*), pada kenyataannya kita tetap memiliki kapasitas untuk memilih dalam membentuk diri dan nilai yang hendak kita anut (Sen 2006, 5).

Sen menggarisbawahi bahwa yang disebut sebagai pilihan menentukan identitas bukanlah sesuatu yang kita lakukan satu kali seumur hidup dan kemudian menjadi permanen. Ia memahami pilihan itu sebagai proses yang dapat terjadi berulang-ulang (*repeated process*). Dalam menentukan identitas, seseorang mendasarkannya pada pertimbangan-pertimbangan kritis dalam merespons realitas yang ada di luar. Meski mengafirmasi adanya pilihan, ia tidak menolak adanya keterbatasan (Sen 1999b, 17-18). Kita tidak bisa memungkiri bahwa “pilihan-pilihan real yang kita miliki mengenai identitas selalu dibatasi oleh tampilan kita, lingkungan kita dan latar belakang dan sejarah kita.”²⁷ Dengan menegaskan adanya keterbatasan ini, pilihan-pilihan yang kita miliki memang selalu berada bersama dengan keterbatasan (*constraints*) yang melingkupi setiap pribadi.

4.4 Konflik Kebebasan dan Pilihan Sosial

Pada bagian ini akan ditunjukkan bagaimana kebebasan seseorang, baik dalam arti proses maupun kesempatan, berhadapan dengan realitas pilihan sosial atau kolektif. Ide dasar masalah ini ada pada fakta bahwa dalam setiap kelompok masyarakat selalu terkandung begitu banyak preferensi individu. Preferensi setiap orang sangat beragam.

²⁷ “*The real options we have about our identity are always limited by our looks, our circumstances, and our background and history.*” Sen, *Reason before Identity*, 17-18.

Pada saat merumuskan satu putusan kolektif, bagaimana kita harus menyikapi keragaman preferensi yang begitu banyak? Hampir pasti, putusan sosial yang dicapai tidak sepenuhnya sesuai dengan preferensi setiap individu yang ada di dalamnya. Sen menyebut kondisi ini sebagai “ketidakmungkinan liberal Paretian” (*the impossibility of the Paretian liberal*). Dengan istilah ini ia ingin menunjukkan adanya konflik antara kebebasan dan putusan sosial yang dihasilkan. Konflik itu terjadi karena kita tidak mungkin mampu menghasilkan satu putusan sosial yang bulat (*unanimity*) dalam arti tidak bertentangan sama sekali dengan preferensi para individu yang ada di dalamnya.

Secara lebih luas, masalah kebebasan dalam pilihan sosial tidak hanya merujuk pada putusan atau kesepakatan formal sebagaimana yang ada dalam perumusan kebijakan publik. Masalah ini terjadi dalam semua kasus hidup bersama di mana di dalamnya terkandung beragam nilai atau preferensi yang tidak mudah untuk disatukan. Misalnya bagaimana kita harus menyikapi hak orang Islam Ahmadiyah untuk beribadah yang bertentangan dengan tuntutan sebagian kelompok Islam arus utama (*mainstream*). Jika keputusan diambil atas pertimbangan suara terbanyak, maka hak dasar para penganut Ahmadiyah yang berjumlah sedikit akan terabaikan. Padahal, sebagai individu dan juga kelompok, mereka memiliki hak dasar atau area yang dilindungi (*protected sphere*) yang tidak boleh dilanggar. Realitas keragaman nilai dan preferensi selalu terjadi dalam setiap masyarakat. Bagi Sen, sangatlah penting perhatian pada kebebasan bagi proses perumusan putusan kolektif. Perumusan pilihan sosial yang tidak memiliki perspektif kebebasan berdampak pada peyusutan kebebasan individu yang ada di dalamnya.²⁸

Sen melihat model pilihan sosial tradisional cenderung memerhatikan prinsip pareto dan kurang memerhatikan kebebasan.²⁹ Model pilihan sosial seperti itulah yang

²⁸ Menurut Sen, masalah khas liberalisme yang selalu muncul adalah ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, misalnya ingin membaca buku tertentu atau menyatakan satu pandangan tertentu, dan pada saat yang sama, kebanyakan orang atau orang lain berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Lih. Amartya Sen, “The Impossibility of a Paretian Liberal: Reply” *The Journal of Political Economy* 79 (1971): 1407.

²⁹ Prinsip Pareto adalah salah satu prinsip penting di dalam ekonomi kesejahteraan. Ada banyak teorema dan kondisi optimalitas yang diformulasikan dengan merujuk pada prinsip ini. Menurut Kwang Ng, satu kondisi dapat disebut sesuai dengan prinsip Pareto jika kondisi itu membuat sebagian orang lebih baik tanpa membuat sebagian yang lain lebih buruk. Yang dimaksud dengan lebih baik di sini adalah dalam arti kesejahteraannya (*welfare*). Ada banyak ekonom yang keberatan dengan prinsip ini karena prinsip ini tidak memerhatikan aspek distribusi. Misalnya jika sebuah kebijakan dapat menaikkan pendapatan kelompok yang lebih kaya tanpa mengurangi pendapatan kelompok yang lebih miskin, maka

menciptakan konflik antara kebebasan dan prinsip Pareto atau yang kemudian disebut sebagai teorema ketidakmungkinan. Untuk mengatasi konflik itu, ia menegaskan bahwa pilihan sosial harus mengakomodasi kebebasan (Sen 2004, 93). Proses akomodasi ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan beragam kepentingan anggota yang ada di dalamnya. Kita akan melihat upaya Sen memasukkan kebebasan ke dalam pilihan sosial pada bagian selanjutnya. Sebelum itu, secara teknis kita perlu melihat bagaimana ketidakmungkinan itu terjadi. Sebagaimana sudah disinggung secara singkat di atas dalam uraian mengenai teori pilihan sosial Arrow bahwa ada yang disebut inkonsistensi tiga kondisi dalam teori pilihan sosial. Tiga kondisi itu adalah kondisi Pareto (kemudian disingkat menjadi kondisi *P*), kondisi kebebasan (kondisi *L* /liberty) dan kondisi area yang tidak dibatasi (kondisi *U*/unrestricted domain).³⁰

Yang dimaksud dengan prinsip Pareto (kondisi *P*) adalah bahwa “jika setiap orang dalam masyarakat lebih menyukai satu kondisi sosial tertentu dibanding kondisi yang lain, maka pilihan itu harus diambil untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan”.³¹ Melalui prinsip ini, jika kebanyakan orang dalam satu kelompok lebih memilih *x* dibanding *y*, maka secara sosial dan untuk kebaikan sosial, *x* harus dipilih. Sementara yang dimaksud dengan kebebasan atau kondisi *L* adalah bahwa setiap individu sejatinya memiliki ruang pribadi yang harus diakui. Menurut Sen, di dalam ruang itu terkandung preferensinya mengenai sesuatu. Melalui kondisi *L* kita menuntut agar preferensi seorang pribadi harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan preferensi sosial.³² Dalam merumuskan pilihan sosial, kita harus menerima fakta bahwa di dalam satu kolektivitas terdapat individu yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pandangan-pandangan itu harus menjadi bagian dari pertimbangan kita dalam

dari perspektif prinsip Pareto tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan optimalitas Pareto. Lih. Kwang Ng, *Welfare Economics*, 26-27.

³⁰ “Formally, the theorem establishes a conflict between three conditions for social choice, viz. Condition *L*, Condition *P* (the Pareto principle) and Condition *U* (‘unrestricted domain’,...” Sen, “Liberty, Unanimity and Rights,” 218. Dari uraian ini Sen menghapus satu kondisi yang pernah disebut oleh Arrow, yakni kondisi non-diktator. Penulis tidak mendapatkan penjelasan mengenai hal ini. Namun penulis menduga bahwa bagi Sen kondisi non-diktator sudah terakomodasi dalam kondisi kebebasan (kondisi *L*).

³¹ “...if everyone in the society prefers a certain social state to another, then the choice of the former must be taken to be better for for the society as a whole.” Sen, “Liberty, Unanimity and Rights,” 217.

³² “Individual liberty can be seen to require – among other things – that each individual should have a recognized personal sphere in which his preference and his alone would count in determining the social preference.” Amartya Sen, “Liberty and Social Choice” *The Journal of Philosophy* 80 (1983): 7.

merumuskan putusan bersama.³³ Tuntutan untuk memerhatikan dan mempertimbangkan preferensi para anggota yang ada di dalamnya merupakan upaya Sen untuk mengakomodasi kebebasan dalam putusan sosial.

Sementara yang dimaksud dengan kondisi U atau area yang tidak dibatasi (*unrestricted domain*) adalah keharusan untuk tidak membatasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang sedang dirumuskan. Sen menegaskan bahwa dalam merumuskan putusan sosial kita harus mengikutsertakan seluruh preferensi individu yang secara masuk akal dimungkinkan untuk terlibat.³⁴ Dalam merumuskan putusan kolektif, kita dituntut untuk terbuka pada setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan masalah yang sedang dibahas. Namun menurut Sen, tentu saja, dalam merumuskan putusan sosial kita tidak akan mampu memuaskan tuntutan kondisi U ini secara maksimal. Putusan sosial yang dihasilkan juga tidak akan memuaskan dua kondisi sebelumnya, yakni tuntutan Pareto dan tuntutan kebebasan secara utuh.³⁵ Untuk mengatasi inkonsistensi ini, maka salah satu kondisi itu perlu dilepas atau dikurangi hingga ke tingkat yang cukup substansial.³⁶

Menurut Sen, dalam merumuskan putusan sosial dari beragam individu yang ada di dalamnya, kebanyakan orang hanya memerhatikan prinsip Pareto (kondisi P), yakni dengan mengupayakan kebulatan suara (*unanimity*) seraya mengabaikan kebebasan individu (kondisi L). Biasanya orang hanya bertanya “Anda lebih suka mana?” tanpa pernah bertanya “Mengapa Anda lebih suka ini atau itu?” (Sen 1976, 218-219). Kecenderungan semacam ini terjadi dalam teori pilihan sosial tradisional yang memahami pilihan sosial tidak lain sebagai fungsi (penjumlahan) preferensi individu,³⁷ tanpa pernah menelisik lebih jauh motivasi yang ada di balik preferensi tersebut. Menurut Sen, kecenderungan ini harus dikurangi dengan cara memerhatikan dan menimbang informasi yang ada di balik preferensi seseorang. Dalam pandangannya, upaya ini merupakan bagian dari model perumusan pilihan sosial yang pro pada

³³ “...there are certain personal matters in which each person should be free to decide what should happen...” Sen, “Liberty, Unanimity and Rights,” 217.

³⁴ “The domain of f includes all logically possible n -tuples $\{R_i\}$ of individual preference orderings over X ” Sen, “Liberty, Unanimity and Rights,” 240.

³⁵ “The impossibility of the Paretian liberal is the theorem establishing that there cannot exist a social decision function satisfying unrestricted domain, the Pareto principle (even in its weak form), and minimal liberty...” Sen, “Liberty and Social Choice,” 8

³⁶ “To avoid the inconsistency, at least one of the conditions has to be dropped or weakened in some substantial way.” Sen, “Liberty and Social Choice,” 12.

³⁷ Dalam tipe Arrow disebut “fungsi kesejahteraan sosial” (*social welfare function*).

kebebasan. Sebagaimana yang ia katakan, "...argumen yang mempertanyakan prinsip Pareto juga dapat digunakan untuk mempertegas kebutuhan mempertimbangkan informasi lain (misalnya mengenai motivasi yang ada di balik preferensi)".³⁸ Dengan cara ini, putusan sosial tidak hanya sekadar penjumlahan preferensi.

Dalam pandangan Sen, masalah utama dalam teorema ketidakmungkinan ada pada mekanisme putusan sosial yang hanya didasarkan penghitungan suara terbanyak. Katanya, "ketidakmungkinan liberal Paretian didasarkan pada asumsi bahwa preferensi sosial bergantung pada *pemeringkatan preferensi* individu... tanpa masuk ke dalam *intensitas* preferensi".³⁹ Menurutnya, mekanisme pilihan sosial tradisional cenderung menghitung jumlah preferensi terbanyak tanpa pernah melihat lebih dalam mengenai alasan atau motivasi yang melatari sebuah preferensi. Upaya untuk menelusuri motivasi yang ada di balik preferensi secara lebih mendalam, bagi Sen merupakan upaya untuk memberikan perhatian pada hak seseorang atas area yang dilindungi (*person's right over his protected sphere*) (Sen 1976, 221). Hal yang dianggap baik dan bernilai oleh setiap orang harus didengar dan dipertimbangkan sehingga putusan sosial yang dicapai telah memberikan ruang bagi beragam preferensi yang ada di dalamnya. Putusan sosial yang sudah mempertimbangkan berbagai preferensi itu dapat dilihat sebagai putusan sosial yang sudah mengakomodasi kebebasan para anggotanya. Gagasan ini merupakan salah satu dari ide modifikasi yang diupayakan oleh Sen.

4.5 Modifikasi Teori Pilihan Sosial

Dalam uraian tentang teori pilihan sosial sudah disinggung bahwa pilihan sosial adalah pilihan yang didasarkan pada beragam preferensi yang ada di dalam satu kelompok. Jumlah preferensi yang ada dalam satu kelompok sebanding dengan jumlah individu yang ada dalam kelompok tersebut. Dalam pandangan Sen, untuk menghasilkan putusan sosial yang legitim, partisipasi yang terbuka dari setiap anggota menjadi sebuah keniscayaan. Lewat gagasan pilihan sosial yang pro kebebasan, partisipasi ini kemudian diterjemahkan menjadi perumusan pilihan sosial yang memerhatikan seluruh preferensi

³⁸ "...the argument questioning the Pareto principle can be also used to establish the need to consider other information (e.g. the motivation behind those preferences)." Sen, "Liberty, Unanimity and Rights," 219.

³⁹ "The impossibility of the Paretian liberal is based on the assumption that social preference be dependent on individual preference orderings... without bringing in intensity of preference." Sen, "Liberty, Unanimity and Rights," 221.

para anggota. Dalam diskusi perumusan putusan kolektif, setiap preferensi harus ditempatkan sebagai sesuatu yang penting karena merepresentasikan rasionalitas dan kebebasan yang harus dihormati dan diakomodasi.⁴⁰ Pandangan ini menjadi gagasan yang sangat mendasar bagi proyek modifikasi teori pilihan sosial yang dilakukan oleh Sen. Agar sebuah pilihan kolektif memiliki legitimasi, maka mekanisme dan hal yang dipertimbangkan harus memasukkan perspektif kebebasan. Cara mengambil keputusan tidak dilakukan dengan cara-cara diktator dan hal yang dipertimbangkan juga harus berorientasi pada perlindungan kebebasan.

Paling tidak ada dua hal pokok yang dapat ditegaskan sebagai bagian dari upaya modifikasi teori pilihan sosial yang dilakukan Sen. Yang pertama kita akan melihat bahwa modifikasi itu dilakukan dengan cara memasukkan pertimbangan kebebasan dan hak dalam perumusan pilihan sosial. Akomodasi kebebasan dalam teori pilihan sosial ada dalam penegasan perlindungan kebebasan dan hak dasar seseorang dari tindakan yang mengganggu (*invasive action*). Sen menyebut hak dasar itu sebagai area yang dilindungi (*protected sphere*). Yang kedua, dalam memodifikasi teori pilihan sosial, Sen mencoba menunjukkan bahwa perbandingan antar-pribadi (*interpersonal comparisons*) adalah sesuatu yang mungkin dalam teori pilihan sosial.⁴¹ Ide yang menjadi dasar dalam perbandingan antar-pribadi ini adalah penolakan pertimbangan pilihan sosial yang hanya didasarkan pada aspek manfaat (utilitas) atau kesejahteraan. Dalam merumuskan putusan sosial, kita harus terbuka terhadap berbagai nilai dan preferensi. Hal yang dianggap bernilai tentu saja bukan hanya aspek kesejahteraan semata, tetapi juga aspek-aspek di luar itu.

a. Perlindungan Kebebasan dan Hak

Melalui teorema ketidakmungkinan liberal Paretian, Sen sudah menunjukkan bahwa teori pilihan sosial tradisional kurang memberikan perhatian pada kebebasan dan hak. Yang diperhatikan dalam teori pilihan sosial tradisional hanya upaya mencapai kesepakatan dan cenderung mengabaikan kebebasan serta kurang mendalami preferensi

⁴⁰ Sen mengutip pandangan Buchanan yang mengatakan bahwa “definisi demokrasi sebagai pemerintahan dengan diskusi berimplikasi bahwa nilai-nilai individu dapat dan sungguh memengaruhi proses membuat keputusan.” Sen, *Rationality and Freedom*, 264-265.

⁴¹ Di dalam teori pilihan sosial tradisional sebagaimana yang dipahami Arrow, perbandingan manfaat antar-pribadi adalah hal yang tidak memiliki makna. Lih. Arrow, *Social Choice and Individual Values*, 9.

para anggota yang ada di dalamnya. Kesepakatan yang diupayakan pada umumnya merujuk pada kesejahteraan dan manfaat saja. Minimnya perhatian pada kebebasan dapat dilihat dalam ketiadaan pertimbangan yang mendalam mengenai preferensi setiap anggota.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Sen kerap kali menegaskan perlunya modifikasi atas mekanisme perumusan pilihan sosial. Modifikasi teori pilihan sosial yang ia ajukan ada pada tuntutan untuk memerhatikan kebebasan dalam perumusan pilihan sosial. Perumusan putusan kolektif harus memberikan tempat bagi setiap anggota untuk memberikan alasan dan pertimbangan preferensinya mengenai sesuatu secara bebas. Seluruh pandangan ini harus dipertimbangkan. Dengan mekanisme ini, pilihan sosial yang legitim menjadi mungkin. Dalam *Rationality and Freedom* (2004) Sen menulis:

...teori pilihan sosial dapat dilihat sebagai satu upaya untuk memahami tuntutan keputusan rasional bagi masyarakat ketika seluruh anggota masyarakat itu memiliki kebebasan untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung, di dalam proses pengambilan keputusan, dan ini meliputi sikap hormat terhadap suara mereka, pengaruh dan hak mereka.⁴²

Sen menyatakan bahwa pilihan sosial yang konsisten – yang tidak berkonflik dengan kebebasan – itu dimungkinkan melalui proses diskusi publik yang bebas dan rasional di antara seluruh anggota yang terlibat di dalamnya. Dalam perumusan pilihan sosial yang didasarkan pada perspektif kebebasan kita harus mengakomodasi dan mempertimbangkan setiap pendapat dan perbedaan yang ada. Setiap orang bisa memberikan alasan atas pilihan yang diambil dan juga terbuka untuk diuji secara kritis oleh pihak lain.

Menurut Sen, di dalam masyarakat selalu terkandung preferensi atau nilai yang sangat beragam. Pilihan sosial yang dihasilkan tidak selalu mewakili seluruh pilihan individu yang ada di dalamnya secara bulat. Penerimaan akan keunikan nilai yang ada pada setiap individu merupakan sesuatu yang penting karena terkait dengan kesempatan setiap orang untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Kata Sen, “Pengakuan suara para anggota masyarakat dalam merumuskan pilihan sosial dan peran bahwa suara

⁴² “...social choice theory can be seen as an attempt to understand the demand of rational decisions for a society when all members of the society have the freedom to participate, directly or indirectly, in the decisional process, and this involves respect for their voice, influence and rights.” Sen, *Rationality and Freedom*, 46.

ini dapat memengaruhi putusan sosial, dapat memberdayakan para individu yang ada dalam masyarakat”.⁴³ Melalui penegasan ini, putusan sosial tidak boleh dilakukan dengan cara-cara diktator yang menutup ruang partisipasi para anggotanya karena berdampak pada penyangkalan kebebasan dan hak. Dengan kata lain, Sen hendak menekankan bahwa prinsip non-diktator menjadi semacam aksioma dalam merumuskan pilihan sosial yang pro kebebasan.

Dalam pandangan Sen, setiap orang memiliki hak untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pada kepentingannya secara partikular. Melalui prinsip kebebasan kita mengupayakan pilihan sosial yang mengakomodasi hak dan kebebasan seseorang yang ada di dalamnya, sejauh itu mungkin (Sen 2004, 592). Ia menekankan agar proses perumusan pilihan sosial mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan pertimbangan para anggota yang ada di dalamnya. Upaya ini menjadi bagian penting dari modifikasi teori pilihan sosial yang ia ajukan. Dalam tuntutan ini, ia juga mengakui bahwa upaya mengakomodasi berbagai pandangan dibatasi dengan pernyataan “sejauh itu mungkin”. Dengan demikian, meski lewat kondisi *U* (*unrestricted domain*) kita dituntut untuk membuka ruang tidak terbatas pada berbagai pandangan yang ada, namun dalam merumuskan pilihan sosial, bisa saja masih ada preferensi-preferensi anggota yang belum terakomodasi. Situasi ini merupakan bagian dari keterbatasan proses perumusan putusan sosial. Bagi Sen, yang terpenting dari proses itu adalah upaya maksimal agar hasilnya tidak lebih buruk dari alternatif yang lain (Sen 2004, 598).

Hal yang juga perlu dicatat dalam mengakomodasi kebebasan ke dalam pilihan sosial adalah bahwa pengertian kebebasan tidak lagi dimaknai secara penuh melainkan dalam arti yang minimal (*minimal liberty*). Tentu saja sulit bagi siapapun untuk menggunakan kebebasan utuhnya dalam kehidupan sosial karena pada saat yang sama kebebasan kita juga dibatasi oleh hak dan kebebasan individu yang lain. Karenanya bagi Sen, rumusan kebebasan dalam pilihan sosial lebih dimaknai sebagai kebebasan minimal. Dengan pengertian ini, ekspresi kebebasan dalam pilihan sosial lebih dipahami sebagai perlindungan area pribadi dari tindakan-tindakan yang mengganggu (*invasive action*). Misalnya, dalam kasus asap rokok, hak seseorang untuk tidak terkena asap

⁴³ “The recognition of the ‘voice’ of the members of the society in the formulation of social choice and the role that this voice gets in influencing social decisions work towards empowering the individuals in the society.” Sen, *Rationality and Freedom*, 591.

rokok harus lebih dilindungi daripada hak perokok (bdk. Sen 2004, 592). Pilihan sosial harus mempertimbangkan area yang dilindungi (*protected sphere*), yakni hak seseorang dari tindakan yang mengganggu, meski kebanyakan suara misalnya cenderung memilih hak untuk merokok. Bagi Sen, hak orang untuk tidak terkena asap rokok harus lebih diutamakan dibanding hak orang untuk merokok karena hak terakhir dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu.

Dalam pandangan Sen, setiap orang memiliki kebebasan dan hak atas apa yang dianggap baik untuk dilakukan, namun pada saat yang sama, sebagai bagian dari kolektivitas, nilai individu ini harus berhadapan dengan realitas sosial. Melalui ide kebebasan minimal (*minimal liberty*), argumen yang hendak diajukan adalah bahwa dalam tegangan antara kebebasan individu dan keputusan sosial, kebebasan tidak lagi ditampilkan dalam bentuk yang penuh, namun lebih dipahami sebagai kemestian (*necessity*), bukan sebagai sesuatu yang memadai (*sufficiency*). Ia menulis, “tidak ada upaya dalam konteks itu untuk membuat aksioma apapun seperti tuntutan penuh dari kebebasan...”⁴⁴

Kebebasan minimal tidak dimaknai sebagai kebebasan seseorang untuk melakukan apapun yang ingin dilakukan, tidak peduli dengan kondisi yang ada di luar dirinya. Dalam arti yang penuh, seseorang dapat disebut bebas jika ia bebas untuk bernyanyi atau tidak bernyanyi, tidak peduli apapun yang dilakukan orang lain. Dalam kasus ini, hak untuk bernyanyi tidak bergantung pada pilihan orang lain. Namun jika seseorang memiliki hak untuk bernyanyi hanya jika yang lain bernyanyi, haknya untuk bernyanyi tidak lagi utuh, melainkan bersifat minimal. Di dalamnya, ada sepasang pilihan, yakni (x) semuanya bernyanyi, termasuk saya dan (y) semuanya bernyanyi, kecuali saya. Dengan demikian, jika kasus ini disebut sebagai kebebasan minimal, kebebasan ini bermakna bahwa seseorang tetap memiliki hak untuk bernyanyi (x) atau tidak bernyanyi (y). Hanya saja, haknya untuk bernyanyi bergantung pada pilihan yang lain, yakni bahwa yang lain juga bernyanyi (bdk. Sen 1992b, 141).

Kebebasan dalam arti yang penuh kerap dimaknai sebagai kebebasan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan. Namun kebebasan dalam arti ini tentu saja sulit terwujud dalam realitas hidup bersama karena kebebasan untuk melakukan

⁴⁴ “...there was no attempt in that context to axiomatize anything like the full demand of liberty...” Sen, “Minimal Liberty” *Economica* 59 (1992b): 140.

sesuatu yang kita minati terkadang atau sering kali dipengaruhi oleh pihak lain di luar diri kita sendiri (Sen 1992b, 141). Misalnya, kebebasan saya untuk tidur tenang tanpa ada suara yang mengganggu telinga amat bergantung pada tindakan yang dilakukan pihak lain. Dalam contoh yang lain, hak seseorang atas kebebasan beragama tidak hanya mengandaikan bahwa ia bebas untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keyakinannya, tetapi juga bahwa kebebasan itu tidak diganggu oleh tindakan pihak lain yang membuat seseorang tidak bisa melakukan sesuatu yang ia yakini. Hak seseorang atau komunitas untuk melakukan meditasi agama menjadi tidak mungkin jika diganggu oleh suara keras yang dilakukan orang lain. Tindakan-tindakan semacam ini disebut sebagai tindakan yang menyerang ruang pribadi pihak lain. Dalam hal ini hak seseorang untuk tidur dengan tenang dan hak untuk melakukan meditasi sudah dirusak oleh tindakan yang menyerang (Sen 1992b, 141-142).

Teori pilihan sosial yang mengakomodasi kebebasan harus memberikan perhatian pada “area yang dilindungi”. Setiap orang memiliki preferensi yang terkait dengan keyakinan personalnya. Misalnya, jika seseorang memiliki keyakinan agama yang berbeda dari orang kebanyakan sehingga membuatnya tidak disukai, maka haknya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinannya harus dijamin meski ada perlawanan dari pihak lain. Kebebasan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinannya menjadi area yang harus dilindungi (Sen 2004, 597-598). Dalam hal ini kita tidak bisa mengambil keputusan yang hanya didasarkan pada suara terbanyak (prinsip Pareto), karena jika cara yang itu yang diambil, hak dasar seseorang atau kelompok minoritas tidak lagi terjamin. Karenanya, dalam merumuskan putusan sosial, kita perlu memastikan bahwa hak dan kebebasan semacam ini diperhatikan dan dijamin. Sen juga menekankan pentingnya sikap toleran dan saling hormat terhadap segala perbedaan yang ada dalam masyarakat (bdk. Sen 2004, 598).

Dalam merumuskan pilihan tindakan yang akan diambil, kita kadang dihadapkan pada dilema moral mengenai hak siapa yang harus diutamakan. Dalam soal ini Sen tidak menampik pandangan yang menilai adanya hak yang lebih penting (*more important rights*) dari hak yang lain. Ia pernah membuat ilustrasi mengenai hal ini. Ada seseorang bernama Ali yang akan diserang dan dianiaya sekelompok berandal. Donna, kawan Ali, mengetahui rencana berandal itu. Sayangnya ia tidak bisa memberitahukan hal itu kepada Ali karena ia tidak mengetahui di mana Ali berada hari itu. Namun, ia

mengetahui bahwa Ali telah meninggalkan pesan kepada Charly (kawan Ali yang lain) dan dengan pesan itu ia bisa mengetahui di mana Ali sehingga ia bisa menyelematkannya dari rencana para berandal itu. Pesan itu ada di dalam kamar Charly yang kebetulan juga sedang keluar. Untuk menyelamatkan Ali, hanya ada satu cara yang bisa dilakukan Donna, yakni mendobrak pintu kamar Charly untuk melihat pesan yang ditinggalkan Ali. Masalahnya adalah karakter Charly sangat tidak suka jika ruang pribadinya dilangkahi. Pertanyaannya kemudian, hak siapa yang harus diutamakan, hak kehidupan Ali yang sedang terancam atau hak Charly yang tidak ingin ruang privatnya diganggu (Sen 1982, 7-12).

Dalam menanggapi dilema itu Sen berpandangan bahwa hak yang lebih penting (*more important rights*) harus diutamakan daripada hak yang dianggap kurang penting (*less important rights*). Menurutnya, upaya untuk melindungi hak hidup Ali tentu lebih penting daripada hak privasi Charly (Sen 1982, 12). Melalui ilustrasi dilematis semacam itu, Sen mencoba menegaskan bahwa ada hak yang harus diprioritaskan dibanding hak yang lain. Pada akhirnya, kita memang harus memilih hak siapa yang harus dianggap lebih penting dari yang lain. Dalam membuat sebuah putusan kolektif, masalah-masalah yang secara moral dilematis bisa saja muncul. Dengan pandangan ini, Sen tidak menolak pertimbangan etika konsekuensial, hanya saja konsekuensi yang dipertimbangkan bukan manfaat (utilitas) yang lebih besar, melainkan perlindungan hak yang dianggap lebih penting.⁴⁵

b. Kemungkinan Perbandingan Antar-Pribadi

Dalam merumuskan hal yang dianggap baik, aspek kesejahteraan dan manfaat (utilitas) bukanlah satu-satunya informasi yang harus dipertimbangkan. Melalui perbandingan antar-pribadi (*interpersonal comparisons*), perumusan pilihan sosial harus membuka ruang bagi setiap penilaian yang dianggap baik. Dalam *The Idea of Justice* (2009) Sen menulis:

Sebagai sebuah disiplin evaluatif, teori pilihan sosial secara mendalam memerhatikan dasar rasional penilaian sosial dan keputusan publik dalam memilih

⁴⁵ Pandangan Sen ini merupakan tanggapan atas dilema antara etika utilitarianisme dan etika deontologis. Yang pertama lebih mempertimbangkan konsekuensi manfaat yang lebih besar, sementara yang kedua lebih mempertimbangkan kewajiban melindungi hak. Sen membuat semacam sintesa dari dua paham etika besar ini. Dalam mempertimbangkan masalah yang dihadapi, ia tidak menolak konsekuensi sebagai pertimbangan moral, hanya saja konsekuensi yang dipertimbangkan adalah konsekuensi perlindungan hak yang dianggap lebih penting.

berbagai alternatif sosial. Hasil prosedur pilihan sosial ada dalam bentuk urutan kondisi yang berbeda-beda dari satu 'titik pandang sosial', dalam pertimbangan penilaian orang-orang yang terlibat di dalamnya.⁴⁶

Hal yang ditekankan dalam modifikasi pilihan sosial yang diajukan Sen adalah sejauh mana perumusan putusan sosial memberikan perhatian dan juga mempertimbangkan preferensi individu yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa menyamaratakan penilaian individu mengenai sesuatu dan menganggapnya sebagai satu-satunya motif tindakan manusia.

Dalam penelusuran Sen, pendekatan kesejahteraan ekonomi dalam waktu lama didominasi oleh tradisi utilitarian. Melalui pendekatan ini, pilihan sosial didasarkan pada agregasi total manfaat dari semua orang yang terlibat (Sen 2004, 265). Pendekatan ini juga menjadi dasar dalam prinsip Pareto. Pada 1930-an, ada pandangan bahwa model yang disebut "perbandingan manfaat antar-personal" (*interpersonal comparisons of utility*) tidak memiliki landasan ilmiah sehingga fondasi epistemik utilitarian menjadi semacam luka yang tidak bisa diobati (Sen 2004, 265). Model ekonomi kesejahteraan selalu didasarkan pada kriteria Pareto yang menggunakan pendekatan utilitarian. Tidak ada ruang kemungkinan untuk membangun model perbandingan antar-personal, juga tidak pada kardinalitas manfaat individu.⁴⁷ Dalam memodifikasi teori pilihan sosial, Sen berpandangan bahwa model efisiensi Pareto dianggap kurang layak untuk mengukur kebaikan masyarakat (*social good*) karena tidak sensitif terhadap distribusi manfaat. Baginya, kondisi ini menjadi alasan kuat untuk memodifikasi penilaian kesejahteraan sosial yang didasarkan pada prinsip Pareto (Sen 2004, 265).

Secara praktis, tuntutan perluasan basis informasi ini dapat kita lihat dalam dorongan untuk mendalami preferensi setiap anggota. Dalam melakukan itu, kita tidak boleh mengabaikan preferensi sebagian seraya memerhatikan sebagian yang lain.

⁴⁶ "As an evaluative discipline, social choice theory is deeply concerned with the rational basis of social judgements and public decision in choosing between social alternatives. The outcomes of the social choice procedure take the form of ranking different states of affair from a 'social point of view', in the light of the assessment of the people involved." Sen, *The Idea of Justice*, 95.

⁴⁷ Konsep utilitas kardinalis lebih menekankan manfaat yang dipahami secara subjektif oleh setiap orang. Setiap orang menilai manfaat dari sesuatu secara berbeda. Konsep ini dikritik oleh para penganut utilitas ordinalis Pareto. Mereka berpandangan bahwa utilitas kardinalis mensyaratkan perbandingan antar-pribadi (*interpersonal comparison*). Metode ini dianggap lemah dan sulit diterima. Bagaimana mungkin membandingkan perasaan antar-orang secara terukur dan adakah dasar kesekuan perasaan antar-manusia. Vilfredo Pareto mengajukan konsep utilitas ordinalis, khususnya dalam menentukan pilihan kolektif yang harus diambil. Yang diperhatikan dalam utilitas ordinalis adalah susunan preferensi setiap orang atas sesuatu. Preferensi teratas terbanyak akan dianggap sebagai pilihan yang paling diminati secara kolektif. bdk. Martin Suryajaya, *Asal Usul Kekayaan*, 172-178.

Sebagaimana yang disinggung Sen, “dalam diskusi, saya tidak berupaya untuk membatasi perhatian pada konfigurasi partikular preferensi seorang individu dan mengabaikan [preferensi] yang lain”.⁴⁸ Pengabaian salah satu preferensi akan membuat putusan yang dihasilkan tidak konsisten dan tidak memerhatikan prinsip “area yang tidak dibatasi” (*unrestricted domain*). Dalam pandangan Sen, salah satu mekanisme pilihan sosial yang kerap tidak konsisten itu ada pada prosedur pengambilan suara terbanyak.⁴⁹ Pilihan yang dihasilkan dari pengambilan suara terbanyak kurang memerhatikan kepentingan antar-pribadi yang ada di dalam suatu komunitas (Sen 2004, 75-78).

Dalam penilaian Sen, prosedur yang ada dalam pilihan politik seperti pemungutan suara atau pemilihan umum dan juga pertimbangan ekonomi sebagaimana yang ada dalam evaluasi mengenai pendapatan negara hanya mengakomodasi informasi yang terbatas. Hasil yang ada dalam pemungutan suara, misalnya, hanya memberikan informasi bahwa satu kandidat mendapatkan hasil yang lebih besar dibanding yang lain. Begitu juga dalam penjumlahan pendapatan nasional. Cara itu hanya memberikan informasi mengenai apa yang dibeli dan dijual, dan dengan harga berapa, tidak lebih dari itu (Sen 2009, 93-94). Karenanya jika rumusan pilihan sosial hanya didasarkan pada informasi yang terbatas, hasilnya tidak memecahkan persoalan yang jauh lebih kompleks. Dalam pandangan Sen, salah satu jalan keluar untuk mengatasi kebuntuan ini adalah dengan mengakomodasi informasi yang lebih luas dalam perumusan pilihan sosial.

Perluasan informasi yang didasarkan pada perbandingan antar-pribadi harus mengakomodasi berbagai nilai selain aspek kesejahteraan dan manfaat. Selain aspek kesejahteraan, perumusan pilihan sosial juga perlu memasukkan aspek lain selain

⁴⁸ “*In the discussion so far, I have made no attempt to confine attention to particular configurations of individual preferences, ignoring others.*” Sen, *Rationality and Freedom*, 75.

⁴⁹ Menurut Sen, paling tidak ada dua alasan mengapa putusan sosial yang didasarkan pada pengambilan suara terbanyak kerap dianggap bermasalah. Yang pertama karena dalam pengambilan suara terbanyak, kita hanya menghitung mereka yang mengambil suara. Sementara mereka yang tidak mengambil hak suara akan diabaikan. Padahal dalam perumusan putusan sosial, mereka yang tidak mengambil suara dan juga yang suaranya kecil harus mendapatkan perhatian. Yang kedua karena pilihan yang tersedia di dalam proses pengambilan suara dianggap terbatas. Dalam pandangan Sen, Arrow cenderung pada prosedur voting atau konsensus dalam mengambil putusan kolektif. Ia mengabaikan metode perbandingan antar-personal karena dianggap tidak memiliki makna. Karenanya teorema ketidakmungkinannya juga terkait dengan metode yang ia kembangkan yang belum memasukkan perbandingan antar-personal dalam merumuskan hasil pilihan sosial. Lih Sen, *Rationality and Freedom*, 77-78.

kesejahteraan dan manfaat sebagai sesuatu yang dianggap bernilai. Dalam penjelasan yang lebih praktis, signifikansi aspek selain kesejahteraan dapat dilihat dalam analisis Sen mengenai pembangunan. Menurutnya, jaminan hak-hak sipil dan politik harus menjadi bagian dari proyek pembangunan di samping hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Katanya “pembangunan menuntut pengentasan sumber-sumber besar ketidakbebasan: kemiskinan sebagaimana juga tirani, kesempatan ekonomi yang kecil sebagaimana juga deprivasi sosial sistematis, pengabaian fasilitas publik sebagaimana juga tindakan intoleransi atau tindakan berlebihan negara yang represif.”⁵⁰

Terhadap pandangan Sen ini, kita dapat bertanya, apakah pertimbangan-pertimbangan yang ia ajukan tidak disadari sama sekali oleh para pemikir sebelumnya? Menurut Sen, perhatian mengenai pentingnya aspek di luar kesejahteraan atau manfaat (utilitas) sebenarnya sudah disadari signifikansinya.⁵¹ Hanya saja mereka, khususnya kalangan ekonom menghadapi kendala dalam merumuskan aspek di luar manfaat (utilitas). Mereka terbiasa memasukkan aspek yang bisa diukur dan bisa diamati. Karena itu, ketika ada tuntutan untuk mengakomodasi aspek selain manfaat, mereka mengalami kesulitan untuk memasukkan aspek itu dalam perumusan pilihan sosial. Sen tampaknya mau keluar dari kesulitan itu dengan kembali pada signifikansi nilai (*value*). Baginya, apa yang dianggap bernilai oleh seseorang bukan hanya aspek manfaat atau kesejahteraan, tetapi juga di luar aspek itu, misalnya kebebasan (Sen 1985, 203). Upaya ini menjadi bagian dari penerapan perluasan basis informasi yang diajukan oleh Sen dalam memodifikasi teori pilihan sosial.

Upaya Sen untuk memasukkan berbagai pertimbangan yang dianggap tidak dapat diukur dan diamati bukanlah sesuatu yang mudah. Namun cukup jelas bahwa

⁵⁰ “*Development requires the removal of major sources of unfreedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as systematic social deprivation, neglect of public facilities as well as intolerance or overactivity of repressive state.*” Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, INC, 1999), 3.

⁵¹ Menurut Sen, signifikansi mengenai informasi yang lebih luas dalam pilihan sosial sebenarnya sudah disadari oleh Arrow sendiri. Ia pernah menulis artikel berjudul “Extended Symphy and the Possibility of Social Choice” di *American Economic Review*, tahun 1977. Hal yang sama juga disadari oleh Condorcet dalam arti yang umum. Ia adalah orang pertama yang mendorong pentingnya pendidikan publik dan khususnya pendidikan untuk perempuan. Pada tahun 1780-an, ia sudah menilai bahwa pendidikan bagi kaum perempuan adalah sesuatu yang penting. Tindakan ini menurut Sen merefleksikan perhatian pada data statistik yang lebih kaya dan komitmennya untuk memperluas jangkauan diskusi publik. Sen, *The Idea of Justice*, 94.

pandangan yang hanya menjadikan aspek manfaat sebagai satu-satunya ukuran bukanlah pandangan yang tepat. Misalnya, ketika kita harus menganalisis kualitas hidup dan masalah kemiskinan, kita akan melihat bahwa ukuran pendapatan bukanlah cara yang memadai. Karenanya tuntutan untuk memperluas basis informasi menjadi hal yang relevan. Para ekonom umumnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan di bawah angka tertentu (misalnya pendapatan di bawah dua dolar AS per hari). Dengan informasi yang lebih luas, Sen lebih memahami kemiskinan sebagai hilangnya kapabilitas. Orang yang kehilangan kapabilitas adalah orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai hidup yang dianggap bernilai. Yang membuatnya demikian bukan hanya karena rendahnya pendapatan, tetapi juga karena heterogenitas personal, keragaman lingkungan, perbedaan kondisi sosial dan perbedaan budaya (Sen 2004, 86-87).⁵²

Perbandingan antar-pribadi atau perluasan basis informasi semacam ini menjadi dasar yang amat penting untuk memahami masalah kemiskinan. Pada gilirannya, perspektif ini juga akan menjadi bingkai penilaian kesejahteraan sosial dalam merumuskan pilihan sosial (Sen 2004, 91-92). Sen menegaskan bahwa “perbandingan antar-pribadi akan dengan mudah menjadi dasar penting dalam studi mengenai kemiskinan dan ketidaksetaraan antar-jenis kelamin” (Sen 2004, 91). Melalui pendekatan ini kita bisa melihat apa saja yang merintangai kebebasan seseorang dalam mencapai sesuatu yang dianggap bernilai.

Dalam pandangan Sen, penilaian kesejahteraan sosial yang tidak menggunakan perbandingan manfaat antar-pribadi atau kriteria selain manfaat (*non-utility information*) dapat dianggap sebagai mekanisme yang tidak lagi memadai. Baginya, dalam menilai kesejahteraan sosial kita harus memerhatikan seluruh aspek dan membandingkan seluruh hal yang dianggap penting. Katanya:

Kita sungguh-sungguh memerhatikan ukuran dan distribusi dari semua capaian; kita memiliki alasan untuk mengurangi kondisi deprivasi, kemiskinan dan ketidaksetaraan; dan semua ini menuntut perbandingan antar-pribadi – baik dalam manfaat atau indikator manfaat individu yang lain seperti pendapatan, kesempatan, hal-hal pokok (*primary goods*) atau kapabilitas.”⁵³

⁵² Uraian mengenai pandangan ini sudah penulis jelaskan dalam Bab III.

⁵³ “We do care about the size and the distribution of the overall achievements; we have reasons to want to reduce deprivation, poverty, and inequality; and all these call for interpersonal comparisons –

Dalam keyakinan Sen, sekali model perbandingan antar-pribadi digunakan maka masalah yang ada di dalam teorema ketidakmungkinan akan teratasi. Isi perbandingan antar-pribadi itu memang akan diperdebatkan namun isi itu sendiri akan menjadi bahan penting bagi penilaian kesejahteraan sosial yang sistematis (Sen 2004, 273).

Menurut Sen, dengan menggunakan perbandingan antar-pribadi, kerangka selain aspek manfaat (utilitas) menjadi berguna dalam menilai kesejahteraan sosial (Sen 2004, 274). Dalam penilaiannya, model yang didasarkan pada prinsip manfaat (utilitas) hanya menyajikan indeks yang terbatas. Sementara jika kita menggunakan kerangka perbandingan antar-pribadi maka informasi yang diberikan akan lebih kaya dan beragam. Menurutnya, prosedur ini secara spesifik dapat digunakan untuk membuat penilaian kesejahteraan sosial berdasarkan pada data perbandingan antar-pribadi yang kesahihannya sudah diterima secara resmi. Ia menyebut beberapa sumber perbandingan yang dapat diterima secara resmi misalnya adalah indeks ketidaksetaraan pendapatan (*indexes of income inequality*), atau ukuran pendapatan nasional real yang distribusinya sudah dikoreksi, atau penghitungan standar kemiskinan yang dibuat oleh Sen sendiri bersama Mahbub al Haq dalam Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (Sen 2004, 274).⁵⁴

Dalam pandangannya “perluasan ini jelas sangat relevan, [ia] tidak hanya untuk menghindari hasil ketidakmungkinan, tetapi juga dalam membawa analisis ekonomi kesejahteraan sejalan dengan filsafat moral...”⁵⁵ Model perbandingan antar-pribadi lebih dari sekadar jalan keluar (*way out*) dari ketidakmungkinan, tetapi juga bisa menjadi jalan masuk (*way in*) untuk menghubungkan teori pilihan sosial normatif dengan tradisi etika. Arrow sendiri sebenarnya melihat peran penting model perbandingan manfaat antar-pribadi, hanya saja ia menghadapi kesulitan menggunakan model itu dalam mengatasi hasil ketidakmungkinan yang ada dalam teoremanya (Sen 2004, 338). Kesulitan ini tampaknya menjadi perhatian Sen dan ia berupaya keras

either of utilities or of other indicators of individual advantages, such as real incomes, opportunities, primary goods, or capabilities.” Sen, Rationality and Freedom, 273.

⁵⁴ Agregat kemiskinan Amartya Sen dapat dilihat dalam “Poverty: An Ordinal Approach to Measurement” *Econometrica* 44 (Mar.,1976): 219-231. Model yang mendasarkan pada perhitungan ini dapat kita lihat dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang tidak hanya menghitung kesejahteraan berdasarkan pada pendapatan tetapi juga pada tingkat pendidikan dan kesehatan.

⁵⁵ “*This extension is of obvious relevance not only in avoiding the impossibility result itself, but also in bringing welfare economic analysis in line with moral philosophy...*” Sen, *Rationality and Freedom*, 338.

mencari jalan keluar agar skema perbandingan antar-pribadi dapat dimungkinkan bagi metode ilmiah.

4.6 Perluasan Informasi sebagai Tuntutan Keadilan

Dalam pemahaman yang lebih luas, tuntutan perluasan informasi dapat dipahami sebagai tuntutan keadilan. Menurut Sen, ide mengenai keadilan memerlukan pertimbangan perspektif yang beragam, bukan perspektif yang tunggal. Perumusan pilihan sosial yang mengakomodasi perspektif yang beragam dan pertukaran gagasan bukan hanya lebih baik, tetapi juga membuka ruang partisipasi aktif dari seluruh anggota. Ketika kita membuat penilaian mengenai sikap atau jenis masyarakat yang tidak adil, kita perlu mendengar dan memerhatikan pandangan lain yang diharapkan dapat memberikan catatan atau revisi atas kesimpulan yang kita buat. Begitu juga sebaliknya ketika seseorang membuat pertimbangan mengenai ketidakadilan, kita perlu menyampaikan pandangan tentang prioritas dan cara berpikir kita (Sen 2009, 88).

Penilaian yang adil mengandaikan satu proses yang terbuka terhadap berbagai perspektif. Dalam merumuskan pilihan sosial, kita tidak bersandar hanya pada satu perspektif saja. Menurut Sen, keyakinan yang terlampau besar pada satu posisi yang dipegang dan tidak mau mendengar perspektif yang lain disebut sebagai ilusi objektif (*objective illusion*).⁵⁶ Sikap semacam ini bisa menjadi rintangan yang cukup serius untuk sampai pada putusan yang adil. Ia mengatakan, “Dalam mencapai keadilan, ilusi posisional menjadi rintangan serius yang dapat diatasi melalui perluasan basis informasi sesuatu yang dievaluasi.”⁵⁷ Untuk mengatasi ilusi objektif atau ilusi posisional, seseorang harus mampu melampaui perspektifnya dengan mendengar dan mempertimbangkan perspektif yang lain. Tanpa itu, ia akan terjebak pada sudut pandang tertentu dan tidak bisa menemukan kebenaran dari pertimbangan-pertimbangan lain.

⁵⁶ Dalam menjelaskan kasus ilusi objektif (*objective illusion*) atau ilusi posisi (*positional illusion*), Sen memberikan sebuah ilustrasi tentang orang yang berpendapat bahwa ukuran bulan dan matahari adalah sama. Pandangan yang pada awalnya dianggap objektif oleh orang yang meyakini kemudian dikoreksi dengan pandangan yang sudah mempertimbangkan jarak objek dan proyeksi. Kekeliruan pandangan yang meyakini bahwa ukuran bulan dan matahari adalah sama didapat setelah orang tersebut melakukan transendensi pandangannya dan mendengar pandangan yang lain. Sen, *The Idea of Justice*, 162-163.

⁵⁷ “*In the pursuit of justice, positional illusions can impose serious barriers that have to be overcome through broadening the informational basis of evaluations...*” Sen, *The Idea of Justice*, 169.

Sen memahami proses penalaran sebagai sikap kritis terhadap semua perspektif dan informasi, baik yang datang dari kita sendiri atau pihak lain. Menurutnya, melalui sikap ini kita berupaya untuk sampai pada tingkat yang disebut sebagai objektivitas etis (*ethical objectivity*). Ia memaknai objektivitas etis sebagai kemampuan untuk bersikap terbuka terhadap berbagai perspektif dan bersikap kritis terhadap semua perspektif (Sen 2009, 122). Dalam penalaran publik, setiap pihak dituntut memiliki kemampuan melampaui posisi yang diyakininya. Kemampuan melampaui posisi yang diyakini dengan mempertimbangkan perspektif yang lain merupakan langkah penting untuk sampai pada objektivitas etis. Ia sendiri mengakui bahwa untuk sampai pada level ini tidaklah mudah. Karenanya upaya ini menjadi semacam tantangan besar yang harus diatasi oleh setiap pihak yang terlibat dalam penalaran publik (*public reasoning*) (Sen 2009, 155).

Tuntutan untuk memperluas basis informasi yang tidak terbatas pada satu perspektif dipahami sebagai imparzialità terbuka (*open impartiality*). Dengan gagasan ini, Sen hendak mengkritik model imparzialità Rawls yang membatasi proses penalaran publik hanya pada mereka yang terlibat dalam satu kontrak sosial tertentu. Bagi Sen, model imparzialità Rawls dan imparzialità yang diinspirasi oleh teori kontrak sosial pada umumnya disebut sebagai imparzialità tertutup (*closed impartiality*).⁵⁸ Model imparzialità tertutup, dalam pandangan Sen dianggap tidak lagi memadai. Dalam proses penalaran publik, kita seharusnya tidak membatasi pertimbangan hanya pada mereka yang disebut sebagai warga negara. Bila kita menerima prinsip kemanusiaan sebagai postulat, maka seharusnya pertimbangan mengenai keadilan dapat melampaui batas-batas kewarganegaraan. Gagasan mengenai imparzialità terbuka ini datang dari konsep “penonton imparisial” (*impartial spectator*) Adam Smith.⁵⁹ Dalam pandangan

⁵⁸ Uraian lebih jauh mengenai konsep imparzialità terbuka Sen dapat dilihat dalam “Open and Closed Impartiality” *Journal of Philosophy* 99 (2002).

⁵⁹ Menurut Smith “Kita tidak pernah bisa mengamati sentimen dan motif kita sendiri, kita tidak pernah bisa membuat satu penilaian atas sentimen dan motif [kita sendiri]; kita bisa melakukan itu jika kita menyingkirkan diri kita sendiri, sebagaimana dia ada, dari tempat alamiah kita, dan berusaha melihatnya dari jarak tertentu. Namun kita dapat melakukan upaya ini hanya melalui mata orang lain, atau sebagai orang lain yang melihat dirinya.” Lihat Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 128.

Sen, konsep penonton imparial Smith bisa menjadi alat dalam melakukan proses pemeriksaan yang lebih kritis.⁶⁰

Dengan menggunakan konsep “penonton imparial” (*impartial spectator*), Sen berargumen bahwa dalam penalaran publik, satu komunitas tidak bisa mengandalkan hanya pada pandangan orang-orang tertentu yang sudah dibatasi. Penilaian tentang ketidakadilan harus melibatkan peserta yang lebih luas melampaui batas-batas kewarganegaraan.⁶¹ Paling tidak ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Sen. Pertama, melalui pelibatan yang lebih luas, kita akan mendapatkan persepsi yang lebih bervariasi. Alasan yang kedua adalah karena pilihan yang akan diambil dapat dipastikan memberikan pengaruh pada orang lain di luar kelompok itu.⁶² Dan pertimbangan yang ketiga, barangkali dengan memerhatikan perspektif dari luar akan membantu satu kelompok masyarakat mengatasi persoalan parokial yang tengah dihadapi (Sen 2009, 130).

Dalam pandangan Sen, mereka yang tidak membuka diri pada pandangan yang lebih luas juga akan terjebak dalam kondisi yang disebut keterbatasan informasi (*informational constraint*). Menurutnya, setiap prinsip moral selalu mengandaikan informasi yang menopang prinsip itu sendiri. Dengan informasi itu, sebuah prinsip moral cenderung melakukan tindakan penyamarataan atas segala persoalan yang ada.⁶³ Menurut Sen, setiap informasi yang dipakai dalam satu prinsip moral sebenarnya, diakui atau tidak diakui, secara implisit mengandung keterbatasan. Keterbatasan itu terjadi akibat tindakan penyamarataan itu sendiri, yakni satu prinsip moral dipakai untuk membaca semua persoalan. Padahal setiap persoalan perlu didekati dengan cara yang berbeda-beda (Sen 1985, 169-170). Bagi Sen, model pertimbangan yang hanya

⁶⁰ “The Smithian ‘impartial spectator’ is, of course, a device for critical scrutiny and public discussion.” Sen, *The Idea of Justice*, 135.

⁶¹ Menurut Sen, gagasan utama dalam konsep *impartial spectator* Smith adalah kebutuhan untuk mempertimbangkan sudut pandang yang lebih luas. bdk. Sen, *The Idea of Justice*, 45.

⁶² Sen memberikan contoh tentang rencana Amerika menginvasi Irak pada 2003. Mereka hanya menerima pertimbangan dari warga Amerika. Padahal dalam kasus invasi Irak, dampak yang akan ditanggung bukan hanya oleh warga Amerika, tetapi juga masyarakat dunia secara global. Karenanya pertimbangan yang hanya menyertakan mereka yang disebut warga negara tidak lagi memadai. Kita perlu melibatkan masyarakat yang lebih luas. Lih. Sen, *The Idea of Justice*, 71.

⁶³ Yang dimaksud dengan informasi di sini adalah elemen dasar yang kemudian menjadi pertimbangan utama dari sebuah prinsip moral. Dalam pendekatan utilitarian misalnya, informasi yang menjadi pertimbangan utamanya adalah aspek kegunaan (*utility*) sementara dalam Ronald Dworkin adalah aspek sumberdaya. Mereka membatasi pertimbangannya hanya pada aspek tertentu.

mendasarkan pada satu posisi dianggap mengabaikan tahapan penting untuk mencapai objektivitas antar-posisi karena telah menutup suara dan pandangan yang berbeda-beda.

Dalam *The Idea of Justice*, Sen menceritakan dialog antara Arjuna dan Krishna sebagaimana yang ada dalam *Bhagawadgita (Gita)*. Dalam kitab itu diceritakan bahwa keduanya tengah mendiskusikan rencana perang terhadap para Kurawa. Menurut Sen, dialog yang ada dalam kitab *Gita* sendiri adalah dialog yang dilihat dari perspektif Krishna. Menanggapi rencana perang terhadap Kurawa, Arjuna cenderung menolak karena baginya di dalam perang akan ada banyak kematian, kehancuran dan kehilangan. Dalam pandangan Sen, pertimbangan ini dikategorikan sebagai pertimbangan konsekuensial. Sementara Krishna mengingatkan tanggung jawab Arjuna sebagai jenderal yang memiliki tugas menumpas para Kurawa yang telah merebut kerajaan. Krishna tidak memerhatikan akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas tersebut. Menurut Sen, pertimbangan Krishna dikategorikan sebagai argumen deontologis, yakni pertimbangan yang menekankan kewajiban, bukan konsekuensi (Sen 2009, 208-210). Diskusi antara keduanya berakhir dengan keputusan memerangi para Kurawa. Namun dalam hal ini Sen menggarisbawahi argumen penting Arjuna yang perlu dilihat.

Paling tidak ada tiga argumen Arjuna yang seharusnya dipertimbangkan sebagai perluasan informasi. Argumen ini sekaligus dapat dipahami sebagai sintesa antara pertimbangan konsekuensial dan deontologis. Yang pertama adalah argumen mengenai pentingnya kehidupan manusia (*the significance of human lives*). Bagi Arjuna, pilihan untuk berperang memiliki konsekuensi yang sangat besar pada kehidupan umat manusia dan dunia. Yang kedua adalah pandangan Arjuna mengenai tanggung jawab. Menurutnya, pilihan yang akan diambil memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Dalam hal ini, Arjuna memiliki pemahaman yang berbeda dari Krishna dalam memahami makna tanggung jawab. Krishna lebih menekankan tanggung jawab Arjuna sebagai jenderal yang harus menumpas para Kurawa yang merebut kekuasaan. Sementara Arjuna lebih memahaminya sebagai tanggung jawab pada kehidupan. Sen menyebut ini sebagai pertimbangan kepelakuan (*agency*). Yang ketiga adalah pertimbangan relasional, di mana orang-orang yang akan diperangi masih menjadi bagian dari keluarga Barata. Dalam hal ini, Arjuna memasukkan unsur perasaan pribadi dan kecenderungan hati (*inclination*) di dalam pertimbangannya (Sen 2009, 212-214). Bagi Sen, kecenderungan hati merupakan sesuatu yang sah dalam pertimbangan moral.

Hanya saja untuk sampai pada putusan yang lebih adil, pertimbangan ini nantinya perlu diperiksa secara objektif dalam perspektif penonton imparisial (*impartial spectator*).

Dari cerita ini Sen menggarisbawahi pentingnya perspektif yang berbeda dalam mempertimbangkan satu persoalan agar tidak terjebak dalam ilusi posisional. Dalam sebuah diskusi publik, seseorang perlu mengajukan sudut pandang yang ia miliki. Namun, untuk mencapai perspektif yang lebih objektif setiap pihak dituntut untuk mempertimbangkan dan terbuka terhadap perspektif pihak lain yang berbeda. Melalui model diskusi semacam ini diharapkan terhasil sebuah kesimpulan yang lebih objektif yang tidak berasal dari satu pihak saja. Bagi Sen, sikap semacam ini bukan hanya soal upaya untuk mencari sudut pandang yang lebih objektif, tetapi juga merupakan proses diskusi yang adil terhadap semua pihak. Karenanya, dalam pandangan Sen, perluasan informasi dipahami sebagai bagian dari tuntutan ide keadilan dalam membuat putusan kolektif.

4.7 Rangkuman

Bab IV ini merupakan bagian yang cukup penting bagi bangunan disertasi ini. Dalam bab ini, kita melihat bagaimana konsep kebebasan yang sudah diuraikan sebelumnya dikontestasikan dan diintegrasikan ke dalam pilihan sosial (*social choice theory*). Jika pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Sen memahami konsep kebebasan dan kapabilitas, pada bab ini ia menunjukkan bahwa teori pilihan sosial seharusnya memasukkan pertimbangan kebebasan dan kapabilitas yang sudah diuraikan. Ia mengkritik teori pilihan sosial tradisional yang cenderung mengabaikan pertimbangan hak dan kebebasan. Menurutnya, teori pilihan sosial tradisional hanya mengakomodasi pertimbangan manfaat dan kesejahteraan. Hal yang hendak dikatakan oleh Sen adalah bahwa pertimbangan pilihan sosial semacam itu sudah tidak lagi memadai karena bertentangan dengan prinsip kebebasan.

Karenanya perlu ada upaya untuk memodifikasi teori pilihan sosial agar pro pada pertimbangan kebebasan dan perbandingan antar-pribadi. Sen menggarisbawahi soal perumusan pilihan sosial tradisional yang dilakukan dengan menjumlahkan pilihan terbanyak atas nilai manfaat. Dalam memodifikasi teori tersebut, ia menekankan pentingnya partisipasi bebas dari setiap anggota untuk menyampaikan kepentingannya. Semua preferensi individu ini harus dipertimbangkan sehingga putusan sosial yang

dihasilkan tidak mempersempit kebebasannya. Selain itu, putusan sosial juga perlu memerhatikan hak dan kebebasan setiap individu yang tidak boleh dilangkahi. Sen menyebut area ini sebagai area yang harus dilindungi (*protected sphere*).

Perumusan pilihan sosial yang mengakomodasi perbandingan antar-pribadi meniscayakan proses perluasan informasi. Bagi Sen, tuntutan untuk memperluas informasi yang perlu dipertimbangkan terkait dengan tuntutan ide keadilan. Sikap adil sejatinya adalah soal kemampuan untuk tidak menjadikan perspektif yang kita miliki sebagai satu-satunya kebenaran yang membuat kita tidak bisa menerima perspektif pihak lain. Dengan mempertimbangkan beragam preferensi, putusan yang diambil dapat lebih sensitif terhadap kepentingan semua pihak. Karenanya, dalam sebuah diskusi publik, kita dituntut untuk mampu merangkul berbagai pandangan dan kepentingan yang ada.

Ide Sen mengenai teori pilihan sosial yang pro pada kebebasan menjadi bagian akhir dari uraian pokok mengenai kebebasan dan teori pilihan sosial. Pada bab berikutnya penulis akan menguraikan beberapa kritik yang dialamatkan pada pandangan kebebasan Sen. Ada dua tokoh yang akan diangkat dan masing-masing mewakili mazhabnya. Yang pertama adalah rekan Sen sendiri, Martha Nussbaum yang sama-sama menjadikan kapabilitas sebagai pendekatan. Meski memiliki pendekatan yang sama, kita akan melihat catatan dan kritik yang lebih rinci dari Nussbaum terhadap pendekatan Sen mengenai kapabilitas. Yang kedua adalah Philip Pettit, seorang Republikan yang akan menggarisbawahi konsep kontrol dalam pandangan Sen mengenai kebebasan. Dalam hal ini, Pettit memiliki pandangan yang lebih ketat mengenai kontrol di dalam ide kebebasan.

BAB V
KRITIK NUSSBAUM DAN PETTIT
TERHADAP PANDANGAN KEBEBASAN SEN

5.1 Pengantar

Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan pemahaman Sen mengenai kebebasan secara panjang lebar, klasifikasi kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*), kritik terhadap teori pilihan rasional (*rational choice theory*) serta integrasi kebebasan di dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*). Pada Bab II, penulis menjelaskan pandangan Sen mengenai kebebasan yang tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya paksaan (aspek proses), tetapi juga sebagai kapabilitas (aspek kesempatan real). Pada Bab III dijelaskan lebih jauh mengenai kapabilitas yang diklasifikasi menjadi kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan. Melalui klasifikasi ini ia menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan satu-satunya nilai yang menjadi pertimbangan di dalam tindakan seseorang atau kelompok. Sementara pada Bab IV, pandangan Sen mengenai kebebasan dikontestasikan dan diintegrasikan ke dalam teori pilihan sosial. Dalam pandangannya, teori pilihan sosial tradisional kurang memberikan perhatian pada kebebasan. Karenanya pembahasan mengenai teori pilihan sosial yang lebih memerhatikan kebebasan menjadi hal yang sangat penting. Gagasan ini juga menjadi proyek modifikasi atas teori pilihan sosial yang diajukan Sen.

Pada Bab V ini akan diangkat beberapa kritik dan catatan yang diajukan terhadap pandangan Sen mengenai kebebasan. Ada dua tokoh yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam kritik terhadap pandangan kebebasan yang dipahami Sen. Tokoh yang pertama adalah Martha C. Nussbaum, seorang filsuf feminis yang juga turut mengembangkan pendekatan kapabilitas bersama Sen. Ia dan Sen pernah menulis dan mengedit bersama sebuah buku berjudul *The Quality of Life* (1993) dan juga mendirikan satu forum yang menjadikan kapabilitas sebagai pendekatan utama dalam pembangunan manusia. Forum yang mereka dirikan itu bernama Human Development and Capability Association (HDCA). Kritik yang kedua datang dari Philip

Pettit, seorang Republikan yang menulis beberapa buku mengenai kebebasan.¹ Kritik dan catatan dari dua tokoh ini mewakili kritik internal dan kritik eksternal. Nussbaum memberikan kritik dan catatan kepada Sen dari perspektif yang sama, yakni pendekatan kapabilitas. Sementara Pettit mengajukan kritik terhadap pandangan Sen mengenai kebebasan lewat perspektif kebebasan yang berbeda, yakni dari tradisi Republikan.

Kritik Nussbaum diuraikan dalam empat catatan yang sejatinya masih terkait satu sama lain. Yang pertama tentang ketiadaan ide ambang batas (*threshold*) dalam pendekatan kapabilitas yang dipahami Sen. Yang kedua tentang respons Sen terhadap relativisme budaya yang dianggap kurang tegas. Yang ketiga tentang ketidakjelasan pendasaran pandangan Sen mengenai kebebasan pada Karl Marx dan Aristoteles. Yang terakhir adalah catatan Nussbaum terhadap klasifikasi Sen mengenai kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) yang dianggap kabur (*obscure*) dan tidak berguna (*not useful*). Sementara bagian kedua berisi kritik Pettit terhadap pandangan Sen mengenai tidak perlunya kontrol langsung (*direct control*) dalam ide kebebasan. Sebagai pemikir yang berasal dari tradisi Republikan, Pettit memberikan catatan bahwa pandangan Sen yang tidak mengharuskan adanya kontrol langsung di dalam konsep kebebasan agak sulit untuk bisa dipahami sebagai tindakan bebas. Kritik dan catatan ini akan dijelaskan lebih rinci dalam bab ini.

Melalui kritik Nussbaum dan Pettit, penulis ingin menunjukkan bahwa pandangan Sen mengenai kebebasan dan kapabilitas dianggap belum memadai atau kurang memberikan jaminan perlindungan kapabilitas dasar manusia. Namun, melalui kritik dan catatan ini, penulis juga ingin menegaskan posisi Sen yang memiliki tekanan berbeda dalam melihat masalah yang dihadapi. Beberapa perbedaan ini akan diklarifikasi sehingga kita bisa melihat signifikansi gagasan setiap pemikir pada tempatnya masing-masing. Sementara beberapa pandangan Sen yang dianggap kurang

¹ Melalui tradisi Republikan, Philip Pettit memahami kebebasan sebagai non-dominasi. Yang ia maksud dengan non-dominasi, seseorang bertindak dengan kontrol penuh dari dirinya sendiri, tanpa ada dominasi atau karena kebaikan hati pihak lain. Dalam pandangannya, kebebasan sebagai non-dominasi berbeda dari kebebasan negatif yang dimaknai sebagai tidak adanya campur tangan (*interference*) dari pihak lain. Seseorang bisa saja berada dalam dominasi pihak lain, di mana pada saat yang sama ia tidak mengalami campur tangan. Misalnya seorang budak yang diizinkan untuk memilih apa yang diinginkan karena sudah diizinkan oleh tuannya. Dalam hal ini ia tidak mengalami campur tangan dari tuannya, namun ia jelas berada dalam dominasinya. Philip Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government* (Oxford: Oxford University Press, 1997), 4-5; 22; 31.

memadai tentu bisa semakin melengkapi pemahaman kita mengenai kebebasan dan kapabilitas serta relevansinya bagi masalah yang kita hadapi.

5.2 Kritik dan Catatan Nussbaum

Pandangan Nussbaum mengenai kapabilitas, sebagaimana yang ia akui sendiri, banyak dipengaruhi oleh Sen. Meski begitu, ia tetap memiliki beberapa pandangan yang berbeda dari Sen dalam memahami pendekatan kapabilitas. Beberapa perbedaan itu akan dijelaskan dalam kritik dan catatan yang ia ajukan kepada Sen. Mereka pernah bekerja bersama di World Institute for Development Economics Research (WIDER) pada 1986 (Nussbaum 2006, 11) dan menulis buku bersama pada 1993 (*The Quality of Life*). Saat ini Nussbaum mengajar di Universitas Chicago Amerika Serikat dan menjadi guru besar dalam bidang hukum dan etika. Melalui karya-karyanya, ia banyak menulis tentang filsafat klasik, filsafat politik, tentang keadilan sosial, khususnya dari perspektif feminis. Ia termasuk seorang penulis yang cukup produktif. Beberapa karya yang pernah dipublikasikan adalah *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (2011), *From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law* (2010), *Liberty of Conscience: In Defense of America's Tradition of Religious Equality* (2008), *Frontier of Justice: Disability, Nationality, Membership* (2006b), *Women and Human Development* ([2000] 2006a) dan lain-lain.²

Nussbaum memahami kapabilitas-kapabilitas manusia (*human capabilities*)³ sebagai kemampuan aktual untuk melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu.⁴ Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa yang terpenting bagi manusia sebenarnya adalah adanya kemampuan untuk melakukan atau menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Pandangan ini juga merupakan kritik terhadap pendekatan ekonomi yang melihat kualitas hidup manusia ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang diterima

² Tentang biografi Nussbaum dapat dilihat dalam www.philosophy.uchicago.edu.

³ Nussbaum menggunakan term kapabilitas dalam bentuk plural "*capabilities*", sementara Sen lebih sering menggunakannya dalam bentuk tunggal "*capability*". Nussbaum menggunakan dalam bentuk plural untuk menunjukkan bahwa elemen-elemen kualitas hidup yang sangat penting sejatinya bersifat plural dan secara kualitatif berbeda. Kesehatan, integritas tubuh, pendidikan dan aspek kehidupan yang lain tidak bisa direduksi menjadi satu metrik tunggal. Martha Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011), 18.

⁴ "...what people actually are able to do or to be." Martha Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 4. Lihat juga Nussbaum, *Creating Capabilities*, 20.

(GDP/GNP dan pendapatan per kapita).⁵ Meski memiliki banyak kesamaan pandangan dengan Sen, di antara mereka berdua juga ada perbedaan pandangan yang cukup mendasar tentang pendekatan kapabilitas. Dalam beberapa karyanya, Nussbaum menegaskan perbedaan itu. Secara langsung dan juga tidak langsung, perbedaan itu dapat dipahami sebagai kritik dan juga catatan terhadap pandangan Sen mengenai kebebasan dan kapabilitas. Berikut ini adalah empat kritik yang diajukan oleh Nussbaum.

a. Signifikansi Ambang Batas

Salah satu gagasan Nussbaum yang tidak dapat kita temukan secara eksplisit dalam pandangan Sen mengenai kapabilitas adalah tentang keharusan adanya ambang batas (*threshold*) kapabilitas-kapabilitas utama (*central capabilities*) bagi setiap manusia. Yang ia maksud dengan ambang batas kapabilitas-kapabilitas utama adalah jaminan adanya kapabilitas minimal pada setiap manusia di manapun untuk melindungi martabat mereka sebagai manusia. Nussbaum beranggapan bahwa jika tidak ada jaminan adanya ambang batas kapabilitas utama ini, martabat seorang manusia akan rentan terabaikan. Misalnya, orang yang mengalami kelaparan atau orang yang mencuri makanan untuk bertahan hidup, dalam pandangan Nussbaum adalah contoh orang yang mengalami kehilangan martabat kemanusiaannya karena tidak memiliki ambang batas kapabilitas utama (Nussbaum 2006a, 71-72). Agar martabat seorang manusia tetap terlindungi, ia mengidentifikasi sepuluh kapabilitas utama yang harus ada pada setiap manusia di manapun.

Sepuluh kapabilitas utama itu adalah sebagai berikut. *Yang pertama*, kapabilitas pada kehidupan (*life*), dalam arti bahwa setiap orang dapat hidup dengan umur yang normal dan tidak mati secara prematur. *Yang kedua* kapabilitas pada kesehatan tubuh (*bodily health*) bagi setiap orang. Dengan kapabilitas ini, seseorang bisa memiliki kesehatan yang baik termasuk kesehatan reproduksi, nutrisi yang baik dan juga memiliki tempat tinggal yang layak. *Yang ketiga* hak atas integritas tubuhnya (*bodily integrity*). Melalui kapabilitas ini, semua orang bebas untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, aman dari serangan pihak lain, aman dari tindak pemerkosaan,

⁵ Kritik Nussbaum atas pendekatan pembangunan yang menekankan peningkatan GDP dan pendapatan per kapita bisa dilihat dalam banyak karyanya. Salah satu yang terbaru, bisa dibaca dalam Nussbaum, *Creating Capabilities*, 46 dan seterusnya.

aman dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memiliki kesempatan untuk mencapai kepuasan seksual dan memiliki hak memilih untuk sesuatu yang terkait dengan reproduksi. *Yang keempat*, kebebasan menggunakan indra, imajinasi dan pikiran (*sense, imagination and thought*). Dengan batas minimal kapabilitas ini, seseorang tidak hanya bebas berpikir dan berimajinasi tetapi juga memperoleh pendidikan yang layak. Dengan imajinasinya mereka bebas berkarya sesuai dengan keyakinan yang dianut. *Yang kelima* kapabilitas pada emosi (*emotions*). Seseorang dapat menggunakan emosinya bersama yang lain. Dengan kapabilitas ini ia dapat mencintai orang yang mencintainya. Seseorang juga bisa menyatakan rasa duka cita karena ketiadaan seseorang dan boleh marah untuk sesuatu yang dapat dibenarkan.

Yang keenam, kapabilitas pada nalar praktis (*practical reason*). Seseorang dapat membangun konsepsi mengenai yang baik dan terlibat dalam refleksi kritis mengenai rencana hidupnya. Dengan kapabilitas ini seseorang memiliki hak perlindungan bagi kebebasan suara hati dan keyakinan agamanya. *Yang ketujuh*, kapabilitas untuk berafiliasi (*affiliation*). Ada dua hal yang ditekankan dalam kapabilitas ini. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup bersama dengan yang lain dan terlibat dalam berbagai bentuk interaksi sosial. Yang kedua, setiap orang berhak untuk mendapatkan kehormatan diri (*self-respect*) dan tidak mengalami penghinaan sosial dalam bentuk diskriminasi karena ras, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, kasta, agama dan asal kebangsaan. *Yang kedelapan*, kapabilitas untuk berhubungan dengan makhluk yang lain (*other species*). Setiap orang berhak untuk hidup bersama dan berhubungan dengan binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta. *Yang kesembilan*, kapabilitas pada permainan (*play*). Semua orang memiliki hak untuk tertawa, bermain dan menikmati segala aktivitas rekreasi. *Yang terakhir* atau *kesepuluh*, kapabilitas untuk mengontrol lingkungan (*control over one's environment*). Kapabilitas ini dimaknai sebagai hak setiap orang untuk berpartisipasi secara efektif pada pilihan-pilihan politiknya dan hak untuk memiliki satu kepemilikan tertentu secara sama sebagaimana orang lain (Nussbaum 2011, 33-34; 2003, 41-42; 2006a, 78-80).

Nussbaum memahami sepuluh kapabilitas utama ini (*central human capabilities*) sebagai konsensus bersama (*overlapping consensus*) dalam liberalisme

politik (*political liberalism*).⁶ Sepuluh kapabilitas itu menjadi semacam tujuan politik bersama atau titik temu yang ditentukan oleh begitu banyak orang dengan latar belakang yang sangat beragam. Melalui sepuluh kapabilitas utama ini, Nussbaum hendak memastikan jaminan perlindungan martabat setiap manusia dan juga bermaksud menjadikan setiap pribadi sebagai tujuan pada dirinya (*principle of each person as an end*). Nussbaum mengkritik keras setiap tindakan yang menjadikan manusia sebagai alat bagi yang lain. Dalam penilaiannya, kaum perempuan adalah makhluk yang kerap kali dijadikan alat atau pendukung bagi tindakan yang dilakukan oleh para pria. Mereka tidak dilindungi oleh sistem yang menjamin mereka bisa menjadikan kehidupannya sebagai tujuan pada dirinya (Nussbaum 2006a, 5-6). Melalui sepuluh kapabilitas utama ini, Nussbaum hendak memapankan sistem yang bisa menjamin kehidupan kaum perempuan menjadi tujuan pada dirinya.⁷

Dalam penilaian Nussbaum, pendekatan kapabilitas versi Sen tentu juga merupakan teori normatif yang memiliki perhatian yang sangat jelas pada isu keadilan. Hanya saja, menurut Nussbaum, Sen tidak mengajukan satu uraian yang betul-betul eksplisit dan rinci mengenai keadilan dasar yang menjamin perlindungan martabat manusia (*human dignity*), meski tentu saja ia mengakui hal ini sebagai sesuatu yang penting (Nussbaum 2003, 37). Nussbaum memang mencatat bahwa Sen sebenarnya sudah mengajukan konsep kapabilitas sebagai dasar penilaian mengenai kualitas hidup yang komprehensif dalam sebuah negara. Dalam arti tertentu, pandangan ini tentu saja

⁶ Konsep konsensus bersama atau *overlapping consensus* adalah konsep yang ia pinjam dari John Rawls. Melalui konsep ini, ia memaksudkannya sebagai titik temu dari beragam doktrin komprehensif yang ada di dalam masyarakat. Dalam *Political Liberalism*, Rawls memahami *overlapping consensus* sebagai kesepakatan bersama yang didasarkan pada pertimbangan yang waras (*reasonable*) dari setiap pihak sehingga kesepakatan yang dilahirkan tidak rapuh. Karenanya, *overlapping consensus* bukan hanya sekadar konsensus untuk menerima otoritas tertentu atau mematuhi kesepakatan institusional yang didasari pada titik temu di antara berbagai kelompok dan kepentingan. Dalam pandangannya, konsensus semacam itu baru sebatas modus Vivendi, bukan *overlapping consensus*. Rawls memahami modus Vivendi sebagai kesepakatan yang terjadi di antara dua pihak (atau lebih) di mana masing-masing pihak hanya memerhatikan tujuan dan kepentingannya. Dalam proses negosiasi, masing-masing pihak berupaya melindungi tujuan dan kepentingannya itu hingga sampai pada titik ekuilibrium. Hal yang ingin digarisbawahi oleh Rawls, dan ini menjadi pembeda dengan konsep konsensus bersama adalah bahwa di dalam modus Vivendi, kesatuan sosial (*social unity*) hanya ada di permukaan dan stabilitasnya bersifat kontingen. Padahal, tujuan penting dalam konsensus bersama adalah hadirnya stabilitas dalam waktu yang langgeng. Lih. John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993), 147.

⁷ Misalnya, Nussbaum memberikan contoh mengenai pentingnya kapabilitas atas integritas tubuh. Sebagai dampak dari penerapan hak atas integritas tubuh, seorang perempuan memiliki hak untuk menolak melakukan hubungan badan dengan suaminya pada saat ia sendiri sedang tidak ingin melakukan hubungan itu. Nussbaum, *Creating Capabilities*, 32.

berangkat dari tujuan dasar mengenai liberalisme politik yang dipahami oleh Nussbaum (Nussbaum 2011, 19-20). Namun, dalam penilaian Nussbaum, pandangan ini tidak dirumuskan lebih spesifik dalam bentuk rumusan daftar kapabilitas utama yang harus ada pada setiap orang untuk melindungi martabatnya sebagai manusia.

Bagi Nussbaum, sepuluh kapabilitas utama ini adalah hak yang harus dijamin dan diwujudkan oleh negara dan pemerintah. Bahkan, secara eksplisit ia mengatakan bahwa seluruh kapabilitas utama ini harus masuk dalam konstitusi (Nussbaum 2006a, 12). Ia menilai, langkah praktis ini memang sudah melangkah lebih jauh dari pandangan Sen, karena Sen tidak membuat uraian yang lebih rinci dan eksplisit mengenai keharusan adanya ambang batas (*threshold*) kapabilitas utama bagi setiap orang. “Sen tidak pernah menggunakan ide mengenai ambang batas”⁸ tulis Nussbaum. Lebih lanjut ia menulis bahwa “...Sen tidak pernah membuat daftar kapabilitas-kapabilitas utama.”⁹ Menurut Nussbaum, “Ia [Sen pernah] memberikan banyak contoh, dan laporan pembangunan manusia menghadirkan sesuatu yang dianggap sejalan dengan hal-hal yang ada dalam daftar saya”,¹⁰ namun dalam penilaiannya, daftar-daftar yang ada dalam laporan itu bukanlah ide Sen.

Penegasan mengenai keharusan adanya ambang batas (*threshold*) kapabilitas pada setiap pribadi menjadi salah satu perbedaan pendekatan kapabilitas Nussbaum dari pendekatan yang diajukan Sen. Nussbaum menilai sepuluh kapabilitas utama di atas sebagai sesuatu yang harus ditegaskan secara eksplisit untuk melindungi hak-hak dasar seorang warga. Melalui pendekatan ini ia hendak menegaskan pentingnya martabat manusia dan hidup yang bermartabat (Nussbaum 2003, 40). Dalam pandangannya, tanpa jaminan ambang batas kapabilitas ini, ide kapabilitas Sen menjadi kabur (Nussbaum 2003, 33). Karenanya dalam menjelaskan pendekatan kapabilitas, Nussbaum tidak pernah luput untuk selalu menegaskan sepuluh kapabilitas utama ini. Ia sendiri menilai kapabilitas-kapabilitas utama ini sebagai ide yang terbuka untuk dikontestasikan dan dirumuskan ulang oleh masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan (Nussbaum 2006a, 77; 2003, 42). Namun Nussbaum

⁸ “Sen nowhere uses the idea of a threshold.” Nussbaum, *Women and Human Development*, 12.

⁹ “...Sen has never made a list of the central capabilities.” Nussbaum, *Women and Human Development*, 13.

¹⁰ “He gives lots of examples, and the Human Development Reports organize things in ways that correspond to at least some of items on my list.” Nussbaum, *Women and Human Development*, 13.

menggarisbawahi beberapa hal yang tidak bisa ditawar karena menjadi jaminan bagi keragaman itu sendiri. Beberapa hal yang tidak dapat ditawar itu adalah kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan kebebasan berkeyakinan (Nussbaum 2003, 43).

Dalam menanggapi kritik Nussbaum ini, penulis sepakat bahwa Sen memang tidak pernah menegaskan ide ambang batas kapabilitas secara eksplisit dalam karyanya. Namun, ketiadaan uraian ini tidak dapat dimaknai sebagai ketidaksepakatan Sen atas ide Nussbaum. Sen tidak pernah menyatakan penolakan atas gagasan Nussbaum mengenai ambang batas kapabilitas. Ketidadaan itu barangkali karena perbedaan perspektif dalam menerapkan pendekatan kapabilitas. Nussbaum memahami pendekatan kapabilitas bukan hanya sebagai konsepsi moral tetapi juga sebagai konsepsi politik yang dirumuskan secara eksplisit dan menjadi tujuan sosial-politik pemerintah dalam mengembangkan kebijakannya. Sementara Sen lebih memahami kapabilitas sebagai rumusan moral yang memandu setiap orang atau lembaga dalam mengatasi dan mengurangi masalah sosial. Dalam arti tertentu, apa yang dilakukan oleh Nussbaum dapat dipandang sebagai penerapan pendekatan kapabilitas dalam politik dengan cara yang lebih eksplisit. Ia merumuskan pendekatan ini menjadi lebih konkret dan menuntut negara atau pemerintah untuk menjadikan kapabilitas-kapabilitas utama yang ia rumuskan sebagai tujuan politik.

Dengan demikian, secara normatif baik Sen maupun Nussbaum sebenarnya memiliki pandangan dasar yang sama bahwa pendekatan kapabilitas harus menjadi perspektif dalam melihat masalah-masalah sosial. Hanya saja, Sen berhenti dengan memahaminya sebagai rumusan moral. Sementara Nussbaum mencoba melangkah lebih jauh dengan menjadikan rumusan moral itu sebagai tujuan politik yang harus direalisasikan oleh negara dan pemerintah. Ia melihat pendekatan kapabilitas yang dipahami sebagai rumusan moral belum cukup untuk melindungi mereka yang rentan mengalami kekerasan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Perlu ada penegasan yang lebih eksplisit mengenai kapabilitas-kapabilitas apa saja yang harus dilindungi dan adanya sebuah institusi yang melaksanakan tanggung jawab itu. Ia melihat negara sebagai institusi yang bertanggung jawab menjamin terealisasinya kapabilitas-kapabilitas utama itu bagi warga negara.

Sen tentu saja setuju dengan gagasan bahwa negara harus melindungi kapabilitas-kapabilitas utama yang diajukan oleh Nussbaum. Hanya saja ia tidak mengeksplisitkan gagasan itu di dalam karyanya sebagaimana yang dilakukan Nussbaum. Setiap pemikir tentu saja memiliki cara sendiri dalam merumuskan pemikirannya. Dalam hal ini Sen cenderung untuk memahami kapabilitas sebagai rumusan moral. Prinsip moral ini memandu bagaimana seharusnya hubungan negara dan masyarakat serta hubungan antar-pribadi dalam masyarakat ditata. Sementara Nussbaum lebih menjadikan pendekatan ini sebagai rumusan yang lebih tegas dalam ide ambang batas kapabilitas yang harus dilindungi dan diimplementasikan oleh negara. Ia tidak hanya melihat pendekatan ini sebagai sebuah rumusan moral tetapi juga sebagai kewajiban politik yang dibebankan kepada negara. Dengan demikian, perbedaan dasar antara Nussbaum dan Sen dalam soal ini terletak pada penegasan ide ambang batas kapabilitas. Nussbaum menegaskan hal itu dan menuntut negara untuk meralisasikan ambang batas tersebut. Sementara Sen tidak pernah menegaskan hal ini, namun cukup jelas bahwa sebenarnya ia juga menuntut negara untuk memerhatikan aspek kebebasan dan perluasan kapabilitas di dalam kebijakan-kebijakannya.

Dalam memahami hal ini penulis melihat signifikansi pandangan Nussbaum yang menjadikan rumusan moral mengenai kapabilitas sebagai rumusan politik yang lebih tegas dan dibebankan kepada institusi negara. Sebuah rumusan moral yang memandu penyelesaian masalah sosial tentu saja penting namun ia belum cukup memadai untuk menciptakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Perlu ada satu institusi yang bertanggung jawab melindungi kapabilitas setiap orang atau warga. Namun, hal ini persis seperti yang digarisbawahi oleh kritik Sen sendiri atas paham institusionalisme yang cenderung menjadikan institusi negara sebagai satu-satunya lembaga yang bisa mengatasi ketidakadilan dan melindungi mereka yang kehilangan kapabilitas. Baginya, perlindungan kebebasan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kemampuan. Yang bertanggung jawab terhadap kondisi kenestapaan bukan hanya negara, dan yang harus dilindungi bukan hanya warga dari negara bersangkutan tetapi juga semua manusia.

Namun, tampaknya rumusan moral semacam ini perlu ditegaskan dan diterjemahkan lebih konkret. Dalam pandangan penulis, perlindungan kebebasan akan lebih efektif jika ada satu lembaga yang bertanggung jawab menangani hal itu. Negara

tentu saja bisa menjadi lembaga yang diminta untuk bertanggung jawab merealisasikan tugas itu. Namun, negara tentu saja bukan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab. Partisipasi kelompok masyarakat dan institusi di luar negara juga memiliki peran yang sangat besar. Perlindungan kaum perempuan dari tindak kekerasan dan penanggulangan masalah kemiskinan, misalnya, akan sulit dilakukan oleh negara tanpa kerja sama dari kelompok-kelompok agama, lembaga pendidikan dan juga institusi pasar. Karenanya, kehadiran negara yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hak dan kebebasan warga, serta partisipasi aktif institusi masyarakat dan pasar akan membuat perealisasi tanggung jawab pemenuhan kapabilitas-kapabilitas utama semakin efektif.

b. Relativisme Budaya

Hal kedua yang dapat dipahami sebagai catatan Nussbaum adalah tentang kurangnya ketegasan Sen dalam menanggapi persoalan relativisme budaya (*cultural relativism*). Catatan ini sejatinya masih terkait dengan masalah ketiadaan ide ambang batas dalam pendekatan kapabilitas Sen. Nussbaum dan Sen adalah orang yang memiliki pandangan mengenai perlunya norma-norma universal dalam kebijakan pembangunan. Namun ia menilai Sen tidak memberikan argumen yang betul-betul tegas dan eksplisit dalam melawan paham relativisme budaya (Nussbaum 2006a, 13). Bagi Nussbaum, kita memerlukan norma universal mengenai kapabilitas manusia yang harus menjadi tujuan politik dan bahkan ditegaskan dalam konstitusi setiap bangsa. Norma-norma ini dapat menjadi alat ukur untuk menilai sejauh mana sebuah negara mempromosikan kehidupan yang berkualitas bagi warganya (Nussbaum 2006a, 34-35).

Salah satu standar yang ditekankan Nussbaum adalah tentang perlindungan kualitas hidup kaum perempuan. Dalam pengalamannya mengajukan gagasan ini di India, Nussbaum harus menghadapi argumen yang menganggap gagasan ini sebagai proses pembaratan (*westernization*). Kebudayaan India yang pada umumnya didominasi oleh Hindu dan Islam mengharuskan kaum perempuan untuk taat, setia dan rela berkorban. Mereka justru menilai perempuan Barat sebenarnya tidak bahagia dengan tingginya tingkat perceraian dan hanya berorientasi pada karier (Nussbaum 2006a, 41). Dengan kebudayaan yang diyakini, mereka mengharuskan kaum perempuan patuh terhadap tradisi yang dianut. Melalui kritik atas relativisme budaya dan penegasan pada

ambang batas kapabilitas utama, Nussbaum hendak menutup ruang kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan atas nama budaya yang dianut. Dalam pandangannya, doktrin relativisme budaya merupakan salah satu tantangan besar bagi perjuangan melindungi hak-hak perempuan dari tindak kekerasan (Nussbaum 2005, 177-178).

Pada dasarnya, ia dan Sen sama-sama menolak paham relativisme budaya yang kerap menjadikan kaum perempuan sebagai korban atas nama budaya yang dipahami oleh satu kelompok masyarakat. Dalam pandangan Nussbaum, penolakan terhadap relativisme budaya yang kerap menjadikan perempuan sebagai korban dapat dikurangi lewat penegasan daftar kapabilitas utama yang harus ada pada setiap orang (Nussbaum 2005, 179). Gagasan mengenai ambang batas dapat membuat pendekatan kapabilitas lebih efektif untuk menghentikan tindak kekerasan yang umumnya dialami kaum perempuan. Dalam hal ini, Nussbaum menilai Sen kurang memberikan penegasan yang lebih konkret untuk melawan paham relativisme budaya.

Tentu saja, meski Sen tidak memberikan daftar kapabilitas, ia tetap melawan pandangan relativisme budaya semacam ini sebagaimana yang juga diakui Nussbaum. Jika kita memerhatikan rumusan Sen mengenai kapabilitas, ia memang memberikan tempat bagi budaya komunitas untuk menentukan sesuatu yang dianggap bernilai. Nilai (*value*) merupakan preferensi yang turut menentukan pilihan seseorang. Setiap orang ada kecenderungan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Nilai yang dimiliki oleh setiap orang adalah pandangan yang dibentuk oleh komunitas di mana mereka hidup. Namun pada saat yang sama, Sen juga menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*) dalam menilai sesuatu. Nilai yang dianut bisa saja atau bahkan sangat mungkin dipengaruhi oleh komunitas. Namun setiap orang juga memiliki kemampuan untuk bersikap kritis terhadap pandangan nilai yang berasal dari komunitasnya.

Dalam *Reason Before Identity* (1999b), Sen mengkritik pandangan komunitarian yang melihat komunitas sebagai pembentuk nilai seorang pribadi. Menurutnya, kaum komunitarian mengabaikan adanya pilihan kritis yang ada pada setiap pribadi (Sen 1999b, 15; 2006, 5). Sen mencoba membedakan antara “memengaruhi” (*influence*) dan “mendeterminasi” (*determine*) (Sen 1999b, 22-24). Baginya, pandangan yang ada dalam

komunitas masih ada dalam batas memengaruhi, bukan mendeterminasi. Karenanya setiap pribadi, meski pandangannya mengenai nilai dipengaruhi oleh komunitas di mana ia hidup dan tumbuh, namun hal itu tidak menafikan adanya kemampuan untuk bersikap kritis. Dengan demikian keterbukaan Sen terhadap pandangan bahwa komunitas dapat membentuk nilai seorang pribadi harus dilihat dalam arti “mempengaruhi” bukan “mendeterminasi.” Pandangan agama dan budaya komunitas memang mempengaruhi pandangan para anggotanya, namun pada saat yang sama setiap anggota komunitas juga bisa melakukan kritik dan evaluasi atas semua pandangan tersebut.

c. Pendasaran Sen pada Marx dan Aristoteles

Hal ketiga yang menjadi catatan Nussbaum adalah tentang pendasaran konsep kapabilitas Sen pada pandangan Marx dan Aristoteles. Menurut Nussbaum, Sen kerap menyinggung bahwa rumusan kapabilitasnya dipengaruhi oleh pandangan Marx dan Aristoteles. Namun dalam penelusuran lebih lanjut, Nussbaum tidak pernah mendapatkan penjelasan yang betul-betul memadai bagaimana Marx dan Aristoteles memainkan peran penting bagi rumusan kapabilitas yang diajukan Sen (Nussbaum 2006a, 13). Pengaruh dua tokoh ini bagi rumusan kapabilitas justru ditunjukkan oleh Nussbaum. Menurutnya, dua tokoh besar itu justru telah mempengaruhi bangunan pemikirannya mengenai kapabilitas. Salah satu pengaruh mereka terhadap pemikiran Nussbaum adalah tentang pentingnya jaminan ambang batas (*threshold*) kapabilitas utama untuk melindungi martabat manusia.

Bagi Nussbaum, Aristoteles dan Marx telah memberikan pengaruh dan inspirasi untuk membuat rumusan kapabilitas-kapabilitas utama. Ia mengklaim adanya pengaruh Aristoteles pada idenya mengenai “memfungsikan kemanusiaan seseorang” (*human functioning*). Dari Aristoteles ia mendapatkan pendasaran mengenai ide keluhuran (*the noble*) yang ada dalam diri manusia. Dengan keluhuran yang ada pada seorang manusia, kita harus melihat manusia dengan penuh rasa hormat (Nussbaum 2006a, 72-73). Karenanya, agar keluhuran itu tidak dirusak, perlu ada sistem yang dapat melindungi martabat kemanusiaan seseorang. Sementara dari Marx, Nussbaum memperoleh inspirasi mengenai penolakan penggunaan manusia sebagai alat. Menurutnya, Marx menilai manusia sebagai pembawa nilai (*bearer of value*) dan tujuan (*end*) pada dirinya. Pandangan ini, dalam penilaian Nussbaum, juga dipengaruhi oleh Kant dan Aristoteles

(Nussbaum 2006a, 73). Penolakan eksploitasi yang didengungkan oleh Marx akan berdampak pada penolakan menjadikan manusia sebagai objek atau alat oleh orang lain. Prinsip inilah yang kemudian ia sebut “prinsip setiap pribadi sebagai tujuan” (*principle of each person as an end*) (Nussbaum 2006a, 73-74).

Pengaruh pandangan Marx dan Aristoteles mengenai manusia ini kemudian ditegaskan dalam rumusan mengenai ambang batas (*threshold*) kapabilitas utama bagi setiap manusia di mana pun. Menurut Nussbaum, dalam memahami kapabilitas, Sen cenderung memahaminya sebagai alat penilai kualitas hidup (*quality of life assessment*). Sementara Nussbaum hendak menggunakan ide ini dalam cara yang lebih menuntut (*more exigent*), yakni dengan menegaskan perlunya ambang batas (*threshold*) kapabilitas untuk setiap manusia (Nussbaum 2006a, 70-71). Dalam hal ini, Nussbaum telah menunjukkan pemahamannya mengenai ambang batas yang menurutnya dipengaruhi oleh Aristoteles dan Marx. Namun ketika Sen mengatakan bahwa pandangannya mengenai kapabilitas juga dipengaruhi oleh dua tokoh ini, Nussbaum tidak mendapatkan penjelasan yang betul-betul memadai dari Sen.

Dalam penelusuran yang sudah dilakukan, Sen memang menulis bahwa konsep kapabilitasnya diinspirasi dari konsep kebebasan yang pernah disinggung oleh Marx dalam *The German Ideology*. Hal ini pernah ia katakan dalam *Inequality Reexamined* (Sen 1992, 41). Sayangnya tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai pengaruh Marx bagi konsep kapabilitasnya. Begitu juga dengan pengaruh Aristoteles di mana Sen mengutip pandangan Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* yang menilai kekayaan dan kemakmuran hanya sebatas sarana (*means*), bukan tujuan (*ends*) (Sen 1999, 14). Dengan pandangan ini, Sen memperkuat kritiknya terhadap kecenderungan ilmu ekonomi arus utama yang melihat kesejahteraan sebagai sesuatu yang utama sebagaimana yang dapat kita lihat dalam ukuran pendapatan perkapita dan GDP. Sejauh ini, tidak ada uraian yang lebih jauh mengenai pengaruh Marx dan Aristoteles bagi rumusan konsep kapabilitasnya.

Namun kurangnya uraian mengenai pendasaran Marx dan Aristoteles bagi konsep kapabilitas Sen, dalam pandangan penulis, tentu tidak bisa dipahami sebagai kekurangmemadaiannya pandangannya tentang kapabilitas. Bila kita melihat ide kapabilitasnya, hal yang paling mendorong lahirnya pendekatan ini sebenarnya ada pada

realitas ketidakbebasan yang dialami manusia dan ketidakmemadai pendekatan ekonomi yang mendasarkan pada manfaat (utilitas). Melalui perspektif kapabilitas, ia mencoba melihat masalah ketidakbebasan secara substantif. Ia mencoba menganalisa hal-hal yang membuat seseorang tidak mampu mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Perspektif ini memberikan inspirasi pengertian kebebasan yang tidak hanya dimaknai dalam arti negatif, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*). Dengan demikian, dalam melihat kritik atau catatan yang diajukan oleh Nussbaum, penulis juga melihat hal yang sama. Sen memang tidak memberikan penjelasan yang cukup memadai mengenai pendasaran konsep kapabilitasnya pada pemikiran Marx dan Aristoteles, namun, hal ini tidak bisa dimaknai sebagai masalah yang cukup serius bagi perumusan Sen mengenai kapabilitas.

d. Klasifikasi Kebebasan Kesejahteraan dan Kepelakuan

Pandangan Sen yang juga menjadi catatan Nussbaum adalah soal pembedaan kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) (Nussbaum 2006a, 14). Dalam penilaian Nussbaum, pandangan Sen mengenai hal ini tidak terlalu jelas (*obscure*). Bahkan ia menilai pandangan ini tidak terlalu berguna bagi mereka yang sedang menolak pendekatan utilitarian. Nussbaum menulis “...pembedaan ini tidak jelas dan tidak berguna bagi orang, seperti Sen, yang menolak (di atas pendasaran yang baik) ide utilitarian mengenai kesejahteraan.”¹¹ Nussbaum berpandangan, dengan membuat pembedaan kesejahteraan dan kepelakuan, orang akan menilai adanya benih utilitarianisme di dalam proyek non-utilitarian Sen (Nussbaum 2011, 200).

Menurut Nussbaum, Sen mencoba membuat pengertian yang betul-betul distingtif mengenai dua aspek kebebasan ini. Melalui konsep kesejahteraan (*well-being*), Sen menolak pemahaman kesejahteraan sebagai kondisi mental (*mental-state*), pemuasan hasrat (*desire-satisfaction*) dan pilihan (*choice*).¹² Dalam penilaian Sen,

¹¹ “...the distinction is obscure and not useful to one who, like Sen, has rejected (on good grounds) utilitarian notions of well-being.” Nussbaum, *Creating Capabilities*, 200.

¹² Dalam artikel “Wellbeing, Agency and Freedom”, Sen menguraikan bahwa konsep kesejahteraan (*well-being*) tidak dimaknai dalam arti utilitas melainkan dalam pengertian *functioning* dan kapabilitas untuk mencapai kesejahteraan. Dalam pandangannya, tiga pengertian yang ada di dalam utilitas tidak memadai untuk disebut sebagai kesejahteraan (*well-being*). Tiga pengertian itu adalah (1) kebahagiaan (*happiness*), (2) pemenuhan hasrat (*desire fulfillment*), dan pilihan (*choice*). Pengertian utilitas sebagai pilihan adalah pengertian yang paling populer di kalangan ekonom di banding kalangan

sebagaimana dikutip oleh Nussbaum, “unsur utama mengenai kesejahteraan dapat dilihat dalam pengertian bagaimana seseorang dapat ‘berfungsi’, dalam arti yang sangat luas.”¹³ Sen menegaskan pengertian kesejahteraan ini beberapa kali. Dalam paragraf yang lain ia mengatakan bahwa “unsur utama mengenai kesejahteraan adalah kemampuan untuk mencapai capaian aktual (*functionings*) yang bernilai.”¹⁴

Pemahaman Sen mengenai kesejahteraan ini menimbulkan pertanyaan apakah kesejahteraan (*well-being*) ini dimaknai sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) atau sebagai capaian (*achievement*) itu sendiri. Menurut Nussbaum, pandangan Sen tampaknya cenderung pada yang pertama, yakni memahami kesejahteraan sebagai kemampuan untuk mencapai. Pemahaman ini akan semakin rumit ketika kita masuk pada uraian mengenai kebebasan sebagai salah satu aspek kesejahteraan (Nussbaum 2011, 198). Dalam hal ini Sen memang membagi kesejahteraan sebagai kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan capaian kesejahteraan (*well-being achievement*). Penulis sudah menjelaskan masalah ini di Bab III.¹⁵ Menurut Nussbaum, kebebasan untuk memilih berfungsi atau tidak berfungsi yang kemudian disebut sebagai kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) menunjukkan bahwa ia memahami kebebasan ini tidak hanya sebagai alat (*instrumental*) untuk

filsuf. Dalam arti ini, utilitas dilihat sebagai representasi dari sesuatu yang dianggap bernilai dari beberapa alternatif yang ada. Jika kesejahteraan dimaknai sebagai utilitas dalam arti pilihan, maka pilihan yang diambil oleh setiap orang harus selalu diabdikan pada dimensi kesejahteraannya. Padahal, tidak semua pilihan yang diambil selalu diabdikan pada kesejahteraan, tetapi bisa juga oleh komitmennya atas sesuatu. Sementara pemaknaan kesejahteraan dalam arti utilitas sebagai kebahagiaan juga mengandung masalah serius. Secara mendasar biasanya kita memahami kebahagiaan dalam arti kondisi mental (*mental state*). Jika kita memaknai kesejahteraan dalam arti kebahagiaan, maka orang-orang yang terkena kelaparan atau terserang wabah bisa saja dibuat senang hatinya dengan “opium” yang ada di dalam agama. Dalam kondisi seperti itu, bisa saja orang dibuat bahagia, namun pada saat yang sama akan menjadi masalah serius bila kita menyebut itu sebagai sejahtera (*well-being*). Begitu juga pemaknaan kesejahteraan dalam arti pemenuhan hasrat. Di dalam pemaknaan ini Sen bertanya: apakah saya menghasrati sesuatu karena sesuatu itu bernilai bagi saya; atau sesuatu itu bernilai bagi saya karena saya menghasratinya. Yang paling masuk akal adalah yang pertama, yakni bahwa saya menghasrati sesuatu karena sesuatu itu bernilai bagi saya. Maka menurut Sen, yang menentukan sesuatu itu bukan pada pemenuhan hasratnya tapi pada kandungan nilai di dalamnya. Amartya Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” *The Journal of Philosophy* 82 (1985): 187-190.

¹³ “The primary feature of well-being can be seen in terms of how a person can ‘function,’ taking that term in a very broad sense.” Nussbaum, *Creating Capabilities*, 197. Kutipan ini juga bisa dilihat dalam Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” 197.

¹⁴ “The central feature of well-being is the ability to achieve valuable functionings.” Nussbaum, *Creating Capabilities*, 197-198. Penegasan ini juga dapat dilihat dalam Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” 200.

¹⁵ Sen memahami kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) sebagai kebebasan atau kemampuan untuk mencapai aspek kesejahteraan yang dicita-citakan. Sementara yang dimaksud dengan capaian kesejahteraan (*well-being achievement*) adalah capaian kesejahteraan itu sendiri yang kemudian ia sebut sebagai capaian aktual (*actual achievement*).

mencapai kesejahteraan (*well-being*) tetapi juga sebagai bagian penting (*constituent part*) dari kesejahteraan seseorang (Nussbaum 2011, 198).¹⁶

Dengan demikian, menurut Nussbaum, Sen memahami kebebasan sebagai sesuatu yang intrinsik di dalam kesejahteraan itu sendiri. Kebebasan kesejahteraan adalah kebebasan yang terkonsentrasi pada kapabilitas seseorang untuk memiliki beragam capaian aktual dan untuk menikmati capaian kesejahteraan yang sesuai dengan minatnya.¹⁷ Nussbaum kemudian menunjukkan perbedaan yang diajukan oleh Sen antara kebebasan kepelakuan dan kesejahteraan. Ia mengutip pandangan Sen mengenai hal ini dalam artikel “Well-being, Agency and Freedom” (1985). Tulis Sen:

Kebebasan kepelakuan seseorang merujuk pada apa yang seseorang itu bebas melakukan dan mencapai tujuan atau nilai apapun yang ia anggap sebagai sesuatu yang penting. Aspek kepelakuan seseorang tidak dapat dipahami bila kita tidak memerhatikan maksud, tujuan, kesetiaan, kewajiban dan – dalam arti yang luas – konsepsi seseorang mengenai yang baik. Sementara kebebasan kesejahteraan adalah kebebasan untuk mencapai sesuatu yang partikular, misalnya kesejahteraan, [dengan demikian] ide mengenai kebebasan kepelakuan itu lebih umum karena tidak terikat pada satu tipe tujuan tertentu.¹⁸

Dalam pemahaman Nussbaum, perbedaan ini akan membuat pandangan Sen memiliki benih utilitarian yang menghubungkan kesejahteraan dengan kebahagiaan, pemuasan hasrat dan pilihan. Sen memang sudah menolak pengertian kesejahteraan dalam arti ini. Ia cenderung memahami kesejahteraan sebagai sesuatu yang terkait dengan nilai seseorang. Konsep mengenai nilai juga terkait dengan konsepsi seseorang mengenai yang baik (*person's conception of the good*). Namun dalam uraian Sen mengenai kebebasan kepelakuan, ia hanya mengidentifikasi konsepsi mengenai yang baik (*the conception of the good*) pada aspek kepelakuan seseorang, bukan pada aspek

¹⁶ “It is this freedom to choose to function or not to function that Sen henceforth calls ‘well-being freedom,’ and the surrounding discussion strongly suggests that he views this freedom not as merely instrumental to well-being but as a constituent part of a person’s well-being.” Nussbaum, *Creating Capabilities*, 198.

¹⁷ “Well-being freedom is this freedom that ‘concentrates on a person’s capability to have various functionings vectors and to enjoy the corresponding well-being achievements’.” Nussbaum, *Creating Capabilities*, 198. Kutipan pendapat Sen juga bisa dilihat dalam Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” 203.

¹⁸ “A person’s ‘agency freedom’ refers to what the person is free to do and achieve in pursuit of whatever goals and values he or she regards as important. A person’s agency aspect cannot be understood without taking note of his or her aims, objectives, allegiances, obligations, and – in a broad sense – the person’s conception of the good. Whereas well-being freedom is freedom to achieve something in particular, viz., well-being, the idea of agency freedom is more general, since it is not tied to any one type of aim.” Nussbaum, *Creating Capabilities*, 199. Kutipan ini juga bisa dilihat dalam Sen, “Well-being, Agency and Freedom,” 203.

kesejahteraan. Bagi Nussbaum, uraian Sen mengenai perbedaan aspek kesejahteraan dan kepelakuan ini menjadi tidak jelas (Nussbaum 2011, 199). Lantas ia kemudian bertanya “bagaimana kita membuat perbedaan ini bisa dimengerti?”¹⁹

Nussbaum mencoba membuat perkiraan pemahaman mengenai hal ini namun kemudian ia tetap menilai pemahaman ini sebagai perbedaan yang tidak jelas. Yang pertama, kebebasan kepelakuan dipahami lebih luas karena seseorang bisa memiliki kebebasan untuk mencapai satu tujuan tertentu dan kebebasan untuk tidak mau mencapainya. Dengan kata lain, di dalam kebebasan kepelakuan, seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang lain (*freedom to do otherwise*). Namun, bukankah di dalam kebebasan kesejahteraan juga sudah terkandung adanya kebebasan ini. Di dalam konsep kapabilitas, seseorang bisa memilih beragam capaian (*functionings*) yang dianggap bernilai (Nussbaum 2011, 199-200). Ia kemudian mengajukan perkiraan yang kedua. Kebebasan kepelakuan dapat dipahami sebagai sesuatu yang lebih luas dari pada kebebasan kesejahteraan dalam arti bahwa apa yang dicapai dalam kebebasan kepelakuan tidak terkait sama sekali dengan kepentingan-diri sang pelaku. Nussbaum menilai bahwa pertimbangan kebebasan kepelakuan yang didasarkan pada konsepsi mengenai nilai (*conception of the good*) yang dianut si pelaku jelas merupakan sesuatu yang bersifat personal dan pribadi. Lantas apa perbedaannya dengan kebebasan kesejahteraan? (Nussbaum 2011, 200).

Karenanya, Nussbaum menilai perbedaan dua kebebasan ini tidak terlalu jelas (*obscure*). Ia bahkan menilai perbedaan ini tidak terlalu berguna (*not useful*) (Nussbaum 2011, 200). Ia juga agak kesulitan untuk membuat perbandingan antara pandangan kebebasannya dan pandangan kebebasan Sen. Dalam penilaiannya, pandangan kebebasan miliknya lebih dipahami sebagai konsepsi politik (*political conception*) bukan sebagai konsepsi komprehensif dalam aspek kesejahteraan (*well-being*) dan kepelakuan (*agency*) sebagaimana yang dipahami oleh Sen. Dengan memahami kebebasan sebagai konsepsi politik, Nussbaum berupaya untuk mengidentifikasi kapabilitas apa saja yang dapat memberikan dampak besar pada kemampuan seseorang mencapai berbagai konsepsi mengenai yang baik. Kapabilitas atas kesehatan, integritas tubuh, nalar praktis dan kebebasan beragama misalnya, menjadi daftar kapabilitas utama karena bernilai untuk mencapai rencana hidup yang

¹⁹ “How might we try to make sense of the distinction?” Nussbaum, *Creating Capabilities*, 199.

sangat beragam. Dalam penilaiannya, dengan memahami kebebasan sebagai konsepsi politik, hal yang menjadi bagian dari aspek kesejahteraan dan kepelakuan sebenarnya akan masuk dalam bagian yang dilindungi, tanpa perlu membuat klasifikasi dua aspek itu (Nussbaum 2011, 200-201).²⁰

Catatan yang digarisbawahi Nussbaum menunjukkan adanya inkonsistensi Sen dalam menjelaskan klasifikasi ini. Apa yang dianggap betul-betul berbeda oleh Sen ternyata masih dianggap tidak jelas oleh Nussbaum. Karenanya, bagi Nussbaum, pembedaan kebebasan kepelakuan dari kebebasan kesejahteraan yang diajukan Sen cenderung membingungkan. Namun, bagi penulis sendiri, ide besar dari klasifikasi kebebasan ini, khususnya sebagaimana yang ia tulis dalam “Well-being, Agency and Freedom” sebenarnya cukup jelas. Sen hendak mengkritik pandangan yang menjadikan kesejahteraan sebagai satu-satunya motif tindakan atau yang kemudian dikenal sebagai “*well-being as informational foundation*” (WAIF). Kritik ini terkait dengan kritik besar di dalam pemikiran Sen, yakni penolakan terhadap “welfarisme”, utilitarianisme dan pada akhirnya kritik terhadap teori pilihan rasional yang hanya dipahami sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest*).

Melalui kebebasan kepelakuan, Sen menunjukkan bahwa motif yang mendorong tindakan seseorang atau kelompok bukan hanya kesejahteraan. Aspek kesejahteraan memang kerap menjadi motif tindakan, namun ia bukan satu-satunya penjelasan untuk memahami motivasi tindakan. Ia mengatakan, “Nilai-nilai selain capaian kesejahteraan bisa sangat menentukan penilaian pilihan seseorang” (Sen 1985, 203). Terlalu picik bila

²⁰ Nussbaum sendiri dalam uraian lebih lanjut mengenai kapabilitas mencoba mengklasifikasi tiga tipe kapabilitas, yakni kapabilitas dasar (*basic*), internal (*internal*) dan kombinasi (*combined*). Menurutnya, yang dimaksud kapabilitas kombinasi adalah totalitas kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memilih dan bertindak dalam situasi politik, sosial dan ekonomi yang spesifik. Terkait dengan kapabilitas kombinasi, karakteristik yang dimiliki oleh seseorang tentu saja akan menjadi sangat relevan. Yang dimaksud dengan karakteristik di sini misalnya sifat pribadi, kapasitas intelektual, kapasitas emosional, kesehatan tubuhnya dan lain-lain. Nussbaum menyebut semua karakteristik ini sebagai kapabilitas internal (*internal capabilities*). Kapabilitas ini tidak tetap. Ia bersifat cair dan dinamis. Kapabilitas internal ini bukan sesuatu yang bersifat bawaan (*innate*). Ia adalah hasil dari sebuah pelatihan, pendidikan dan pengembangan. Dalam banyak hal kapabilitas ini juga dibentuk oleh interaksi dengan lingkungan politik, sosial, ekonomi dan juga keluarga. Sementara yang dimaksud dengan kapabilitas dasar (*basic capabilities*) adalah kemampuan bawaan (*innate*) seseorang yang membuat proses pengembangan dan pelatihan menjadi mungkin. Menurut Nussbaum, kapabilitas ini kurang atau lebihnya siap untuk berfungsi, misalnya kapabilitas untuk melihat dan mendengar. Dalam arti tertentu, kapabilitas ini masih sangat embrionik (*rudimentary*). Ia tidak bisa langsung berfungsi. Seorang anak yang baru lahir misalnya, ia memiliki kapabilitas untuk berbicara dan berbahasa, namun kapabilitas itu tidak bisa langsung berfungsi. Lih. Nussbaum, *Creating Capabilities*, 21-24 dan Nussbaum, *Women and Human Development*, 84.

kita memahami motif tindakan hanya pada aspek kesejahteraan. Di dalam banyak tindakan, kita bisa menyaksikan motif-motif di luar kesejahteraan. Melalui tindakan kepelakuan, Sen menunjukkan bahwa dalam bertindak, seseorang bisa saja tidak memiliki motif maksimalisasi kepentingan-diri. Ia sangat mengkritik konsekuensi dari pandangan welfarisme, yakni pengurangan pengertian pilihan rasional hanya pada pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Pengertian yang didasarkan pada konsep manusia ekonomi (*homo economicus*) ini tidak hanya berlaku di dalam ekonomi, tetapi juga di dalam hukum dan politik.

Nussbaum tentu saja sepakat dengan gagasan besar ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam kritiknya terhadap pendekatan GDP dan per kapita. Yang ia persoalkan tampaknya terpusat pada klasifikasi dua kebebasan yang dianggap tidak jelas dan tidak berguna. Alih-alih membuat klasifikasi kebebasan seperti ini, Nussbaum lebih berkonsentrasi pada perumusan ambang batas (*threshold*) kapabilitas utama yang harus ada pada setiap warga. Sen tidak menyinggung mengenai pentingnya ambang batas kapabilitas utama ini. Dalam pandangan penulis, catatan yang diajukan Nussbaum tentu telah menggarisbawahi beberapa hal yang dianggap kurang jelas dalam dua kebebasan Sen ini. Namun melalui konsep kebebasan kepelakuan ini, Sen sebenarnya tengah memberikan satu fondasi mengenai kemungkinan tindakan rasional yang tidak didorong oleh motif maksimalisasi kepentingan-diri. Bagi penulis, sebagaimana yang akan ditunjukkan dalam Bab VI, ide Sen mengenai kebebasan kepelakuan menjadi dasar bagi rasionalitas tindakan etis yang didasarkan pada komitmen. Jika kita hanya menerima rasionalitas pilihan hanya pada motif maksimalisasi kepentingan-diri, maka tindakan etis yang didasarkan pada komitmen menjadi tidak mungkin disebut sebagai rasional.

5.3 Kritik Pettit terhadap Konsep Kontrol Sen

Kritik yang juga perlu kita lihat secara mendalam adalah kritik dari seorang pemikir Republikan, Philip Pettit. Dalam catatan terakhir mengenai Pettit, ia adalah guru besar dan pengajar teori politik dan filsafat di Universitas Princeton, Amerika Serikat. Karya penting yang sudah dipublikasikan di antaranya adalah *A Theory of Freedom: From the Psychology to Politics of Agency* (2001) dan *Republicanism: A Theory of Freedom and Government* (1997). Ia mengidentifikasi pandangannya mengenai kebebasan sebagai pandangan yang berasal dari tradisi Republikan. Lewat

tradisi Republikan, ia memahami kebebasan sebagai non-dominasi (Pettit 1997, 31). Hubungan dominasi ini diumpamakan dalam hubungan antara tuan dan budak. Seorang tuan akan mencampuri (*interfere*) pilihan orang yang didominasi secara sewenang-wenang (Pettit 1997, 22).²¹ Menurutnya, orang yang hidup karena kebaikan hati pihak lain juga masuk dalam kategori orang yang berada dalam dominasi (Pettit 1997, 4-5). Dalam tradisi ini, kebebasan lebih dipahami sebagai kehidupan yang berada dalam yurisdiksi si pelaku dan tidak berada dalam bayang-bayang pihak lain.²²

Melalui pandangan di atas, Pettit akan menganalisis dan mengkritik pandangan Sen mengenai kebebasan. Secara khusus, ia sangat menggarisbawahi pengertian kontrol yang dipahami dalam ide kebebasan yang dipahami Sen. Dalam hal ini, Sen memahami proses kontrol dalam kebebasannya tidak selalu dalam kerangka kontrol langsung (*direct control*), tetapi juga dalam arti kontrol tidak langsung (*indirect control*). Pettit berargumen bahwa dalam tindakan yang berlangsung lewat kontrol tidak langsung sebenarnya agak sulit untuk disebut sebagai tindakan bebas. Pandangan Pettit ini tentu saja dipengaruhi oleh paham kebebasan Republikan yang memahami kebebasan sebagai non-dominasi. Kritik Pettit atas pandangan Sen mengenai kebebasan ini penulis ambil dari artikelnya yang berjudul “Freedom in the Spirit of Sen”²³ Buku Pettit yang berjudul *A Theory of Freedom* (2001) dan *Republicanism* (1997) juga menjadi rujukan untuk melihat konsep kebebasan Pettit secara lebih jauh.

Dalam uraian mengenai kebebasan dan kontrol kita sudah melihat pandangan Sen mengenai kebebasan yang tidak selalu dipahami dalam kerangka kontrol langsung (*direct control*) oleh si pelaku. Ilustrasi mengenai hal ini sudah penulis jelaskan dalam Bab III tentang tindakan medis yang harus dilakukan terhadap korban kecelakaan. Melalui ilustrasi tersebut Sen hendak menegaskan bahwa konsep kebebasan tidak selalu

²¹ “*Domination...is exemplified by the relationship of master to slave or master to servant. Such a relationship means, at the limit, that the dominating party can interfere on an arbitrary basis with the choices of the dominated...*” Pettit, *Republicanism*, 22.

²² Dalam pandangan Pettit, pengertian dominasi berbeda dengan campur tangan (*interference*). Menurutnya, seseorang bisa saja dalam dominasi namun tidak mengalami campur tangan. Atau sebaliknya, seseorang mengalami campur tangan namun tidak berada dalam dominasi oleh pihak lain. Lih. Pettit, *Republicanism*, 22-23. Misalnya seorang budak yang boleh memilih apa saja yang ia suka atas izin tuannya masuk dalam kategori orang yang berada dalam dominasi namun tidak mengalami campur tangan. Sementara seorang pelaku yang mengalami campur tangan oleh rekan kerja masuk dalam kategori orang yang tidak berada dalam dominasi namun mengalami campur tangan dari kawan sejawatnya.

²³ Philip Pettit, “Freedom in the Spirit of Sen” dalam *Amartya Sen*, ed. Christopher Morris (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

dimaknai sebagai kontrol langsung (*direct control*) oleh si pelaku. Dalam pandangannya, proses kontrol juga bisa terjadi dalam kerangka kontrol tidak langsung (*indirect control*). Seseorang tetap dianggap memiliki kebebasan sejauh ia memiliki daya efektif (*effective power*) untuk mencapai preferensinya dengan kontrol langsung atau tidak langsung (Pettit 2010, 94).²⁴

Melalui pandangan di atas, Pettit berpandangan bahwa inovasi Sen yang paling penting bagi teori kebebasan ada pada konsep preferensi yang tegas (*decisive preference*) dalam arti bahwa seseorang dapat mencapai preferensi yang diminati lewat proses yang berlangsung di dalam kontrolnya. Proses kontrol itu bisa dilakukan secara langsung (*direct control*) atau tidak langsung (*indirect control*). Seseorang dapat dianggap memiliki kebebasan jika ia bisa mencapai preferensi yang ia minati melalui kontrol si pelaku secara langsung atau lewat orang lain yang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan preferensinya. Hanya saja, bagi Pettit, jika konsep kontrol dipahami terlalu longgar, pandangan kebebasan yang dipahami Sen ini sebenarnya masih belum cukup untuk disebut sebagai kebebasan.²⁵

Dalam pandangan Pettit, untuk menyebut kebebasan, kita harus memahami konsep kontrol dalam pengertian yang lebih ketat. Baginya, pengertian kontrol tidak hanya mengandaikan kebebasan menentukan sesuatu yang kita minati, tetapi juga

²⁴ Dalam pandangan Pettit, ilustrasi Sen ini bisa diperluas pada kasus di mana seseorang menggantungkan seluruh layanan yang ia butuhkan pada seorang wakil (*proxy*), orang yang diberikan otoritas untuk melakukan sesuatu. Melalui wakilnya ini, seseorang memercayakan seluruh kebutuhan yang ia perlukan. Melalui wakil ini, seseorang dapat memperluas jangkauan tangannya. Wakil ini bisa menjadi mata, kuping, tangan dan kaki orang yang memercayakannya. Dengan kata lain, melalui mereka, seseorang bisa memperluas kontrol dan kebebasannya sejauh ia mengetahui peran yang mereka lakukan dan menyetujui tindakan itu. Lih. Pettit, "Freedom in the Spirit of Sen," 94-95. Menurut Pettit, pengertian kontrol juga bisa diklasifikasi dalam arti aktif dan virtual. Ia menggambarkan pengertian aktif sebagai adanya peran aktif si pelaku terhadap perpanjangan tangannya itu. Sementara yang dimaksud virtual, si pelaku tidak terlalu aktif dalam mengontrol, namun bisa memastikan bahwa hasil yang dicapai akan sesuai dengan preferensi yang ia minati. Lih. Pettit, "Freedom in the Spirit of Sen," 100-102. Dalam hal ini, Pettit memang hanya menjelaskan beberapa konsekuensi yang bisa dikembangkan dari pandangan Sen mengenai kebebasan. Ia sendiri akan mencoba menunjukkan bahwa beberapa konsekuensi itu sulit untuk disebut sebagai kebebasan. Kritik Pettit ini akan dijelaskan dalam uraian selanjutnya.

²⁵ "The problem is that the decisiveness of my preference is too circumscribed and contingent to deserve the name of freedom." Pettit, "Freedom in the Spirit of Sen," 97. Dalam *A Theory of Freedom* (2001), Pettit menyebutkan tiga hal yang membuat sebuah tindakan dapat disebut sebagai bebas. Yang pertama, sebuah tindakan dapat disebut sebagai bebas jika saya harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Tindakan yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan tidak bisa disebut sebagai tindakan bebas. Yang kedua, tindakan yang saya ambil adalah milik saya, bukan orang lain. Dan yang ketiga, tindakan yang saya ambil tidak berada dalam determinasi, dominasi atau kontrol oleh pihak lain. Lih. Philip Pettit, *A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 6-7.

kebebasan dari kehendak baik (*goodwill*) atau kebaikan hati pihak lain terhadap pilihan tindakan kita.²⁶ Ia membuat ilustrasi mengenai hal ini. Andaikan saja bahwa kita bisa memilih antara A atau B secara bebas, namun kebebasan yang kita miliki ini bergantung pada kebaikan hati pihak lain, maka bagi Pettit, kebebasan pilihan itu sejatinya bukanlah tindakan bebas. Ia menamakan kebebasan tersebut sebagai pilihan yang bergantung pada izin (*permit-dependent*) (Pettit 2010, 98).²⁷ Dengan perspektif Republikan, ia akan mengatakan bahwa tindakan itu masih belum tepat untuk disebut sebagai kebebasan, karena pilihan yang dianggap bebas itu masih bergantung pada kebaikan hati pihak lain.

Menurut Pettit, kritik utama yang hendak ia sampaikan dalam ilustrasi di atas adalah penolakan atas dominasi atau kontrol pihak lain pada pilihan yang kita ambil. Jika kita menerima ilustrasi di atas sebagai tindakan bebas, kita kemudian bisa saja menyebut proses adaptasi preferensi kita dengan preferensi orang yang telah berbaik hati kepada kita sebagai kebebasan. Bagi Pettit, kondisi semacam ini belum cukup untuk disebut sebagai tindakan bebas. Ia mengilustrasikan kasus seorang budak yang mencoba menyesuaikan preferensinya dengan preferensi tuannya. Meski ia bisa memilih, namun pilihan itu merupakan hasil adaptasi atau penyesuaian preferensinya dengan preferensi tuannya.²⁸ Dalam pandangannya, rumusan seperti ini masih terlalu terbatas untuk disebut sebagai kebebasan (Pettit 2010, 98-99).

Dalam pandangan Pettit, konsep kebebasan Sen dikategorikan sebagai kebebasan-pilihan (*option-freedom*) di mana kebebasan dipahami sebagai adanya pilihan atau kesempatan.²⁹ Menurut Pettit, ada tiga asumsi yang ada di dalam paham kebebasan ini. Yang pertama individu atau masyarakat memiliki kebebasan yang berbeda-beda. Yang kedua, kepemilikan kebebasan yang lebih banyak dianggap lebih baik daripada kepemilikan kebebasan yang lebih sedikit. Yang ketiga, seberapa besar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi ukuran seberapa baik

²⁶ “Not only must the control be independent of what it is that the agent prefers...it should also be independent of whether the agent happens to enjoy the goodwill of those with power over their affairs.” Pettit, “Freedom in the Spirit of Sen,” 98.

²⁷ “You may be said to have decisive preference, but this decisiveness is permit-dependent.” Pettit, “Freedom in the Spirit of Sen,” 98.

²⁸ “If permit-dependence does not matter, then such individuals can make their preferences decisive, and secure freedom, just by adapting their preferences so that their relations to their superiors improve.” Pettit, “Freedom in the Spirit of Sen,” 99.

²⁹ “Option-freedom is often described as freedom of choice or freedom of opportunity.” Pettit, “Freedom in the Spirit of Sen,” 106.

kehidupannya (Pettit 2010, 106). Pettit kemudian mengatakan bahwa dalam *Rationality and Freedom* (2004), Sen sebenarnya sudah menambahkan penjelasan mengenai hal ini. Menurut Sen, kebebasan bukan hanya soal jumlah pilihan, tetapi juga luasnya pilihan. Keluasan itu dimaknai sebagai keragaman dan kebernilaian pilihan tersebut bagi si pelaku (Pettit 2010, 107).

Menurut Pettit, jika Sen memaknai kebebasan demikian maka ada dua implikasi penting bagi teori kebebasannya. Yang pertama, kualitas kontrol yang dituntut dalam kebebasan-pilihannya (*option-freedom*) ternyata lebih tinggi daripada yang diasumsikan. Yang kedua, kuantitas atau luas pilihan yang dinikmati juga lebih besar daripada pendekatan yang standar dalam kebebasan-pilihan (Pettit 2010, 107). Menurut Pettit, implikasi paham kebebasan-pilihan (*option-freedom*) ini sebenarnya bisa diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, yakni pada kebebasan-status (*status-freedom*). Dalam kebebasan-status, kita menilai kebebasan seorang pelaku dalam arti yang penuh (Pettit 2010, 108). Menurut Pettit, kebebasan dalam arti ini diasosiasikan dengan tradisi Republikan yang memahami kebebasan sinonim dengan konsep kewarganegaraan (*citizenship*). Dalam tradisi ini, kebebasan harus memapankan masyarakat yang setara sebagai warga negara dan melindungi mereka dari ancaman atau kontrol pihak lain, termasuk dari negara itu sendiri (bdk. Pettit 2010, 110).

Menurut Pettit paling tidak ada tiga pertimbangan mengapa Sen sebaiknya lebih mengarahkan kebebasannya ke kebebasan-status (*status-freedom*) daripada kebebasan-pilihan (*option-freedom*) (Pettit 2010, 110-112). Yang pertama, karena kebebasan dalam arti status sangat menekankan kebebasan dalam arti yang penuh. Jika saya bergantung pada izin pihak lain untuk menentukan pilihan, maka sejatinya saya bukanlah pelaku yang bebas dan saya juga tidak memiliki diri saya. Saya bisa saja mengatakan bahwa saya bisa memilih sebagaimana yang saya mau karena tuan saya sudah mengizinkan. Namun bagi Pettit, tindakan pilihan ini belum bisa disebut sebagai kebebasan-status (*status-freedom*). Baginya, kebebasan-status harus memastikan bahwa dalam bertindak, seseorang tidak menyandarkan pada izin (atau kebaikan hati) yang diberikan oleh pihak

lain. Kebebasan ini juga harus memapankan tindakan seorang manusia sebagai tindakan yang berada dalam yurisdiksinya sendiri.³⁰

Pertimbangan yang kedua, konsep kebebasan-status sebenarnya justru bersinambung dengan pendekatan Sen mengenai kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities for functioning*) sebagai cara menilai kualitas hidup. Ada dua hal yang ditekankan dalam kebebasan status: yang pertama ia memberikan perlindungan yang menjamin para warga negara bisa disebut sebagai warga yang bebas; yang kedua, tipe-tipe pilihan yang dapat dinikmati oleh warga adalah kebebasan dasar (*basic liberties*). Pettit mengutip pandangan Rawls dan H. L. A. Hart yang memahami kebebasan dasar sebagai kebebasan berpikir, berserikat, beragama (berkeyakinan), kebebasan untuk hidup di negara yang dikehendaki, dan kebebasan dasar yang lain (Pettit 2010, 111). Bagi Pettit, kebebasan dasar ini sangat penting bagi setiap pribadi dan kita perlu menjamin bahwa setiap orang bisa mengaksesnya. Dalam pandangannya, gagasan ini dekat dengan ide Sen dan juga Nussbaum yang memerhatikan pemberdayaan manusia untuk menikmati kapabilitas dasar (Pettit 2010, 111-112).

Yang ketiga, konsep kebebasan-status juga bersinambung dengan struktur demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, pemerintahan yang mengontrol negara juga berada dalam kontrol masyarakat. Dalam arti ini, masyarakat dan pemerintah bersifat saling mengontrol. Yang satu tidak mendominasi yang lain. Kontrol yang dilakukan oleh negara terhadap warga juga berada dalam kontrol yang dilakukan warga terhadap negara. Proses kontrol yang berlangsung dalam kerangka ini, menurut Pettit bukan dalam kategori kontrol yang sewenang-wenang. Dalam pandangannya, proses saling kontrol yang berlangsung di dalam negara demokratis tidak termasuk dalam kategori yang mengancam kebebasan (Pettit 2010, 212). Menurut Pettit, dengan pertimbangan ini, gagasan kebebasan Sen sebenarnya bisa diarahkan ke konsep kebebasan status (*status-freedom*) dibanding ke kebebasan pilihan (*option-freedom*) (Pettit 2010, 212-213).

Dalam menanggapi kritik Pettit ini penulis akan berkonsentrasi pada pandangannya mengenai kontrol dalam kebebasan, karena kritiknya terhadap Sen

³⁰ “*The protection provided has to ensure that in making his or her choices, the agent does not have to rely on the leave of permission of others; the agent does not have to act cum permissu. The protection must establish the person as sui juris, under their own jurisdiction.*” Pettit, “Freedom in the Spirit of Sen,” 110.

tampaknya berpangkal pada perbedaan pemahaman mengenai kontrol di dalam kebebasan. Kita dapat merangkum pandangan Pettit mengenai kebebasan Republikan dalam ungkapan miliknya sendiri, yakni “kebebasan sebagai non-dominasi” (*liberty as non-domination*). Dengan pengertian ini, ia memahami kebebasan sebagai kondisi di mana pilihan seseorang tidak berada dalam dominasi pihak lain dan juga bukan karena kebaikan hati dari orang lain. Untuk menyebut sebuah tindakan pilihan sebagai bebas, pilihan yang diambil harus berada dalam yurisdiksi si pelaku itu sendiri. Inilah kurang lebih, pengertian kebebasan yang didasarkan pada tradisi Republikan yang dipahami Pettit. Sementara bagi Sen, jika pengertian kebebasan yang dipahami sebagai kontrol langsung (*direct control*) oleh si pelaku, maka pengertian kebebasan akan menjadi sangat terbatas. Ada begitu banyak tindakan yang kita lakukan namun tidak bisa atau tidak selalu dioperasikan langsung oleh kita sendiri. Jika kebebasan mengandaikan adanya proses kontrol secara langsung maka ada begitu banyak tindakan yang tidak dapat kita sebut sebagai bebas (Sen 1992, 64).

Dalam *The Idea of Justice*, Sen juga menyinggung argumen Pettit ini lewat ilustrasi tentang orang cacat. Ada tiga ilustrasi yang diangkat mengenai orang cacat ini. Menurutnya, katakan saja, dalam ilustrasi pertama, orang cacat itu berencana keluar rumah untuk tujuan tertentu, namun sayangnya tidak ada orang yang mau membantunya sehingga akhirnya ia tidak bisa mewujudkan rencana tersebut. Pada ilustrasi kedua, orang cacat itu memiliki rencana yang sama dan beruntung ia dibantu oleh sistem pengaman sosial (*social security system*) yang dibuat oleh pemerintah atau ditolong oleh orang yang mau berbaik hati mengantarkannya keluar rumah sehingga akhirnya ia bisa mewujudkan rencananya. Sementara pada ilustrasi yang ketiga, kebetulan orang cacat ini adalah orang yang kaya sehingga ia bisa membayar orang yang membantu mengantarkannya (Sen 2009, 306-307).

Melalui tiga ilustrasi di atas, Sen kemudian menunjukkan perbedaan antara pendekatan kapabilitas dan pandangan kebebasan Republikan Pettit. Menurutnya, ia dan Pettit sepakat bahwa pada ilustrasi yang pertama, orang cacat itu tidak memiliki kebebasan karena tidak bisa mewujudkan rencananya. Sementara pada ilustrasi kedua dan ketiga, Sen menilai bahwa orang cacat itu sebenarnya memiliki kebebasan meski dengan cara yang berbeda. Orang cacat pada ilustrasi kedua memiliki kebebasan karena dibantu oleh kebijakan pemerintah lewat sistem pengaman sosial atau ditolong oleh

kebaikan hati seseorang yang mau mengantarkannya. Pada ilustrasi yang ketiga, orang cacat itu memiliki kebebasan karena bisa mewujudkan rencananya dengan menggaji orang yang bisa membantunya. Pettit hanya meloloskan ilustrasi yang ketiga sebagai tindakan bebas. Baginya, orang cacat pada ilustrasi kedua memang bisa mewujudkan cita-citanya, namun hal itu terjadi karena kebaikan hati pihak lain, sehingga sulit baginya untuk menyebut apa yang diraih orang cacat itu sebagai kebebasan (Sen 2009, 306-307).

Dari uraian di atas, perspektif Sen dan Pettit dalam melihat kebebasan memang berbeda. Rumusan Sen mengenai kebebasan sebagai daya efektif (*effective power*) tidak mengharuskan adanya kontrol langsung dari si pelaku. Dalam mencapai sesuatu yang direncanakan, seseorang tidak bisa dan tidak mungkin mengandalkan kemampuan atau kontrol yang ia miliki sendiri. Kesempatan seseorang untuk mencapai sesuatu ditentukan oleh begitu banyak hal yang tidak selalu ada dalam kontrolnya secara langsung. Kondisi lingkungan alam, kondisi sosial dan situasi politik merupakan hal penting yang turut menopang seberapa luas kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Kondisi-kondisi itu tentu saja tidak sepenuhnya berada dalam kontrol pelaku, namun semua itu akan memengaruhi kemampuan seorang pelaku mencapai sesuatu yang direncanakannya. Dalam pandangan Sen, seluruh faktor ini akan menentukan apakah kebebasan seseorang mengalami perluasan atau penyusutan.

Lantas bagaimana pandangan Sen atas ilustrasi Pettit tentang seorang budak yang mengadaptasi preferensinya dengan preferensi tuannya. Apakah capaian si budak pada preferensi itu dapat disebut sebagai kebebasan? Dalam soal ini, seorang budak tentu saja bukan orang merdeka dan bebas. Meski ia bisa mencapai sesuatu yang ia inginkan, hal itu hanya dimungkinkan karena ada kebaikan hati dari tuannya. Sen tidak menanggapi pandangan Pettit ini secara langsung. Dalam menanggapi itu, ia justru menggunakan ilustrasi yang berbeda, yakni tentang orang cacat yang berencana keluar rumah sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Kondisi orang cacat dalam ilustrasi Sen jelas memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan kondisi budak dalam ilustrasi Pettit. Pilihan orang cacat untuk keluar rumah adalah pilihan bebas yang tidak dimiliki oleh seorang budak.

Karenanya, meski Sen tidak menanggapi ilustrasi Pettit itu, penulis cukup yakin bahwa bagi Sen, seorang budak jelas tidak memiliki kebebasan. Dalam memahami kebebasan, selain adanya kemampuan untuk mencapai sesuatu (*the ability to achieve*), Sen juga sensitif dengan aspek proses. Dalam pengertian proses, kebebasan dimaknai sebagai tidak adanya tekanan atau paksaan dalam menentukan sesuatu. Budak dalam ilustrasi Pettit memang bisa mencapai sesuatu, namun kondisinya berada dalam dominasi dan kepemilikan tuannya. Pilihan “bebasnya” hanya dimungkinkan oleh kebaikan hati dari tuannya. Dengan kata lain, meski budak tersebut memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu, namun ia tidak memiliki kebebasan dalam aspek proses. Karenanya, dalam menanggapi ilustrasi budak ini, menurut penulis, Sen seharusnya setuju dengan pendapat Pettit yang mempersoalkan kebebasan si budak itu.

Hal yang cukup penting untuk digarisbawahi dari kritik Pettit ini adalah penyamaan kontrol tidak langsung dengan dominasi. Kontrol tidak langsung adalah hal yang berbeda dari masalah dominasi. Jika saya bisa datang ke kantor karena tidak ada konflik dalam masyarakat dan cuaca sedang cerah, maka seluruh kondisi itu jelas tidak berada dalam kontrol langsung dari saya. Namun kondisi itu jelas bukan sebuah dominasi sebagaimana dominasi seorang tuan atas budaknya. Dominasi seorang tuan terhadap budaknya merupakan masalah serius dalam kebebasan. Bila kita melihat dua aspek kebebasan Sen, kita juga akan melihat masalah kebebasan di dalam kasus budak ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam kebebasan bukan hanya soal kemampuan untuk mencapai sesuatu, tetapi juga adanya kebebasan untuk menentukan sesuatu yang dianggap bernilai oleh pelaku. Dalam hal ini, budak tersebut jelas tidak memiliki aspek yang kedua ini.

5.4 Rangkuman

Pemilihan dua tokoh ini dalam uraian mengenai kritik atas pandangan Sen mengenai kebebasan karena, dalam pertimbangan penulis, kritik keduanya didasarkan pada pandangan yang cukup mapan. Martha Nussbaum, sebagaimana juga Amartya Sen, adalah seorang intelektual yang turut terlibat dalam perumusan dan pengembangan pendekatan kapabilitas. Ia menjadikan pendekatan kapabilitas, khususnya lewat sepuluh kapabilitas utama (*central capabilities*) sebagai sistem yang diharapkan dapat melindungi martabat kemanusiaan seseorang. Karya-karya Nussbaum mengenai tema

ini juga sangat diperhitungkan. Beberapa di antaranya adalah *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (2011) dan *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (2006), serta artikel-artikel yang ada di dalam jurnal ilmiah. Dalam hal ini, kritik Nussbaum bisa dilihat sebagai representasi kritik internal dari sesama pemikir yang mendasarkan diri pada pendekatan kapabilitas.

Sementara jika dilihat dari sisi substansi, kritik Nussbaum juga telah menggarisbawahi hal yang cukup mendasar bagi pendekatan kapabilitas Sen. Menurut Nussbaum, pendekatan kapabilitas Sen tidak memberikan penegasan yang konkret mengenai ambang batas (*threshold*) kapabilitas-kapabilitas utama yang harus ada pada setiap manusia. Sen juga tidak menegaskan rumusan kapabilitas ini sebagai tanggung jawab politik yang harus dibebankan kepada negara dan pemerintah. Perbedaan mengenai hal ini menjadi kritik utama Nussbaum terhadap pendekatan kapabilitas Sen. Meski demikian, sebagaimana sudah penulis sampaikan di atas, sejatinya Sen juga tidak menolak secara eksplisit gagasan Nussbaum tersebut. Secara prinsip dan implisit, ia tentu saja setuju dengan pandangan Nussbaum. Hanya saja tampaknya ia lebih menempatkan pendekatan kapabilitasnya sebagai kerangka moral dalam menilai persoalan sosial. Kerangka ini tentu saja bisa dilanjutkan dengan menjadikannya sebagai konsepsi politik sebagaimana yang dilakukan oleh Nussbaum.

Sementara pemikir kedua yang kritiknya atas Sen harus diperhatikan adalah Philip Pettit. Ia adalah seorang pemikir kebebasan yang berasal dari tradisi Republikan. Melalui tradisi ini ia memahami kebebasan sebagai non-dominasi. Seseorang dapat disebut bebas sejauh pilihannya itu tidak berada dalam dominasi pihak lain. Pilihan yang diambil berada dalam yurisdiksinya sendiri dan bukan juga karena kebaikan hati dari pihak lain. Karya pentingnya mengenai kebebasan dapat dibaca dalam *Republicanism: A Theory of Freedom and Government* (1997) dan *A Theory of Freedom: From the Psychology to Politics of Agency* (2001). Dengan pendekatan kebebasan Republikan, kritiknya bisa kita kategorikan sebagai kritik eksternal. Yang dipersoalkan oleh Pettit adalah konsep kontrol tidak langsung (*indirect control*) yang dimungkinkan di dalam kebebasan yang dipahami Sen. Dalam pandangan Sen, untuk mencapai sesuatu, seseorang tidak harus mencapai itu dengan kontrolnya sendiri. Ia bisa saja mencapai tujuannya melalui bantuan pihak lain atau lewat kontrol tidak langsung.

Pettit membandingkan kemungkinan kontrol tidak langsung ini dengan posisi seorang budak yang bisa mencapai sesuatu dengan mengadaptasi preferensi tuannya. Capaian seorang budak atas pilihan yang diambil bukan karena kemampuan yang dimilikinya sendiri, melainkan karena ia telah mengadaptasi preferensinya dengan preferensi tuannya. Bagi Pettit, capaian budak ini tidak bisa disebut sebagai kebebasan. Sejatinya, bila kita melihat dua aspek kebebasan yang diajukan Sen yakni aspek proses dan kesempatan, ia juga tidak melihat ada kebebasan dalam kasus budak ini. Namun, ia menegaskan bahwa capaian seseorang terhadap sesuatu jelas tidak bisa dilakukan sendiri lewat kontrolnya secara langsung. Ada begitu banyak hal yang tidak berada di bawah kontrol pelaku secara langsung dan hal itu tidak mengurangi makna kebebasan. Kebebasan seseorang untuk bisa beribadah sesuai dengan keyakinan yang ia anut dimungkinkan oleh begitu banyak faktor yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya langsung. Beberapa faktor itu misalnya adalah faktor kohesi sosial dan faktor politik. Bagi Sen, jika kebebasan hanya dipahami sebagai pilihan yang harus berada di bawah kontrol pelaku secara langsung, maka pengertian kebebasan kemudian menjadi sangat sempit. Dalam hal ini, Sen tidak memahami konsep kontrol dalam pengertian kebebasan sebagaimana yang dipahami oleh Pettit.

BAB VI
KEBEBASAN DAN KAPABILITAS
SEBAGAI KRITERIA ETIS

Melalui Bab VI ini penulis mencoba merumuskan kesimpulan dan menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam disertasi ini. Dalam kesimpulan akan ditunjukkan analisis penulis mengenai langkah Sen mengintegrasikan kebebasan ke dalam teori pilihan sosial dan ide yang hendak diajukan lewat pengintegrasian ini. Sementara dalam menjawab pertanyaan disertasi akan ditegaskan pandangan Amartya Sen mengenai ukuran dan kriteria dari tindakan etis serta maksud dari kritiknya terhadap teori pilihan rasional bagi pandangannya mengenai etika. Jawaban atas pertanyaan ini sekaligus merupakan tesis yang diajukan penulis di dalam penelitian ini. Setelah menegaskan pandangan Sen mengenai etika, selanjutnya akan ditunjukkan asumsi dasar dan beberapa dampak dari pandangan etika ini baik secara teoritis maupun praktis. Dalam bab ini juga akan ditunjukkan beberapa relevansi pemikiran Sen dalam disertasi ini bagi praktik kebijakan publik dan kehidupan sosial di Indonesia. Terakhir, penulis akan menyajikan beberapa catatan dan tanggapan atas pemikiran Sen.

6.1 Pilihan Sosial Berbasis-Kebebasan

Sen memaknai kebebasan tidak hanya sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang dianggap bernilai. Secara distingtif ia membedakan dua aspek di dalam kebebasan, yakni aspek proses dan kesempatan. Dalam aspek proses ia memahami kebebasan sebagai tidak adanya paksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki atau dilarang melakukan sesuatu yang diinginkan. Sementara dalam aspek kesempatan ia mengatakan bahwa dengan kebebasan yang lebih besar, setiap orang dapat terlibat aktif memperjuangkan kepentingannya di dalam kelompok sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih tujuannya. Ia berpandangan bahwa partisipasi publik yang terbuka berimplikasi positif bagi perlindungan kebebasan setiap orang dalam satu kelompok dan juga bagi perluasan kesempatan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Karenanya, signifikansi kebebasan bukan hanya karena kebebasan tersebut merupakan sesuatu yang sangat bernilai pada dirinya, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk

mencapai sesuatu yang lain. Pandangan ini menjadi rumusan dasar pandangan Sen mengenai kebebasan dan kontribusinya dalam mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap bernilai.

Perspektif kebebasan di atas menjadi landasan bagi Sen untuk memodifikasi teori pilihan sosial (*social choice theory*) tradisional yang kurang memerhatikan nilai kebebasan. Dalam teori pilihan sosial tradisional ada kecenderungan untuk menjadikan nilai manfaat dan kesejahteraan sebagai pertimbangan utama. Kecenderungan ini didasarkan pada pandangan yang memahami motif maksimalisasi kepentingan-diri (*self-interest*) sebagai pengertian pilihan rasional (*rational choice*). Sebuah pilihan dapat disebut rasional jika pilihan tersebut dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Lebih jauh, Sen menegaskan bahwa pandangan ini mendapatkan pendasaran dari konsepsi manusia ekonomi (*homo economicus*). Implikasi dari kecenderungan ini bisa dilihat dalam perumusan pilihan sosial yang ada dalam kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Hal yang dipertimbangkan di dalam kebijakan publik pada umumnya adalah sejauh mana kebijakan itu dapat memaksimalkan kesejahteraan dan mafaat bagi kelompok terbanyak. Jika pilihan sosial mendasarkan diri pada pertimbangan ini maka ada kemungkinan kebijakan yang dihasilkan akan mengabaikan hak dan kapabilitas kelompok masyarakat yang lebih kecil atau mereka yang tidak terlalu mementingkan nilai manfaat dan kesejahteraan.

Pada titik inilah Sen melihat masalah serius dalam teori pilihan sosial tradisional bagi upaya perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas, khususnya kebebasan dan kapabilitas kelompok minoritas. Untuk mengatasi masalah ini ia kemudian mencoba memodifikasi teori pilihan sosial tradisional agar tidak berbenturan dengan upaya perlindungan kebebasan. Dalam memodifikasi teori ini, ada dua hal penting yang ia lakukan, yang pertama adalah melalui kritik atas teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dan yang kedua melalui panduan praktis mengenai pilihan sosial yang pro pada kebebasan. Dua langkah Sen ini akan diuraikan dalam penjelasan berikut.

a. Kritik atas Teori Pilihan Rasional

Kritik atas teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menjadi tahap penting dari upaya modifikasi teori pilihan sosial yang diajukan Sen agar tidak berkonflik dengan ide kebebasan. Ia mengkritik keras teori pilihan rasional yang dipahami dalam

kerangka manusia ekonomi. Melalui teori ini, sebuah pilihan dapat disebut rasional jika pilihan itu dapat memaksimalkan kepentingan-diri, keuntungan dan kesejahteraan bagi si pelaku. Dalam kaca mata manusia ekonomi, tindakan rasional manusia hanya bisa dipahami lewat motif memaksimalkan kepentingan-diri. Dengan kata lain, seseorang tidak mungkin bertindak secara rasional kecuali untuk memaksimalkan kepentingannya.

Untuk mengevaluasi pandangan manusia ekonomi di atas, pertama-tama Sen membedakan dua macam tindakan, yakni tindakan egoistik dan tindakan altruistik. Di dalam tindakan egoistik, kita memang bisa melihat dengan jelas pengejawantahan model manusia ekonomi yang hanya mengejar kepentingan-diri. Seseorang hanya bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya, tidak lain. Dalam praktik ekonomi secara umum, kita bisa melihat bagaimana para pelaku ekonomi mempraktikkan model tindakan egoistik. Namun tindakan egoistik bukan satu-satunya model tindakan manusia. Seorang manusia juga bisa bertindak secara altruistik. Dalam menganalisis tindakan altruistik, ia membedakan secara tajam dua macam tindakan altruistik. Yang pertama adalah tindakan yang didasarkan pada simpati dan yang kedua tindakan yang didasarkan pada komitmen. Di dalam tindakan simpati, meski tindakan pelaku tampaknya diarahkan untuk kepentingan orang lain, namun kepentingan-diri si pelaku sebenarnya masih dapat dilacak dalam tindakan ini. Misalnya, seseorang yang merasa tidak enak melihat tetangganya kelaparan sehingga ia kemudian memberikan bantuan makanan agar rasa tidak enak yang dirasakan hilang, adalah contoh kasus simpati. Di dalam tindakan ini, meski ada perhatian yang terarah pada orang lain, namun motif yang mendasari tindakan itu tetap kepentingan-diri, yakni menghilangkan rasa tidak enak yang dialami si pelaku.

Dalam pandangan Sen, jika kita berhenti pada tindakan altruistik yang didasarkan pada simpati, kita masih melihat kebenaran klaim kepentingan-diri sebagai prinsip pertama (*first principle*) di dalam tindakan manusia. Namun jika kita melihat jenis tindakan altruistik kedua, yakni tindakan yang didasarkan pada komitmen, menurut Sen, kita akan melihat adanya tindakan yang tidak lagi memaksimalkan kepentingan-diri. Ia memahami tindakan komitmen sebagai terputusnya hubungan antara tindakan yang diambil dan motif memaksimalkan kepentingan-diri. Tindakan seorang pembela tanah air (*patriot*) yang rela mengorbankan harta dan hidupnya adalah contoh di mana tindakan itu murni diarahkan untuk kehidupan yang lebih luas, yakni

kemerdekaan bangsa, bukan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Tindakan komitmen juga bisa dilihat pada kasus seseorang yang hendak berangkat piknik, misalnya, namun tiba-tiba tetangganya sakit dan meminta bantuan kepadanya untuk diantarkan ke rumah sakit. Ia kemudian memilih membantu tetangganya meski akhirnya ia harus membatalkan rencananya untuk piknik. Pilihan untuk membantu tetangga dipahami sebagai pilihan yang tidak mengandung motif memaksimalkan kepentingan-diri.

Masalahnya kemudian, jika pilihan pelaku tidak lagi mengandung motif memaksimalkan kepentingan-diri, akankah pilihan itu disebut sebagai tidak rasional? Bagi Sen, penilaian rasional atau tidak rasional tidak dapat diukur dari adanya motif memaksimalkan kepentingan-diri. Dalam pandangannya, rasionalitas sebuah pilihan lebih ditentukan oleh sejauh mana pilihan tindakan itu sudah dipertimbangkan dan diperiksa secara kritis (*critical scrutiny*). Ia mendefinisikan rasionalitas sebagai “disiplin menentukan satu pilihan – tindakan sebagaimana juga tujuan, nilai dan prioritas – agar sesuai dengan pemeriksaan bernalar (*reasoned scrutiny*)” (Sen 2004, 4). Singkatnya, pilihan rasional adalah soal kecocokan antara tindakan memilih dan pemeriksaan kritis. Hal yang perlu dipertimbangkan secara kritis bukan hanya seberapa besar nilai kepentingan-diri yang diraih si pelaku, tetapi juga nilai, tujuan dan prioritas yang lebih luas. Karenanya, tindakan yang didasarkan pada komitmen untuk bertanggung jawab terhadap mereka yang membutuhkan bantuan adalah pilihan tindakan yang rasional, meski tindakan itu tidak memaksimalkan kepentingan-diri.

Dengan memasukkan konsep komitmen dan kritik atas teori pilihan rasional, Sen menegaskan satu hal penting, yakni tentang pluralitas nilai yang dapat dipertimbangkan setiap orang ketika memilih. Ia menulis bahwa “Nilai-nilai selain capaian kesejahteraan bisa saja sangat memengaruhi penilaian seseorang dalam memilih” (Sen 1985, 203). Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa kesejahteraan/manfaat bukan satu-satunya nilai yang dikejar dalam tindakan yang diambil oleh seorang pelaku. Seorang pelaku bisa saja mengambil pilihan tindakan di mana pada saat yang sama ia tidak sedang memaksimalkan kepentingannya. Lantas apa konsekuensi dari kritik ini bagi upaya untuk mengintegrasikan kebebasan ke dalam teori pilihan sosial?

Menurut penulis, ada tiga konsekuensi penting yang perlu digarisbawahi jika kritik Sen ini diterima. Yang pertama, kritik ini tentu tidak dipahami sebagai penolakan

atas tindakan yang didasarkan pada kepentingan-diri. Ada begitu banyak contoh yang ditunjukkan dari klaim kepentingan-diri sebagai prinsip pertama (*first principle*) dalam tindakan manusia. Namun, hal yang hendak ditolak adalah kecenderungan untuk menjadikan motif kepentingan-diri sebagai satu-satunya penjelasan rasional untuk memahami tindakan manusia. Tepatnya, apa yang diajukan Sen sebenarnya merupakan koreksi atas pandangan yang melihat tindakan manusia hanya bisa dipahami lewat motif maksimalisasi kepentingan-diri. Terlebih ketika pandangan ini kemudian didaku sebagai ukuran untuk memahami rasionalitas pilihan. Sen mengoreksi pandangan ini dengan menunjukkan bahwa ada pilihan tindakan yang tidak memaksimalkan kepentingan-diri namun kita tetap bisa memahaminya sebagai tindakan rasional sejauh tindakan itu sudah diperiksa secara bernalar dan kritis. Dengan demikian, maksimalisasi kepentingan-diri bukanlah ukuran untuk memahami rasionalitas sebuah pilihan.

Yang kedua, jika kita menerima pengertian rasionalitas tindakan sebagai proses pemeriksaan kritis atas tujuan, nilai dan prioritas meski tidak memaksimalkan kepentingan-diri, manfaat dan kesejahteraan, maka kita dapat memasukkan rasionalitas komitmen ke dalam pertimbangan pilihan sosial. Dalam argumen mengenai kontribusi positif sistem demokrasi bagi kesejahteraan, Sen mengkritik tesis Lee yang menolak demokrasi dan hak sipil-politik bagi upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ia menunjukkan bahwa jika dilihat secara komparatif, pemerintahan demokratis justru memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menciptakan kesejahteraan dibanding pemerintahan otoriter. Itu berarti bahwa perhatian pada hak dan kebebasan memiliki implikasi positif bagi terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat. Masalahnya kemudian bagaimana jika upaya perlindungan kebebasan tidak memberikan dampak positif bagi maksimalisasi kesejahteraan, keuntungan dan manfaat?

Di sini kita melihat relevansi rasionalitas komitmen yang diajukan Sen bagi pertimbangan pilihan sosial. Jika kita menerima upaya perlindungan kebebasan hanya jika upaya itu bisa memaksimalkan kesejahteraan, lantas bagaimana jika tidak memaksimalkan kesejahteraan? Upaya untuk melindungi kebebasan dan memperluas kapabilitas tidak selalu dilakukan hanya jika upaya itu memberikan kontribusi positif bagi maksimalisasi kesejahteraan. Tuntutan agar pemerintah melindungi hak-hak dasar kelompok minoritas dan melindungi lingkungan dari kerusakan akibat limbah

perusahaan bisa saja memberikan dampak positif bagi peluang investasi asing di dalam negeri. Namun, jika pun hal ini tidak memberikan dampak positif bagi maksimalisasi keuntungan dan kesejahteraan, perlindungan hak-hak dasar kelompok minoritas dan perlindungan lingkungan hidup tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini dipahami sebagai komitmen yang tidak harus terkait dengan maksimalisasi kesejahteraan. Apakah pilihan sosial semacam ini dianggap tidak rasional? Sejauh kita sudah mempertimbangkan mengenai nilai, tujuan dan prioritas pilihan itu secara kritis kita dapat menyebut pilihan tindakan itu sebagai pilihan rasional meski tidak memaksimalkan kepentingan-diri.

Konsekuensi ketiga dari kritik Sen, sebagaimana sudah disinggung di atas, adalah koreksi atas pandangan yang menganggap kesejahteraan/manfaat sebagai satu-satunya nilai yang mendorong tindakan manusia. Sen menunjukkan bahwa ada begitu banyak nilai yang dikejar oleh seorang pelaku. Kemajemukan atau pluralitas nilai yang dipertimbangkan oleh setiap pelaku adalah hal yang harus dilihat untuk memahami tindakan manusia. Nilai yang dikejar bisa saja tidak terkait sama sekali dengan motif maksimalisasi kepentingan-diri. Pilihan seseorang yang hendak berpiknik untuk menolong tetangganya yang sakit adalah murni karena komitmen terhadap tanggung jawab sebagai manusia untuk menolong orang yang meminta pertolongan. Pilihan itu tidak terkait sama sekali dengan motif agar tetangga itu juga mau menolongnya pada saat ia membutuhkan pertolongan. Dengan kata lain, pilihan tindakan itu diambil tanpa motif maksimalisasi kepentingan-diri. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan alasan memilih tindakan, manusia tidak hanya mempertimbangkan nilai manfaat dan kesejahteraan. Ada banyak nilai yang dapat dipertimbangkan selain nilai manfaat dan kesejahteraan.

b. Panduan Praktis

Langkah kedua yang dilakukan Sen dalam upaya mengintegrasikan kebebasan ke dalam pilihan sosial adalah dengan memberikan panduan praktis tentang bagaimana seharusnya pilihan sosial dibuat. Menurut Sen, salah satu realitas yang dihadapi ketika kita merumuskan pilihan sosial adalah kenyataan bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hal yang dianggap penting dan bernilai. Ia menyebut kenyataan ini sebagai kemajemukan preferensi individu. Jumlah preferensi di

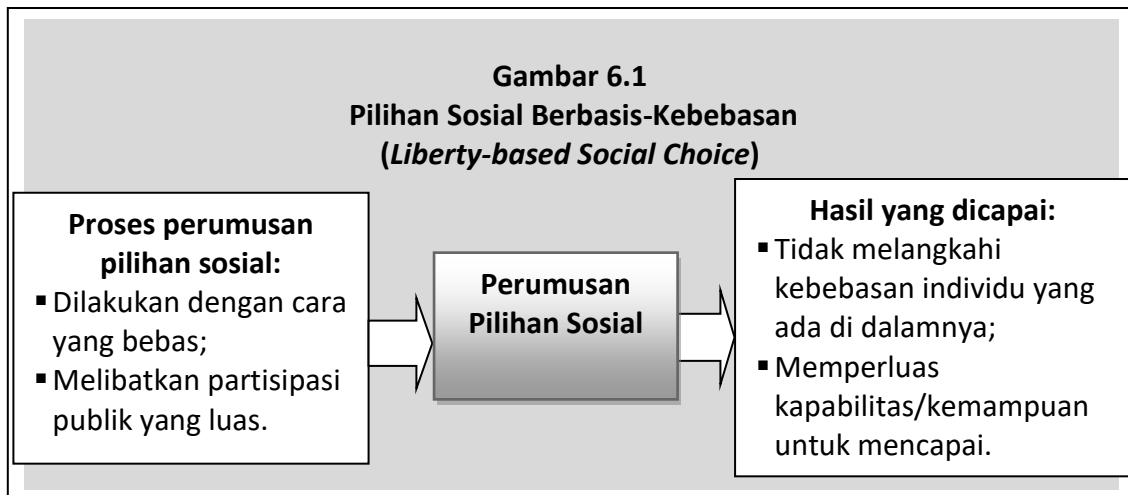
dalam satu kelompok bisa sama dengan jumlah individu yang ada di dalamnya. Lantas bagaimana sebuah putusan kolektif yang legitim bisa dilahirkan dari preferensi yang begitu banyak dan beragam? Dalam mengurai persoalan ini, Sen menekankan prinsip perumusan pilihan sosial yang memerhatikan kebebasan dan kapabilitas. Ada dua hal yang ditekankan dalam prinsip ini. Yang pertama, dalam merumuskan pilihan sosial, setiap pihak yang berkepentingan harus diberi ruang untuk berpartisipasi. Dengan kata lain harus ada partisipasi publik yang bebas dalam merumuskan putusan kolektif. Yang kedua, hasil yang dicapai juga harus menghormati kebebasan setiap orang dan dapat semakin memperluas kapabilitas para anggota yang ada di dalamnya. Pilihan sosial atau kebijakan publik yang dihasilkan tidak melangkahi hak dasar kelompok yang lebih kecil.

Dalam hidup bersama, baik itu yang bersifat formal atau non-formal, kita selalu dihadapkan pada upaya untuk membuat putusan kolektif. Kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu yang ia anggap baik tidak sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh banyak faktor eksternal. Salah satu faktor terpenting itu ada pada putusan kolektif atau pilihan sosial. Keinginan seseorang untuk hidup sehat atau keinginan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang diyakini, misalnya, bergantung pada sejauh mana komitmen pemerintah melindungi kesehatan dan menjamin hak beribadah semua warga negara. Kebijakan politik yang tidak mendukung upaya hidup sehat atau komitmen politik yang rendah terhadap jaminan kebebasan beribadah akan berdampak pada susutnya kesempatan seseorang merealisasikan harapannya. Dalam pandangan Sen, kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai, tidak bisa tidak, akan bersinggungan langsung dengan pilihan sosial (*social choice*).

Apa yang dianggap bernilai oleh satu orang belum tentu juga dianggap bernilai oleh pihak lain. Preferensi pribadi belum tentu cocok dengan preferensi kolektif. Sen menyebut kondisi seperti ini sebagai konflik antara kebebasan dan pilihan sosial. Pertimbangan pilihan sosial yang hanya didasarkan pada suara mayoritas dapat berpotensi melangkahi hak dan kebebasan dasar seseorang. Menurutny, kecenderungan konflik antara kebebasan dan pilihan sosial terjadi pada teori pilihan sosial tradisional. Karenanya, kita memerlukan sebuah panduan praktis dan sekaligus etis yang bisa membatasi ekspansi pilihan sosial yang berorientasi pada suara mayoritas dan motif kesejahteraan/manfaat agar tidak melangkahi hak dan kebebasan dasar sebagian

anggotanya. Panduan ini menjadi prinsip yang harus diperhatikan dalam perumusan pilihan sosial.

Dengan panduan ini, pilihan sosial tidak lagi didasarkan pada suara terbanyak yang biasanya hanya terarah pada nilai manfaat dan kesejahteraan. Dalam pandangan Sen, pilihan sosial juga harus memerhatikan nilai kebebasan dan hak dasar para anggota yang ada di dalamnya. Kebebasan dan hak dasar tidak bisa dilangkahi hanya karena mayoritas menghendaki pilihan itu. Dengan pandangan ini Sen mencoba merumuskan pilihan sosial yang terintegrasikan dengan nilai kebebasan. Penulis menyebut model modifikasi pilihan sosial yang diajukan Sen ini sebagai pilihan sosial berbasis-kebebasan atau *liberty-based social choice*. Modifikasi lewat panduan praktis ini merupakan upaya Sen agar pilihan sosial tidak berbenturan dengan upaya perlindungan kebebasan. Melalui model ini ia juga mencoba mengajukan rumusan kesepakatan kolektif yang memiliki legitimasi politik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.



6.2 Pandangan Sen Mengenai Etika

Setelah menguraikan analisis mengenai langkah Sen mengintegrasikan kebebasan ke dalam teori pilihan sosial yang kemudian menjadi pilihan sosial berbasis-kebebasan (*liberty-based social choice*), selanjutnya penulis akan merumuskan jawaban atas pertanyaan utama yang diajukan dalam disertasi ini, yakni mengenai ukuran tindakan etis yang diajukan Sen. Apa ukuran atau kriteria untuk menilai sebuah tindakan sebagai baik atau tidak baik secara etis? Yang kedua, apa motif yang hendak

ditegaskan Sen lewat kritik terhadap teori pilihan rasional bagi pandangannya mengenai etika? Dari seluruh pandangan dan argumen yang sudah diajukan, menurut penulis, rumusan mengenai tindakan etis dalam pandangan Sen diukur dari seberapa jauh sebuah tindakan memberikan perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas. Perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas menjadi kriteria untuk menilai apakah tindakan yang dipilih itu baik atau tidak baik secara etis. Perlindungan kebebasan dipahami sebagai penolakan terhadap segala bentuk paksaan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain. Sementara perluasan kapabilitas dipahami sebagai penguatan kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mencapai sesuatu (*the ability to achieve*) yang dianggap bernilai. Rumusan mengenai kriteria tindakan etis menjadi perspektif yang harus diintegrasikan ke dalam hubungan antar-sesama (interaksi sosial) dan dalam perumusan kebijakan publik yang dibuat pemerintah.

Menurut penulis, karena hal yang menjadi ukuran dalam etika ini adalah kebebasan dan kapabilitas (kebebasan dalam aspek kesempatan) maka etika ini disebut sebagai etika yang berbasis-kebebasan. Sebuah tindakan dapat dinilai baik secara etis jika memerhatikan perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas. Perspektif kebebasan ini diorientasikan dalam hubungan antar-sesama atau dalam interaksi sosial dan juga dalam perumusan kebijakan publik. Dengan kata lain, kriteria etis yang diajukan Sen memiliki sifat sosial atau terkait dengan masalah hidup bersama. Karenanya penulis kemudian menyebut pandangan etika ini sebagai etika sosial berbasis-kebebasan (*liberty-based social ethics*). Hal yang juga ditekankan dalam pandangan etika Sen adalah perhatian pada keragaman ketidakmampuan (deprivasi kapabilitas) yang ada di dalam masyarakat.

Sementara lewat kritik atas teori pilihan rasional, Sen hendak memberikan pendasaran mengenai tindakan etis yang didasarkan pada komitmen. Rasionalitas sebuah pilihan tidak diukur pada sejauh mana pilihan tindakan itu dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Pilihan tindakan yang didasarkan pada komitmen juga bisa disebut rasional meski tindakan itu tidak memaksimalkan kepentingan-diri. Ia lebih memahami rasionalitas sebuah pilihan pada sejauh mana pilihan itu sudah diperiksa secara kritis, bukan pada sejauh mana pilihan itu bisa memaksimalkan kepentingan-diri. Karenanya, melalui kritik ini Sen menegaskan bahwa tindakan

tindakan etis yang didasarkan pada komitmen dapat disebut rasional meski kontradiktif dengan motif maksimalisasi kepentingan-diri.

Dalam pilihan tindakan yang didasarkan pada pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*), hal yang ditekankan bukan hanya nilai manfaat-kesejahteraan tetapi juga nilai-nilai lain seperti hak dan kebebasan. Di dalam tindakan komitmen seperti solidaritas dan patriotisme, seorang pelaku memang tidak memaksimalkan nilai manfaat, kesejahteraan dan kepentingan-dirinya, namun kita bisa menyebutnya sebagai tindakan rasional. Jika pelaku sudah mempertimbangkan secara kritis mengenai nilai kebebasan dan kapabilitas yang diupayakan dalam tindakan yang didasarkan pada komitmen kita dapat menyebutnya sebagai tindakan rasional. Dengan pemahaman ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan kritis, ada banyak nilai yang dapat dipertimbangkan oleh manusia.

Dengan penegasan ini, Sen sebenarnya telah memberikan pemahaman dasar bahwa rasionalitas tindakan tidak diukur pada sejauh mana ia dapat memaksimalkan kepentingan-diri melainkan pada sejauh mana ia sudah diperiksa secara kritis. Tindakan yang didasarkan pada komitmen dapat disebut rasional sejauh sudah dipertimbangkan secara kritis. Dengan demikian, kritik Sen pada teori pilihan rasional, menurut penulis berfungsi untuk menopang dasar rasionalitas tindakan etis yang didasarkan pada komitmen. Ia memahami komitmen sebagai tindakan yang tidak lagi didorong oleh motif kepentingan-diri. Ide mengenai komitmen terkait dengan tanggung jawab seseorang sebagai pelaku yang memiliki kemampuan untuk mengatasi atau mengurangi ketidakbebasan yang dialami oleh pihak lain.

Dari rumusan di atas maka pandangan Sen mengenai etika dapat ditegaskan sebagai berikut:

Sebuah tindakan dapat dinilai baik secara etis jika tindakan itu memiliki perspektif pada perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas. Sementara dengan mengkritik teori pilihan rasional, ia menegaskan bahwa rasionalitas pilihan tidak diukur pada maksimalisasi kepentingan-diri tetapi pada pemeriksaan kritis. Karenanya tindakan etis yang didasarkan pada komitmen dapat disebut rasional sejauh sudah diperiksa secara kritis.

Apakah dengan penegasan ini Sen mengeliminasi tindakan yang memiliki motif maksimalisasi kepentingan-diri dari kriteria tindakan etis? Penulis berpendapat bahwa Sen tidak mengeliminasi motif maksimalisasi kepentingan-diri dari kriteria tindakan etis. Tindakan seorang pelaku bisa masuk dalam kategori etis meski memiliki motif maksimalisasi kepentingan-diri. Seorang warga yang mencoba menggerakkan warga lain untuk membersihkan lingkungan rumah dari sampah pada saat menjelang musim hujan tentu saja terkandung motif maksimalisasi kepentingan-diri dalam tindakan itu. Dengan menggerakkan warga lain untuk membersihkan lingkungan masing-masing, ia dan semua warga yang ada di sekitarnya dapat terhindar dari banjir. Dalam tindakan semacam ini, meski terkandung motif maksimalisasi kepentingan-diri juga jelas terkandung motif etis yakni perluasan kapabilitas.

Begitu juga dalam tindakan seorang pejuang hak azasi yang membela hak kelompok minoritas. Ia melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas dari tindakan pengekangan dan pembatasan hak dasar dengan motif maksimalisasi kepentingan-diri di dalamnya. Di dalam tindakan itu, ia memang melakukan pembelaan terhadap kelompok lain, namun pada saat yang sama, tindakan itu juga didorong oleh kekhawatiran pelaku jika hal itu menimpa dirinya atau kelompoknya. Melalui pembelaan itu, ia mencoba menghentikan tindakan negara yang bisa mengancam hak-hak dasar warga, termasuk dirinya. Dalam hal ini kita bisa melihat motif kepentingan-diri di dalam tindakan yang dari permukaan merupakan tindakan diarahkan pada orang lain. Meski memiliki motif kepentingan-diri, sikap semacam ini bisa dilihat sebagai tindakan etis karena memberikan perhatian pada perlindungan kebebasan. Dengan demikian hal yang hendak digarisbawahi dalam kriteria tindakan etis menurut Sen di atas memang bukan soal adanya motif maksimalisasi kepentingan-diri atau tidak, tetapi pada sejauh mana sebuah tindakan melindungi kebebasan dan memperluas kapabilitas. Jika sebuah tindakan dapat melindungi kebebasan dan memperluas kapabilitas, kita dapat menyebutnya sebagai tindakan etis, apakah dengan motif maksimalisasi kepentingan-diri atau tidak dengan motif maksimalisasi kepentingan-diri.

6.3 Asumsi Dasar dan Dampak

Dalam pandangan etika kebebasan yang diajukan Sen kita dapat menelusuri pandangan dasarnya mengenai manusia. Sen memiliki perhatian besar pada

perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas karena pandangannya mengenai manusia dilekatkan dengan kebebasan. Hakikat kemanusiaan seseorang terletak pada kebebasannya sehingga perlindungan kebebasan menjadi sesuatu yang tidak dapat dikompromikan. Ia memahami manusia sebagai subjek yang memiliki pandangan mengenai nilai dan pada saat yang sama juga memiliki kemampuan kritis untuk mengevaluasi nilai yang dianutnya. Dalam pandangan Sen, nilai yang dianut oleh setiap individu adalah nilai yang dipengaruhi oleh komunitas di mana seseorang hidup dan tumbuh di dalamnya. Meski komunitas memberikan pengaruh bagi pandangan seseorang mengenai nilai, namun kondisi ini tidak berarti bahwa ia tidak bisa melakukan evaluasi atas nilai yang diterima. Setiap individu, dalam pandangan Sen, memiliki kemampuan kritis untuk mengevaluasi dan memodifikasi nilai yang datang kepadanya.

Dalam pandangan penulis, asumsi dasar Sen mengenai manusia bisa dilihat sebagai asumsi deskriptif mengenai manusia (ontologis) dan sekaligus juga bersifat normatif (etis). Secara deskriptif ia menunjukkan kenyataan bahwa nilai yang dianut oleh seorang manusia adalah nilai yang dipengaruhi oleh komunitas di mana ia hidup. Pandangan dan nilai komunitas dapat memberikan pengaruh bagi pandangan dan nilai yang dianut oleh seorang individu yang ada di dalamnya. Namun pada saat yang sama ia juga menekankan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan evaluasi atas nilai tersebut. Dengan pandangan ini ia memahami bahwa setiap manusia harus dilihat dalam kerangka kebebasan. Tanpa kebebasan, seseorang akan kehilangan nilai kemanusiaannya.¹

Dengan asumsi dasar ini, peran pendidikan nilai menjadi sangat penting. Perspektif kebebasan dalam melihat sesama manusia tidak bisa tumbuh begitu saja. Nilai dan perspektif ini harus dibangun dan dihidupkan melalui proses pendidikan yang juga memberikan penghargaan besar pada nilai kebebasan. Proses pendidikan itu berlangsung baik secara formal maupun informal. Melalui pendidikan yang memberikan

¹ Dengan pandangan ini, asumsi dasar Sen mengenai manusia, menurut penulis, juga dapat merespons pertanyaan mengenai makna kebebasan individu di dalam pasar bebas. Bagaimana mungkin manusia dapat disebut bebas karena pada saat yang sama, hasratnya terhadap sesuatu sebenarnya sudah dibentuk dan ditentukan oleh pasar. Dalam menanggapi pertanyaan ini, kita perlu membedakan antara memengaruhi (*influencing*) dan mendeterminasi (*determining*). Hasrat seorang individu pada sesuatu bisa dipengaruhi tetapi tidak dideterminasi oleh pasar (atau apapun), karena setiap individu memiliki kemampuan kritis untuk menilai ulang mengenai hal mana yang sebaiknya dipilih.

perhatian besar pada pentingnya nilai kebebasan, seseorang bisa tumbuh dengan perspektif kebebasan yang baik.

Setelah menjelaskan asumsi dasar dari pandangan etika yang diajukan Sen, penulis juga dapat menunjukkan beberapa dampak dari pandangan etika ini. Hal pertama yang dapat dilihat sebagai dampak dari pandangan ini adalah tuntutan untuk menjadikan perspektif kebebasan sebagai perspektif dasar dalam perumusan pilihan kolektif dan relasi antar-sesama. Bagi Sen, kebebasan adalah sesuatu yang bernilai pada dirinya sehingga harus menjadi perspektif dalam interaksi sosial dan dalam perumusan kebijakan publik. Namun kebebasan juga bisa menjadi sarana untuk sesuatu yang lain sebagaimana sudah ditunjukkan dalam korelasi antara kebebasan dan kesejahteraan. Menurut Sen, jika kebebasan dijamin dan berjalan secara baik, ia berkeyakinan bahwa hal itu akan berkontribusi bagi capaian kesejahteraan. Dengan kebebasan yang lebih besar, sebuah masyarakat dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Dengan demikian kebebasan merupakan hal yang sangat penting, baik dari dirinya sendiri (*ends*) atau sebagai sarana (*means*) untuk mencapai tujuan yang lain.

Sen kerap mempersoalkan capaian sebuah masyarakat atau pemerintah pada kesejahteraan yang minus kebebasan di dalamnya. Sebuah negara bisa saja memiliki GDP dan pendapatan per kapita yang tinggi, namun jika pada saat yang sama warganya tidak memiliki kebebasan, maka ada hal serius yang hilang dalam kehidupan masyarakat di negara itu. Baginya, hidup yang bebas menjadi hal yang mutlak bagi manusia dan menjadi tolok ukur kualitas hidup manusia. Dengan menjadikan tuntutan perlindungan kebebasan sebagai perspektif dalam menata kehidupan sosial dan juga politik, Sen mengidealkan kondisi masyarakat yang hidup dalam kebebasan. Setiap orang atau setiap warga negara memiliki kebebasan dasar yang harus dihormati dan tidak dilangkahi.

Perspektif kebebasan seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi dalam berhubungan dengan pribadi yang lain. Perspektif ini juga seharusnya dipakai oleh para penganut agama dalam berhubungan dengan mereka yang berbeda keyakinan. Tidak boleh ada pemaksaan dalam keyakinan dan tidak boleh ada kekerasan dalam menyikapi keyakinan yang berbeda. Keyakinan yang dianut merupakan bagian dari area yang dilindungi

(*protected sphere*) yang ada pada setiap pribadi. Perspektif kebebasan juga harus diterapkan dalam perumusan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Dalam merumuskan kebijakan, mereka harus memerhatikan dan melindungi kebebasan setiap warga negara. Dengan demikian, hal yang diperhatikan bukan hanya peningkatan kesejahteraan, tetapi juga perlindungan hak dan kebebasan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak boleh melangkahi atau mengorbankan hak dan kebebasan. Bahkan, institusi pasar juga harus memiliki perspektif kebebasan. Maksimalisasi keuntungan yang menjadi logika institusi tersebut tidak boleh merusak kebebasan. Mereka juga dituntut untuk terlibat dalam upaya perlindungan kebebasan.

Hal kedua yang dapat dipahami sebagai dampak dari pandangan Sen adalah soal tuntutan perumusan putusan publik yang harus mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Apa yang diajukan Sen dalam modifikasi teori pilihan sosial adalah upaya untuk menghadirkan satu putusan kolektif yang memiliki legitimasi dari para anggotanya. Hal ini terkait dengan pandangan Sen mengenai demokrasi sebagai proses penalaran publik (*public reasoning*) oleh para anggota yang ada di dalamnya. Dari pandangan ini kita bisa menarik sebuah model demokrasi atau perumusan pilihan sosial yang menuntut setiap pihak untuk mempertimbangkan seluruh sudut pandang yang diajukan oleh para anggota. Kita tidak boleh membatasi salah satu pihak untuk menyampaikan kepentingannya ketika kita melakukan penalaran publik.

Dalam arti tertentu, ide penalaran publik yang diajukan Sen adalah gagasan yang ramah terhadap berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa Sen bahkan tidak menolak gagasan-gagasan yang berasal dari “doktrin komprehensif” untuk diajukan di dalam perumusan pilihan sosial ini.² Baginya, semua

² Konsep doktrin komprehensif (*comprehensive doctrine*) adalah konsep yang dipakai Rawls ketika menjelaskan kelompok-kelompok yang ada di dalam komunitas politik. Di dalam masyarakat ada kelompok yang berasal dari kelompok agama, suku atau budaya tertentu. Dalam pandangannya, kelompok-kelompok semacam itu dikategorikan sebagai doktrin komprehensif. Dalam *Political Liberalism*, ia mengajukan gagasan tentang upaya membangun masyarakat yang tertata baik (*well-ordered society*) yang terdiri dari berbagai doktrin komprehensif. Lewat ide liberalisme politik, ia membuat aturan main bagi doktrin komprehensif untuk terlibat dalam kehidupan publik. Salah satu syarat penting yang ia ajukan adalah adanya sikap waras (*reasonable*). Yang dimaksud dengan sikap waras adalah satu elemen sosial yang memungkinkan kerjasama berada dalam hubungan yang fair. Satu hubungan dapat dikatakan waras jika setiap pihak dapat menerimanya secara timbal balik. Seseorang dapat dikatakan bertindak waras jika ia mempertimbangkan sesuatu yang dapat diterima oleh pihak lain yang sama-sama memiliki kebebasan yang setara. Dalam prinsip kewarasan (*reasonableness*), nilai timbal balik mendapatkan tekanan cukup besar. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak memiliki kewarasan jika

sudut pandang dan nilai yang dianut boleh terlibat di dalamnya dengan syarat bahwa setiap pihak juga harus terbuka terhadap pandangan pihak lain dan siap untuk diperiksa secara kritis.

Hal ketiga yang bisa dilihat sebagai dampak praktis dari pandangan etika Sen adalah tuntutan untuk memerhatikan beragam faktor dalam memperluas kapabilitas. Dalam upaya memperluas kapabilitas seseorang atau masyarakat, kita perlu memahami bahwa sumber ketidakberdayaan atau faktor yang menentukan kapabilitas tidaklah tunggal, melainkan beragam. Paling tidak, ada empat faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah faktor keragaman kondisi setiap pribadi, yang kedua perbedaan kondisi alam dan lingkungan, yang ketiga kondisi sosial-politik, yang keempat faktor budaya dan hubungan antar-pribadi. Untuk melihat seberapa besar kapabilitas yang dimiliki, faktor-faktor ini tentu harus diperhatikan.

Kondisi setiap orang, baik secara fisik dan mental sejatinya berbeda satu sama lain dan tidak bisa disamaratakan begitu saja. Perbedaan kondisi ini turut memengaruhi kapabilitas yang dimiliki setiap orang. Laki-laki dan perempuan jelas memiliki kapabilitas yang berbeda. Bahkan antar-kaum perempuan juga terdapat perbedaan yang perlu diperhatikan. Misalnya, kita tidak bisa menyamaratakan kapabilitas seorang perempuan yang sedang hamil dan yang tidak hamil. Perempuan yang sedang hamil membutuhkan asupan gizi yang lebih besar dibanding perempuan yang tidak hamil, sehingga karenanya kapabilitas yang mereka miliki menjadi berbeda. Orang yang memiliki penyakit atau orang cacat jelas tidak bisa disamakan dengan orang yang normal. Keragaman kondisi setiap orang ini akan berdampak pada perbedaan kapabilitas setiap orang untuk mencapai sesuatu.

Kondisi lingkungan dan alam yang berbeda juga turut memengaruhi perbedaan kapabilitas masyarakat yang tinggal di dalamnya. Masyarakat yang tinggal di daerah yang rentan bencana jelas memiliki kapabilitas yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah yang relatif aman dari bencana. Kapabilitas masyarakat yang tinggal di daerah yang mengalami musim dingin ekstrem akan berbeda dengan masyarakat yang bisa menikmati matahari sepanjang tahun seperti di Indonesia. Masyarakat Indonesia relatif bisa beraktivitas seperti biasa setiap waktu, bahkan di musim hujan sekalipun.

tidak memperhatikan prinsip timbal-balik dengan pihak lain yang juga memiliki kebebasan yang setara. Lih. John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993), 49-50.

Sementara masyarakat yang mengalami musim dingin yang ekstrem barangkali tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya secara normal ketika musim dingin tiba.

Perbedaan kondisi sosial, politik dan budaya juga memiliki dampak pada perbedaan kapabilitas masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah konflik misalnya jelas memiliki kapabilitas yang lebih kecil dibanding dengan masyarakat yang tidak mengalami konflik sosial atau politik. Pandangan mengenai budaya juga berkontribusi bagi kapabilitas masyarakatnya. Dalam masyarakat patriarkal misalnya, kemampuan kaum perempuan untuk mencapai sesuatu akan berbeda dari kaum laki-laki yang relatif memperoleh banyak kemudahan. Bagi Sen, semua kondisi ini turut memengaruhi kapabilitas seseorang atau masyarakat dalam mencapai sesuatu. Karenanya, pendekatan kapabilitas yang diajukan Sen menuntut setiap pihak untuk memerhatikan beragam faktor yang menentukan kapabilitas.

6.4 Relevansi Bagi Indonesia

Indonesia saat ini, khususnya sejak jatuhnya rezim Soeharto telah mengalami perubahan politik yang cukup signifikan dalam proses demokratisasi dan penghormatan pada nilai-nilai hak azasi manusia.³ Hal itu ditandai oleh semakin besarnya ruang kebebasan di dalam masyarakat, ruang partisipasi publik yang semakin terbuka dan secara rutin juga telah menyelenggarakan pemilihan pemimpin dan wakilnya baik di tingkat nasional dan daerah. Namun, meski demokrasi Indonesia dianggap relatif sudah stabil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sebenarnya masih belum merepresentasikan kebijakan publik yang memerhatikan hak dan kebebasan setiap warga negara. Sikap pemerintah terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah yang dilarang menjalankan ibadah di tempat mereka di Jawa Barat dan Lombok, Nusa Tenggara Barat,⁴ larangan ibadah

³ Dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia paling akhir, demokrasi Indonesia sejak era reformasi dinilai berjalan relatif stabil. Menurut penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), demokrasi Indonesia dianggap konsisten dengan capaian antara 60-70. Capaian ini menggambarkan bahwa demokrasi Indonesia masuk dalam kategori sedang atau menengah. Indeks Demokrasi Indonesia dipublikasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP). Mereka memublikasikan indeks ini sejak tahun 2009 dan secara rutin memberikan laporan indeksnya setiap tahun. Laporan lebih lengkap dapat dilihat dalam Maswadi Rauf, dkk. *Indeks Demokrasi Indonesia 2013, Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi* (Jakarta: Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Badan Pusat Statistik, 2015).

⁴ Hingga kini, warga Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat yang terusir dari tempat tinggalnya masih belum bisa pulang. Selama lebih dari tujuh tahun mereka tinggal di tempat pengungsian yang jauh dari layak. Mereka terusir karena penolakan sebagian kelompok muslim yang menganggap mereka sebagai aliran sesat. Ironisnya pemerintah atau negara justru tidak membela hak dasar mereka. Kelompok

bagi sebagian umat Kristiani di beberapa tempat seperti kasus Gereja Yasmin di Bogor⁵ dan pengusiran kelompok Syi'ah di Sampang, Madura,⁶ adalah beberapa kasus yang belum merefleksikan ketegasan pemerintah untuk melindungi hak dasar warganya.

Sebagaimana dikatakan Sen sendiri, demokrasi tentu bukan hanya soal pemilihan umum yang dilakukan secara rutin. Adanya pemilihan umum belum cukup untuk memastikan adanya proses demokrasi yang baik dan jaminan perlindungan hak dan kebebasan setiap orang. Bahkan, kebebasan media yang sudah berlangsung sejak reformasi pun masih belum memberikan kontribusi bagi perlindungan kebebasan sebagaimana yang diharapkan.⁷ Apa sebenarnya yang hilang atau kurang dari kehidupan demokrasi yang berlangsung di Indonesia di mana pada saat yang sama pandangan Sen memiliki kontribusi untuk menutup kekurangan itu. Tentu saja, apa yang akan ditunjukkan sebagai relevansi pandangan Sen bagi demokrasi Indonesia tidak dipahami sebagai obat mujarab yang dapat menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Dalam hal ini, relevansi pemikiran Sen dapat dilihat pada pentingnya perspektif kebebasan di dalam pertimbangan kebijakan publik di Indonesia.

Perlindungan kebebasan adalah sesuatu yang mutlak dan menjadi alasan dari adanya (*raison d'être*) negara itu sendiri. Setiap orang atau setiap warga memiliki hak dan kebebasan dasar yang tidak boleh dilangkahi oleh siapapun dan atas nama apa pun. Hak atas keyakinan yang dianut adalah hak dasar yang tidak boleh dilanggar dan negara berkewajiban melindungi hak dasar ini. Adanya kenyataan bahwa sebagian kelompok minoritas di Indonesia tidak bisa memperoleh perlindungan atas hak dasarnya

Ahmadiyah di beberapa daerah justru dilarang lewat peraturan daerah. Bdk. "5 Lembaga Desak Jokowi Sikapi Ahmadiyah NTB" www.tempo.co. <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/08/078627113/5-Lembaga-Desak-Jokowi-Sikapi-Ahmadiyah-NTB>

⁵ Kasus gereja Yasmin atau GKI Yasmin Bogor cukup menyita perhatian publik karena terjadi debat yang berkepanjangan mengenai izin pembangunan gereja. Proses hukum yang dilakukan oleh pihak GKI Yasmin sebenarnya sudah mereka menangkan di Mahkamah Agung namun kemudian tidak dijalankan oleh pemerintah kota Bogor. Lih. "Komnas HAM Minta Jokowi Tangani Kasus GKI Yasmin" www.tempo.co <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/23/173630488/Komnas-HAM-Minta-Jokowi-Tangani-Kasus-GKI-Yasmin>

⁶ Kelompok muslim Syi'ah adalah kelompok minoritas di banyak tempat, termasuk di Sampang Madura. Karena ada konflik keluarga yang kemudian menyebar pada isu perbedaan aliran Islam, kelompok muslim Syi'ah di Sampang kemudian diusir dari tempat mereka. Mereka kemudian diungsikan ke Surabaya. Lih. "Kasus Sampang: pemerintah berpotensi lakukan kejahatan genosida" www.radioaustralia.net.au <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kasus-sampang-pemerintah-berpotensi-lakukan-kejahatan-genosida/1183930>.

⁷ Sebagai sebuah proses, media memang sudah bebas, namun materi yang dibela masih belum menunjukkan bahwa mereka betul-betul membela kebebasan. Misalnya, sebagian media masih menganggap bahwa tindakan kelompok Islam terhadap Ahmadiyah sebagai tindakan yang benar.

merupakan cacat yang tidak dapat ditoleransi. Negara seharusnya tidak membiarkan kondisi seperti ini hanya karena kelompok mayoritas menghendaki kebijakan yang memiliki potensi pelanggaran hak dasar kelompok minoritas. Sikap negara yang tunduk pada suara mayoritas yang menghendaki pelarangan bagi kelompok minoritas untuk menjalankan ibadah yang mereka yakini merupakan wujud dari tidak adanya perspektif kebebasan di dalam pertimbangan kebijakannya.

Jika merujuk pada konstitusi Republik Indonesia, kita sebenarnya bisa mendapatkan penegasan yang sama. Negara melindungi hak dan kebebasan dasar setiap warga negara. Negara melindungi hak setiap warga untuk meyakini agama dan menjalankan ibadah yang dianutnya.⁸ Sikap negara yang membiarkan atau justru melanggar hak dasar untuk meyakini agama dan hak untuk beribadah jelas merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam hal ini, pandangan Sen yang menuntut perlindungan kebebasan dan hak dasar memiliki kesinambungan dengan tuntutan yang ada di dalam konstitusi Indonesia. Karenanya, kewajiban untuk melindungi kebebasan sejatinya merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari oleh para pemangku kebijakan di negeri ini. Sayangnya, dalam real politik di negeri ini, pilihan kebijakan yang diambil kerap didasarkan pada pertimbangan yang kurang memerhatikan hak dan kebebasan.

Relevansi yang kedua dapat dilihat pada pendekatan kapabilitas yang diajukan Sen. Forum Human Development and Capability Association (HDCA) yang diinisiasi oleh Sen dan Nussbaum pernah menyelenggarakan konferensi tahunannya di Jakarta pada tahun 2012. Konferensi ini merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan pendekatan kapabilitas sebagai arus utama dalam melihat masalah dan juga dalam mengembangkan kebijakan publik. Sebagaimana yang kerap ditegaskan oleh Sen dan juga Nussbaum, hal pertama yang sangat digarisbawahi dalam pendekatan kapabilitas adalah koreksi atas pendekatan GDP dan pendapatan per kapita yang menjadi arus utama kebijakan publik di banyak negara. Dalam pendekatan yang diajukan Sen dan juga Nussbaum, keberhasilan sebuah negara tidak dilihat dari tingkat GDP dan

⁸ Dalam Pasal 29 ayat 2 ditegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal ini juga diperkuat oleh pasal 28 E ayat 1 dan 2 hasil amendemen: (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Lih. UUD 1945 hasil amandemen.

pendapatan per kapita yang di terima warganya, tetapi pada sejauh mana warga negara memiliki kapabilitas untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai.

Dalam pendekatan kapabilitas, capaian GDP dan per kapita tidak dapat menggambarkan kualitas hidup manusia. Pada negara yang memiliki ketimpangan sosial yang sangat mencolok, pendekatan yang menekankan capaian GDP dan per kapita bisa sangat menyesatkan. Orang-orang miskin di negara yang memiliki GDP dan per kapita yang tinggi bisa saja memiliki kapabilitas yang lebih rendah dibanding warga yang hidup di negara dengan GDP dan per kapita yang tidak terlalu tinggi namun memiliki rasio gini yang cukup baik. Relevansi dari pendekatan kapabilitas adalah perhatian terhadap berbagai faktor yang menentukan kapabilitas seseorang dalam mencapai sesuatu. Tentu saja, sebagaimana sudah ditunjukkan di atas dan juga kerap disinggung dalam disertasi ini, untuk melihat kapabilitas seseorang atau masyarakat kita harus melihat keragaman kondisi setiap orang, perbedaan kondisi sosial dan politik, perbedaan kondisi alam dan lingkungan, serta perbedaan kultur dan relasi antar-pribadi di dalam masyarakat.

6.5 Kritik dan Tanggapan

Setelah membaca dan menguraikan pandangan Sen mengenai kebebasan, di bagian akhir Bab VI ini penulis mencoba mengajukan dua catatan. Catatan yang pertama terkait dengan masalah klasifikasi konsep kapabilitas yang dibagi menjadi kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*). Klasifikasi ini memiliki potensi membingungkan pembaca ketika harus menghubungkan dengan klasifikasi kebebasan dalam aspek proses dan kesempatan. Agar tidak menciptakan kebingungan, penulis berpendapat bahwa sebaiknya kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan dipahami sebagai klasifikasi dari motif tindakan manusia. Menurut penulis, perubahan klasifikasi ini tidak mengubah substansi gagasan yang diajukan oleh Sen melainkan hanya soal penamaan saja. Sementara dalam catatan kedua, penulis akan masuk pada hal yang lebih substantif yakni mengenai konsep komitmen yang menurut Sen dipahami sebagai terputusnya hubungan antara pilihan dan motif maksimalisasi kepentingan-diri.

Dalam catatan yang pertama ini, penulis menggarisbawahi klasifikasi kapabilitas yang dibagi menjadi kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan

kepelakuan (*agency freedom*). Ketika kita membaca dan memahami kerangka pemikiran Sen, klasifikasi ini cenderung membuat bingung terkait dengan klasifikasi sebelumnya, yakni kebebasan dalam aspek proses dan kesempatan. Sebelumnya, Martha Nussbaum juga memberikan catatan soal ketidakjelasan klasifikasi kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan sebagaimana sudah diuraikan dalam kritiknya di Bab V. Hal yang hendak penulis garisbawahi dalam catatan ini bukan soal ketidakjelasan melainkan soal penamaan dua kebebasan itu yang akan lebih mudah dipahami jika dinamai motif tindakan. Jadi bukan kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan, melainkan motif kesejahteraan dan motif kepelakuan.

Pada saat menjelaskan konsep kebebasan, pertama-tama Sen membaginya dalam dua aspek, yakni aspek proses dan aspek kesempatan real (*real opportunity*). Dengan klasifikasi ini, ia membedakan antara pengertian kebebasan yang dipahami secara generik sebagai tidak adanya paksaan dan pengertian kebebasan yang dipahami sebagai kesempatan. Kebebasan dalam aspek kesempatan kemudian disebut kapabilitas atau kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*). Pada pengertian yang pertama, ia menekankan soal aspek proses di mana dalam menentukan sesuatu yang dianggap bernilai, seseorang tidak dipaksa oleh pihak luar. Sementara pada pengertian kedua, ia menekankan aspek substantif, yakni soal kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Dalam klasifikasi kita belum mendapatkan penjelasan yang cenderung membingungkan.

Namun ketika Sen membagi kapabilitas menjadi kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*), klasifikasi ini mulai agak membingungkan, khususnya dalam kaitannya dengan klasifikasi aspek proses dan kesempatan real yang sudah dijelaskan. Alkire, Qizilbash dan Comim memahami kebebasan kesejahteraan sebagai kapabilitas dan kebebasan kepelakuan sebagai kebebasan dalam aspek proses (Alkire, Qizilbash dan Comim 2008, 4).⁹ Dalam pembacaan awal, penulis juga memahami klasifikasi ini sebagaimana yang dipahami Alkire dan rekan-rekan. Namun, ketika melihat klasifikasi ini lebih jauh, tampaknya tidak terlalu tepat jika kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan dipahami

⁹ Alkire adalah Direktur Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), di Universitas Oxford. Qizilbash adalah profesor politik, ekonomi dan filsafat di Universitas York. Comim adalah Direktur the Capability and Sustainability Center (CSC) dan Fellow di St Edmund's College, Universitas Cambridge dan Fellow di Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porte Alegre (UFRGS), Brasil.

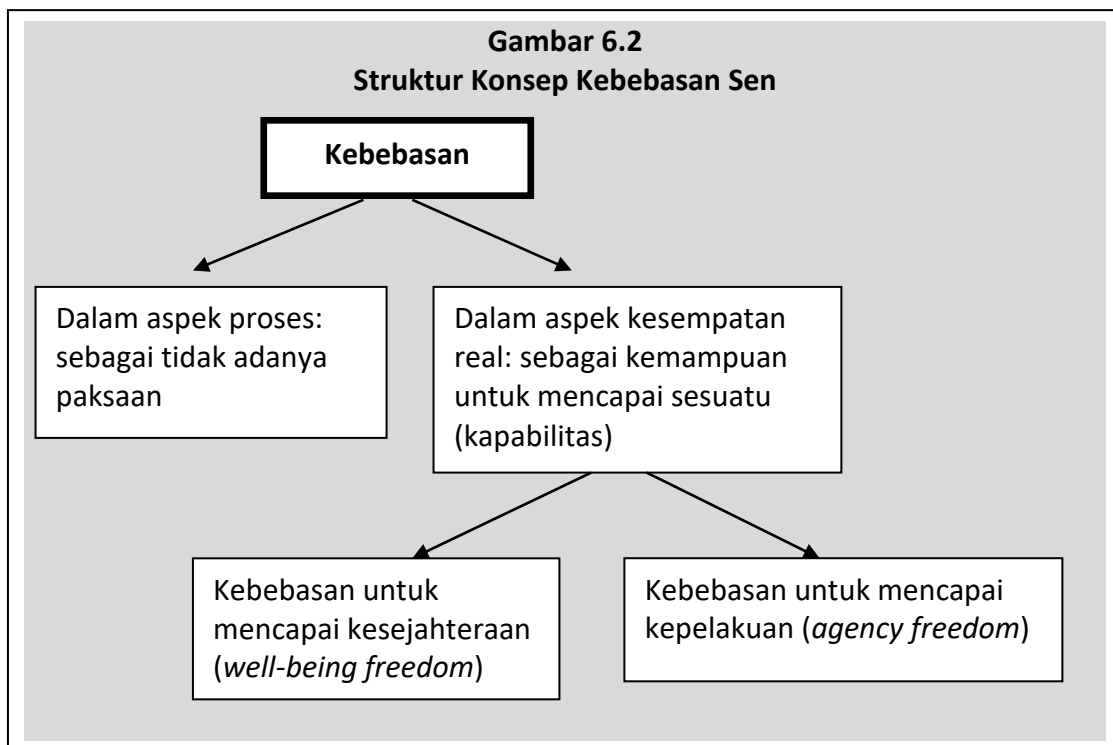
demikian. Terlebih ketika dalam *The Idea of Justice* Sen menegaskan bahwa kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan dipahami sebagai bagian dari kapabilitas (Sen 2009, 288-289). Dengan pemahaman ini ia menegaskan bahwa kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu dibedakan menurut isi yang hendak dicapai, yakni kesejahteraan dan kepelakuan.

Perbedaan antara kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan diuraikan dengan panjang lebar oleh Sen di dalam artikel “Well-being, Agency and Freedom” (1985). Dalam artikel itu ia menunjukkan soal nilai-nilai yang dipertimbangkan dalam memilih tindakan. Menurutnya, kesejahteraan bukan satu-satunya nilai yang dipertimbangkan dalam memilih tindakan yang akan diambil. Melalui artikel itu ia mengkritik pandangan yang menjadikan kesejahteraan sebagai satu-satunya informasi untuk menjelaskan tindakan manusia. Seseorang juga bisa memilih tindakan yang tidak terkait sama sekali dengan motif kesejahteraan. Di banyak tulisan lain, ia menghubungkan masalah ini dengan pengertian pilihan rasional (*rational choice*) yang sudah penulis jelaskan di atas.

Melalui klasifikasi kesejahteraan dan kepelakuan, Sen memahami manusia tidak hanya sebagai pengejar manfaat dan kesejahteraan tetapi juga sebagai pelaku yang memiliki tanggung jawab. Melalui tindakan komitmen pada nilai tanggung jawab, ia menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan satu-satunya motif bagi seseorang untuk memilih tindakan. Seseorang juga bisa memilih tindakan yang tidak terkait sama sekali dengan motif kesejahteraan. Jika Sen memaksudkan klasifikasi kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan dalam arti ini, sebenarnya akan lebih baik jika klasifikasi ini dipahami sebagai turunan (derivasi) dari motif pilihan tindakan rasional, daripada klasifikasi konsep kapabilitas. Istilah yang dipakai akan lebih efektif jika menggunakan istilah “motif kesejahteraan” dan “motif kepelakuan” daripada istilah “kebebasan kesejahteraan” dan “kebebasan kepelakuan”

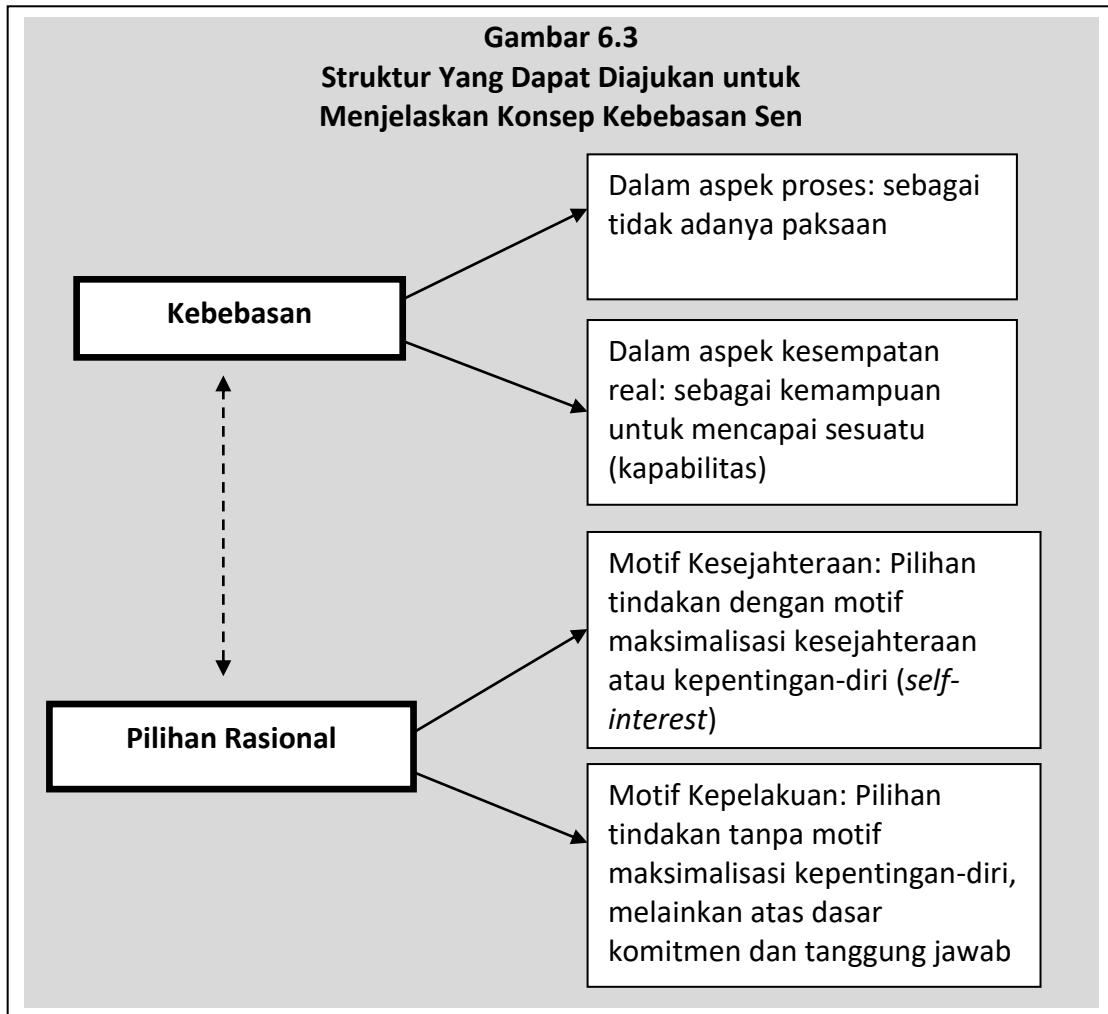
Istilah kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan justru membuat pembaca bingung, khususnya ketika ia harus menghubungkannya dengan klasifikasi kebebasan dalam aspek proses dan kesempatan. Dalam pandangan Sen sendiri cukup jelas bahwa hal yang ditekankan dalam kebebasan kesejahteraan dan kebebasan kepelakuan adalah soal pluralitas nilai yang dipertimbangkan dalam tindakan dan kritik

terhadap pengertian pilihan rasional. Dalam Gambar 6.2 di bawah ini ditunjukkan struktur pemikiran Sen mengenai kebebasan sebagaimana sudah dijelaskan. Sementara Gambar 6.3 adalah struktur yang dapat diajukan untuk memahami pemikirannya mengenai kebebasan dengan lebih mudah dan efektif namun tetap sesuai dengan maksud Sen sendiri. Dalam Gambar 6.3 ini, penulis menunjukkan dua pokok pemikiran Sen, yakni tentang kebebasan dan rasionalitas. Ia membagi kebebasan menjadi dua aspek, yakni kebebasan dalam aspek proses dan aspek kesempatan real. Yang kedua ia memahami bahwa motif pilihan rasional tidak hanya dipahami sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan atau kepentingan-diri, tetapi juga pilihan tindakan yang didasarkan pada komitmen yang tidak terkait dengan motif kepentingan-diri.



Antara kebebasan dan rasionalitas (pilihan rasional) terdapat hubungan yang erat. Dengan menegaskan bahwa tindakan seseorang tidak hanya didorong oleh motif kesejahteraan maka sebagai pelaku kita memiliki kebebasan untuk memilih berbagai macam pilihan rasional. Seorang pemilih yang rasional tidak selalu mengambil tindakan yang dapat memaksimalkan kepentingan-dirinya. Sebagai pelaku rasional, seseorang juga bisa mengambil pilihan tindakan yang tidak memiliki motif memaksimalkan kepentingan-diri sama sekali. Jika rasionalitas pilihan hanya meniscayakan pilihan

maksimalisasi kepentingan-diri, sejatinya tidak ada kebebasan pilihan rasional yang bisa diambil oleh seorang pelaku. Dengan memahami pengertian pilihan rasional yang tidak hanya dimaknai sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri, kita telah mengembalikan kebebasan sebagai sesuatu yang inheren dalam tindakan manusia yang rasional.



Dalam catatan kedua, penulis mencoba masuk pada masalah yang lebih substantif dengan menelisik lebih jauh proposal pemikiran Sen mengenai komitmen yang dipahami sebagai terputusnya hubungan antara pilihan (*choice*) yang diambil secara aktual dan motif maksimalisasi kesejahteraan (*welfare*). Sebagaimana yang kerap ditegaskan, melalui konsep komitmen, ia menunjukkan adanya pilihan tindakan pelaku yang tidak memaksimalkan kepentingan-diri. Melalui tindakan yang didasarkan pada

komitmen, seorang pelaku bisa menegasi kepentingan-dirinya. Ia mengkritik pandangan yang memahami tindakan manusia hanya bisa dilihat secara rasional dalam kerangka maksimalisasi kepentingan-diri. Bagi Sen, maksimalisasi kepentingan-diri bukanlah ukuran untuk menilai sebuah pilihan tindakan itu rasional. Ia lebih memahami pilihan rasional sebagai pilihan yang sudah diperiksa secara kritis sebagaimana yang sudah dijelaskan. Pertanyaan yang diajukan atas pandangan Sen mengenai komitmen ini adalah apakah mungkin manusia bisa bertindak dengan menegasi kepentingan-dirinya?¹⁰ Dalam catatan ini, penulis mencoba memisahkan antara pengertian mengenai kesejahteraan dan kepentingan-diri. Seseorang bisa saja menegasi kesejahteraan atau kondisi yang menyenangkan (*pleasure*) tetapi tidak kepentingan-dirinya.

Pemahaman mengenai kepentingan-diri kerap diidentifikasi sebagai kesejahteraan, manfaat, keuntungan dan kesenangan diri. Jika kepentingan-diri dipahami sebagai prinsip pertama (*first principle*) dalam tindakan manusia itu berarti bahwa kesejahteraan, manfaat, keuntungan dan kesenangan adalah alasan penggerak mengapa seseorang bertindak. Motif ini bisa dilacak dalam banyak tindakan, bukan hanya dalam tindakan ekonomi tetapi juga di dalam politik, hukum dan lain-lain. Motif maksimalisasi kepentingan-diri juga dapat ditunjukkan di dalam tindakan simpati sebagaimana yang kerap dijelaskan. Meski tampaknya tindakan yang didasarkan pada simpati itu terarah pada orang lain, namun motif tindakan itu tetaplah maksimalisasi kepentingan-diri. Menurut Sen, motif maksimalisasi kepentingan-diri baru bisa dinegasi pada tindakan komitmen. Dalam pandangannya, tindakan yang didasarkan pada komitmen, seorang pelaku bisa memutus hubungan antara motif maksimalisasi kepentingan-diri dan pilihan yang diambil.

Masalahnya, apakah mungkin seorang pelaku bisa menegasi motif maksimalisasi kepentingan-diri? Jika Sen menganggap bahwa tindakan seorang patriot atau pembela tanah air merupakan pengejawantahan dari tindakan komitmen, kita bisa menganalisisnya lebih tajam, apakah di dalam tindakan itu, si pelaku betul-betul menegasi kepentingan-dirinya? Tindakan seorang pembela tanah air yang rela

¹⁰ Herry-Priyono mengajukan kritik dan catatan yang sangat subtil atas proposal Sen ini. Ia menilai, jika dilihat dalam kerangka tindakan kepelakuan manusia, sulit rasanya untuk melihat kemungkinan adanya tindakan manusia yang menegasi tujuan-dirinya (*self-goal*). Ia berpandangan bahwa sebuah tindakan menjadi khas manusia karena tindakan itu mengandung tujuan-diri. Kritik dan catatannya ini dapat dilihat dalam B. Herry-Priyono, "Amartya Sen Membongkar Rasionalitas" *Diskursus* 14 (2015): 69-76.

mengorbankan harta dan hidupnya dianggap sebagai pilihan yang telah memutuskan keniscayaan antara pilihan dan motif maksimalisasi kepentingan-diri. Menurut Sen, dalam kasus simpati, seseorang merasa tidak enak dan sedih ketika melihat korban gunung meletus sehingga ia memutuskan untuk membantu para korban. Dalam pandangannya, tindakan membantu itu didorong oleh rasa tidak enak dan sedih sehingga dengan pilihan tindakan tersebut ia berharap bisa menghilangkan rasa tidak enak dan kesedihannya itu. Namun jika pelaku yang sama dan menghadapi masalah yang sama memahami bahwa karena memiliki kemampuan untuk membantu, ia kemudian merasa bertanggung jawab untuk membantu para korban bencana gunung meletus tanpa memedulikan apakah tindakan itu bisa menghilangkan rasa tidak enak dan kesedihannya, menurut Sen, tindakan ini disebut komitmen.

Dalam pandangan penulis, seseorang bisa saja melakukan sesuatu tanpa memedulikan apakah tindakan itu memaksimalkan kesejahteraannya atau tidak, sebagaimana dalam tindakan komitmen, namun kenyataan akan hal itu tidak lantas dipahami bahwa si pelaku menegasi kepentingan-dirinya. Pelaku yang mendasarkan tindakannya pada komitmen, menurut Sen, didorong oleh nilai kesetiaan, kewajiban dan secara umum pada konsepsi mengenai yang baik (*the conception of the good*) (Sen 1985, 203-204). Orang yang bertindak berdasarkan komitmen memang tidak mengejar nilai keuntungan, manfaat dan kesejahteraan secara langsung, tetapi tindakan semacam ini tidak berarti bahwa si pelaku menegasi kepentingan-dirinya. Dalam hal ini, pengertian kepentingan-diri memang tidak lagi dipahami sebagai keuntungan, manfaat dan kesejahteraan. Kepentingan-diri juga dapat dipahami sebagai nilai tanggung jawab atau konsepsi mengenai yang baik itu sendiri.

Seorang pelaku memilih tindakan berderma bukan karena ia berharap mendapat dukungan politik ketika ia mencalonkan diri menjadi pemimpin. Ia tidak melakukan itu karena berharap akan dipersepsi positif sehingga akan berimplikasi positif bagi bisnis perusahaannya. Ia juga tidak melakukan itu karena alasan religius dengan berharap pahala di surga. Jika ia melakukan tindakan berderma karena alasan di atas, ia tetap sedang memaksimalkan kepentingan-diri. Namun jika seseorang berderma dengan alasan tanggung jawab karena kemampuan dan kekayaan yang dimiliki, apakah tindakan ini betul-betul telah menegasi kepentingan-diri? Dalam pandangan penulis, si pelaku berderma karena memiliki keyakinan mengenai tanggung jawab dan memiliki

konsepsi mengenai yang baik dari nilai tanggung jawab itu. Ketika memilih tindakan berderma, ia berupaya untuk melekatkan tindakannya dengan nilai tanggung jawab dan konsepsi mengenai yang baik yang ia yakini.

Melalui tindakan itu, si pelaku memiliki tujuan agar tindakannya itu sesuai dengan nilai tanggung jawab, kewajiban dan konsepsi mengenai yang baik yang diyakini. Apakah tujuan semacam ini tidak terkait dengan nilai kepentingan-diri? Nilai tanggung jawab dan kewajiban tentu tidak sama dengan kesejahteraan, manfaat dan keuntungan. Tetapi nilai itu tidak berarti tidak terkait dengan nilai kepentingan-diri. Bagi penulis, motif tindakan atas nama tanggung jawab, kewajiban dan konsepsi mengenai yang baik tidak dapat dipahami bahwa si pelaku telah menegasi kepentingan-dirinya. Dengan catatan ini penulis ingin menegaskan bahwa si pelaku memang tidak memaksimalkan keuntungan atau kesejahteraannya, tetapi ia tetap memerhatikan nilai kepentingan-diri lewat pencocokan tindakannya dengan konsepsinya mengenai yang baik (*the conception of the good*).

Dengan pemahaman ini pada akhirnya kita perlu menerima bahwa kepentingan-diri merupakan prinsip pertama (*first principle*) dalam memahami tindakan manusia. Namun, hal yang juga perlu dicatat, kita perlu mengklasifikasi jenis kepentingan-diri dalam setiap tindakan. Seorang pedagang bakso yang mencampur daging baksonya dengan borak adalah tindakan memaksimalkan kepentingan-diri dalam kategori *selfish*. Dalam tindakan ini si pelaku hanya menjadikan dirinya sebagai pusat tindakan tanpa memedulikan kepentingan-diri orang lain. Sementara seorang pedagang emas yang menjual emasnya dengan jujur tanpa mengurangi berat timbangan dan memberikan layanan terbaik bagi semua pelanggan adalah tindakan memaksimalkan kepentingan-diri dalam arti cinta-diri (*self-love*). Melalui tindakan ini si pelaku berpandangan bahwa untuk mencapai kepentingan-dirinya, ia harus memuaskan kepentingan-diri orang lain. Tindakan ini memiliki kemiripan dengan tindakan seseorang yang akan merasa bahagia jika sahabatnya bahagia atau tindakan simpati. Dalam tindakan simpati ini, si pelaku berpandangan bahwa kebahagiaannya hanya bisa dicapai bila sahabatnya juga merasakan kebahagiaan.

Menurut penulis, bahkan di dalam tindakan komitmen, si pelaku sebenarnya tetap mempertimbangkan motif maksimalisasi kepentingan-dirinya, namun pengertian

kepentingan-diri di dalam tindakan ini memiliki kategori yang berbeda dari kepentingan-diri sebelumnya. Kita bisa menyebut kepentingan-diri di tingkat ini sebagai kepentingan-diri berkomitmen. Kepentingan-diri yang dipertimbangkan di dalam tindakan ini bukan motif untuk mengejar kesejahteraan, manfaat, keuntungan, kesenangan atau bahkan pahala di surga. Si pelaku menolong korban bencana bukan karena berharap dipersepsi positif atau berharap akan mendapatkan pahala. Ia menolong karena merasa bertanggung jawab terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Ia memahami bahwa pemenuhan akan tanggung jawab itu adalah sesuatu yang bernilai baik secara moral sesuai dengan keyakinannya. Dalam pengertian ini penulis tetap memahami bahwa sebenarnya di dalam tindakan ini si pelaku tetap memiliki motif kepentingan-diri namun konsep kepentingan-diri yang berkomitmen pada nilai yang lebih abstrak daripada nilai-nilai manfaat dan kesejahteraan.

BAB VII

PENUTUP

Apa yang hendak ditegaskan lewat integrasi kebebasan ke dalam teori pilihan sosial yang diajukan Sen? Menurut penulis, ada dua gagasan pokok yang hendak ditegaskan lewat integrasi kebebasan ke dalam teori pilihan sosial dan dua gagasan ini saling terkait. Yang pertama, melalui integrasi itu Sen mau memasukkan pertimbangan etis ke dalam teori pilihan sosial. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari upaya pertama, ia hendak mengembalikan cara pandang kita mengenai manusia. Manusia dan tindakannya tidak hanya dipahami dalam kerangka pengejar manfaat dan kesejahteraan, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki nilai tanggung jawab terhadap kehidupan yang lebih luas.

Pertama, dengan memasukkan kebebasan ke dalam pertimbangan pilihan sosial, masyarakat atau pemerintah dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan nilai manfaat dan kesejahteraan pada saat merumuskan putusan kolektif. Hal yang dianggap bernilai tentu saja bukan hanya nilai manfaat dan kesejahteraan tetapi juga nilai hak dan kebebasan. Sen melihat kecenderungan untuk menjadikan manfaat-kesejahteraan sebagai pertimbangan utama dalam pilihan sosial bisa berdampak pada pengabaian hak dan kebebasan kelompok minoritas di dalam masyarakat. Praktik pilihan sosial tidak boleh dibiarkan seperti itu karena akan membuatnya semakin menjauh dari norma etis yang seharusnya memberikan ruang pada cakrawala kepentingan dan nilai yang lebih luas. Ada begitu banyak hal yang dianggap bernilai oleh manusia, dan menurut Sen di antara nilai yang sangat penting itu adalah kebebasan. Dengan demikian, melalui integrasi ini Sen berupaya menekankan signifikansi nilai kebebasan manusia di dalam perumusan pilihan sosial.

Kedua, masih terkait dengan upaya di atas, dengan memasukkan nilai kebebasan ke dalam teori pilihan sosial, Sen juga hendak mengembalikan posisi manusia sebagaimana adanya. Manusia bukan hanya makhluk pengejar manfaat-kesejahteraan tetapi juga makhluk yang memiliki orientasi pada nilai tanggung jawab yang tidak terkait dengan maksimalisasi manfaat-kesejahteraan. Pandangan kita mengenai manusia bukan hanya sebagaimana yang dipersepsi dalam kerangka manusia ekonomi (*homo*

economicus), tetapi juga manusia yang memiliki perspektif mengenai nilai yang sangat beragam. Manusia memiliki cakrawala yang cukup luas mengenai nilai sehingga kita tidak dapat meringkusnya hanya pada satu cakrawala nilai manfaat-kesejahteraan. Bagi penulis, dengan memberikan perhatian pada keragaman nilai yang dianggap baik, Sen mencoba menampilkan gambaran manusia yang lebih utuh, yang tidak diringkus hanya pada satu konsep tertentu.

Dengan dua gagasan ini penulis menilai bahwa pemikiran Sen mengenai kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial bukan semata kritik atas teori dan praktik ekonomi. Pandangan Sen yang penulis uraikan dalam disertasi ini memiliki relevansi yang sangat penting bagi pemikiran filsafat, khususnya bagi filsafat moral dan filsafat manusia. Melalui tema kebebasan dan teori pilihan sosial, ia mencoba merefleksikan bidang yang menjadi latar belakangnya, yakni bidang ekonomi, untuk diangkat ke aras yang lebih tinggi. Ia melihat ada masalah serius dalam kecenderungan untuk memahami perilaku manusia hanya dalam kerangka manusia ekonomi. Terlebih ketika perilaku itu justru harus mengorbankan dimensi manusia yang lebih mendasar, yakni kebebasan. Karenanya, proyek besar pemikiran Sen sejatinya, menurut penulis, adalah untuk menegaskan kembali makna dan tujuan hidup manusia secara sosial, yakni melindungi kebebasan. Kebebasan manusia tidak boleh dikorbankan atas nama apapun.

Gagasan Sen mengenai kebebasan dan koreksi atas konsep manusia ekonomi, bila dilihat dalam skala yang lebih luas, barangkali masih belum terlalu populer, khususnya bagi kalangan ekonom arus utama. Dalam praktik kebijakan publik kita masih melihat dominasi kebijakan publik yang lebih berorientasi pada bidang ekonomi dibanding perhatian pada nilai kebebasan. Kondisi ini tentu saja bisa menjadi keprihatinan bagi siapapun yang berpandangan bahwa sejatinya manusia tidak bisa hanya dipersepsi dalam kerangka ekonomistik. Kemanusiaan kita bertopang pada nilai kebebasan yang wajib dihormati dan tidak boleh dilangkahi atas nama apapun. Praktik ekonomi dan kebijakan publik tidak boleh mengabaikan tuntutan ini. Karenanya, ada kebutuhan yang sangat kuat untuk menginjeksi nilai kebebasan ke dalam praktik ekonomi dan kebijakan publik agar kebebasan menjadi pertimbangan penting di dalamnya.

Apa yang penulis angkat dalam disertasi ini hanya sebagian kecil dari pemikiran Amartya Sen yang cukup luas. Namun, ada harapan besar dari penulis agar karya ini juga bisa memberikan manfaat bagi banyak kalangan, tidak hanya secara teoritis tetapi juga bisa dipahami oleh para praktisi. Signifikansi pertimbangan kebebasan seharusnya bisa diterima karena nilai kebebasan terkait langsung dengan hakikat dasar kita sebagai manusia. Sebagai catatan terakhir, karya yang penulis sajikan ini tentu masih jauh dari sempurna. Hal yang menurut penulis merupakan kekurangan dalam penelitian disertasi ini adalah latar belakang penulis sendiri. Penulis mengangkat gagasan Amartya Sen yang memiliki latar belakang ilmu ekonom dan meraih Nobel dalam bidang ekonomi untuk kontribusinya pada bidang ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*). Sayangnya, penulis sendiri tidak memiliki latar belakang ekonomi sebagaimana Sen. Penulis tidak terlalu menguasai sepenuhnya teorema-teorema ekonomi yang kadang muncul di beberapa karya Sen. Namun penulis beruntung karena karya-karya utama Sen di dalam penelitian ini justru lebih diorientasikan pada refleksi filosofis dan etis sehingga tidak ada teorema ekonometrik yang tidak sepenuhnya dipahami oleh penulis.

Daftar Pustaka

1. Sumber Utama

- Sen, Amartya. 1985 (Apr.). "Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984." *The Journal of Philosophy*, Vol. 82, No. 4: 169-221.
- _____. 1992. *Inequality Reexamined*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, INC.
- _____. 2002. *Rationality and Freedom*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- _____. 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

2. Sumber Pendukung Utama

I. Buku

- Berlin, Isaiah. 2002 [1969]. *Liberty*. ed. Henry Hardy. Oxford: Oxford University Press.
- Crocker, David A., dan Ingrid Robeyns. 2010. "Capability and Agency" dalam *Amartya Sen*, ed. Christopher W. Morris, 60-90. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hayek, Friedrich A. 1978 [1960]. *The Constitution of Liberty*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mill, John Stuart. 1978. *On Liberty*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.
- _____. 1996. *On Liberty – Perihal Kebebasan*. Penerjemah Alex Lanur. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nussbaum, Martha C. 2006a [2000]. *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. 2011. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nussbaum, Martha C., dan Amartya Sen. 1993. "Introduction." dalam *The Quality of Life*, ed. Martha C. Nussbaum dan Amartya Sen. 1-6. Oxford, Oxford University Press.
- Pettit, Philip. 1997. *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Oxford: Oxford University Press.

- _____. 2001. *A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 2010. "Freedom in the Spirit of Sen." dalam : *Amartya Sen*, ed. Christopher W. Morris, 91-114. Cambridge: Cambridge University Press.
- Roberts, Kevin. 2010 "Social Choice Theory and the Informational Basis Approach." dalam *Amartya Sen*, ed. Christopher W. Morris, 115-137. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya dan Bernard Williams. 1982. "Introduction: Utilitarianism and Beyond." dalam *Utilitarianism and Beyond*, ed. Amartya Sen dan Bernard Williams, 1-21. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 1987. *Food and Freedom*. Makalah dalam Sir John Crawford Memorial Lecture. 29 Oktober 1987. Washington, D.C.
- _____. 1988 [1987]. *On Ethics and Economics*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- _____. 1999b. *Reason before Identity*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 2005. *The Argumentative Indian: Writing on Indian Culture, History and Identity*. London: Penguin Books.
- _____. 2006. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

II. Jurnal

- Howe, Charles W. 1961 (Sep.). "Choice of Techniques." *The American Economic Review* Vol. 51, No. 4: 720-722.
- Klamer, Arjo. 1989 (musim dingin). "A Conversation with Amartya Sen." *Journal of Economics Perspectives* Vol. 3, No. 1: 135-150.
- Nussbaum, Martha C. 2005. "Women's Bodies: Violence, Security and Capabilities." *Journal of Human Development* Vol. 6, No. 2: 167-183.
- _____. 2003. "Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice." *Feminist Economics* 9 (2-3): 33-59.

- Sen, Amartya. 1970 (Mei). "Interpersonal Aggregation and Partial Comparability." *Econometrica* Vol. 38, No. 3: 393-409.
- _____. 1971 (Nov.-Des.). "The Impossibility of a Paretian Liberal: Reply." *The Journal of Political Economy* Vol. 79, No. 6: 1406-1407.
- _____. 1973 (Agu.). "Behaviour and the Concept of Preference." *Economica* Vol. 40, No. 159: 241-259.
- _____. 1976a (Mar.). "Poverty: An Ordinal Approach to Measurement." *Econometrica* Vol. 44, No. 2: 219-231.
- _____. 1976b (Agu.). "Liberty, Unanimity and Rights." *Economica* Vol. 43, No. 171: 217-245.
- _____. 1977a (Jan.). "Social Choice Theory: Reexamination" *Econometrica* Vol. 45, No. 1: 53-88.
- _____. 1977b (musim panas). "Rational Fools: A Critique of the behavioral Foundations of Economic Theory." *Philosophy and Public Affairs* Vol. 6, No. 4: 317-344.
- _____. 1982 (musim dingin). "Rights and Agency." *Philosophy and Public Affairs* Vol. 11, No. 1: 3-39.
- _____. 1983 (Jan.). "Liberty and Social Choice." *The Journal of Philosophy* Vol. 80, No. 1: 5-28.
- _____. 1992b (Mei). "Minimal Liberty." *Economica* Vol. 59, No.234: 139-159
- _____. 1993 (Okt). "Market and Freedoms: Achievements and Limitations of the Market Mechanism in Promoting Individual Freedoms." *Oxford Economic Papers* Vol. 45, No. 4: 519-541.
- _____. 1994 (Mei). "The Formulation of Rational Choice." *The American Economic Review* Vol. 84, No. 2: 385-390.
- _____. 1995 (Mar.). "Rationality and Social Choice." *American Economic Association* Vol. 85, No. 1: 1-24.
- _____. 2002b (Sep.). "Open and Closed Impartiality." *The Journal of Philosophy* Vol. 99, No. 9: 445-469.
- Sugden, Robert. 1986 (Sep.). "Commodities and Capabilities." *The Economic Journal*, Vol. 96, No. 383: 820-822.

3. Sumber Pendukung Tambahan

- Alkire, Sabina, Mozaffar Qizilbash, dkk. 2008. Pengantar dalam *The Capability Approach: Concepts, Measures and Applications*, ed. Flavio Comim, Mozaffar Qizilbash, dkk., 1-25. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alkire, Sabina. 2002. *Valuing Freedom: Sen's Capability Approach and Poverty Reduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Aristotle. 2004. *Nicomachean Ethics*. diterjemahkan dan diedit oleh Roger Crisp. Cambridge: Cambridge University Press.
- Arrow, Kenneth J. 1963 (1951). *Social Choice and Individual Values*. New York, London, Sidney: John Wiley & Sons, Inc.
- Bentham, Jeremy. 1823 (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: The Clarendon Press.
- Craven, John. 1992. *Social Choice: A Framework for Collective Decisions and Individual Judgements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dworkin, Ronald. 2000. *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Farrelly, Colin. 2004. *Introduction to Contemporary Political Theory*. London: Sage Publication.
- Force, Pierre. 2003. *Self-Interest before Adam Smith: A Genealogy of Economic Science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foster, James dan Amartya Sen. 1973. *On Economic Inequality*. New York: Oxford University Press.
- Freeman, Samuel. 2007. *Rawls*. New York: Routledge.
- Friedman, Milton. 1982 [1962]. *Capitalism and Freedom*. Chicago: The University of Chicago.
- Greaves, Bettina Bien. 2002 (1985). Prakata dalam *Liberalism in the Classical Liberalism* oleh Ludwig von Mises, v-viii. San Francisco: Cobden Press.
- Herry-Priyono, B. 2015. "Amartya Sen Membongkar Rasionalitas," *Diskursus* 14: 28-79.
- Hobbes, Thomas. 1974. *Leviathan*. Ed. C. B. Macpherson. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books.

- Kant, Immanuel. 2002. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Ed. Allen Wood. New Haven dan London: Yale University Press.
- Kloppenber, James T. 1998. *The Virtues of Liberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Kwang Ng, Yew. 2004. *Welfare Economics: Towards a More Complete Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Locke, John. 1970. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LPPKB. 2006. *Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB).
- Magnis-Suseno, Franz. 1997. *13 Tokoh Etika*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius.
- Majumdar, Tapas. 1998. "Amartya Sen in Search of Impure Welfare Economics: Finding New Space," *Economic and Political Weekly* 33: 2860-2862.
- Marx, Karl. 2000. "The German Ideology." dalam *Karl Marx Selected Writing*, ed. David McLellan. Oxford: Oxford University Press.
- Mill, John Stuart. 1906. *Utilitarianism*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Morris, Christopher W. 2010. "Introduction." *Amartya Sen*, ed. Christopher W. Morris. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nelson, Brian (ed.). 2009. *A Comprehensive Dictionary of Economics*. Chandigarh-India: Abhishek Publications.
- Nitzan, Shmuel. 2010. *Collective Preference and Choice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nozick, Robert. 1974 [1971]. *Anarchy, State and Utopia*. Oxford: Basil Blackwell.
- _____. 2004. "The Entitlement Theory of Justice." dalam *Contemporary Political Theory: A Reader*, ed. Colin Farelly. London: Sage Publication.
- Nussbaum, Martha C. 2006b. *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Przeworski, Adam, Michael Alvarez, José Antonio Cheibub dan Fernando Limongi. 1996. "What Makes Democracies Endure?" *Journal of Democracy* 7.1: 39-55.
- Rauf, Maswadi dkk. 2015. *Indeks Demokrasi Indonesia 2013, Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi*.

Jakarta: Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Badan Pusat Statistik.

- Rawls, John. 1993. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- _____. 1999 [1971]. *A Theory of Justice* (edisi revisi). Cambridge, MA: Harvard University Press Cambridge.
- _____. 2000. *Lectures on the History of Moral Philosophy*. Ed. Barbara Herman. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- _____. 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press Cambridge.
- Ricoeur, Paul. 2007. *Reflection on the Just*. Diterjemahkan oleh David Pellauer. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rutherford, Donald. 1992. *Routledge Dictionary of Economics*. London and New York: Routledge.
- Sandel, Michael J. 2009. *Justice: What's the Right Thing To Do?*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Scanlon, Thomas M. 1982. "Contractualism and Utilitarianism." dalam *Utilitarianism and Beyond*, ed. Amartya Sen dan Bernard Williams. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya. 2003. "Sraffa, Wittgenstein and Gramsci" *Journal of Economic Literatur* XLI: 1240-1255.
- Smith, Adam. 1937. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. New York: The Modern Library.
- _____. 2004. *The Theory of Moral Sentiment*. Ed. Knud Haakonssen. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suryajaya, Martin. 2013. *Asal Usul Kekayaan: Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi dari Aristoteles Sampai Amartya Sen*. Yogyakarta: Resist Book.
- Suzumura, Kotaro. 2002. Pengantar dalam *Handbook of Social Choice and Welfare*, eds. Kenneth J. Arrow, Amartya Sen dan Kotaro Suzumura. Amsterdam: Elsevier Science B.V.
- Syamsi, Syam Surya. 2013. *Teori dan Etika Pembangunan Amartya Sen Pendekatan Kebebasan, Kapabilitas dan Pentingnya Komitmen Bagi Pembangunan*. Disertasi

Doktor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia.

Ten, C.L. 2008. "Mill's *On Liberty*: Introduction." dalam *Mill's On Liberty*, ed. C.L. Ten. Cambridge: Cambridge University Press.

Tseng, Chuan Chia. 2011. *Microfinance and Amartya Sen's Capability Approach*. Disertasi di Institute of Philosophy, University of Birmingham.

Vizard, Polly. 2006. *Poverty and Human Rights: Sen's 'Capability Perspective' Explored*. Oxford: Oxford University Press.

Wolff, Richard D. dan Stephen A. Resnick. 2002. *Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian*. Cambridge, MA: MIT Press.

Zink, John Jeffrey. 2005. *Amartya Sen and Freedom: A Critique*, A Dissertation Submitted to the Faculty of the University of Utah.

Sumber dari Website

<http://kbbi.web.id/preferensi> (diunduh 13 Oktober 2014)

<http://philosophy.uchicago.edu/faculty/nussbaum.html> (diunduh 20 November 2014)

<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kasus-sampang-pemerintah-berpotensi-lakukan-kejahatan-genosida/1183930> (diunduh 21 April 2015)

<http://www.tempo.co/read/news/2014/12/08/078627113/5-Lembaga-Desak-Jokowi-Sikapi-Ahmadiyah-NTB> (diunduh 25 April 2015)

<http://www.tempo.co/read/news/2014/12/23/173630488/Komnas-HAM-Minta-Jokowi-Tangani-Kasus-GKI-Yasmin> (diunduh 21 April 2015)

<http://www.thefreedictionary.com/entitlement> (diunduh 26 Juni 2015)

<https://hd-ca.org/about/hdca-history-and-mission> (diunduh 16 Maret 2015)

Report by the "Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress" di www.stiglitz-sen-fitoussi.fr (diunduh 9 Oktober 2012)

www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical". *Nobelprize.org*. Nobel Media AB 2013. Web. 8 Jan 2014. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1998/sen-bio.html